

BAB I

GEOGRAFI AUSTRALIA

Peta Australia



Wilayah Teritorial

Teritorial di dalam	Ibukota
<u>Teritorial Ibu Kota Australia</u>	<u>Canberra</u>
<u>Teritorial Teluk Jervis</u>	
<u>Teritorial Utara</u>	<u>Darwin</u>

Teritorial di luar

- Kepulauan Ashmore dan Cartier
- Teritorial Antarktika Australia
- Pulau Norfolk
- Pulau Natal
- Kepulauan Cocos (Keeling)
- Teritorial Kepulauan Laut Koral
- Kepulauan Heard dan McDonald



Peta pembagian wilayah di Australia.¹

Negara bagian di Australia

Negara	Ibukota	Negara	Ibukota
<u>New South Wales</u>	<u>Sydney</u>	<u>Tasmania</u>	<u>Hobart</u>
<u>Queensland</u>	<u>Brisbane</u>	<u>Victoria</u>	<u>Melbourne</u>
<u>Australia Selatan</u>	<u>Adelaide</u>	<u>Australia Barat</u>	<u>Perth</u>

Kedutaan besar Australia

Alamat: Jalan H.R. Rasuna Said Kav C 15-16, Jakarta Selatan 12940 - Tel: +62 21 2550 5555 - Fax: +62 21 2550 5467

❖ SEJARAH AUSTRALIA

Sejarah Australia tidak terlepas dari anggapan “*The Spirit of Laws*” yang

¹ <https://www.google.com/search?q=peta+australia&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=sb>, diakses pada tanggal 20 Juli 2014 pukul 04.00 Wib

diadopsi dari buku yang dikarang oleh Charles de Scondat dan Baron de Montesquieu pada pertengahan abad ke-18 tepatnya pada tahun 1748. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Thomas Nugent pada tahun 1752. Secara garis besar, didalam bukunya tersebut, Scondat dan Montesquieu membahas tentang proses terbentuknya hukum dan betapa pentingnya kehadiran hukum dan pemerintahan di tengah masyarakat. Buku ini menjadi tolak ukur pada masanya yang juga merupakan awal titik mula munculnya ide demokrasi. Terkait dengan latar belakang kehidupan kedua penulis yang hidup pada masa abad pertengahan di mana hukum masih belum terbentuk dan hanya berupa buah pemikiran saja, Montesquieu dan Scondat mengklasifikasikan manusia menjadi dua yakni savage dan barbarous. Dalam bukunya tersebut, savage didefinisikan sebagai:

*“...who lead a very hard life, and in despotic governments, where there is only one person on whom fortune lavishes her favours, while the miserable subjects lie exposed to her insults, people are equally cruel. Lenity reigns in moderate governments.”*² Kemudian mereka juga menilai terdapat perbedaan antara savage dan barbarous sebagai berikut:

“There is this difference between savage and barbarous nations: the former are dispersed clans, which for some particular reason cannot be joined in a body; and the latter are commonly small nations, capable of being united. The savages are generally hunters; the barbarians are herdsmen and shepherds.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik savage adalah sebagai berikut: Masyarakatnya tidak memiliki ilmu pengetahuan, Masyarakatnya memiliki pola pikir purba, Masyarakatnya tidak mementingkan arti pemerintahan dan cenderung tidak mengerti konsep hukum dan proses ekonomi, Masyarakatnya masih sangat terbelakang dalam berbagai bidang.

Berangkat dari buku *“The Spirit of Laws”*, secara umum masyarakat Eropa yang datang ke benua Australia melihat karakteristik yang digambarkan oleh Scondat dan Montesquieu tentang *savage*, ada pada masyarakat pribumi Australia. Di dalam buku *Making Australian History: Perspective on The Past since 1788*, dijelaskan secara mendetail alasan mengapa masyarakat koloni Eropa memandang masyarakat pribumi Australia sebagai masyarakat *savagery*. Watkin Tench, seorang pemimpin angkatan laut Inggris menggambarkan:

*“....the Indigenous people of Australia exemplified a condition Europeans referred to as a ‘state of nature’—an image of ‘primitive’ human life prior to the development of government, law or society.”*³

Pernyataan di atas adalah penggambaran akan kondisi masyarakat pribumi Australia yang hidup secara primitif dengan mengedepankan hukum alam sebagai landasan kehidupan. Masyarakat pribumi Australia digambarkan tidak mengerti dan tidak mengenal sama sekali akan konsep pemerintahan, hukum atau

² Scondat, C. d., & Montequeiu, B. d. , *The Spirit of Laws*, Kitchener, Batoche, Ontario, 2001, hal 100

³ *Ibid*

kemasyarakatan. Ditambahkan juga di dalam buku yang sama bahwa masyarakat pribumi Australia tidak mengenal akan konsep jual-beli, dan hal ini menjadi salah satu alasan kegagalan upaya pendekatan bangsa Eropa dengan masyarakat pribumi Australia saat itu.

Banyak yang telah berubah di Australia sejak penduduk aslinya yang disebut kaum Aborigin Australia hidup dalam sistem sosial yang kompleks, dengan tradisi yang mencerminkan hubungan yang kuat dengan tanah air dan lingkungannya. Sejak masa itu sampai kedatangan penjelajah Eropa pertama, para narapidana, pemukim bebas dan para imigran yang lebih baru datang, Australia telah mengalami masa depresi, perang dan skandal politik; menciptakan kota-kota yang dinamis dan legenda 'the bush' (pedalaman) serta 'Aussie battler' (pejuang Australia); menyediakan kehidupan baru bagi orang-orang dari seluruh belahan dunia; dan mengalami penurunan serta kebangkitan kembali budaya penduduk aslinya.⁴

Sejarah Sebelum Abad ke 20

Penduduk asli Australia yang dikenal sebagai kaum Aborigin Australia, memiliki sejarah budaya yang terpanjang di dunia, sejak zaman Es yang terakhir. Meskipun misteri dan perdebatan mengaburkan banyak aspek dalam prasejarah Australia, secara umum diakui bahwa manusia pertama berkelana melintasi lautan dari Indonesia sekitar 70.000 tahun yang lalu.

Bangsa Eropa mulai menjelajahi Australia di abad 16; pertama para navigator Portugis diikuti oleh para penjelajah Belanda dan disusul oleh pengusaha sekaligus bajak laut Inggris William Dampier. Kapten James Cook berlayar menelusuri seluruh panjang pantai timur di tahun 1770, lalu berhenti di Botany Bay di tengah perjalanannya; dan tak lama kemudian ia mengklaim benua ini untuk Inggris dan menamakannya New South Wales.

Di tahun 1779, Joseph Banks (seorang naturalis dalam armada Kapten Cook) mengusulkan cara agar Inggris dapat mengatasi masalah kepadatan di penjara-penjara dengan mengirimkan narapidana ke New South Wales. Di tahun 1787, armada pertama berlayar menuju Botany Bay, terdiri dari 11 kapal dan 750 narapidana pria maupun wanita. Armada ini tiba tanggal 26 Januari 1788, tapi segera berpindah ke utara ke Sydney Cove, yang memiliki tanah serta air yang lebih baik. Bagi para pendatang baru ini, New South Wales merupakan tempat yang panas, keras dan buruk, dan ancaman kelaparan menghantui koloni ini selama bertahun-tahun. Untuk berjuang melawan alam dan pemerintah yang penuh tekanan, orang-orang Australia baru ini membentuk sebuah budaya yang kemudian menjadi dasar dari legenda 'Aussie battler'.

Dalam beberapa dekade kemudian, datanglah para pemukim bebas yang tertarik ke Australia, tapi penemuan emas di 1850-anlah yang secara permanen mengubah koloni ini. Arus imigran yang besar dan beberapa penemuan emas yang besar mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengubah struktur sosial di koloni.

⁴ <http://indocropcircles.wordpress.com/2013/12/18/ditemukan-meriam-asal-indonesia-mengubah-catatan-sejarah-australia/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2014, pukul 15.00 Wib

Kaum Aborigin terusir paksa dari tanah suku mereka, saat para pendatang merebut tanah untuk pertanian atau pertambangan.

Di akhir abad ke 19, banyak orang yang mengagungkan daerah pedalaman atau 'the bush' (yaitu daerah yang jauh dari kota) dan orang-orangnya. Forum besar untuk 'nasionalisme pedalaman' ini adalah majalah Bulletin yang sangat populer. Halaman-halamannya penuh dengan humor dan sentimen terhadap kehidupan sehari-hari dan para penulis yang terkenal adalah legenda pedalaman Henry Lawson dan 'Banjo' Paterson.

Sejarah Abad ke Dua Puluh

Australia menjadi negara saat federasi dari koloni-koloni yang terpisah terbentuk pada tanggal 1 Januari 1901. Tentara Australia turut berperang bersama Inggris dalam Perang Boer dan PDI. Negara ini terpukul berat oleh masa Depresi, saat harga untuk wol dan gandum (dua produk utama dalam ekonomi) jatuh. Di tahun 1931, hampir sepertiga pencari nafkah menjadi pengangguran, dan kemiskinan pun merajalela. Namun, di tahun 1933, perekonomian Australia mulai pulih. Saat PDII pecah, balatentara Australia turut berjuang bersama Inggris di Eropa, namun Amerika Serikat-lah yang membantu melindungi Australia dari serbuan pasukan udara Jepang, dengan mengalahkan mereka di Perang Laut Coral.

Setelah PDII, datanglah arus imigrasi dari Eropa, yang memberikan sumbangsih besar terhadap negara, menghidupkan kembali budaya dan memperluas wawasan pandang Australia. Era pasca perang ini merupakan saat-saat booming di Australia, karena adanya permintaan yang tinggi terhadap bahan baku mentah. Australia mengikuti Amerika Serikat dalam Perang Korea, dan di tahun 1965 mengirimkan pasukan untuk membantu AS di Perang Vietnam, meskipun dukungan terhadap keterlibatan Australia ini tidaklah menyeluruh. Masalah bagi banyak pemuda Australia adalah wajib militer yang diterapkan dalam tahun 1964. Kerusuhan akibat wajib militer ini merupakan salah satu faktor naiknya partai Buruh Australia (Labor Party) ke jenjang kekuasaan di tahun 1972, di bawah kepemimpinan Gough Whitlam. Pemerintahan Whitlam menarik pasukan Australia dari Vietnam, menghapuskan biaya pendidikan tinggi dan dinas nasional, menerapkan sistem perawatan kesehatan yang gratis dan tersedia untuk umum, serta mendukung hak tanah bagi masyarakat Aborigin.

Namun demikian, pemerintahan ini mendapat tentangan dari Senat dan berkembangnya isu salah manajemen. Tanggal 11 November 1975, gubernur jenderal (perwakilan kerajaan Inggris di Australia) membubarkan parlemen dan membentuk pemerintah sementara yang dipimpin oleh ketua Partai Liberal, Malcolm Fraser. Langkah ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh gubernur jenderal. Koalisi partai Liberal yang konservatif dengan Partai Tanah Air Nasional memenangkan pemilu berikutnya. Pemerintahan partai Buruh baru kembali di tahun 1983, saat mantan pemimpin serikat pekerja, Bob Hawke, berhasil memenangkan partainya.

Australia mulai dihuni oleh manusia pada akhir abad es atau kira-kira 30.000 tahun yang lalu, sementara pulau Tasmania yang terletak disebelah selatan Australia baru baru dihuni beberapa setelah itu. Hal ini karenamasih adanya

pegunungan-pegunungan es yang memisahkan Australia dengan Tasmania, sehingga ekspansi manusia ke pulau tersebut terhalang. Ketika terjadi revolusi iklim dan pegunungan es mencair, sebagian diantara mereka kemudian menyebar dan menetap di Tasmania. Hal ini juga menyebabkan dengan benua Asia menjadi terencil setelah es mencair.⁵

Manusia penghuni Australia dikenal dengan suku Aborigin yang masih menggunakan alat-alat dari batu untuk mencari dan mengolah makanan. Jumlah mereka pada awalnya masih sangat sedikit sekitar 300.000 orang, sementara di Tasmania sekitar 7.000 orang, ada peradaban batu sebagai peradaban pertama.⁶ Perkembangan peradaban suku Aborigin berjalan lambat. Ketika penduduk Asia, sumatra dan Jawa telah beranjak dari jaman batu, orang-orang Aborigin masih tetap dalam peradaban batu. Hal ini kemungkinan karena :

- (1). ganasnya iklim Australia yang membuat mereka sulit mempraktekkan sistem bercocok tanam dan beternak sebagaimana yang telah dilakukan oleh penduduk Asia,
- (2). Tidak tersedianya biji-bijian yang yang bisa ditanam (tanaman pangan yang kini ada di Australia bijinya sepenuhnya impor bukan asli Australia)
- (3). Setelah berakhirnya jaman es orang-orang Aborigin tersebut terkurung lautan selama beribu-ribu tahun, hampir tidak mampu berkomunikasi dengan pihak luar.

Sekitar 2.000 tahun SM penduduk dunia mulai bermigrasi, seperti orang melayu Asia daratan bermigrasi ke kepulauan Indonesia, tetapi tidak sampai ke Australia. Kemudian pada abad pertama masehi, orang-orang Hindu-Budha dari India Selatan juga mulai melakukan ekspansi kekepulauan Indonesia untuk mencari emas, rempah dan menyebarkan agama mereka. Mereka terus berekspansi kearah Timur dan tertahan di pulau Lombok. Pada abad 15 ekspansi terhenti karena ada serangan Islam di India maupun di Kerajaan-kerajaan Indonesia. Sementara itu sejak abad ke 8 orang Cina juga mulai mengadakan perdagangan dengan penduduk Indonesia dan Eropa. Pada abad 15 orang-orang Cina mulai mencari trepang dan burung merak yang laku keras di Peking. Pelayaran untuk mencari trepang ini membawa mereka bersama-sam pelaut Bugis (makasar) ke pantai utara Australia yang mereka sebut 'Marega' atau 'tanah trepang'. Pelayaran perdagangan orang-orang Cina ini tidak bisa berlangsung terus karena di Peking terjadi pergantian rezim yang menentang pelayaran perdagangan. Beberapa dekade setelah itu mulai berdatangan pula orang-orang Eropa yang melakukan eksplorasi untuk mencari rempah-rempah serta benua baru di Selatan. Tahun 1520 orang-orang Eropa menemukan 2 route ke Timur. **Pertama**, melalui pantai Afrika, menyusuri Tanjung Harapan (*the cape of good hope*), terus ke Timur melalui Gujarat (India), Malaka, Jakarta, sampai ke Maluku (kepulauan rempah). **Kedua**, yang dilalui oleh Magellan dan Delcano(1519-1521), yaitu melewati Atlantik, terus menyusuri Amerika Selatan, lewat selat Magellan, Filipina sampai di Maluku.

⁵ <http://www.australia.com/id/about/culture-history/history.aspx>, diakses pada tanggal 20 Juli 2014, pukul 14.00 Wib

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Australia, diakses pada tanggal 20 Juli 2014, pukul 14.00 Wib

Tahun 1596-1606 pelayar Belanda, Kapten Willem Jansz dengan kapalnya 'Duyfken' juga berlayar menyusur Banda, Papua New Guinea, terus menyeberangi Selat Torres dan mencapai pantai utara Australia. Tetapi yang ia temukan adalah benua yang amat gersang, tandus dan sangat tidak menarik, sehingga ia menulis '*there was no good to be done there*'. Itulah komentar pertama orang Eropa terhadap Australia. Tahun 1642 Dutch East India Company memutuskan untuk menggiatkan kembali pelayaran eksplorasi di belahan bumi bagian selatan karena mereka yakin bahwa di daerah tersebut terdapat daerah yang subur dan kaya akan barang-barang tambang. Mereka mengutus Kapten Abel Tasman dan berhasil menemukan pulau yang terkenal dengan Tasmania. Sebelumnya pulau tersebut dinamakan Van Diemen's land. Mereka juga menemukan pantai Barat New Zealand yang saat itu mereka namakan Staten land. Selain itu mereka juga menemukan pantai barat Australia. Tetapi komentar mereka tetap buruk terhadap Australia, bahwa Australia sangat gersang, tandus dan tidak memberikan harapan apapun. Empat puluh tahun kemudian (1688-1698) pelaut Inggris William Dampier mendarat di Shark's bay, Australia. Seperti halnya para pelaut Belanda, Dampier juga menemukan tanah yang sangat kering berpadang pasir, tidak air maupun pohon buah-buahan. Kali ini mereka bertemu dengan orang-orang Aborigin yang menurut mereka sangat primitif. Tahun 1770 pandangan orang Eropa terhadap Australia berubah. Kapten Inggris James Cook mendarat di Botany bay dekat Sydney dan pantai-pantai Timur Australia yang kemudian dinamakan New South Wales. Mereka menemukan daerah yang amat subur dengan iklim yang menyerupai Eropa, yang sangat bertolak belakang dengan sisi barat Australia yang ditemukan Dampier. Tahun 1779 Sir Joseph Banks yang pernah mengikuti perjalanan Cook mengusulkan agar pemerintahan Inggris menjadikan Botany bay sebagai koloninya. Ia juga mengusulkan agar pemerintah Inggris mengiriskan para narapidananya ke daerah baru tersebut. Setelah berakhirnya perang Napoleon Inggris dilanda resesi perekonomian. Harga barang-barang serba mahal dan banyak orang kelaparan sehingga mengakibatkan angka kriminalitas dan prostitusi amat tinggi. Pemerintah sampai kesulitan menangani para narapidananya. Untuk mengatasinya pemerintah mengirim mereka ke koloni-koloni Inggris yang baru.

Selama tahun 1717-1776 beribu-ribu narapidana dikirim ke Amerika untuk dipekerjakan sebagai buruh-buruh kasar. Tetapi pada tahun 1783 Amerika menyatakan kemerdekaannya, sehingga pengiriman narapidana terhambat. Itulah sebabnya mereka kemudian mengalihkan pelayaran ke Australia. Tahun 1786 Lord Sydney akhirnya memutuskan untuk mengirimkan para narapidana ke Australia. Untuk pertama kalinya akan dikirim 750 narapidana yang dilengkapi dengan segala keperluan pertanian untuk kehidupan barunya di Australia. Inggris menunjuk Arthur Philip sebagai Gubernur pertama di Botany Bay, New South Wales. Kehidupan baru di Australia tidak langsung mulus. Mereka harus menghadapi iklim yang baru, tanah yang belum mereka kenal dan perlawanan penduduk pribumi. Tidak mengherankan jika panen pertama mereka gagal dan terancam kelaparan. Inggris segera mendatangkan bantuan makanan untuk menyelamatkan mereka. Jumlah mereka semakin bertambah dan tantangan demi

tantangan bisa mereka patahkan untuk mewujudkan kehidupan barunya di Australia.⁷



Gambaran Australia

Australia adalah masyarakat yang stabil, berkebudayaan majemuk dan demokratis disertai dengan angkatan kerja yang terampil dan ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Dengan penduduk lebih dari 21 juta, Australia adalah satu-satunya bangsa yang memerintah seluruh benua dan negara dengan wilayah daratan terluas ke-enam di dunia. Masyarakat multikultural Australia mencakup penduduk Asli dan pendatang dari sekitar 200 negara. Australia adalah salah satu massa daratan tertua di dunia dan telah berpenghuni manusia sekitar 60.000 tahun. Sebelum kehadiran pendatang Eropa, penduduk Aborijin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres mendiami sebagian besar wilayah benua.

Sejarah kontemporer Australia secara relatif singkat, dengan pemukiman Eropa pertama didirikan oleh Inggris Raya pada 26 Januari 1788. Australia memiliki 10 persen keanekaragaman hayati dunia dan sejumlah besar tanaman, hewan dan burung asli tidak ada di lain tempat di dunia. Australia bertekad melestarikan warisan alam dan lingkungan hidupnya yang unik dan memiliki sejumlah prosedur perlindungan, termasuk pencatatan dalam Warisan Dunia dan banyak taman nasional dan perlindungan kehidupan liar.

Australia adalah salah satu ekonomi yang paling berdaya tahan, pertumbuhan tinggi di dunia. Australia memiliki sektor pemerintah yang efisien, pasar buruh yang luwes dan sektor bisnis yang berdayasaing tinggi. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Australia memiliki standar hidup yang

⁷ E.M. Andrew, *A History of Australian Foreign Policy*, Longman Cheshire, Melbourne, 1988, hal 23

tinggi sejak abad ke 19. Australia telah melakukan investasi besar dalam infrastruktur sosial, termasuk pendidikan, pelatihan, kesehatan dan transportasi. Angkatan kerja Australia yang berjumlah sekitar 10 juta sangat terlatih. Banyak manajer senior dan staf teknik memiliki pengalaman internasional, sementara hampir setengah angkatan kerja Australia memiliki kualifikasi universitas, kejuruan atau diploma. Dalam ekonomi global, keterampilan bahasa merupakan kemampuan penting bagi angkatan kerja. Walaupun Australia adalah negara berpenutur bahasa Inggris, lebih dari 5 juta penduduknya berbicara bahasa kedua.

Australia menawarkan pengenalan budaya bisnis Barat dengan angkatan kerja yang mampu beroperasi dalam kedua lingkungan bisnis Asia dan Barat, karena Australia memiliki sejumlah besar ketrampilan bahasa Asia di kawasan. Keterampilan bahasa dan kemampuan lain yang menarik perusahaan asing sebagian merupakan hasil dari masyarakat Australia yang majemuk secara budaya. Para migran memiliki pengaruh yang nyata pada semua aspek masyarakat Australia. Selama lebih dari 60 tahun migrasi terencana pasca-perang, Australia telah menerima lebih dari 6,5 juta migran dari lebih 200 negara, termasuk lebih dari 660.000 pengungsi. Penduduk Australia telah meningkat dari sekitar tujuh juta menjadi lebih dari 21 juta.

Ekonomi yang kukuh

Australia memiliki salah satu ekonomi yang paling terbuka dan inovatif di dunia dan Pemerintah Australia bertekad untuk melanjutkan arah ini. Pertumbuhan yang kukuh sejak dasawarsa 1990an diikuti dengan kinerja produktifitas yang kuat. Ekonomi, politik dan lingkungan sosial Australia yang stabil mendorong peningkatan investasi asing beberapa tahun belakangan. Sejak 1990, ekonomi riil Australia tumbuh rata-rata 3,3 persen per tahun. Nilai GDP Australia pada 2006–07 sedikit di atas \$1 triliun, menjadikannya ekonomi terbesar ke 13 secara keseluruhan di dunia dan terbesar ke 10 diantara ekonomi industri. Sebagai hasil diversifikasi besar basis ekspor Australia, Australia kini tidak hanya mengekspor komoditas, namun juga memiliki industri pabrikan dan jasa yang canggih. Nilai ekspor barang dan jasa Australia mencapai \$215,8 milyar pada 2006–07, dengan ekspor jasa sebesar \$46,2 milyar — 21,4 persen dari keseluruhan ekspor. Jepang masih tetap menjadi pasar ekspor kami terbesar (\$35,6 milyar pada 2006), selanjutnya Cina (\$26,4 milyar), Amerika Serikat (\$15,5 milyar), Korea Selatan (\$14,9 milyar) dan Selandia Baru (\$12,7 milyar).

Kajian OECD baru-baru ini memperlihatkan Australia sebagai salah satu dari enam pedagang ekonomi baru dengan pertumbuhan tercepat. Australia tangguh dalam infrastruktur dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Australia juga memiliki lingkungan ekonomi dan peraturan yang kondusif untuk bisnis dan angkatan kerja yang terdidik serta terlatih baik. Investasi ICT Australia menurut persentase produk domestik bruto (GDP) adalah ketiga tertinggi di antara negara-negara OECD. Bank sentral (Reserve Bank of Australia) telah menemukan hubungan langsung antara belanja ICT dan pertumbuhan produktifitas Australia yang kukuh. Kehadiran perdagangan daring

(e-commerce) diperkirakan akan menambah 2,7 persen pertumbuhan GDP Australia dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang.

Masyarakat berbudaya majemuk

Australia merupakan masyarakat yang toleran dan inklusif—sebuah bangsa yang dibangun oleh rakyat yang berasal dari berbagai macam latar belakang. Vietnam, Cina, Yunani dan Inggris merupakan negara-negara utama dari mana warga Australia berasal. Kemajemukan budaya telah menjadi kunci identitas nasional Australia. Salah satu contohnya adalah pertumbuhan Islam di Australia. Kini, Muslim membentuk bagian yang semakin penting dari masyarakat Australia yang majemuk dan modern, yang menurut Sensus 2006 jumlah keseluruhan warga Muslim Australia mencapai lebih dari 340.000. Australia menerima dan menghargai hak seluruh rakyat Australia untuk mengungkapkan dan berbagi warisan budaya individu mereka dalam komitmen tertinggi akan dasar demokrasi Australia dan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional.

Kebudayaan dan kesenian yang dinamis

Seni kontemporer Australia unik dan majemuk sebagaimana masyarakat dan benua mereka berasal. Mereka mencerminkan bentang darat kuno yang menjadi rumah bagi tradisi budaya tertua dunia yang berkesinambungan dan campuran budaya pendatang yang kaya. Artis Penduduk Asli dan bukan-Penduduk Asli sama-sama memberikan tanggapan atas tantangan imajiner Australia yang hadir dalam aneka cara dan telah mengembangkan cara baru berekspresi yang membuat seni dan budaya Australia memperoleh perhatian internasional. Industri film Australia memiliki reputasi akan inovasi dan mutu serta produksi film yang khas dengan cita rasa Australia yang memiliki daya tarik global. Australia makin menjadi tujuan populer produser film asing yang tertarik oleh bentang darat kami yang bervariasi, lusinan panggung dan studio suara, fasilitas skor musik dan pasca-produksi, awak yang luwes dan profesional, dan aktor ternama di dunia.

Rekor pendidikan yang membanggakan

Sistem pendidikan Australia berstandar tertinggi dan menikmati pengakuan internasional. Sekolah adalah wajib di seluruh Australia, yang memberikan sumbangsih pada tingkat melek huruf 99 persen. Sekolah-sekolah kami mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri para pelajar; lulusan universitas Australia unggul pada penelitian dan inovasi terdepan; serta pendidikan kejuruan dan teknik memajukan sektor industri yang sedang berkembang pesat. Australia juga salah satu penyelenggara pendidikan dan pelatihan terdepan di dunia bagi pelajar internasional, termasuk pelatihan bahasa Inggris. Lebih dari 400,000 pelajar dari sekitar 200 negara menerima pendidikan Australia setiap tahun. Kursus ditawarkan baik di Australia maupun di luar negeri. Sistem pendidikan dan pelatihan Australia tunduk pada pengkajian ulang dan kendali berkelanjutan dari pemerintah, industri dan badan-badan profesional untuk mempertahankan dan meningkatkan standarnya yang sudah tinggi. Jaminan mutu

di pendidikan tinggi Australia berdasarkan pada kemitraan kukuh antara sektor pendidikan tinggi dan Pemerintah Australia, pemerintah negara bagian dan teritori. Kemitraan ini menjamin standar yang konsisten secara nasional dalam pemberian persetujuan dan akreditasi, pengawasan luar dan audit mutu independen.

Komitmen kuat akan sains dan teknologi

Australia bertekad untuk membangun budaya inovasi untuk memanfaatkan sebaik-baiknya jaringan informasi nasional dan internasional, mendorong kreatifitas dalam semua bentuk penelitian, memajukan kerja sama antara peneliti universitas dan industri, dan menyebarkan hasil penelitian ke masyarakat luas. Di antara 10 hadiah Nobel untuk Australia sejak 1915, sembilan diantaranya dalam bidang sains. Inovasi dalam sains dan teknologi merupakan lokomotif tangguh pertumbuhan ekonomi. Australia dalam posisi yang baik dan memiliki sumber daya yang bagus untuk membuat perbedaan dalam lomba inovasi global. Australia memiliki lingkungan ekonomi yang dinamis dan berdayasaing dengan produktifitas dan pertumbuhan tinggi, yang menghadirkan iklim yang ideal untuk perkembangan inovasi. Inovasi Australia sudah dikenal di dunia, dan mencakup terobosan medis seperti kuping bionik dan perawatan flu revolusioner hingga mesin nano pertama di dunia, kartu pintar tanpa sentuh, dan mesin orbit.

Australia memiliki sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang canggih dan terdepan di dunia. Pasar ICT-nya adalah kesebelas terbesar di dunia. Produksi barang dan jasa ICT menghasilkan pendapatan sekitar \$54 milyar dan penghasilan industri ICT mencapai lebih dari \$100 milyar. Produk domestik bruto (GDP) ICT sekitar 4,6 persen total GDP Australia. Penggunaan Internet di kalangan dunia usaha terus tumbuh. Sekitar 60 persen usaha kecil dan menengah melakukan pemesanan produk dan jasa dalam jaringan pada 2006 dan 47 persen menerima pesanan dalam jaringan. Di antara semua kegiatan dalam jaringan, mengakses layanan pemerintah dan layanan perbankan Internet adalah yang paling populer, 59 persen orang di Australia pada 2007 menghubungi pemerintah lewat Internet selama 12 bulan terakhir, dan 40 persen orang dewasa melakukan transaksi bank dalam jaringan pada September 2006. Australia adalah salah satu negara dengan peringkat kepemilikan telepon genggam yang paling tinggi, dengan jangkauan jaringan paling modern tersedia bagi lebih dari 98 persen penduduk.

Tempat yang memesona untuk dikunjungi

Lingkungan alami yang spektakuler, masyarakat multi-budaya, makanan dan anggur, keramahan penduduk, yang dipadu dengan cuaca dan gaya hidup menempatkan Australia di antara tujuan wisata paling populer di dunia. Hal tersebut juga menjadikan Australia sebagai salah satu tempat yang terbaik di dunia untuk tinggal dan melakukan usaha. Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar dengan pertumbuhan tercepat di Australia. Jumlah pelancong ke Australia tumbuh dari 4,3 juta pada 1997 menjadi 5,6 juta pada 2007. Sektor pariwisata menyumbang \$22,6 milyar ke ekonomi Australia pada 2006–07. Pariwisata menyumbang 12 persen pendapatan ekspor total Australia, lebih dari gabungan nilai ekspor bijih besi dan aluminium pada tahun tersebut.

Lingkungan hidup yang unik dan spektakuler

Lingkungan hidup Australia yang unik memiliki banyak tanaman, binatang dan burung asli yang tidak ada di lain tempat di dunia. Australia secara aktif bertekad melestarikan warisan alaminya dan memiliki sejumlah prosedur perlindungan yang sudah mapan. Walaupun benua Australia demikian luas, mayoritas penduduknya tinggal di pantai dan kota-kota besar. Sekitar 75 persen penduduk Australia tinggal di wilayah perkotaan. Australia adalah benua terkering di bumi. Daerah pedalamannya memiliki salah satu curah hujan terendah di dunia dan sekitar tiga-perempat massa daratannya gersang atau setengah-gersang. Daerah gersang ini mencakup gurun pasir di tengah hingga pantai barat. Tanah di daerah ini sangat tidak subur dibandingkan dengan gurun pasir lain yang memiliki kegersangan yang mirip. Ini menghadirkan Australia dengan tantangan bagaimana cara yang terbaik untuk mengelola berbagai macam daerah di benua kami untuk memenuhi persaingan tuntutan dari pertanian, ekonomi dan pelestarian. Kecuali bila dinyatakan, semua jumlah dolar dalam dolar Australia.

Fakta-fakta kunci

- Australia merupakan salah satu massa daratan tertua di dunia dan telah berpenghuni manusia selama sekitar 60.000 tahun.
- Pada 2007, penduduk Australia melampaui 21 juta jiwa.
- Dalam 60 tahun migrasi terencana, Australia telah menerima lebih dari 6,5 juta migran dari lebih 200 negara, termasuk lebih dari 660.000 pengungsi.
- Lebih dari lima juta warga Australia berbicara bahasa kedua.
- Sejak 1990, ekonomi Australia telah tumbuh rata-rata 3,3 persen per tahun dengan pertumbuhan selama 17 tahun berturut-turut.
- Pada 2007, produk domestik bruto (GDP) Australia senilai \$1 triliun, menjadikannya ekonomi terbesar ke-tigabelas di dunia dan kesepuluh terbesar di antara negara-negara industri.
- Australia satu-satunya bangsa yang memerintah seluruh benua.
- Australia memiliki 10 persen keanekaragaman hayati dunia dan sejumlah besar diantaranya tanaman, hewan dan burung asli yang tidak terdapat di tempat lain di dunia.

Australia merupakan hasil perpaduan unik antara tradisi mapan dan pengaruh baru.

Penduduk asli Australia, Aborijin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres, adalah pewaris salah satu tradisi kebudayaan tertua dunia yang masih langgeng. Mereka telah berdiam di Australia selama lebih dari 40.000 tahun dan mungkin hingga 60.000 tahun. Penduduk Australia lainnya adalah migran atau keturunan migran yang tiba di Australia dari sekitar 200 negara sejak Inggris mendirikan pemukiman Eropa yang pertama di Sydney Cove pada 1788. Pada 1945, penduduk Australia berjumlah sekitar 7 juta jiwa dan mayoritas Inggris-Celtic. Sejak saat itu, lebih dari 6,5 juta migran, termasuk 675.000 pengungsi, bermukim di Australia, secara nyata memperluas profil sosial dan budayanya. Kini penduduk Australia mencapai lebih dari 21 juta jiwa. Lebih dari 43 persen penduduk

Australia kelahiran luar negeri atau memiliki orang tua yang lahir di luar negeri. Penduduk asli Australia diperkirakan berjumlah 483.000, atau 2,3 persen. Banyak orang yang datang ke Australia sejak 1945 memiliki motivasi komitmen kepada keluarga, atau keinginan untuk melepaskan diri dari kemiskinan, perang atau penganiayaan. Gelombang pertama migran dan pengungsi kebanyakan datang dari Eropa. Gelombang-gelombang berikutnya datang dari kawasan Asia-Pasifik, Timur Tengah dan Afrika. Migran telah memperkaya hampir setiap aspek kehidupan Australia, dari bisnis hingga kesenian, dari masakan hingga komedi dan dari ilmu pengetahuan hingga olahraga. Mereka, pada gilirannya, beradaptasi dengan masyarakat Australia yang toleran, informal dan secara garis besar egalitarian.

Nilai-nilai bersama

Kekhasan Australia masa kini tidak hanya kemajemukan budaya penduduknya, namun hingga tahap dimana mereka dipersatukan oleh komitmen yang mendasar dan menyatu terhadap Australia. Dalam kerangka hukum Australia, seluruh penduduk Australia berhak untuk mengungkapkan kebudayaan dan kepercayaan dan untuk ambil bagian dengan bebas dalam kehidupan nasional Australia. Pada saat yang sama, setiap orang diharapkan untuk menjunjung prinsip-prinsip dan nilai-nilai bersama yang menyokong cara hidup Australia. Hal ini termasuk:

- menghormati kesetaraan nilai, kehormatan dan kebebasan individu
- kebebasan berbicara dan berserikat
- kebebasan beragama dan pemerintah sekular
- dukungan atas demokrasi parlementer dan negara hukum
- kesetaraan di bawah hukum
- kesetaraan pria dan wanita
- kesetaraan kesempatan
- kedamaian
- semangat egalitarianisme yang mencakup toleransi, saling hormat-menghormati dan rasa kasih sayang kepada mereka yang sedang dalam kesulitan.

Australia juga memiliki keyakinan teguh bahwa tak seorang pun boleh dirugikan hanya karena perbedaan negeri kelahiran, warisan budaya, bahasa, jender atau agama mereka.

Masyarakat egalitarian

Secara umum, Australia adalah masyarakat egalitarian. Ini tidak berarti bahwa setiap orang sama atau memiliki kekayaan atau harta yang setara. Namun ini berarti bahwa tidak ada perbedaan kelas yang formal atau mendarah daging pada masyarakat Australia, seperti di negara-negara lain. Ini juga berarti bahwa dengan kerja keras dan tekad, orang tanpa koneksi tingkat tinggi atau patron yang berpengaruh dapat mewujudkan ambisi mereka. Tingkat pengangguran secara relatif rendah (4,3 persen pada Desember 2007) dan pendapatan per kapita bruto sekitar \$39.000. Seluruh warga setara di bawah hukum di Australia dan seluruh warga Australia memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan secara wajar.

Ciri Khas Orang Australia?

Mengingat kemajemukan Australia masa kini, beberapa orang mempertanyakan apakah ada ‘kekhasan’ orang Australia. Tentu saja, banyak stereotipe populer, beberapa di antaranya bertolak belakang. Misalnya, beberapa orang memandang penduduk Australia sebagai penduduk egalitarian, dan tidak sopan dengan kecurigaan mendalam terhadap pihak berwenang sementara ada yang memandang mereka sebagai orang yang taat-hukum dan bahkan konformis. Sebagian orang, terutama yang tinggal di luar negeri, percaya penduduk Australia sebagian besar tinggal di pedesaan, pedalaman Australia atau di daerah. Nyatanya, lebih dari 75 persen penduduk Australia menikmati gaya hidup kosmopolitan di pusat perkotaan, utamanya di kota-kota besar di sepanjang pesisir. Sebagian lain melihat penduduk Australia sebagai orang yang hidup di ‘negeri yang beruntung’ yang mencintai kegiatan waktu senggang mereka, khususnya olah raga, baik sebagai penonton maupun sebagai peserta. Faktanya, penduduk Australia termasuk di antara pekerja paling keras di dunia beberapa di antaranya mempunyai jam kerja terpanjang di negara-negara maju.

Pandangan lumrah lainnya adalah bahwa penduduk Australia itu informal, terbuka dan langsung dan mengatakan apa yang mereka maksudkan. Mereka juga dipandang sebagai orang yang percaya pada prinsip memberi orang lain kesempatan secara adil dan membela sahabat mereka, yakni mereka yang kurang beruntung dan lemah. Banyak dari pandangan populer ini mengandung kebenaran dan kebanyakan penduduk Australia sesuai sekurangnya dengan sebagian dari persepsi tersebut. Namun penduduk Australia, seperti penduduk lain, tidak dapat dengan mudah di-*stereotipe*-kan. Terdapat “ciri khas” orang Australia di mana-mana. Namun mereka tidak semua sama.

Bahasa

Seluruh rakyat Australia didorong untuk belajar bahasa Inggris, yang merupakan bahasa nasional dan unsur pemersatu yang penting dari masyarakat Australia. Namun, bahasa-bahasa selain Inggris juga dihargai. Nyatanya, lebih dari 15 persen penduduk Australia berbicara selain bahasa Inggris di rumah. Bahasa yang paling banyak digunakan setelah bahasa Inggris adalah bahasa Itali, Yunani, Kanton, Arab, Vietnam dan Mandarin. Penduduk Australia berbicara dalam lebih dari 200 bahasa, termasuk bahasa Penduduk Asli Australia.

Bahasa Inggris Australia

Sementara Inggris adalah bahasa nasional Australia, ada beberapa kata dan ungkapan tertentu yang telah dianggap sebagai keunikan Australia melalui penggunaan bersama. Beberapa di antaranya mungkin nampak aneh bagi orang asing. Penggunaan kata-kata percakapan sehari-hari dan yang populer, sering digabung dengan cita rasa humor Australia yang memiliki karakter ironi dan tanpa kesopanan, kadang kala dapat menimbulkan kebingungan bagi pengunjung internasional. Ada sejumlah buku tentang kata-kata percakapan sehari-hari dan ungkapan-ungkapan populer Australia, termasuk *Macquarie Book of Slang*.

Ibadah Keagamaan

Secara umum Australia adalah negara Kristen, dengan sekitar 64 persen penduduk Australia mengaku sebagai penganut agama Kristen. Namun, agama-agama besar lainnya juga memiliki penganut, yang mencerminkan masyarakat Australia yang majemuk secara budaya. Agama atau aliran kepercayaan Australia paling awal mulai dengan Penduduk Aborijin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres, yang telah mendiami Australia selama antara 40.000 dan 60.000 tahun. Penduduk Asli Australia memiliki tradisi agama dan nilai-nilai rohani yang unik. Australia tidak mempunyai agama negara yang resmi dan masyarakat bebas menganut segala agama yang mereka pilih, sepanjang mereka patuh pada hukum. Penduduk Australia juga bebas untuk tidak memeluk agama.

Dunia seni yang dinamis

Australia memiliki dunia seni yang dinamis yang sekaligus mencerminkan tradisi budaya Penduduk Asli dan mosaik kaya budaya migran bangsa Australia. Seluruh bentuk seni visual dan panggung mempunyai pengikut yang fanatik, termasuk film, seni, teater, tari dan musik. Menurut suatu survei, hampir 13 juta atau 88 persen penduduk dewasa Australia menyaksikan satu acara atau pertunjukan kebudayaan setiap tahunnya. Seni yang paling populer adalah film, yang disaksikan oleh sekitar 70 persen penduduk setiap tahunnya. Lebih dari 26 persen menyaksikan konser musik pop; 25 persen berkunjung ke galeri seni atau museum; 19 persen menonton opera atau musik; 18 persen menyaksikan seni panggung; 11 persen menonton pertunjukan tari; dan 9 persen menyaksikan konser musik klasik.

Seni visual memainkan peran penting dalam membentuk dan memancarkan citra Australia. Seni ini mencakup artis Aborijin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres hingga pelukis nasionalis Aliran Heidelberg di Victoria, surealis simbolis seperti Sidney Nolan, Arthur Boyd dan Albert Tucker dan artis modern yang mencerminkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Australia kontemporer. Artis ternama Australia lainnya mencakup John Brack, William Dobell, Russell Drysdale, Margaret Olley, John Olsen, Margaret Preston, Clifton Pugh, Jeffrey Smart, Brett Whiteley dan Fred Williams. Australia mempunyai tradisi sastra yang tangguh, diawali dengan cerita lisan Penduduk Asli Australia dan berlanjut dengan cerita lisan para narapidana yang tiba di Australia pada akhir abad ke 18.

Australia mempunyai seorang pemenang Hadiah Nobel untuk Sastra, yakni novelis Patrick White yang meraih Nobel pada 1973. Novelis Australia terbaru yang karyanya memiliki cita-rasa khusus Australia termasuk Peter Carey, Bryce Courtenay, Kate Grenville, Elizabeth Jolley, Thomas Keneally, Christopher Koch, David Malouf, Colleen McCullough, Christina Stead, Morris West dan Tim Winton.

Budaya olah raga

Warga Australia adalah penggemar olah raga, baik sebagai pemain maupun sebagai penonton. Australia sering mencapai prestasi yang luar biasa pada tingkat elit. Pada Pesta Olah Raga Olimpiade Athena 2004, Australia berada

di peringkat ke empat dalam perolehan medali secara keseluruhan di bawah Amerika Serikat, Cina dan Rusia. Pada Piala Dunia Sepakbola 2006, Australia mencapai babak 16 besar. Australia juga merupakan bangsa berperingkat atas dalam olah raga kriket di dunia. Namun tidak hanya pada tingkat top ini saja Australia menikmati olah raga. Survei nasional baru-baru ini memperlihatkan bahwa lebih dari 11 juta warga Australia yang berusia antara 15 tahun atau lebih ambil bagian sekurangnya sekali dalam satu minggu dalam kegiatan fisik senam, rekreasi dan olah raga— tingkat partisipasi hampir 70 persen. Sepuluh kegiatan fisik yang paling populer adalah jalan kaki, aerobik/fitnes, renang, bersepeda, tenis, golf, lari, jalan di alam terbuka, sepakbola dan bola tangan. Kegiatan olah raga lain yang populer adalah sepakbola Australia, rugby, hoki, bola basket, baseball, balap mobil, balap kuda, berlayar dan selancar salju.

Olahraga yang paling menarik perhatian penonton di Australia mencakup Sepakbola Australia, suatu permainan khas Australia yang jejaknya dapat ditemukan pada bentuk awal rugby dan sepak bola *Gaelic*, liga rugby, uni rugby dan kriket. Australia Terbuka, diselenggarakan di Melbourne, merupakan salah satu dari empat turnamen tenis *Grand Slam*. Australia mempunyai lebih dari 120 organisasi olah raga nasional dan ribuan badan olah raga di wilayah negara bagian dan lokal.

Masakan nasional

Australia adalah salah satu negara dengan masakan paling majemuk di dunia, berkat pengaruh migran Asia dan Eropa, penduduk yang senang mencoba masakan inovatif dan mempunyai akses ke pasokan bahan pangan yang segar and bermutu tinggi dalam jumlah yang berlimpah. Australia, salah satu bangsa pertanian yang paling efisien di dunia, menghasilkan sayur, buah, biji-bijian, daging, ayam, pangan laut, keju dan produk susu lain yang bermutu tinggi. Selain itu, banyak industri baru telah didirikan untuk mengakomodasi meningkatnya keinginan Australia untuk mencicipi makanan eksotis, termasuk sayursayuran Asia, pear, leci, buah zaitun dan jamu-jamuan. Produk budi daya air seperti salmon Atlantik hasil peternakan kolam dan tuna sirip biru selatan kini tersedia demikian juga sejumlah hasil laut yang berasal dari samudera yang mengelilingi Australia, termasuk *Moreton Bay bugs* (ikan kerangkerangan), udang ‘pisang’, ikan barramundi dan tiram.

Penduduk Australia menggemari bermacam-macam makanan di restoran dan rumah yang mencerminkan kemajemukan budaya negerinya. Eropa Selatan bersatu dengan Asia dan Pasifik untuk membuahakan cita rasa baru. Restoran Itali, Cina, Indonesia, Jepang, Yunani, Thailand, Malaysia, Perancis dan Vietnam sudah lumrah, khususnya di kota-kota besar. Cita rasa Timur Tengah juga dengan cepat muncul, dengan cita rasa Maroko dan Lebanon yang dimasak dengan bahan-bahan lokal pada masakan arus utama dengan keberhasilan yang nyata. Masakan tradisional Penduduk Aborijin *bush tucker* juga semakin lumrah, khususnya di restoran-restoran di Australia Utara, di mana kangguru, kerbau, buaya dan emu sering ditawarkan pada daftar menu. Menurut sejarah, tidak pernah ada masakan khas Australia. Yang ada adalah masakan Australia berevolusi dengan lapis-lapis cita rasa yang berbeda di mana setiap kebudayaan baru memberi tambahan.

Warga Australia di luar negeri yang rindu kampung halaman kadang-kadang kangen dengan makanan Australia seperti *lamingtons* (kue kotak berpori yang dicelupkan ke dalam coklat dan kelapa), *pavlova* (adonan gurun yang diberinama penari balet Rusia Anna Pavlova) dan *vegemite* (olesan yang terbuat dari produk ragi). Sektor minuman anggur Australia diakui secara internasional dengan produksi berbagai jenis minuman anggur bermutu tinggi dan bervariasi untuk disesuaikan dengan segala masakan, dari *full-bodied reds* dan *deep fruity whites* hingga *sparkling*, *dessert* dan *fortified wines*.

Taat hukum

Perilaku masyarakat di Australia diatur oleh gabungan hukum resmi dan kebiasaan sosial tidak resmi. Seluruh penduduk di Australia harus mematuhi hukum atau berhadapan dengan kemungkinan hukuman pidana atau aksi perdata. Penduduk secara umum juga diharapkan untuk mematuhi adat, kebiasaan dan praktik sosial Australia walaupun tidak mengikat secara hukum. Pelanggaran pidana serius seperti pembunuhan, penyerangan, penyerangan seksual, pedofilia, kekerasan terhadap orang dan harta benda, perampokan atau pencurian bersenjata, mengemudi kendaraan bermotor yang berbahaya, kepemilikan dan penggunaan obat-obatan terlarang, penipuan dan hubungan seks dengan anak di bawah umur yang telah ditetapkan, yakni 16 di New South Wales namun berbeda-beda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya.

Merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol tidak melanggar hukum, namun terdapat banyak pembatasan dalam penggunaan umum. Adalah melanggar hukum bagi siapapun yang menjual atau memasok produk alkohol atau tembakau kepada mereka yang berusia kurang dari 18 tahun. Ada pula hukum yang melarang perlakuan buruk atau menelantarkan binatang, membawa senjata seperti pisau atau senjata api, membuang sampah sembarangan, mengotori atau membuang limbah tanpa izin atau membuat bising yang berlebihan. Di Australia tidak ada hukuman mati.

Iklim yang hangat, penduduk yang informal

Australia demikian luas sehingga mengalami sebagian besar kondisi iklim, dari musim tropis ke cuaca panas, kering dan salju. Namun, cuaca pada umumnya hangat dan sedang, khususnya di kota-kota pesisir yang besar. Iklim yang relatif sedang ini mendorong warga Australia untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka di luar rumah di pantai, di pedesaan atau di lapangan olah raga baik sebagai penonton maupun sebagai peserta. Warga Australia cenderung suka berkawan dan terbuka. Secara umum relatif informal dalam kehidupan sosialnya dan dalam hubungan mereka dengan kenalan dan rekan kerja mereka.

Di tempat kerja dan di antara teman, warga Australia umumnya saling memanggil dengan nama pertama mereka. Namun informalitas ini tidak sampai pada hubungan fisik. Ketika bertemu orang pada pertama kalinya, biasanya saling berjabat tangan dengan tangan sebelah kanan. Orang yang tidak mengenal satu sama lain biasanya tidak mencium atau berpelukan ketika bertemu. Penduduk Australia antri ketika sedang menunggu untuk dilayani di toko, bank, kantor pemerintah, bioskop atau di mana pun juga ketika sejumlah orang mencari

layanan pada saat yang sama. Penduduk Australia menunggu hingga tiba gilirannya untuk dilayani. Tepat waktu pada rapat dan pertemuan adalah penting.

Pakaian

Jenis pakaian yang dikenakan mencerminkan kemajemukan masyarakat Australia dan variasi iklim. Tidak ada undang-undang atau peraturan tentang pakaian, namun penduduk Australia diharapkan untuk mengenakan pakaian tertentu ketika bekerja—kebanyakan tempat kerja mempunyai standar pakaian. Di luar kerja, pakaian adalah pilihan pribadi— orang berpakaian dengan pertimbangan kenyamanan, situasi sosial atau musim. Klub, gedung bioskop dan tempat-tempat lain menuntut orang untuk berpakaian rapi, bersih dan mengenakan alas kaki yang sesuai. Australia tidak memiliki pakaian nasional resmi.

Perayaan dan hari libur

Sebagian besar pekerja di Australia memiliki sekitar 12 hari libur nasional dan negara bagian sepanjang tahun, di samping cuti tahunan mereka. Hari libur ini mencakup: Tahun Baru, pada 1 Januari setiap tahunnya. Waktu yang paling umum bagi penduduk Australia untuk mengambil cuti tahunan mereka adalah antara pertengahan-Desember hingga akhir Januari. Natal dan Paskah, dua tanggal yang paling penting pada kalender Kristen. Natal adalah pada 25 Desember setiap tahun, sementara Paskah dirayakan antara akhir Maret hingga akhir April setiap tahun. *Boxing Day*, satu hari setelah Natal, juga hari libur umum. Hari Australia, pada 26 Januari, juga hari penduduk Australia merayakan pendirian pemukiman Eropa yang pertama di Australia pada 1788. Anzac Day, pada 25 April, adalah hari Korps Angkatan Darat Australia dan Selandia Baru (Anzac) mendarat di Gallipoli di Turki pada 1915 pada Perang Dunia I. Hari ini disisihkan dalam kenangan mereka yang bertempur untuk Australia dan bagi mereka yang gugur di medan perang. Hari ini adalah hari libur umum nasional dan diperingati dengan upacara, meletakkan karangan bunga dan parade militer.

Juga ada sejumlah hari libur bukan nasional yang dirayakan di negara bagian atau teritori tertentu (atau dirayakan di seluruh negara bagian, namun pada waktu yang berbedabeda). Ini termasuk Hari Buruh (atau Delapan-Jam) dan hari ulang tahun resmi Ratu Elizabeth. Hari Piala Melbourne, yang berlangsung pada hari Selasa pertama bulan November setiap tahunnya, adalah hari libur umum di Melbourne metropolitan. Piala Melbourne adalah pacuan kuda yang ternama di dunia yang hampir menghentikan seluruh kegiatan di Australia. Selama beberapa menit, sebagian besar penduduk, apakah di tempat kerja, sekolah atau pun rumah, berhenti untuk menonton pacuan tersebut di televisi.

Fakta-fakta penting

- Lebih dari 6,5 juta migran telah bermukim di Australia sejak 1945.
- Inggris merupakan bahasa nasional namun bahasa-bahasa lain dihargai.
- Mayoritas penduduk Australia beragama Kristen namun orang bebas memeluk agama yang mereka pilih.
- Sekitar 88 persen warga Australia menghadiri kegiatan kebudayaan sekurangnya sekali dalam satu tahun.

- Lebih dari 11 juta warga Australia berusia 15 tahun atau lebih ambil bagian dalam olahraga atau kegiatan fisik lainnya.
- Australia adalah salah satu negara yang memiliki masakan paling majemuk di dunia namun tidak memiliki masakan nasional.

Sistem pemerintahan Australia

Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia.

Pemerintah yang bertanggungjawab

Salah satu demokrasi yang tertua dan lestari di dunia, Persemakmuran Australia didirikan pada 1901 ketika bekas koloni Inggris ini – kini enam negara bagian – sepakat untuk menjadi federasi. Praktik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen kolonial pra-federasi (seperti ‘satu orang, satu suara’ dan hak pilih wanita) diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama. Koloni Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum dan ganda. Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih mendorong perubahan pemilihan umum. Australia memelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern. Pada 1855, Victoria memperkenalkan pemilihan umum secara rahasia, yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai ‘pemilu Australia’. Pada 1856, Australia Selatan menghapuskan persyaratan profesional dan harta serta memberi hak pilih kepada seluruh pria dewasa, kemudian pada 1892 memberi wanita dewasa hak pilih. Pada dasawarsa 1890an koloni-koloni tersebut memberlakukan prinsip satu suara per orang, menghentikan praktik pemungutan suara ganda. Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat.

Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat Kabinet. Selain pengumuman keputusan, diskusi Kabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris yakni Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen. Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Ratu menunjuk Gubernur Jenderal (atas saran dari Pemerintah Australia terpilih) untuk mewakilinya. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.

UUD tertulis

Seperti Amerika Serikat namun berbeda dengan Inggris, Australia memiliki undang-undang dasar tertulis. UUD Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi. Pemerintah negara bagian dan teritori bertanggungjawab

atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada Persemakmuran, dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggungjawab. Di negara bagian, Ratu diwakili oleh seorang Gubernur untuk setiap negara bagian.

Pengadilan Tinggi Australia menangani sengketa antara Persemakmuran dan negara bagian. Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawab konstitusional pemerintah federal. UUD Australia hanya dapat diubah dengan persetujuan pemilih melalui suatu referendum nasional di mana seluruh orang dewasa yang masuk dalam daftar pemilih harus ikut serta.

Rancangan undang-undang yang berisi amandemen pertama-tama harus disahkan oleh kedua majelis parlemen tersebut atau, dalam situasi tertentu saja, hanya oleh salah satu majelis parlemen. Setiap perubahan UUD harus disetujui oleh mayoritas ganda – mayoritas pemilih nasional dan mayoritas pemilih di mayoritas negara bagian (sekurangnya empat dari enam negara bagian). Jika satu atau beberapa negara bagian tertentu terkena dampak isi referendum tersebut, mayoritas pemilih di negara-negara bagian tersebut juga harus menyetujui perubahan tersebut. Ini sering disebut dengan kaidah ‘tiga mayoritas’. Ketentuan mayoritas ganda membuat perubahan UUD menjadi sulit. Sejak federasi berdiri pada 1901, hanya delapan dari 44 usulan amandemen UUD yang disetujui. Pemilih pada umumnya enggan mendukung apa yang mereka pandang sebagai peningkatan kekuasaan pemerintah federal. Negara bagian dan teritori juga boleh menyelenggarakan referendum.

Kedaulatan parlementer

UUD Australia menjabarkan kekuasaan pemerintah dalam tiga bagian – legislatif, eksekutif dan yudikatif – tetapi menegaskan bahwa anggota legislatif harus juga anggota eksekutif. Pada kenyataannya, parlemen mendelegasikan wewenang penyusunan undang-undang yang luas kepada eksekutif. Pemerintah dibentuk di Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai yang mampu meraih mayoritas di majelis tersebut. Partai minoritas seringkali menjadi penyeimbang kekuasaan di Senat, yang berfungsi sebagai majelis kaji ulang keputusan-keputusan pemerintah. Para senator dipilih untuk masa bakti enam tahun, dan dalam satu pemilihan umum biasa hanya separuh senator yang menghadapi pemilih.

Di semua parlemen Australia, pertanyaan dapat diajukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan menerapkan giliran yang ketat antara pertanyaan pemerintah dan Oposisi kepada para menteri selama Waktu Tanya-Jawab. Oposisi menggunakan pertanyaan untuk mencecar pemerintah. Pemerintahan memberi kesempatan kepada para menteri untuk menjelaskan kebijakan dan tindakan pemerintah secara positif, atau untuk menyerang Oposisi.

Apa pun yang diucapkan di parlemen dapat disebarluaskan dengan berimbang dan akurat tanpa kekhawatiran akan tuntutan pencemaran nama baik. Keriuhan Waktu Tanya-Jawab dan debat parlemen disiarkan dan diberitakan secara luas. Ini membantu membangun reputasi debat publik yang tangguh di Australia, dan berfungsi sebagai kendali informal atas kekuasaan eksekutif.

Kekerapan pemilihan umum

Pemilihan umum nasional harus diselenggarakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak sidang pertama parlemen federal yang baru. Masa bakti rata-rata parlemen sekitar dua setengah tahun. Pada praktiknya, pemilihan umum diadakan ketika Gubernur Jenderal menyetujui permintaan dari Perdana Menteri, yang memilih tanggal pemilihan umum.

Partai yang berkuasa berganti rata-rata setiap lima tahun sejak federasi berdiri pada 1901, akan tetapi masa bakti pemerintah sangat bervariasi. Partai Liberal memimpin koalisi dengan masa bakti paling lama — 23 tahun — dari 1949 hingga 1972. Sebelum Perang Dunia II, beberapa pemerintahan bertahan kurang dari satu tahun, tetapi sejak 1945 hanya terjadi tujuh kali pergantian pemerintahan.

Pemungutan suara

Seluruh warga negara yang berusia di atas 18 tahun wajib memberikan suaranya dalam pemilihan umum pemerintah federal atau negara bagian, dan kemangkiran dari pemilu dapat berujung pada denda atau tuntutan pidana.

Partai

Seperti halnya di negara lain, partai politik Australia dan kegiatan internalnya umumnya tidak diatur, namun disiplin internal partai sangat ketat. Australia memiliki sistem resmi pendaftaran partai dan pelaporan kegiatan partai melalui Komisi Pemilihan Australia dan komisi setara di tingkat negara bagian dan teritori.

Australia memiliki empat partai politik utama. Partai Buruh Australia (ALP) adalah partai sosial demokrat yang didirikan oleh gerakan buruh Australia. ALP telah berkuasa sejak akhir 2007. Partai Liberal adalah partai sayap kanan tengah. Partai Nasional Australia, sebelumnya Partai Negeri, adalah partai konservatif yang mewakili kepentingan pedesaan. Partai Hijau Australia adalah partai sayap kiri dan lingkungan. Partai politik utama Australia memiliki tata cara terstruktur untuk melibatkan anggota mereka dalam pengembangan kebijakan partai atas isu tertentu. Politisi terpilih jarang yang menentang partai mereka di parlemen. Meskipun para komentator Australia mengamati bahwa pemilihan umum semakin bersifat ‘presidensial’ dalam arti beberapa metode kampanye Amerika telah digunakan, struktur dasar sistem Australia cenderung menekankan posisi kebijakan daripada kepribadian perorangan politisi.

Seperti halnya di negara demokrasi lainnya, biaya kampanye pemilu dan sumber dana kegiatan politik menjadi isu di Australia. Sejak 1984, sistem pendanaan publik (dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Australia) dan keterbukaan kampanye pemilihan umum telah diterapkan. Partai harus meraih sedikitnya 4 persen dari suara yang sah dalam pemilihan yang mereka ikuti untuk menerima dana publik. Partai-partai harus mengungkapkan pengeluaran kampanye dan sumber-sumber sumbangan di atas batas yang sudah ditentukan. Calon perorangan juga harus mengungkapkan sumber sumbangan di atas batas tertentu. Partai dan perorangan yang mengikuti pemilihan umum tidak secara

berturut-turut harus mengungkapkan hadiah dan sumbangan yang diterima di selang kampanye.

Hubungan antar tingkat tingkat pemerintahan

Parlemen negara bagian tunduk kepada UUD nasional dan konstitusi negara bagian. Hukum federal mengalahkan hukum negara bagian yang tidak selaras dengannya. Dalam praktiknya, kedua tingkat pemerintahan bekerja sama dalam banyak bidang di mana negara bagian dan teritori secara resmi bertanggungjawab, seperti pendidikan, transportasi, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak penghasilan ditetapkan secara federal, dan debat antar tingkat pemerintahan mengenai akses ke penerimaan dan fungsi pengeluaran yang tumpang tindih adalah corak permanen politik Australia. Lembaga pemerintah daerah dibentuk melalui perundang-undangan di tingkat negara bagian dan teritori.

Dewan Pemerintahan Australia (COAG) adalah forum untuk memprakarsai, mengembangkan dan menerapkan reformasi kebijakan nasional yang menuntut tindakan kerja sama antar tiga tingkat pemerintahan: nasional, negara bagian atau teritori, dan daerah. Sasarannya mencakup penanganan isu besar dengan kerja sama dalam reformasi struktural pemerintah dan reformasi untuk mencapai ekonomi nasional yang terintegrasi dan efisien serta pasar tunggal nasional. COAG terdiri dari perdana menteri, perdana menteri negara bagian, ketua menteri teritori, dan presiden Asosiasi Pemerintah Daerah Australia. Selain itu, dewan menteri (terdiri dari menteri nasional, negara bagian dan teritori, dan bila relevan, perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah Selandia Baru dan Papua Nugini) bertemu secara teratur untuk mengembangkan dan menerapkan tindakan antar-pemerintah di bidang-bidang kebijakan khusus.

Fakta-fakta kunci

- Persemakmuran Australia didirikan pada 1901 ketika bekas koloni Inggris ini – sekarang enam negara bagian – sepakat untuk mendirikan federasi.
- Walaupun Australia merupakan negara demokrasi parlementer yang merdeka penuh, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia.
- Seluruh warga negara yang berusia di atas 18 tahun harus memberikan suaranya baik pada pemilihan umum pemerintah federal maupun negara bagian.

BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA

❖ PROSES PEMBENTUKAN POLITIK AUSTRALIA

Tahun 1788 : Ada pemerintahan dalam bentuk koloni Inggris ada disatu tempat yaitu Sydney. Tahun 1851 : Ditemukan tambang emas, kemudian dibentuklah koloni-koloni ditempat lain, seperti Tasmania, New South Wales, pada awalnya terpisah, meskipun dibawah Inggris. Tahun 1850-an: dengan membesarnya jumlah penduduk/koloni maka daerah-daerah tersebut membentuk parlemen sendiri. Dengan adanya parlemen-parlemen tersebut, maka ada parlemen di koloni-koloni untuk memenej proses pembuatan keputusan. Tahun 1890-an: ada gagasan untuk membentuk pemerintah federasi, menimbulkan pro dan kontra, karena masing-masing daerah tidak mempunyai kemampuan dalam bidang sumber daya manusia. Yang paling besar wilayahnya adalah New South Wales. Ada kekhawatiran adanya penindasan dari wilayah yang besar ke yang kecil. Alasan utama pembentukan federasi : Adanya ancaman dari daerah sekitar Australia. Ancaman datang dari : Sekitar pasifik dan dari Asia.

1. Perancis dan Belanda saling berebut untuk menguasai daerah-daerah Pasifik. Jerman berkuasa di Papua Nugini. Pada tahun tersebut di Eropa ada konflik antara negara-negara besar, maka penguasaan Jerman di Papua Nugini menimbulkan ketidakenakan. Australia sebenarnya ingin menguasai Papua Nugini tapi dicegah oleh Inggris karena Inggris tidak mau bentrok dengan Jerman.
2. daerah Mauritius (pasifik) dikuasai oleh Perancis (Napoleon) yang berambisi untuk menyatukan Eropa.

Ancaman-ancaman yang ada di Australia tersebut yang menyebabkan federasi kuat. Tahun 1901 : Federasi terbentuk, memilih Alfred Deakin sebagai PM I, seorang yang nasionalis (tokoh pejuang pembentuk federasi di Australia menjadi bapak Australia). Pembentukan federasi tersebut, diikuti dengan pembentukan sistem pemerintahan demokrasi parlementer Australia. Federasi tersebut disebut “The Commonwealth of Australia”. Mengapa Parlementer? Karena mengambil sistem dari Inggris. Australia mengambil sistem federasi, sedangkan Inggris adalah negara Kesatuan, makanya Australia mengambil sistem dari AS untuk federasinya, sehingga sistem pemerintah Inggris dicampur dengan sistem pemerintahan AS.

❖ STRUKTUR PEMERINTAHAN

Saat ini Australia merupakan Negara persemakmuran yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) Pemerintah Federal
- b. 6 (enam) negara bagian

1. New South Wales (NSW)	-Sydney	801.600
2. Victoria (VIC)	-Melbourne	227.600
3. Queensland (QLD)	-Brisbane	1.727.200
4. Australia Barat (WA)	-Perth	2.525.500
5. Australia Selatan (SA)	-Adelaide	984.000

- | | | | |
|--|-------------------|---------|--------|
| | 6. Tasmania (TAS) | -Hobart | 67.800 |
|--|-------------------|---------|--------|
- c. 3 (tiga) territory atau wilayah khusus
- ☆ Australian Capitol Territory
Daerah khusus ibukota Canberra dan Jervis Bay
 - ☆ Northern territory ibukota Darwin
 - ☆ 7 (tujuh) external Territory :
 1. Pulau Norfolk
 2. Kepulauan Laut Coral
 3. Kepulauan Cocos
 4. Pulau Christmas
 5. Kepulauan Ashmore dan Cartier dilautan Indonesia
 6. Pulau Heard dan dan kepulauan Mc. Donald di sub antartika
 7. Antartika Australia

Negara bagian mempunyai kebebasan penuh dalam mengurus pemerintahan lokal. Territory juga *self Government*, tetapi ada beberapa kebijakan yang tetap dipegang oleh pemerintahan federal Australia. *External Territory* sepenuhnya dibawah peraturan pemerintah federal. Kepala pemerintahan eksekutif di negara bagian disebut primer, sedang pada Territory disebut Chief Minister.⁸

❖ DINAMIKA POLITIK AUSTRALIA

Kehidupan politik Australia bersifat kompetitif, konfrontatif, dan penuh pertentangan dalam gayanya, pragmatis dalam perumusan ide-ide dan kebijaksanaan dan partisipasi. Proses politik dijalankan dalam kerangka kelembagaan yang diwarisi dari Inggris dan dan dipinjam dari Amerika Serikat. Sistem politik Australia dapat digolongkan sebagai sistem politik barat, parlementer dan demokratis. Kehidupan politik di parlemen didominasi oleh persaingan antara dua partai politik utama.

Kehidupan politik Australia telah menghasilkan ciri-ciri khusus, yang didasarkan sebagian atas percampuran antara lembaga-lembaga dan tradisi Inggris (dimana pemerintah bertanggungjawab kepada parlemen) dengan struktur federal yang dilhami oleh Amerika Serikat, dimana negara-negara bagian tetap memiliki otonomi secara konstitusional dan pada tingkat federal, diwakili oleh sebuah Majelis Tinggi yang dipilih secara langsung(senat).

Melalui dua warisan politik ini, muncullah dua sistem pengaturan konstitusional, yaitu :⁹

1. Australia seperti AS mempunyai konstitusi tertulis yang antara lain menentukan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dan fungsi-fungsi serta kekuasaan beberapa lembaga penting.

⁸ www.cityofsydney.nsw.gov.au/.../australias-syste..., diakses pada tanggal 20 Juli 2014, pukul 16.00 Wib

⁹ sejarah.kompasiana.com/.../sistem-pemerintahan-australia-sebuah-refleksi, diakses pada tanggal 20 Juli 2014, pukul 16.00 Wib

2. Seperti Inggris, praktek-praktek politik Australia sangat dipengaruhi oleh konvensi yang walaupun tidak merupakan bagian dari konstitusi, diterima pada umumnya oleh para politisi.

Pada waktu krisis konstitusi tahun 1975, kedua sistem pengaturan tersebut tidak selamanya serasi. Contoh : menurut konstitusi, gubernur jenderal mempunyai kekuasaan eksekutif yang besar sebagai kepala negara dan merupakan wakil dan pejabat yang ditunjuk oleh Monarki Inggris, namun dengan mengabaikan krisis tahun 1975, sebagian besar orang Australia menganggap bahwa Gubernur Jenderal sebagai seorang kepala negara simbolis, seperti halnya seorang raja konstitusional, Presiden India, presiden Jerman Barat dan Presiden Singapura, yang diangkat berdasarkan saran PM.

Kesimpulan sementara : Orang-orang Australia cenderung melihat proses politik dengan sikap penuh curiga yang mendekati sinisme. Para pemimpin Australia jarang yang dihormati ataupun disenangi bahkan juga oleh para pendukung partai mereka sendiri.

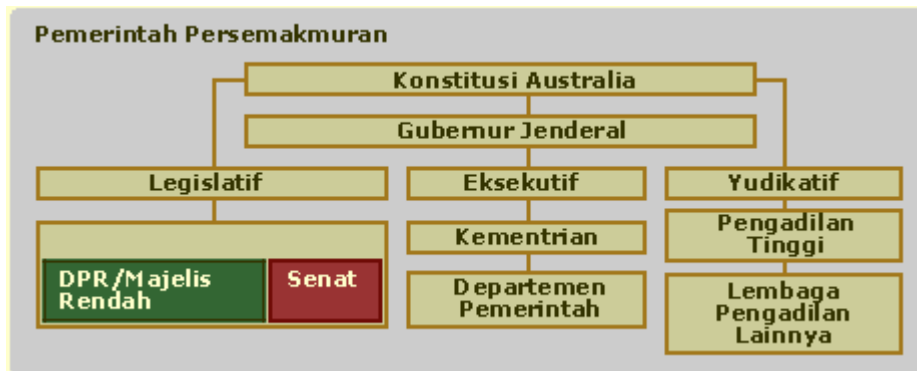
❖ DEMOKRASI PARLEMENTER

Australia mempunyai sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer. Sistem ini merupakan gabungan dari model pemerintahan parlementer yang diwarisinya dari Inggris dan model pemerintahan federal yang dicontohnya dari Amerika Serikat. Para pendiri pemerintahan Australia mengambil sistem parlementer Inggris, karena pada saat pembentukan Australia, sistem pembentukan Australia, sistem pemerintahan itulah yang paling mereka kenal dan selama itu telah dilaksanakan di enam wilayah permukiman. Namun demikian sistem pemerintahan Inggris tidak bisa dicontoh Australia secara persis, karena Inggris adalah Negara kesatuan, sedang Australia adalah Negara Federal. Karena itu mereka kemudian juga mencontoh sistem pemerintahan Amerika. Selain itu bentuk konstitusi Inggris tidak tertulis dan bersifat amat fleksibel, sehingga mempunyai banyak kelemahan. Konstitusi Inggris hanya merupakan kumpulan dari undang-undang parlemen yang menjadi kebiasaan/ konvensi umum yang dikeramatkan.¹⁰

Menyadari akan kelemahan sistem Perundang-undangan Inggris, maka perancang konstitusi Australia sepakat untuk membuat konstitusi yang tertulis. Tetapi karena mayoritas penduduk Australia berasal dari Inggris, maka praktek-praktek politik Australia sangat dipengaruhi oleh konvensi, yang meskipun secara resmi tidak termuat dalam konstitusi, telah diterima oleh para politisi. Bagi Australia yang penting ialah merancang sistem pemerintahan yang benar-benar bertanggung jawab (*Responsible Government*) terhadap rakyat.

¹⁰ www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf, diakses 21 Juli 2014, pukul 04.00 Wib

BAGAN RESPONSIBLE GOVERNMENT



Sumber

: www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html

diakses pada tanggal 21 Juli 2014, pukul 04.00 Wib

Keterangan Bagan;

Sistem Politik Australia

Sistem pemerintahan Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal, termasuk di dalamnya toleransi beragama, dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Bentuk dan pelaksanaannya mencerminkan model pemerintahan Inggris dan Amerika namun tetap khas Australia. Persemakmuran Australia didirikan pada 1 Januari 1901, yang disebut juga Hari Federasi - ketika enam bekas koloni Inggris, sekarang adalah keenam negara bagian Australia - setuju untuk berserikat. Konstitusi Australia, yang pertama kali berlaku pada 1 Januari 1901, meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan Australia.

Konstitusi

Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan - legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Badan legislatif berisi parlemen - yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sementara badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hukum. Konstitusi hanya boleh diubah melalui jajak pendapat.

Monarki Konstitusional Australia

Australia dikenal sebagai negara Monarki Konstitusional. Ini berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi/UUD. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Meskipun ia juga adalah Ratu Inggris, jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam hukum maupun praktek pemerintahan/konstitusional. Dalam kenyataannya, Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam sistem politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol/tokoh. Di Australia, Ratu secara resmi diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian Gubernur Jenderal.

Gubernur Jenderal dan Gubernur/ Kepala Negara Bagian

Meski diakui Gubernur Jenderal adalah wakil Ratu Inggris di Australia, posisinya tidak harus mengikuti arahan, pengawasan ataupun hak veto dari Ratu dan Pemerintah Inggris.

Dalam UUD/Konstitusi, wewenang dan tugas Gubernur Jenderal termasuk memanggil, menghentikan sidang badan pembuat undang-undang, dan membubarkan parlemen, menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim.

Namun, berdasarkan konvensi, Gubernur Jenderal hanya bertindak atas permintaan para Menteri dalam hampir semua permasalahan. Figur yang diangkat untuk posisi Gubernur Jenderal dipilih berdasarkan pertimbangan Pemerintah. Keenam Gubernur negara bagian melaksanakan peran yang sama di daerah mereka masing-masing.

Pemerintahan Persemakmuran/ Federasi atau Pemerintah Pusat

Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral, yakni mempunyai dua kamar: House of Representatives atau Majelis Rendah/DPR dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggungjawab menetapkan UU berskala nasional seperti: perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Rancangan UU/Peraturan Pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis sebelum menjadi UU/Peraturan Pemerintah.

DPR (House of Representatives), mengusulkan sebagian besar rancangan UU/Peraturan Pemerintah. Majelis ini beranggotakan 148 anggota yang dipilih melalui pemilu, di mana setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara. Partai politik yang mempunyai kursi terbanyak di majelis rendah berhak membentuk pemerintahan.

Pemerintah Negara Bagian dan Teritori

Hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Federasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian dan Teritori.

Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan (akta parlemen) sendiri (yang dapat diamandemen parlemen setempat) tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara.

Bilamana suatu UU/Peraturan Negara Bagian masih berada di bawah wewenang konstitusional Federasi, maka UU/Peraturan Pemerintah Federasi berlaku di atas wewenang UU/Peraturan negara bagian.

Semua Parlemen negara bagian kecuali Queensland, bersifat bikameral yakni mempunyai majelis rendah dan majelis tinggi. Sementara parlemen dari dua teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) hanya memiliki satu majelis. Pemerintah negara bagian dan teritori menangani masalah kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana jalan, pemanfaatan lahan publik, perangkat kepolisian, pemadam kebakaran dan pelayanan ambulans, serta keberadaan pemerintah lokal dalam wilayahnya masing-masing.

Pemerintah Lokal

Terdapat sekitar 900 badan pemerintah lokal di Australia. Wewenang pemerintah lokal berbeda untuk setiap negara bagian dan merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian masing-masing. Beberapa badan pemerintah lokal bertanggungjawab menjalankan perusahaan perhubungan/transportasi dan energi, kebanyakan negara bagian menetapkan besar tarif bea dan menerima dana dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Tanggungjawab pemerintah lokal secara khusus meliputi perencanaan/tata kota, pengawasan izin bangunan, sarana jalan setempat, penyediaan air bersih, saluran pembuangan dan drainase, pelayanan sampah dan kebersihan dan fasilitas hiburan masyarakat.

Hubungan antara Pemerintahan Federal dan Negara Bagian

Pemerintah Federasi dan negara bagian menjalin kerjasama di berbagai bidang, yang secara resmi merupakan tanggung jawab negara bagian dan teritori; seperti pendidikan, perhubungan, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak pendapatan ditarik secara federal, dan debat di antara semua tingkat pemerintahan negara bagian mengenai akses mendapatkan pemasukan merupakan ciri lama politik Australia. Parlemen berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga pembuat Undang-undang. Wakil rakyat dipilih melalui Pemilu (paling lama 3 tahun sekali), dan mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang. Menurut sistem Inggris, pemerintah atau kabinet (PM dan Menteri-Menteri Kabinet) dipilih dari anggota parlemen. Sedang kabinet dibentuk oleh partai atau

koalisi partai-partai politik yang mempunyai suara mayoritas diparlemen. Agar bisa mempertahankan jabatan dan melaksanakan roda pemerintahan secara efektif, pemerintah atau kabinet memang memerlukan dukungan mayoritas, karena tanpa dukungan mayoritas dia tidak akan mampu mengesahkan Undang-Undang atau RAPBN (Rencana Pendapatan dan Belanja Negara) yang akan digunakan untuk memutar roda pemerintahan. Jika parlemen tidak menyetujui atau menolak RAPBN maka kabinet yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Dengan sistem pemerintahan parlementer seperti diatas, diharapkan agar kabinet bisa bertanggung jawab kepada rakyat (pemilih), dan parlemen bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, sedang parlemen bertanggung jawab kepada rakyat.

❖ **SISTEM PEMERINTAHAN FEDERAL**

Embrio pemerintahan Australia mulai tumbuh pada tahun 1788, ketika Inggris mulai membentuk koloni untuk pembuangan narapidana di Sydney (The First Fleet). Empat puluh tahun kemudian jumlah penduduk kulit putih baru mencapai sekitar 57.000 orang termasuk 2500 diantaranya adalah para narapidana. Sementara itu dalam periode yang sama jumlah penduduk asli Aborigin menyusut hingga tinggal 25 persen saja. Penyusutan ini disebabkan oleh wabah penyakit maupun peperangan-peperangan yang terjadi dengan pendatang kulit putih.

Pada tahun 1851 mulai ditemukan tambang-tambang emas sehingga mengakibatkan banjirnya para imigran baru yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Jumlah penduduk kulit putih melonjak hingga 1.150.000 orang. Sementara mulai didatangkan pula kuli-kuli kasar dari Cina

Pada tahun 1855-1856 Inggris memberikan status otonomi intern pada New South Wales, Victoria, Tasmania, dan South Australia. Sejak saat itu di daerah-daerah tersebut dibentuk parlemen serta pemerintahan sendiri, meskipun secara formal Inggris masih bisa melakukan campur tangan. Sementara pengaruh ide sosialis mulai tampak dalam berbagai Undang-Undang yang muncul, seperti sistem sekolah yang gratis.

Pada tahun 1890 mulai timbul gagasan untuk membentuk sistem pemerintahan federal. Isu ini mulai intens dibicarakan dikalangan pemimpin daerah-daerah koloni diberbagai bagian Australia. Gagasan ini benar-benar terwujud pada tahun 1901 ketika daerah-daerah yang semula berpemerintahan sendiri bergabung dan membentuk Federasi Australia atau "The Commonwealth of Australia", serta memilih Alfred Deakin sebagai perdana Menteri pertama. Model pemerintahan demokrasi parlementer mereka ambil karena selama ini telah dipraktekkan di daerah-daerah koloni yang kemudian menjadi Negara-negara bagian tersebut. Tetapi sistem Inggris tersebut tidak bisa mereka ambil secara penuh karena Inggris adalah Negara kesatuan, sementara Australia kini berbentuk federal. Karena itulah mereka merasa perlu untuk menggabungkannya dengan sistem Amerika.

Sewaktu dibentuk pemerintahan Federal (1890), para wakil Negara-negara bagian menginginkan adanya sebuah jaminan agar otonomi mereka dalam menjalankan pemerintahan lokal tidak diserobot oleh pemerintah federal. Negara-negara bagian yang kecil amat khawatir jika pemerintah federal yang dibentuk

nantinya hanya akan dimanfaatkan atau sekedar dijadikan alat oleh Negara-negara bagian yang besar, kaya dan berpenduduk banyak, untuk menindas mereka.

Dalam sistem federal, Negara-negara bagian tetap mempunyai alat-alat pemerintahan dan menjalankan sebagian besar roda pemerintahannya sendiri. Negara-negara bagian yang telah ada tidak dirubah menjadi Negara kesatuan. Negara bagian hanya menyerahkan sebagian kecil kekuasaannya pada pemerintah federal, sebatas urusan yang menyangkut masalah luar negeri atau masalah antar Negara bagian.

Untuk menyesuaikan sistem pemerintahan Inggris dengan Amerika, maka harus diadakan beberapa perubahan:

Pertama, pemerintahan federal memerlukan konstitusi tertulis yang kuat dan benar-benar mampu mengatur kekuasaan yang ada pada kedua tingkat pemerintahan. Sejauh ini Inggris tidak mempunyai konstitusi yang kuat. Konstitusi Inggris sifatnya sangat luwes dan tidak tertulis, yang terdiri dari beberapa undang-undang parlemen yang dianggap keramat.

Misalnya :

- ☆ *Act of Union* Inggris (Undang-undang kesatuan tahun 1707) yang mengatur penyatuan Inggris dengan Scotlandia dalam Kerajaan kesatuan Britania Raya.
- ☆ Undang-undang parlemen 1911 yang membatasi kekuasaan Legislatif dari Majelis Tinggi (*House of Lord*) untuk menunda rencana Undang-Undang.
- ☆ Pemerintah akan dibentuk oleh partai politik yang mempunyai dukungan mayoritas dalam majelis rendah, bukan majelis tinggi.
- ☆ Raja yang secara resmi memiliki kekuasaan eksekutif, dalam prakteknya tidak akan menolak undang-undang yang disahkan oleh parlemen.

Peraturan –peraturan atau ketetapan-ketetapan diatas tidak sedikitpun ditulis dalam konstitusi Inggris. Walaupun sudah banyak ilmuwan yang menyoroti masalah tersebut, tetapi sampai saat ini tetap belum ada kesepakatan mengenai hal-hal apa yang seharusnya merupakan konstitusi.

Kedua, Di Inggris parlemen mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengesahkan undang-undang. Tidak ada batasan hukum yang membatasi hak parlemen dalam mengesahkan Undang-undang. Dalam prakteknya sebenarnya banyak rancangan undang-undang yang tidak bisa dibahas oleh parlemen. Mungkin karena parlemen tidak mempunyai kemampuan teknis untuk membahasnya, atau memang masalah yang dibahas secara politik tidak populer. Dalam masalah ini para pendiri Australia sepakat untuk mengadakan perubahan atas model *Westminster*.

Parlemen Australia hanya mempunyai wewenang yang terbatas saja dalam mengesahkan Undang-undang, yaitu yang berhubungan dengan masalah pertahanan, perwasitan dalam konflik antar Negara bagian dan Territory, pembuatan uang dan Bank, serta masalah pos, Telegram.

Selain dari masalah-masalah itu, wewenang pembuatan undang-undang diberikan pada Negara bagian. Misalnya masalah kepolisian, pengendalian harga-harga kebutuhan pokok, hukum pidana, agraria, lalu lintas, pendidikan, kesehatan, perencanaan kota dan perlindungan bagi orang-orang Aborigin. Para pendiri

Australia benar-benar bersikukuh agar hak-hak tersebut tidak dilanggar oleh pemerintah federal.

Ketiga, Mahkamah Agung (MA) berwenang untuk memeriksa atau mencocokkan apakah undang-undang yang dibuat oleh parlemen federal atau Negara bagian tersebut benar-benar sesuai dengan konstitusi atau tidak. Jika ternyata parlemen melakukan pelanggaran, maka MA berhak membatalkan Undang-undang tersebut. Wewenang MA di Australia ini terasa menyolok karena di Inggris pun tidak mempunyai wewenang sebesar ini.

Keempat, Pembentukan senat. Untuk menegakkan pemerintahan federal maka dibentuk senat yang terdiri dari wakil-wakil negara bagian. Pembentukan senat ini mencontoh sistem Amerika. Jumlah wakil dari masing-masing Negara bagian sama (masing-masing 12 orang), tanpa mempedulikan besar/kecilnya Negara tersebut. Senat di Australia ini berbeda dengan *House of Lord* di Inggris. Kekuasaannya sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*).

Sebagaimana Senat di Amerika, senat Australia ini berwenang untuk menetapkan aturan konstitusi (tertulis) yang membagi wewenang kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah Negara bagian. Senat tersebut memang sengaja dibentuk dan diberi kekuasaan yang besar untuk melindungi kepentingan Negara bagian. Agar diperoleh penggambaran yang lebih baik mengenai sistem parlementer ini, perlu dijelaskan terlebih dulu mengenai latar belakang pembentukan sistem pemerintahan parlementer di Inggris yang merupakan induk dari sistem pemerintahan parlementer Australia.

❖ SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER INGGRIS

Sistem pemerintahan parlementer seperti yang kita kenal sekarang ini telah dipraktekkan di Inggris sejak pertengahan abad 18. Sementara itu embrio parlemen telah dirintis sejak abad 18. Pada saat itu parlemen telah menjadi lembaga penting yang berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang, menyetujui dan memeriksa pengumpulan pajak serta anggaran belanja Negara.

Kabinet (perdana menteri + menteri-menteri) telah berkembang menjadi pemerintah yang menyerap kekuasaan eksekutif Raja. Kelangsungan kabinet tidak lagi tergantung pada dukungan raja tetapi tergantung pada dukungan parlemen. Karena partai-partai politik mulai menguasai Majelis Rendah, maka kabinet harus dari anggota partai mayoritas di Majelis Rendah.

Pada tahun 1764 Montesquieu (seorang ilmuwan Perancis) memuji sistem pemerintahan Inggris yang memberi kebebasan politik yang lebih luas karena ada *Separations of power* (pembagian kekuasaan) yang bisa mencegah munculnya pemerintahan Tirani. Menurut Montesquieu disetiap pemerintahan seharusnya diadakan pemisahan kekuasaan:

- ☆ Kekuasaan legislative untuk membuat dan mengesahkan undang-undang
- ☆ Kekuasaan eksekutif untuk menerapkan undang-undang
- ☆ Kekuasaan yudikatif untuk menafsirkan undang-undang.

Bila kekuasaan legislative dan eksekutif berada disatu tangan, maka akan mendorong timbulnya tirani dan tidak ada kebebasan lagi. Demikian juga bila kekuasaan legislative digabung dengan kekuasaan yudikatif maka akan

menimbulkan kekuasaan sewenang-wenang karena hakim bisa bertindak dengan kekerasan atau melakukan penindasan. Adanya pemisahan kekuasaan inilah yang memungkinkan tumbuhnya kebebasan politik di Inggris. Sebaliknya di Perancis tidak ada kebebasan politik karena Raja berkuasa secara absolute (sebelum revolusi).

Montesquieu memberikan kriteria untuk menilai sistem pemerintahan dengan melihat tinggi/rendahnya tingkat kebebasan politik yang diberikan kepada rakyatnya, serta tinggi/rendahnya tingkat pengawasan yang bisa diberikan dilakukan terhadap pelaksanaan pemerintah. Ilmuwan lain sering mengkritik Montesquieu yang dianggapnya salah dalam menganalisa politik Inggris pada pertengahan abad 18. pada saat itu sebenarnya sistem politik Inggris masih sulit dikatakan demokratis. Sampai dengan tahun 1832 hanya sekitar 5 % penduduk dewasa yang mempunyai hak pilih. Sistem pemilihan juga memberi peluang untuk melakukan pembelian kursi majelis secara meluas. Namun demikian kebaikan sistem Inggris memang bukan terletak pada sistem demokrasinya, tetapi karena adanya pembagian kekuasaan yang mencegah munculnya pemerintahan tirani atau pemerintahan yang sewenang-wenang.

Dalam perkembangannya rakyat semakin menuntut pelaksanaan demokrasi dan sistem Inggris semakin Demokratis. Pada tahun 1832 dan 1867 dikeluarkan *Reform Act* (undang-undang perbaikan) yang semakin membatasi praktek pemilihan umum yang korup, memperluas hak pilih serta perbaikan prosedur-prosedur parlemen lainnya. Dengan semakin luasnya hak pilih, tumbuh pula partai politik modern yang menerapkan disiplin yang tinggi pada anggotanya. Akibatnya posisi kabinet (pemerintah) semakin penting. Kabinet dibentuk oleh partai yang mempunyai kursi mayoritas di parlemen (Majelis Rendah). Sehingga pada akhirnya parlemen tidak lagi menjadi majikan dari kabinet, tapi sebaliknya kabinet menjadi majikan dari parlemen. Dengan demikian kekuasaan legislative dan kekuasaan eksekutif kembali dipegang oleh satu badan. Atau setidaknya tidak ada lagi pemisahan yang efektif antara fungsi eksekutif dengan fungsi legislative.

Seperti kata Montesquieu penggabungan dua lembaga oleh satu tangan ini akan mendorong kembalinya pemerintahan yang sewenang-wenang, atau mengurangi tingkat kebebasan politik rakyat. Namun demikian pemerintahan ini tetap disebut kabinet yang bertanggungjawab kepada parlemen, dan parlemen tetap melaksanakan fungsi pengawasan terhadap praktek pelaksanaan eksekutif. Tetap terdapat rantai pertanggungjawaban yang secara tidak langsung memaksa pemerintah beserta kabinetnya bertanggungjawab kepada rakyat (pemilih). Bila parlemen menarik kepercayaannya pada pemerintah, pemerintah akan tetap jatuh. Pemilihan umum yang diadakan secara berkala memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengganti wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen, atau mengganti pemerintah

BAB III

KONSTITUSI AUSTRALIA

Australia merupakan salah satu negara di dunia digolongkan sebagai negara yang unik. Terdapat banyak sekali hal-hal menarik yang dapat kita lihat apabila kita mencari tahu lebih jauh mengenai Australia. Hal paling khas dari Australia ialah sebagai satu-satunya negara di dunia yang juga melingkupi seluruh benua Australia. Selain itu, Australia juga sering dikenal sebagai “Eropa”nya Asia karena meskipun letak geografis Australia yang sangat berdekatan dengan kawasan Asia, namun Australia sendiri dihuni oleh kebanyakan masyarakat berkulit putih. Dan yang paling khas dari Australia itu sendiri ialah multikulturalisme yang terdapat di Australia. Konstitusi Australia merupakan konstitusi yang dapat dikategorikan sebagai konstitusi negara unik yang pernah ada dan terus diberlakukan hingga saat ini. Tidak ada satu negarapun yang mengimplementasikan uniknya konstitusi Australia.

Australia merupakan negara Commonwealth terhadap Britania Raya, namun juga menganut sistem federasi. Selain itu, Australia memberlakukan sistem pemerintahan parlementer. Karena memberlakukan sistem pemerintahan parlementer lah, oleh karena itu Australia otomatis menganut sistem bikameral dalam pemerintahan, yakni terdiri dari Senat dan House of Representative. Dan yang paling menarik dalam membahas mengenai konstitusi Australia itu sendiri ialah sumber konstitusi yang dianut oleh Australia terinspirasi dari empat negara lainnya, yaitu Inggris, Amerika Serikat (AS), Swiss, dan Canada

Salah satu keunikan Sistem Politik Australia adalah : Konstitusinya. Berbeda dengan negara-negara bekas jajahan Inggris, lazimnya menggunakan konstitusi tidak tertulis, tetapi Australia menggunakan konstitusi tertulis. Konstitusi Australia disebut *Commonwealth Constitution of Australia* atau Konstitusi Federal. Konstitusi merupakan bagian terpenting dalam sistem politik Australia, Mengapa? Karena : (a). Hampir seluruh aturan politik tertuang didalamnya, antara lain mengenai : bentuk negara, masalah kelembagaan politik, penyelenggaraan negara serta aturan-aturan politik tertuang secara rinci. (b). Menjadi pedoman bagi para politisi dan para penyelenggara lembaga-lembaga politik dan negara untuk melaksanakan peranan dan fungsi-fungsinya.

❖ Proses Pembentukan Konstitusi

Tujuan utamanya: diawali oleh munculnya berbagai harapan dan keinginan untuk melindungi dan memajukan kepentingan bersama dari masing-masing koloni Australia. Pada tahun 1891 ada 6 koloni yang berdiri sendiri-sendiri, dimana masing-masing koloni memiliki telah memiliki pemerintahan sendiri serta parlemen yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Satu-satunya kesamaan adalah menganut sistem pemerintahan WESTMINSTER, yang berlaku di Inggris, berikut lembaga-lembaga politiknya. Masing-masing koloni melaks. Kebijakan ekonomi dan politik luar negeri secara sendiri-sendiri,

sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, bahkan terjadi konflik kepentingan sampai perpecahan antar koloni.

Alasan pembentukan federal : (1). Melindungi perekonomian Australia melalui kebijakan pengetatan keuangan, dengan mendirikan bank persemakmuran (Commonwealth bank), (2). Masalah pertahanan, dimana pemerintahan koloni mengkhawatirkan kekuatan-kekuatan besar yang akan mengancam keamanan Australia. Ada indikasi bahwa negara besar seperti Jerman, Rusia, Perancis dan Jepang akan mendirikan koloni di pulau2 dekat Australia. (3). Masalah pembatasan imigrasi. Ada tuntutan mengenai perlunya satu kebijakan imigrasi untuk melindungi kaum buruh Australia. Terciptanya “Australia Putih”(white Australia policy), berdasarkan UU Imigrasi 1901. (4) Masalah nasionalisme. Perlu membangun jati diri dan harus bangga dengan jati dirinya.

Konstitusi disahkan oleh Parlemen Inggris dan diberlakukan sejak 01 Januari 1901. Terdapat 6 koloni(negara bagian) dengan otonomi penuh, yang tergabung dalam Pemerintah Persemakmuran (federasi) Australia. Seperti halnya Inggris, praktek pelaksanaan pemerintah yang bertanggungjawab/ *Responsible Government* di Australia juga dilakukan secara samar-samar. Konsep pemerintahan yang bertanggung jawab memang merupakan konsep yang samar-samar, karena tidak ditulis secara khusus dalam konstitusi, tetapi dilaksanakan melalui kebiasaan-kebiasaan dan pengertian-pengertian yang sudah biasa diterima oleh rakyat. Menurut kebiasaan yang sudah dimengerti oleh rakyat, dalam sistem pemerintahan seperti ini, parlemen akan melaksanakan fungsi pengawasan dan pembatasan praktek pelaksanaan pemerintah (termasuk dalam keuangan Negara)

Sekali lagi, aturan ini tidak dirinci secara jelas dalam konstitusi Australia, tetapi dijelaskan bahwa anggota kabinet harus diambil dari anggota parlemen. Parlemen Australia terdiri atas dua kamar, yaitu Senat dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Setiap Negara bagian mempunyai wakil di DPR minimal 5 orang atau sesuai dengan jumlah penduduknya masing-masing. Sementara didalam senat, setiap Negara bagian diwakili oleh 12 orang senator, ditambah 4 orang senator dari 2 wilayah territory. Sejak tahun 1985 jumlah seluruh senator adalah 76 orang.

Para pendiri Australia yang merancang konstitusi rupanya tidak merasa perlu untuk merinci masalah sistem pemerintahan yang bertanggungjawab (*Responsible Government*), pertanggungjawaban menteri, kabinet dan perdana menteri dalam konstitusi. Meski demikian pembahasan konstitusi tetap sangat diperlukan karena ia telah memberikan kerangka untuk memahami bekerjanya sistem politik. Konstitusilah yang mengatur tindakan-tindakan lembaga politik.

❖ **Proses Pembentukan Konstitusi**

Konstitusi Australia adalah seperangkat aturan dimana pemerintahan Australia diatur. Konstitusi Australia bergerak menuju federasi enam koloni berpemerintahan sendiri pada abad kesembilan belas. Sebelum tahun 1901, kekuasaan tertinggi atas koloni-New South Wales ini, Victoria, Queensland, Australia Barat, Australia Selatan dan Tasmania disandarkan dengan Inggris Parlemen di Westminster.

Selama abad 19 serangkaian konferensi yang diadakan untuk membahas federasi.

- a. Pada tahun 1895, enam perdana menteri koloni Australia sepakat untuk membentuk Konvensi Konstitusi baru oleh suara rakyat. Konvensi tersebut terpenuhi selama setahun selama 1897 dan 1898 Konstitusi telah disetujui dalam referendum yang diadakan antara 1898 dan 1900 Setelah ratifikasi oleh lima dari koloni (yaitu, semua kecuali Australia Barat), itu disajikan sebagai RUU untuk Parlemen Imperial dengan Alamat ke Queen Victoria, meminta diberlakukannya RUU.¹¹
- b. Pada tahun 1899 dan 1900 diadakan referendum di seluruh koloni untuk meminta pendapat rakyat terhadap konstitusi yang telah diputuskan dalam konvensi kedua tersebut. Adapun hasil referendum dari Konvensi Federal II.¹²

1. Hasil Referendum I (1898)

	For.	Against.	Majority.	Percentage of Voters to Electors on the Roll
New South Wales	71,595	66,228	5,367	49. 88
Victoria	100,520	22,099	78,421	48.94
Tasmania	11,797	2,716	9,081	46.5
South Australia	35, 800	17,320	18,480	39.44

2. Hasil Referendum II (1899)

	For.	Against.	Majority.
New South Wales (20 Juni 1899)	107,420	82,741	24,679
Victoria	152,653	9, 805	
Tasmania	13,437	791	
South Australia	65,990	17,053	
Queensland (September)	38,488	30,996	7,492

Pada tanggal 31 Juli 1900, rakyat Australia Barat di referendum memutuskan untuk bergabung dengan Commonwealth of Australia.¹³

- c. Akhirnya pada 17 September 1900, berdasarkan Proklamasi, Ratu menyatakan New South Wales, Victoria, Australia Selatan, Queensland, dan Tasmania, sepakat untuk bersatu dalam satu federal Commonwealth di bawah

¹¹ John Quick and Robert Garran, *The Annotated Constitution of the Australian Commonwealth* (Angus & Robertson, 1910)

¹² Sir, Moore W Harrison. *The Constitution of the Commonwealth of Australia*. (Sidney: University of Sydney Library, 2000). Pp. 56

¹³ Williams, John M. dan Clement Macintyre. *Commonwealth of Australia*.

Mahkota Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia, dan di bawah Konstitusi ini didirikan.

Konstitusi persemakmuran Australia adalah sebuah undang-undang yang disahkan oleh parlemen Inggris pada tahun 1900. konstitusi baru tersebut kemudian mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (pusat) dengan keenam Negara bagiannya yang pada prinsipnya diklasifikasikan kedalam 3 jenis kekuasaan:

1. kekuasaan Eksklusif ialah kekuasaan yang hanya bisa dijalankan oleh pemerintah federal. Misalnya masalah hubungan luar negeri, pertahanan, imigrasi, Bea Cukai, dan pajak.
2. kekuasaan bersama ialah kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah federal bersama-sama dengan pemerintah negara-negara bagian, maka perundang-undangan pemerintah federal yang dimenangkan.
3. kekuasaan sisa ialah semua kekuasaan yang tidak tercantum dalam konstitusi, dan dijalankan oleh Negara bagian. Misalnya pendidikan, keamanan/kepolisian, perumahan, kesenian dan lain-lain.

Konstitusi bisa dirubah melalui referendum. Usulan perubahan undang-undang harus memperoleh persetujuan dari senat dan Majelis Rendah terlebih dulu sebelum dimintakan pendapat rakyat melalui referendum. Namun demikian perubahan undang-undang melalui referendum tidak efektif karena rakyat cenderung bersifat konservatif. Sejak 1900 sampai kini telah diadakan 48 kali referendum, tetapi hanya delapan kali saja yang berhasil mengubah konstitusi. Dalam prakteknya usul perubahan konstitusi hanya akan berhasil jika memperoleh dukungan luas dari pemerintah, oposisi dan pemerintah Negara-negara bagian.

Cara yang lebih efektif dalam merubah undang-undang ialah dengan merubah penafsirannya. Mahkamah Agung yang beranggotakan 7 orang hakim agung berhak untuk menafsirkan undang-undang, meskipun mereka tidak berhak mengubah kata-kata dalam undang-undang tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir ini Mahkamah Agung telah banyak mengeluarkan penafsiran hukum yang pada prinsipnya memperbesar kekuasaan pemerintah federal. Jadi seperti halnya di Inggris, sampai saat ini Australia juga tidak mempunyai konstitusi yang kuat yang mengatur kekuasaan pemerintah.

❖ **Sumber Konstitusi Australia**

Australia merupakan salah satu negara yang mengadopsi dari beberapa negara lain dalam struktur pemerintahannya. Bentuk pemerintahan Australia yaitu Monarki Konstitusional dan sistem pemerintahan yaitu parlementer yang diadopsi dari Inggris. Ratu sebagai simbol, tetapi yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri.

Dari bentuk pemerintahannya, Australia mengadopsi dari Amerika Serikat yang berbentuk Federalisme dan juga terdapat pemisahan di legislative dengan adanya Senat dan *House of Representative*. Senat adalah 'majelis tinggi' dan mewakili enam negara bagian Australia dan dua wilayah pemerintahan sendiri. Semua negara, terlepas dari populasi, memilih dua belas senator, sedangkan setiap wilayah memilih dua. Ada 76 Senator secara keseluruhan. Pemilihan Senat

biasanya diadakan setiap tiga tahun. Sedangkan House of Representative Australia dibagi menjadi 150 pemilih tunggal anggota, masing-masing mewakili sekitar 80-90.000 pemilih dan masing-masing dengan Anggota DPR. Setiap negara memiliki sejumlah pemilih sebanding dengan penduduknya. Negara terbesar, New South Wales, memiliki empat puluh sembilan pemilih sedangkan yang terkecil, Tasmania, memiliki lima. Pemilihan untuk DPR biasanya diadakan setiap tiga tahun.¹⁴ Yang terakhir, Australia mengadopsi dari Swiss yang ditandai dengan kebutuhan referendum (pemungutan suara) dalam Konstitusinya.¹⁵

❖ **Distribusi Kekuasaan Australia**

Australia merupakan negara persemakmuran yang menganut konstitusi Monarki Konstitusional dimana sistem pemerintahannya berbentuk parlementer. Persemakmuran Australia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara-negara lainnya, bahkan sekalipun sangat berbeda dengan negara persemakmuran lainnya.

Persemakmuran Australia menggabungkan dua bentuk sistem pemerintahan, yakni pemerintahan parlementer dan sistem federal yang biasanya berlaku di Amerika Serikat. Ketika Australia memutuskan untuk menganut sistem parlementer yang dianut oleh Australia, secara otomatis Australia langsung terhubung pula dengan sistem parlementer Britania Raya. Ratu Elizabeth II menjadi ratu bagi Australia. Namun, dalam hal ini, Ratu Elizabeth memiliki wakil yang disebut dengan Gubernur Jenderal Australia.

Sementara untuk sistem federasi yang dianut oleh Australia pula, membuat sistem distribusi kekuasaan Australia terbagi menjadi tiga cabang, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif sendiri menganut sistem parlemen bikameral yang berisikan oleh Ratu Britania Raya, diwakilkan oleh Gubernur Jenderal, Senat, dan *House of Representative*.

1) Kekuasaan Legislatif/ Parlemen

Kekuasaan legislatif dari negara persemakmuran harus tetap berada dalam ruang lingkup Parlemen Federal. Di dalam sebuah parlemen menganut sistem bikameral yang terdiri dari Ratu atau Gubernur Jenderal, Senat, dan *House of Representative*, yang kemudian disebut dengan Parlemen Persemakmuran.¹⁶

a. Gubernur Jenderal

Seorang Gubernur Jenderal merupakan perwakilan dari Ratu Elizabeth II yang sekarang masih menjabat di Britania Raya. Seorang Gubernur Jenderal sendiri ditunjuk oleh Ratu.¹⁷ Penjelasan mengenai ratu dan gubernur jenderal akan dibahas dalam badan eksekutif.

b. Senat

Senat dalam pemerintahan Australia harus tersusun atas Senator dari masing-masing negara bagian yang secara langsung dipilih oleh warga negara

¹⁴ Parliament of Australia, *Parliamentary Handbook of the 42nd Parliament*, Parliamentary Library, 2007. Online version available at <http://www.aph.gov.au/library/handbook/>

¹⁵ Maynes, Sue. *The Commonwealth of Australia Constitution v Local Council*. 2013.

¹⁶ Helen, Irving, *Five Things to Know About the Australian Constitution*. (Cambridge)

¹⁷ *Ibid*. Pp. 119

bagian tersebut melalui sistem voting dan sebaliknya, parlemen menyediakan satu hak pilih pada rakyat.¹⁸

Sama halnya seperti prinsip federasi dalam konstitusi yang dianut oleh negara seperti Amerika dan Canada, setiap negara bagian original memiliki perwakilan yang sama di dalam Senat. Namun, jumlah ini dapat berubah hanya dengan sebuah amandemen konstitusi dan hanya jika para pemilih negara bagian berkeinginan perwakilannya untuk dikurangi. Misalnya, masing-masing negara bagian memiliki enam member, tetapi parlemen mungkin dapat menambah jumlahnya.¹⁹

c. *House of Representative*

Jika di dalam Senat merupakan kamar bagi federal, maka dalam *House of Representative* merupakan kamar bagi nasional (negara bagian). Berbeda halnya dengan sistem pemilihan Senat, jumlah anggota dari *House of Representative* diatur dalam dua kondisi, yaitu pendistribusian bangku DPR, dan hubungan *House* terhadap Senat.²⁰ Setiap *House of Representative* bisa melanjutkan tiga tahun sejak pertemuan pertama dan tidak lebih, tetapi dapat juga dihentikan oleh Gubernur Jenderal.²¹

Parlemen memiliki kekuasaan eksklusif untuk membuat hukum demi perdamaian, tata tertib, dan pemerintahan Commonwealth yang baik yang berhubungan dengan:²²

- (i) perdagangan dan perniagaan dengan negara-negara lain, dan di antara negara bagian;
- (ii) perpajakan; dengan tidak mendiskriminasi antara negara pusat atau negara bagian;
- (iii) produksi atau ekspor barang, dengan penetapan yang harus seragam di seluruh Commonwealth;
- (iv) peminjaman uang dari kredit umum Persemakmuran;
- (v) pos, telegraf, lewat telepon, dan lainnya seperti jasa;
- (vi) pertahanan angkatan laut dan militer pemerintahan persemakmuran dan beberapa negara bagian, serta memiliki kontrol atas kekuatan untuk melaksanakan dan memelihara hukum Commonwealth;
- (vii) mercusuar, kapal suar, rambu dan pelampung;
- (viii) pengamatan astronomi dan meteorologi;
- (ix) karantina;
- (x) perikanan di perairan Australia di luar batas teritorial;
- (xi) sensus dan statistik;
- (xii) mata uang, uang logam, dan alat pembayaran yang sah;

¹⁸ *Ibid.* Pp. 120

¹⁹ Sir, Moore W Harrison. *The Constitution of the Commonwealth of Australia*. (Sidney: University of Sydney Library, 2000). Pp.95

²⁰ *Ibid.* Pp. 99

²¹ Irving, *Op. Cit.* Pp. 127

²² Commonwealth of Australia Constitution Act.

- xiii) perbankan, selain perbankan negara; juga Perbankan negara di luar batas negara yang bersangkutan, penggabungan bank, dan masalah uang kertas;
- (xiv) asuransi, selain asuransi negara ; juga asuransi negara di luar batas negara yang bersangkutan;
- (xv) bobot dan ukuran;
- (xvi) wesel dan surat pembayaran;
- (xvii) pailit dan insolvensi;
- (xviii) hak cipta, paten penemuan dan desain, dan merek dagang;
- (xix) naturalisasi dan orang asing;
- (xx) perusahaan asing, dan perdagangan atau perusahaan keuangan terbentuk di dalam batas-batas Commonwealth;
- (xxi) perkawinan;
- (xxii) perceraian dan penyebab perkawinan; dan sehubungan dengan hal tersebut, hak-hak orang tua, dan hak asuh dan perwalian bayi;
- (xxiii) ketidaksahan dan pensiun hari tua
- xxiiiA) penyediaan tunjangan bersalin, pensiun janda, wakaf anak, pengangguran, farmasi, sakit dan manfaat rumah sakit, pelayanan medis dan gigi (tapi tidak untuk bentuk wajib militer sipil), beasiswa dan tunjangan keluarga;
- (xxiv) layanan dan eksekusi di seluruh Persemakmuran proses perdata dan pidana dan putusan pengadilan negara-negara bagian;
- (xxv) pengakuan di seluruh Persemakmuran hukum, akta publik dan catatan, dan proses peradilan negara-negara bagian;
- (xxvi) orang dari setiap ras bagi siapa itu dipandang perlu untuk membuat undang-undang khusus;
- (xxvii) imigrasi dan emigrasi;
- (xxviii) masuknya penjahat;
- (xxix) urusan eksternal;
- (xxx) hubungan Persemakmuran dengan pulau-pulau di Pasifik;
- (xxxi) akuisisi properti hanya pada kondisi dari setiap Negara atau orang untuk tujuan apapun dalam hal Parlemen memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang;
- (xxxii) kontrol kereta api sehubungan dengan transportasi untuk tujuan angkatan laut dan militer dari Persemakmuran;
- (xxxiii) akuisisi, dengan izin dari Negara, dari setiap kereta api Negara dengan persyaratan diatur antara Persemakmuran dan Negara;
- (xxxiv) konstruksi kereta api dan penyuluhan di setiap Negara dengan persetujuan Negara itu;
- (xxxv) konsiliasi dan arbitrase untuk pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial memperluas melampaui batas satu negara;
- (xxxvi) masalah dalam hal Konstitusi ini membuat ketentuan sampai Parlemen menetapkan lain;
- (xxxvii) hal sebagaimana dimaksud Parlemen Persemakmuran oleh Parlemen atau Parlemen Negara atau Serikat, tapi begitu bahwa hukum hanya akan diberikan kepada negara-negara yang dengan Parlemen masalah ini disebut, atau yang kemudian mengadopsi hukum;

- (xxxviii) latihan dalam Persemakmuran, atas permintaan atau dengan persetujuan Parlemen semua negara bagian secara langsung yang bersangkutan, kekuatan apapun yang dapat di pembentukan Konstitusi ini hanya dapat dilaksanakan oleh Parlemen Inggris atau oleh Dewan Federal Australasia;
- (xxxix) masalah terkait dengan eksekusi terhadap kekuasaan apapun dipegang oleh Konstitusi ini di Parlemen atau salah satu Dewan, atau Pemerintah Persemakmuran, atau Federal Peradilan, atau dalam departemen atau petugas dari Commonwealth²³

2) Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif Commonwealth ditetapkan oleh ratu yang terlebih dahulu telah dilatih dan dirujuk oleh Gubernur Jenderal selaku perwakilan ratu. Terdapat sebuah Council eksekutif federal untuk menasihati Gubernur-Jenderal dalam memerintah Commonwealth dan anggota council dipilih oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal bisa menunjuk pegawai untuk mengatur departemen negara Commonwealth tertentu.

3) Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif Commonwealth ditetapkan dalam Pengadilan Tertinggi Federal yang disebut sebagai *High Court of Australia* dan dalam beberapa pengadilan federal tertentu yang dibuat oleh parlemen. *High Court* dibangun pada 1903 dimana memiliki kekuasaan untuk mempertimbangkan perundang-undangan Commonwealth maupun negara apakah patut untuk disahkan atau tidak. Selain itu fungsi pokok dari High Court Australia ialah untuk menginterpretasikan Konstitusi dan untuk menyelesaikan masalah yang ada.²⁴ Pengadilan Tinggi (*High Court*) terdiri dari seorang ketua Mahkamah, dan hakim-hakim lainnya tidak kurang dari dua hakim. Para hakim Pengadilan Tinggi diangkat oleh Gubernur Jenderal dan hanya dapat dipindahkan oleh Gubernur Jenderal. Dan batas maksimum usia seorang Hakim berdasarkan hukum yangtelah ditetapkan kurang dari 70 tahun²⁵

❖ Garis Besar Konstitusi

Konstitusi Australia terdiri dari delapan bab

Bab Pertama tentang Parlemen

Merupakan Bab terpanjang yang meliputi hampir setengah dari jumlah seluruh pasal konstitusi (60 dari 128 pasal)

Bagian pertama berisi ttg penjelasan umum parlemen, bahwa: (a). Pasal 1 UU harus disahkan parlemen yg meliputi ratu, majelis tinggi(senat) dan majelis rendah (house of representatives). (b).Pasal 2 ttg posisi gubernur jenderal yang merup perwakilan dari ratu Inggris. Pasal ini menegaskan bhw kerajaan Inggrislah yang mengangkat gub-jend, akan tetapi melalui konvensi keputusan pengangkatan dibuat atas saran pemerintah yang berkuasa. (c).Parlemen hrs bersidang setiap

²³ Irving, *Op. Cit.* Pp. 131-134

²⁴ *Australia's Constitution*.2010. Pp. 14-16

²⁵ Irving, *Op. Cit.* Pp. 139-141

tahun(pasal 6), dan sidang sekurang-kurangnya 30 hari setelah berakhirnya pemilu.

Bagian kedua mengenai senat (majelis tinggi). Bagian ini terutama berkaitan dengan pemilu bagi senator(pasal 7-16), cara-cara senat melakukan tugasnya(pasal 17-8, 22-3), serta masa jabatan, penempatan dan pengunduran diri para senator(pasal 19-21)

Bagian ketiga mengenai *House of Representatif* (majelis rendah.) Bagian ini menyediakan pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilu langsung untuk memilih anggota-anggota HoR untuk masa jabatan maksimum tiga tahun, serta prosedur-prosedur yang pasti dalam melaksanakan kegiatan HoR. Selanjutnya dalam pasal 24 ditegaskan pula bahwa jumlah anggota HoR sebanyak-banyaknya dua kali anggota senat.

Bagian keempat hal-hal yang mempengaruhi kedua majelis. Pasal 41 mengatur hak-hak pemilih, kemudian mengenai kualifikasi dan diskualifikasi anggota kedua majelis(pasal 43-6), sengketa dalam pemilu (pasal 47), hak-hak istimewa parlemen(pasal 49), serta ketentuan yang mengizinkan kedua majelis untuk membuat peraturan tata tertib, atau yang disebut dengan *standing order*(pasal 50).

Bagian Kelima jantung konstitusi Australia. Pasal-pasalnya mencerminkan adanya distribusi kekuasaan: a.)Antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, b.). Antara HoR dan senat. Dalam pasal 51 dijelaskan bahwa parlemen federal mempunyai kekuasaan untuk membuat perundang-undangan dalam bidang-bidang, yang dirinci dalam 40 ayat, antara lain termasuk perdagangan dan perniagaan antar negara bagian dan luar negeri, perpajakan, pelayanan jasa, pos dan telegraf, pertahanan , mata uang, dan lain-lain. Sebagian besar bidang yang tertuang dalam pasal 51 ini dikategorikan sebagai kekuasaan eksklusif bagi parlemen federal (*exclusive power*)dan beberapa lainnya diklasifikasikan sebagai kekuasaan bersama antara parlemen-parlemen federal dan negara bagian(*concurrent powers*). Sedangkan semua bidang lainnya, yang tidak disebutkan dalam pasal tersebut, diklasifikasikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh parlemen negara bagian(*residual power*). Yang perlu dicatat mengenai hal ini adalah bahwa untuk mengatasi

Bab Kedua berisi ketentuan mengenai Pemerintahan Eksekutif.

Pemerintahan Eksekutif memiliki persoalan rumit dalam pelaksanaannya, terutama mengenai kedudukan Gubernur Jenderal dan Dewan eksekutif(pemerintah federal). Bab ini menempatkan kekuasaan eksekutif federal di tangan ratu dan gubernur jenderal(pasal 61). Gubernur Jenderal juga berwenang mengangkat (dan memberhentikan) Dewan eksekutif, yang tugasnya memberi saran kepadanya(pasal 62-3). Ia juga membentuk departemen-departemen dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggungjawab terhadap departemen-departemen tersebut dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggungjawab terhadap departemen-departemen tersebut(pasal 64). Pasal 68 berbunyi bahwa gubernur jenderal adalah panglima tertinggi

angkatan bersenjata dan kemudian dapat menetapkan pengalihan beberapa departemen dari negara bagian pada pemerintah federal.²⁶

Interpretasi harfiah dari pasal-pasal ini, terutama pasal 62 telah menimbulkan keraguan, yang membawa pada suatu krisis politik di Australia.²⁷ Pasal tersebut sebenarnya tidak dimaksudkan untuk bertentangan dengan konvensi yang berlaku mengenai pemerintahan yang bertanggungjawab. Berdasarkan konvensi segala keputusan eksekutif dibuat oleh Kabinet dan Perdana Menteri, baru kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal didalam Dewan eksekutif. Peristiwa Nopember 1975, dimana PM Whitlam dipecat oleh Gubernur jenderal Sir John Kerr, memperlihatkan adanya kesimpangsiuran mengenai interpretasi tersebut.

Bab Ketiga masalah peradilan

Bab ini menetapkan pembentukan Pengadilan Tinggi, serta memberikan kekuasaan kepada parlemen untuk menciptakan pengadilan-pengadilan federal lainnya(pasal 71) dan merinci cara-cara pengangkatan para hakim serta syarat-syarat pengangkatan mereka (pasal 72). Pasal 73 memberikan kewenangan pada Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan banding, baik yang diajukan dari pengadilan federal maupun negara bagian dan selanjutnya Pengadilan Tinggi berwenang menyetujui usulan banding yang diajukan kepada Privy Council(di Inggris) berdasarkan persyaratan tertentu.

Konstitusi juga menetapkan yurisdiksi kekuasaan pengadilan Tinggi yang sejati, yaitu diwilayah mana pengadilan Tinggi dapat mendengarkan perkara banding(pasal 75-6), dan membatasi kekuasaan parlemen dalam hubungannya dengan yurisdiksi federal(pasal 77-8). Pengadilan Tinggi juga menyediakan kemungkinan pengadilan melalui sistem juri atas dakwaan melakukan pelanggaran melawan pemerintah federal(pasal 80).²⁸

Bab keempat masalah perdagangan dan keuangan

Bab ini berisi tentang persyaratan mengenai cara mempertanggungjawabkan keuangan oleh pemerintah federal(pasal 81-3). Salah satu pasal yang penting adalah pemerintah federal dapat memutuskan seberapa besar uang yang dikumpulkan oleh pemerintah federal yang dikembalikan kepada negara bagian berdasarkan pasal 87 telah ditetapkan proporsinya, yaitu tiga perempat kepada negara bagian dan seperempat kepada pemerintah federal hanya untuk 10 tahun pertama federasi.

Bab ini juga membahas pengaturan-pengaturan keuangan lainnya yang berusaha menjamin bahwa semua negara bagian diperlakukan secara adil oleh pemerintah federal, serta memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah federal dalam masalah-masalah bea cukai dan perpajakan. Pasal 92 menyediakan

²⁶ John M. Williams dan Clement Macintyre. *Commonwealth of Australia*. Sidney: University of Sydney Library, 2000, hal. 23

²⁷ Dennis Woodward, Andrew Parkin dan John Summer(Eds), *Government, Politics and Power in Australia*, Longman Cheshire, Melbourne, 1987, hal 50-67

²⁸ Sir Moore W Harrison, . *The Constitution of the Commonwealth of Australia*. University of Sydney Library, 2000, hal 45

ketetapan yang mengatur perdagangan bebas di wilayah Australia, serta memperbolehkan pemerintah federal menghibahkan uang tambahan kepada negara bagian bila syaratnya dipandang cocok(pasal 96).

Konstitusi mengizinkan pemerintah federal untuk mengambil alih hutang pemerintah-pemerintah federal (pasal 105) dan memperbolehkan pemerintah federal dan negara bagian membuat perjanjian peminjaman uang (pasal 105A, yang ditambahkan setelah referendum 1928). Akan tetapi terdapat ketidaksepakatan antara pemerintah negara bagian dan pemerintah federal mengenai beberapa ketentuan bab ini, terutama setelah keputusan pengadilan tinggi yang mengizinkan pemerintah federal meningkatkan kontrol terhadap masalah keuangan. Pasal 92 dimaksudkan untuk menjamin tidak ada hambatan bea cukai dalam perdagangan diantara negara bagian. Tetapi sampai 1988 pasal itu diinterpretasikan oleh pengadilan tinggi dengan cara sedemikian rupa sehingga membatasi pengawasan pemerintah federal terhadap perusahaan-perusahaan yang berdagang diantara negara bagian. Hal ini termasuk semua perusahaan besar.

Bab kelima tentang negara-negara bagian yang menyatakan bahwa semua koloni menjadi bagian dari federasi Australia.

Pasal 106, yang mengawali aturan mengenai negara bagian, mengatakan bahwa konstitusi yang berlaku di negara bagian tetap dipertahankan, kecuali jika ada aturan-aturan yang dipengaruhi oleh konstitusi federal, disamping juga tetap mempertahankan kekuasaan parlemen dan UU negara-negara bagian(pasal 107-8). Sementara itu, ditetapkan pula konstitusi federal diberlakukan terhadap UU negara bagian yang tidak konsisten dengan UU federal(pasal 109). Pasal 111 menetapkan parlemen negara -negara bagian harus menyerahkan sebagian wilayahnya kepada pemerintah federal, tetapi negara-negara bagian dapat memungut pajak untuk tujuan impor ataupun ekspor (pasal 112).

Selanjutnya ada peraturan minuman-minuman keras menjadi subyek UU negara bagian(pasal 113), dan negara-negara bagian dilarang memiliki angkatan bersenjata serta memungut pajak atas harta benda federal tanpa seijin pemerintah federal(pasal 114) dan pasal 115 dikatakan bahwa negara-negara bagian dilarang mencetak mata uang koin. Parlemen federal juga dilarang membuat UU pembentukan agama atau melarang kebebasan beragama atau memaksakan percobaan atas agama(pasal 116).

Pasal 117 tidak ada diskriminasi penduduk suatu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Pasal 118 menyatakan UU negara bagian harus diakui diseluruh negara bagian dan federal untuk melindungi negara bagian dari invasi atau kekerasan domestik. Negara-negara bagian dapat melakukan penahanan terhadap orang-orang yang didakwa melakukan pelanggaran terhadap UU federal(pasal 120).²⁹

Bab keenam tentang negara-negara bagian baru.

Mengatur ketentuan mengenai pendaftaran atau pembentukan negara bagian baru dalam federasi (pasal 121). Pasal 122 menegaskan bahwa pemerintah federal mempunyai kekuasaan penuh terhadap wilayah-wilayah yang sudah diserahkan oleh negara-negara bagian kepada pemerintah federal, termasuk didalamnya

²⁹

Ibid

kemampuan mereka untuk diwakili diparlemen federal. Konstitusi juga mengatur cara-cara mengubah atau menentukan batas-batas negara bagian atau negara bagian yang baru dibentuk.³⁰

Bab ketujuh mengatur masalah lain-lain

Terdiri atas dua pasal. Pertama, pasal 125, yang menetapkan lokasi kedudukan pemerintahan(*seat of Government*), yang ketika konstitusi dibentuk bertempat di Melbourne dan saat ini berada di Canberra(teritori ACT). Pasal 126 mengatur pemberian kewenangan kepada gubernur jenderal untuk mengangkat para wakilnya. Ketika konstitusi dirumuskan, ada satu pasal lagi dalam bab ini yang menetapkan kaum Aborigin tidak terhitung sebagai rakyat dari Persemakmuran Australia(pasal 127).

Pasal 128, menegaskan bahwa konstitusi dapat diubah melalui referendum.

Bab kedelapan mengatur perubahan konstitusi.

Referendum adalah suatu proses pemungutan suara untuk mengambil suatu keputusan, terutama keputusan politik dimana keputusan tersebut dapat memengaruhi suatu negara secara keseluruhan. Konstitusi yang ada di Australia juga menyediakan mekanisme referendum ini. Referendum dapat diterima bila mayoritas pemilih mendukung isi dari referendum yang diajukan. Agar referendum dapat diterima di dalamnya haruslah terdapat suara empat negara federal dari enam negara federal yang ada di Australia. Selain itu, sebelum referendum dapat terjadi, parlemen pun harus mampu melewati rancangan undang-undang yang berisi perubahan yang disarankan oleh konstitusi.³¹

Setelah berlakunya konstitusi Australia di tahun 1901, telah terjadi 42 referendum³² yang telah diajukan oleh pemerintah Australia. Dari 42 referendum, hanya 8 referendum yang diterima dan mendapat dukungan masyarakat Australia. Referendum yang diterima adalah referendum yang dilaksanakan pada 1906, 1909, 1928, 1946, 1967, 1998, dan 1999³³.

Disini kami berikan list mengenai referendum yang pernah terjadi di Australia, termasuk referendum yang ditolak oleh parlemen dan jugamasyarakat Australia³⁴ :

Referendum Dates and Results 1906–1988

	Issue of Writ	Polling Day	Result
Senate Elections	8 November 1906	12 December	Carried

³⁰ Irving, Helen. *Five Things to Know About the Australian Constitution*. Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

³¹ Williams, M. John and Macintyre Clement. “*Commonwealth of Australia*”.

³² 1999 referendum report and statistic background. Terdapat di http://www.aec.gov.au/elections/referendums/1999_Referendum_Reports_Statistics/Referendum_Background.htm#results. Diakses pada 8 Oktober 2014 pukul 23.00

³³ Irving, Helen. *Five Things to Know About the Australian Constitution*. (Cambridge : Cambridge University Press, 2004), Pp. 109

³⁴ *ibid*

Referendum Dates and Results 1906–1988

	Issue of Writ	Polling Day	Result
		1906	
Finance	28 February 1910	13 April 1910	Not Carried
State Debts	28 February 1910	13 April 1910	Carried
Legislative Powers	15 March 1911	26 April 1911	Not Carried
Monopolies	15 March 1911	26 April 1911	Not Carried
Trade and Commerce	24 April 1913	31 May 1913	Not Carried
Corporations	24 April 1913	31 May 1913	Not Carried
Industrial Matters	24 April 1913	31 May 1913	Not Carried
Railway Disputes	24 April 1913	31 May 1913	Not Carried
Trusts	24 April 1913	31 May 1913	Not Carried
Nationalisation of Monopolies	24 April 1913	31 May 1913	Not Carried
Legislative Powers	3 November 1919	13 December 1919	Not Carried
Nationalisation of Monopolies	3 November 1919	13 December 1919	Not Carried
Industry and Commerce	26 July 1926	4 September 1926	Not Carried
Essential Services	26 July 1926	4 September 1926	Not Carried
State Debts	9 October 1928	17 November 1928	Carried
Aviation	4 February 1937	6 March 1937	Not Carried
Marketing	4 February 1937	6 March 1937	Not Carried
Post-war Reconstruction and Democratic Rights	4 July 1944	19 August 1944	Not Carried
Social Services	21 August 1946	28 September 1946	Carried

Referendum Dates and Results 1906–1988

	Issue of Writ	Polling Day	Result
Organised Marketing of Primary Products	21 August 1946	28 September 1946	Not Carried
Industrial Employment	21 August 1946	28 September 1946	Not Carried
Rent and Prices	12 April 1948	29 May 1948	Not Carried
Powers to Deal with Communists and Communism	10 August 1951	22 September 1951	Not Carried
Parliament	28 April 1967	27 May 1967	Not Carried
Aboriginals	28 April 1967	27 May 1967	Carried
Prices	12 November 1973	8 December 1973	Not Carried
Incomes	12 November 1973	8 December 1973	Not Carried
Simultaneous Elections	20 April 1974	18 May 1974	Not Carried
Mode of Altering the Constitution	20 April 1974	18 May 1974	Not Carried
Democratic Elections	20 April 1974	18 May 1974	Not Carried
Local Government Bodies	20 April 1974	18 May 1974	Not Carried
Simultaneous Elections	27 April 1977	21 May 1977	Not Carried
Senate Casual Vacancies	27 April 1977	21 May 1977	Carried
Referendums – Territories	27 April 1977	21 May 1977	Carried
Retirement of Judges	27 April 1977	21 May 1977	Carried
Terms of Senators	26 October 1984	1 December 1984	Not Carried
Interchange of Powers	26 October 1984	1 December 1984	Not Carried
Parliamentary Terms	25 July 1988	3 September 1988	Not Carried
Fair Elections	25 July 1988	3 September 1988	Not Carried
Local Government	25 July 1988	3 September 1988	Not Carried

Referendum Dates and Results 1906–1988

	Issue of Writ	Polling Day	Result
Rights and Freedoms	25 July 1988	3 September 1988	Not Carried
Republic	1 October 1999	6 November 1999	Not Carried
Preamble	1 October 1999	6 November 1999	Not Carried

❖ Contoh Kasus

LEMBAGA EKSEKUTIF PARLEMEN

Secara formal Australia diperintah oleh seorang Gubernur Jenderal yang bertindak selaku wakil Ratu Inggris di Australia. Gubernur Jenderal yang juga bertindak selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri, tetapi dalam prakteknya rakyat Australia tidak pernah mau mengakui kekuasaan Gubernur Jenderal. Mereka menganggapnya hanya sebagai kepala Negara simbolis saja.

Seperti halnya di Inggris, rakyat Australia berpendapat bahwa mereka mempunyai pemerintah yang bertanggungjawab kepada parlemen yang merupakan badan perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Perdana Menteri beserta menteri-menteri kabinet harus menjadi anggota parlemen. Sementara kabinet dibentuk oleh partai politik atau koalisi partai yang mempunyai suara mayoritas dalam parlemen.

Kedudukan Perdana Menteri beserta kabinetnya tergantung dari dukungan parlemen, karena ia harus bisa meloloskan RAPBN (Rancangan Anggaran dan Belanja Negara) yang disetujui oleh Parlemen. Jika pemerintah kehilangan dukungan parlemen, terutama sekali Majelis Rendah, maka sesuai dengan konvensi ia harus mengundurkan diri. Aturan-aturan diatas sebenarnya tidak dicantumkan dalam konstitusi. Perdana Menteri, kabinet serta hubungan pertanggungjawaban seperti diatas, tidak disebut dalam konstitusi. Aturan demokrasi parlementer sebenarnya sangat samar-samar yang hanya disandarkan pada konvensi atau kebiasaan yang diterima oleh masyarakat.

Ketidakjelasan aturan demokrasi parlementer model Inggris ini sering menimbulkan kontroversi. Misalnya, pada waktu Gubernur Jenderal Sir John Kerr memecat PM. Gough Whitlam tahun 1975. saat itu Whitlam tidak berhasil memperoleh dukungan senat untuk mengesahkan RAPBN. Tanpa pengesahan RAPBN pemerintah tidak bisa berjalan karena RAPBN merupakan biaya operasional pemerintah.

Menurut Whitlam pemerintah hanya bergantung pada dukungan Majelis Rendah (menurut konvensi), sementara menurut interpretasi John Kerr dan partai liberal pemerintah harus bergantung pada Majelis Rendah bersama-sama dengan senat.

MENINGKATNYA KEKUASAAN EKSEKUTIF

Dalam beberapa dekade terakhir ini telah terjadi peningkatan kekuasaan eksekutif yang semakin mencolok, sementara fungsi parlemen justru mengalami penurunan. Secara formal parlemen berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga pembuat undang-undang. Penurunan fungsi parlemen terutama disebabkan karena partai-partai politik yang menjalankan disiplin yang tinggi telah mendominasi proses legislative sehingga mereka telah membiarkan saja eksekutif menjalankan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh parlemen.

Jarang sekali terjadi seorang menteri yang memberikan tanggungjawab individual secara langsung kepada parlemen. Kecuali jika terjadi penyelewengan yang sangat mencolok. Sementara itu pemerintah bisa menghindarkan diri untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya, karena ia bisa mengandalkan kedudukannya yang mayoritas diparlemen. Selain itu, tugas-tugas pemerintah yang semakin luas dan komplek juga mengakibatkan parlemen tidak mampu lagi melakukan fungsi kontrol seperti yang diharapkan.

Sebaliknya Perdana Menteri beserta Menteri-menteri kabinetnya mempunyai pengaruh yang semakin dominan. PM. Whitlam, Fraser maupun Hawke sama-sama mempunyai ketrampilan politik yang tinggi sehingga mampu mengendalikan kabinetnya. Mereka mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kebijaksanaan Negara.

Namun demikian kemampuan mereka akan berkurang, dikala kedudukan mereka terancam oleh oposisi, perpecahan partai, atau saat-saat menjelang pemilihan Umum dimana mereka sangat memerlukan setiap dukungan kelompok-kelompok politik yang ada.

❖ Perubahan Konstitusi Melalui Referendum

Australia sebagai sebuah negara yang berdaulat tentunya memiliki sebuah konstitusi. Secara umum konstitusi adalah dasar negara yang dijadikan negara tertentu sebagai landasan dalam kehidupan bernegara dalam upaya mencapai kemajuan. Australia merupakan negara yang unik di mana Australia mengadaptasi dua nilai dalam sistem pemerintahan mereka yang berasal dari Amerika Serikat dan Inggris. Tidak hanya sistem pemerintahan, konstitusi Australia juga dipengaruhi oleh dua negara tersebut. Berbeda dengan Inggris yang tidak memiliki Undang-undang Dasar (UUD) Tertulis, Australia memiliki UUD Tertulis yang terdiri atas sembilan bab.

Berbicara mengenai proses pembentukan konstitusi, Australia memerlukan proses yang cukup panjang untuk bisa mencapai konstitusinya saat ini. Konstitusi Australia dimulai untuk terbentuk pada Konvensi 1891. Proses pembentukan konstitusi Australia ini juga menjadi tonggak awal berdirinya negara Australia yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1891, perwakilan dari tiap-tiap koloni dan teritori di Australia berkumpul di Australia Selatan untuk menghadiri rapat besar dengan agenda pembentukan konstitusi atas dasar semangat persatuan dan kesatuan koloni. Hanya saja, konvensi tersebut gagal yang disebabkan oleh beberapa hal, yakni: Benturan kepentingan untuk tetap memelihara ikatan dengan Inggris atau ingin membentuk pemerintahan federal

yang bertanggung jawab. Benturan dengan pihak yang ingin membentuk pemerintahan federal dengan pihak yang ingin tetap mempertahankan kekuasaan dan identitas masing-masing koloni. Keseimbangan antara koloni yang berpenduduk padat dan kaya (Victoria dan New South Wales) dengan koloni kecil dan miskin (Tasmania dan Australia Selatan).³⁵

Perbedaan latar belakang para delegasi di mana:³⁶ 1) Delegasi Liberal menghendaki adanya perubahan dan perluasan kekuasaan rakyat; 2) Delegasi Tuan Tanah yang menghendaki pembatasan hak pilih dan kekuasaan federal; dan 3) Delegasi Koloni Kecil dan Miskin (Tasmania dan Australia Selatan) yang menghendaki adanya perlindungan dari dominasi koloni Victoria dan New South Wales. Perbedaan tersebut merujuk untuk kembali diadakannya konvensi pada tahun 1897-1898 yang menghasilkan rancangan konstitusi Australia Commonwealth Constitution of Australia yang berfungsi sebagai Konstitusi Federal. Kemudian, pada tahun 1899 dan 1900 diadakan referendum yang di mana tepat pada 1 Januari 1901 konstitusi ini disetujui oleh Kerajaan Inggris. Inggris mengakui Australia dengan 6 koloni nya menguasai Australia secara penuh dalam kerangka Commonwealth of Australia (Negara Persemakmuran Australia) atau Federasi Australia. 4). Berbeda dengan negara-negara di dunia pada umumnya di mana perubahan atas konstitusi cukup sering terjadi, Australia memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Sepanjang kemerdekaan nya pada tahun 1901, Konstitusi Australia secara garis besar tidak banyak berubah dan apabila ada perubahan di dalamnya, perubahan tersebut tidaklah berbeda mencolok dengan konstitusi awal. Hal ini terjadi karena Australia memiliki sistem pengubahan konstitusi yang cukup ketat dan melewati proses yang cukup panjang. Proses tersebut dinamakan referendum. Referendum bagi Australia memiliki arti penting. Sebagaimana tercantum dalam website resmi Australian Election Commission (AEC), referendum di Australia memiliki definisi polling yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan perubahan atas Konstitusi Australia. Referendum di Australia melibatkan seluruh warga dewasa Australia yang sudah memiliki hak pilih untuk melakukan polling akan pengajuan pengubahan Konstitusi Australia.

Secara singkat, mekanisme yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh masyarakat Australia dewasa dan membiarkan mereka memilih untuk setuju atau tidak setuju atas pengajuan perubahan pada konstitusi. 5). Semenjak konstitusi Australia terbentuk, telah terdapat 44 referendum yang diajukan oleh pemerintah Australia akan tetapi hanya delapan yang berhasil dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Australia, yaitu:³⁷

³⁵ Gare, D., & Ritter, D., *Making Australian History Perspectives on The Past 1788*, Cengage Learning. Melbourne, 2008, hal 45-56

³⁶ Scondat, C. d., & Montequieu, B. D., *Op.Cit*

³⁷ Commission, A. E. (2012, October 24). Referendum Dates and Results. Retrieved October 22, 2013, from Australia Election Commission: http://www.aec.gov.au/Elections/referendums/Referendum_Dates_and_Results.htm, diakses pada tanggal 19 Agustus 2014, pukul 04.00 Wib

NO	TAHUN	PENGAJUAN PERUBAHAN KONSTITUSI	KETERANGAN
1	1906	Perubahan waktu pada sistem pemilihan House of Representatives dan Senate yang sebelumnya dilakukan pada waktu berbeda, agar dilakukan pada waktu yang sama	Disetujui oleh 82,65% suara
2	1910	Terkait dengan hutang negara bagian, di mana sebelumnya konstitusi memberikan perbedaan atas hutang yang dilakukan oleh persemakmuran dan negara bagian, sehingga pada konstitusi perubahan persemakmuran memiliki power untuk mengambil alih pinjaman negara bagian	Disetujui oleh 54,95% suara (hanya kalah di negara bagian New South Wales)
3	1928	Terkait dengan hutang negara bagian, kali ini terkait dengan penghentian sistem pembayaran per kapita yang diwajibkan oleh Persemakmuran dan membatasi jumlah pinjaman yang dilakukan oleh negara bagian dengan membentuk badan pinjaman	Disetujui oleh 74,30% suara
4	1946	Terkait dengan pelayanan sosial di mana Persemakmuran diberikan kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial di mana sebelumnya negara bagian juga mengemban kewajiban tersebut	Disetujui oleh 54,39% suara
5	1967	Terkait dengan hak kaum Aborigine, di mana Persemakmuran wajib untuk menegakkan hukum pada kaum Aborigine dan juga penghitungan kaum Aborigine ke dalam populasi Australia	Disetujui oleh 90,77% suara
6	1977	Terkait dengan pengisian kekosongan senate yang harus diisi oleh senate pengganti dari partai yang sama guna menjaga keseimbangan parlemen	Disetujui oleh 73,32% suara
7	1977	Terkait dengan referendum di mana teritori juga diperbolehkan untuk melakukan referendum konstitusi di waktu ke depan	Disetujui oleh 77,72% suara
8	1977	Terkait dengan umur pensiun dari seorang Hakim Federal yang sebelumnya tidak disebutkan menjadi 70 tahun	Disetujui oleh 80,10% suara

Selain dari delapan referendum tersebut sebanyak 36 referendum gagal dibentuk,

berikut adalah lima referendum yang paling muda telah dilakukan dan gagal yakni:³⁸

NO	TAHUN	PENGAJUAN KONSTITUSI	PEUBAHAN	KETERANGAN
1	1988	Terkait dengan pemilihan umum yang adil dan demokratis di seluruh Australia (Persemakmuran, Negara Bagian dan Teritori)		Hanya disetujui oleh 37,60%
2	1988	Terkait dengan menyetujui adanya pencantuman pemerintahan lokal di dalam konstitusi		Hanya disetujui oleh 33,62%
3	1999	Terkait dengan hak-hak dan kebebasan warga negara dimana dijaminnya keadilan seluruh warga negara dalam pengadilan, penjaminan kebebasan pemilihan agama dan menjamin peradilan yang adil dalam penyelesaian tuntutan terkait properti pribadi yang diklaim oleh pemerintah manapun		Hanya disetujui oleh 30,79%
4	1999	Terkait dengan perubahan Australia menjadi sebuah Republik dengan menghilangkan Ratu dan Gubernur Jenderal dan memilih Presiden dengan 2/3 suara dari Parlemen Persemakmuran		Hanya disetujui oleh 45,13%
5	1999	Terkait dengan keinginan adanya pembukaan dalam konstitusi		Hanya disetujui oleh 39,34%

Sebagai sebuah konstitusi, Konstitusi Australia memiliki kelebihan dan kekurangan yang cukup jelas dapat terlihat. Dari sisi kelebihan konstitusi ini dibandingkan dengan konstitusi dari negara lain adalah terletak pada kemurnian konstitusi Australia yang terjaga dan sulit untuk diintervensi oleh unsur politik atau unsur lainnya karena adanya mekanisme referendum yang mengharuskan seluruh masyarakat Australia ikut andil dan menjadi ujung tombak suksesnya sebuah perubahan konstitusi. Sedangkan kelemahan dari konstitusi Australia terletak pada ambiguitas pasal-pasal yang terkandung dalam konstitusi. Banyak dari pasal-pasal di dalam konstitusi yang cenderung multi interpretasi sehingga diperlukan peraturan-peraturan tambahan di luar konstitusi (karena perubahan konstitusi membutuhkan waktu yang lama dan mekanisme yang panjang) untuk memperjelas makna dari pasal-pasal di dalam konstitusi tersebut.

Ada 4 faktor penyebab munculnya perlunya untuk mengubah konstitusi (Aitkin, Jinks dan Warhurst):³⁹

³⁸ *ibid*

³⁹ Don Aitkin, , Brian JinkJohn Warhurst, *Australian Political Instution*, edisi ke 4, Longman Chesire, Melbourne, 1989, hal 47

1. Faktor anggota parlemen.

Anggota parlemen menggunakan kekuasaannya tidak lagi melihat asal-usul negara bagiannya, tetapi cara pandang nasional

Memperluas kepentingan pemerintahan Federal

2. Faktor pemerintah federal

Akan selalu menanggapi berbagai tuntutan, sehingga memungkinkan tuntutan-tuntutan baru lainnya untuk ditanggapi.

3. Faktor munculnya teknologi baru

Membutuhkan intervensi pemerintah, dengan munculnya penemuan baru yang nantinya akan membawa kepada terciptanya badan2 federal baru.

4. Faktor peningkatan sumber-sumber keuangan pemerintah federal.

Mengenai pajak, tarif, pertukaran mata uang, atau perdagangan internasional.

Krisis Konstitusi Australia 1975 merupakan krisis politik dan konstitusional terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Australia. Peristiwa ini memuncak pada tanggal 11 November 1975 dengan diturunkannya Perdana Menteri Gough Whitlam yang berasal dari Australian Labor Party (ALP) oleh Gubernur Jenderal Australia Sir John Kerr. Kerr kemudian menunjuk pemimpin partai oposisi dari Australian Liberal Party, Malcolm Fraser, sebagai Perdana Menteri sementara. Pemerintahan Whitlam telah terpilih pada tahun 1972 dengan menjadi mayoritas di House of Representatives, namun dengan partai oposisi yang menguasai dan mengontrol Senate. Pemilihan umum pada tahun 1974 mengakibatkan sedikit perubahan. Sementara Pemerintah Whitlam memperkenalkan banyak kebijakan dan program-program baru, pada saat yang bersamaan Pemerintahan Whitlam diguncang oleh skandal politik dari partai oposisi yang menguasai Senate. Pada Oktober 1975, Oposisi menggunakan kontrol dari Senat untuk menunda pengesahan Appropriation/Supply Bills (Budget Bills) atau Rancangan Undang-undang (RUU) APBN Nasional Australia di mana RUU ini berperan sangat penting untuk membiayai operasi pemerintah. Tanpa disahkannya RUU ini oleh Senate maka pemerintahan federal tidak dapat berjalan. RUU ini telah disahkan oleh House of Representatives sebelumnya.

Dalam perkembangan berikutnya, Oposisi terus menekan dengan mengagalkan RUU ini lagi dan lagi, dan pada akhirnya menyatakan secara terbuka bahwa mereka akan terus melakukan penggagalan ini hingga PM Whitlam mengadakan pemilihan umum untuk House of Representatives. Di sisi lain, pihak Oposisi juga mendesak Gubernur Jenderal Kerr untuk memberhentikan Whitlam sebagai jalan dari kebuntuan yang terjadi. Pada tanggal 11 November 1975 Whitlam diberhentikan sebagai Perdana Menteri oleh Kerr dan tidak lama kemudian Fraser menggantikan tempatnya. Pada dasarnya Kerr beralasan pemecatan yang dilakukannya terhadap Whitlam sesuai dengan Konstitusi Australia dalam Bab II yang mengatur kekuasaan Gubernur Jenderal sebagai pemegang kendali eksekutif. Secara lebih detail kekuasaan Gubernur Jenderal dalam Section 64 dinyatakan bahwa Gubernur Jenderal berhak untuk menurunkan seorang Perdana Menteri, hanya saja peristiwa yang terjadi dengan Whitlam berbeda. Sebagai partai pemenang dan mayoritas dalam House of Representatives, sesuai dengan konstitusi, Whitlam secara otomatis menjadi Perdana Menteri. Atas dasar inilah Kerr dinilai tidak kompeten dan menimbulkan tanda Tanya besar

mengapa keputusan penurunan Perdana Menteri yang justru diambil dan bukan pembubaran Senat.⁴⁰

BAB IV

PARTAI POLITIK DI AUSTRALIA

❖ SISTEM KEPARTAIAN

Partai politik Australia tidak disebut didalam konstitusi dan tidak dikontrol oleh suatu perundangan apapun. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur penerimaan anggota, perumusan kebijakan dan pemilihan calon anggota Parlemen adalah urusan mereka sendiri dan tidak dapat diajukan ke pengadilan sebagaimana yang diberlakukan bagi lembaga swasta lainnya.⁴¹ Walaupun demikian partai politik Australia menjadi inti dari demokrasi parlementer yang mendominasi sistem politik Australia.

Dalam sistem politik modern, keberadaan partai politik biasanya mengungkapkan adanya tradisi demokrasi bagi bagi sistem politik yang bersangkutan. Oleh karena itu berbagai sistem politik menerapkan berbagai klasifikasi kepartaian yang yang demokratis yaitu sistem dua partai atau sistem multi partai. Melihat Australia tampak bahwa multi partai menjadi sistem politik di Australia. Hal ini bisa dilihat dari jumlah partai yang berpartisipasi dalam pemilu. Dari jumlahnya memang berfluktuatif, sekurang-kurangnya terdapat sekitar 15 partai politik yang ikut bersaing dalam setiap pemilu federal.⁴² Tapi ada ahli yang menggambarkan Australia menggunakan sistem dua partai karena secara konsisten partai liberal dan partai nasional membentuk koalisi, baik ketika memerintah maupun ketika bertindak sebagai oposisi untuk berhadapan dengan partai buruh. Ada juga yang berpendapat Australia menganut tiga partai yaitu partai Buruh, partai Liberal dan partai Nasional. Pandangan ini didasarkan oleh kenyataan bahwa ada tiga partai itulah yang memiliki perwakilan yang menentukan baik dalam parlemen-parlemen federal maupun negara bagian dan teritori.

Yang menarik dari partai politik Australia adalah ideologinya. Bagaimana kaitannya dengan kebijakan mereka. Secara umum hanya ada dua kutub ideologi dalam sistem kepartaian Australia yaitu partai buruh kiri dan koalisi Liberal-Nasional di kanan. Tapi jarak ideologisnya hampir tidak ada. Partai buruh menetapkan dirinya berideologi sosialis demokrat tetapi ideologi para anggotanya berjarak dari faksi-faksi “sosialis kiri radikal yang kecil dan bertumpu kepada faksi tengah yang lebih moderat, yang pandangan pandangannya hampir tidak dibedakan dengan beberapa anggota Partai Liberal. Kebijakan Partai ini cenderung bercirikan Liberal. Meskipun ada elemen komunis dalam partai buruh,

⁴⁰ Ulasan yang rinci mengenai krisis konstitusional 1975, terutama mengenai pandangan pro dan kontra, lihat Jeffrey Archer dan Graham Maddox, “The 1975 Constitutional Crisis in Australia”, dalam Dennis Woodward, Andrew Parkin dan John Summers(Eds), *Government, politic and power in Australia*(edisi ketiga: Melbourne:Longman Chesire, 1978), hal 50-67 dan Francis West, “Constitutional krisis 1975-An Historian’s View, “dalam Woodward Parkin, Summers(eds), hal 68-77

⁴¹ Geoffrey Sawyer, *Australian Government today* (edisi ke-13, Pitman, Melbourne, 1987, hal 84

⁴² “Parties and the party system”, dalam *Op.cit*, hal 134

namun ada ketakutan akan bahaya komunis disebagian besar anggota partai ini. Bahkan serikat-serikat buruh pembentuk dan pendukung partai ini, sehubungan dengan kemajuan ekonomi Australia, telah menempatkan dirinya sebagai golongan menengah yang sukses.

Partai Liberal yang berkoalisi dengan partai nasional dan berideologi liberal tidak terpecah ke dalam faksi-faksi ideologis. Namun terdapat semacam pandangan ideologis diantara para tokohnya, yaitu sekelompok kecil kaum liberal, sehingga disebut dengan “l” (huruf L kecil) dan sejumlah besar kaum konservatif.⁴³ Oleh karena itu, sebagian besar Kebijakan Partai Liberal

Fungsi Partai

Partai politik mempunyai beberapa fungsi, antara lain: mengagregasikan kepentingan kelompok (serikat buruh) dan individu; merekrut kandidat anggota majelis rendah (peran parpol dalam pemilu sangat dominan); menyiapkan kebijaksanaan dalam hampir semua masalah yang dihadapi bangsa Australia; mengkritik, merevisi dan mewmberi alternative terhadap kebijaksanaan pemerintah (sebagai partai oposisi).

Secara garis besar fungsi-fungsi tersebut bisa diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

1. Menyiapkan wakil-wakil rakyat di parlemen.
2. Mengidentifikasi permasalahan (ekonomi, social, politik) yang dihadapi masyarakat, melemparkan issue dan menyiapkan kebijaksanaan serta program-program yang jelas bagi masyarakat.
3. Mengorganisir proses pemerintahan (mempersiapkan kabinet, badan-badan Negara, perundang-undangan).

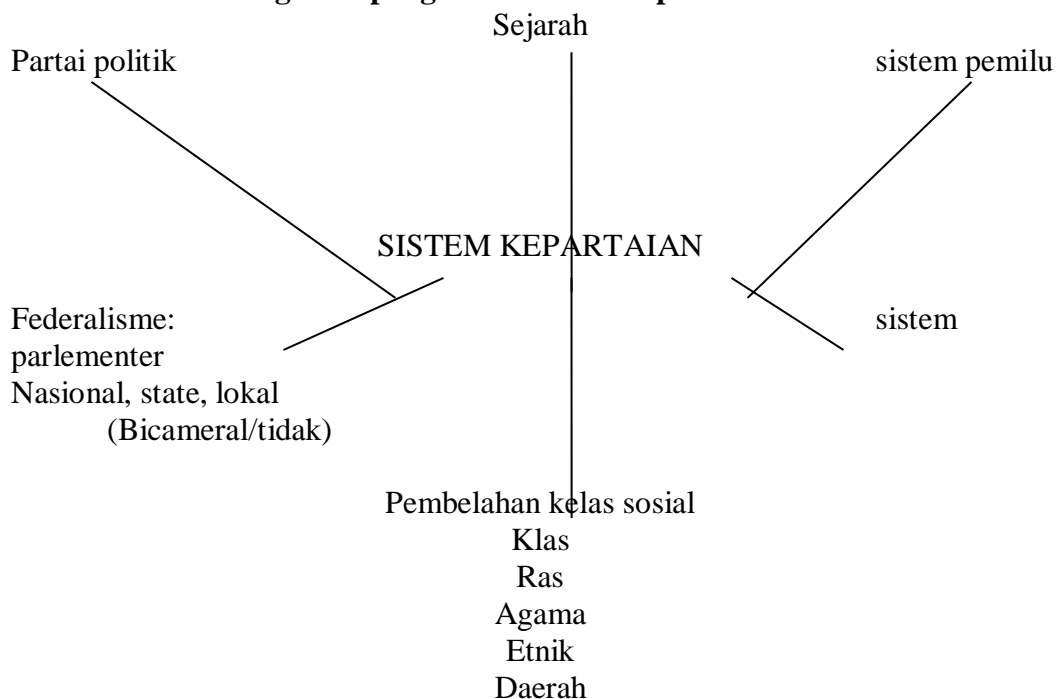
Bagi partai politik Australia, ketiga fungsi diatas sama-sama penting dan saling terkait. Karena itu ketika mereka terjun dalam arena pemilu mereka tentu telah menyiapkan serangkaian program yang jelas bagi masyarakat. Jika partai tersebut berhasil duduk dalam sistem pemerintahan, mereka diharapkan akan mendukung kebijaksanaan partai. Partai-partai kecilpun tetap mempunyai fungsi yang penting, seperti mengkritik program-program pemerintah, mengontrol agar lembaga-lembaga Negara berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan alternative kebijaksanaan terhadap pemerintah.

Cukup mengherankan bahwa meski parpol terlibat dalam berbagai aspek proses politik tetapi dalam fakta memperlihatkan bahwa hanya sedikit (sekitar 5 %) orang yang bersedia masuk sebagai anggota parpol. Bahkan partai-partai tersebut selalu malu jika ditanya tentang jumlah anggotanya.⁴⁴

⁴³ K.R. Evas, *The Australian Political System: An Introduction*(Edisi ke-3), The Jacaranda Press, Auckland, 1988, hal.189

⁴⁴ Geoffrey Sawyer, dalam *Op. Cit*, hal 156

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Kepartaian



Faktor-Faktor Yang Ikut Memperkokoh Sistem Dua Partai Yang Dominan

Bagan diatas memperlihatkan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi sistem kepartaian. Dalam sejarahnya sistem kepartaian Australia selalu tampak stabil. Meski secara formal menganut sistem multi partai tetapi sejak awal selalu didominasi oleh partai Buruh dan Liberal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini:⁴⁵

1. Sistem pemilu distrik (*single member preferential sistem*)
2. Struktur federal memungkinkan perbedaan-perbedaan sistem kepartaian disetiap Negara bagian dan mamungkinkan eksistensi partai-partai kecil (Australian Democrats,DLP)
3. Sistem parlementer yang mengharuskan kabinet dibentuk oleh partai politik direkrut dari anggota parlemen. Hal ini memungkinkan kehadiran partai-partai kecil untuk ikut memainkan kartu *truf* dalam membentuk kabinet koalisi.
4. Sosialisasi politk dalam masyarakat cenderung menentang kemunculan partai-partai politik yang baru. Biasanya orang cenderung memilih partai yang didukung keluarganya. Tetapi seandainya seseorang ingin mengalihkan

⁴⁵ K.R. Evas, dalam *Op.Cit*, hal 45

dukungannya kepartai lain, maka biasanya ia akan memilih untuk mendukung partai yang besar (Buruh atau Liberal).

5. Pembelahan masyarakat Australia selalu hanya didasarkan pada perbedaan kelas. Meski terdapat heterogenitas seperti perbedaan ras, agama, etnik, daerah dan lain-lain, tetapi perbedaan-perbedaan ini tidak terpolitisir. Seandainya heterogenitas tersebut terpolitisir (dalam partai politik), maka tentunya terjadi perubahan-perubahan dalam sistem kepartaian Australia. Kenyataannya perubahan tersebut tidak pernah terjadi.
6. Partai Buruh dan Partai Liberal sendiri juga mempunyai peran yang sangat besar dalam mempertahankan status Quo ini. Mereka tidak menyukai terjadinya perubahan sistem kepartaian karena senadainya hal ini terjadi hanya akan menggoyahkan dominasi mereka.
7. Publikasi pada media massa selalu memberikan perhatian yang besar terhadap aktivitas partai-partai besar (Buruh dan Liberal). Sebaliknya kurang memberikan kesempatan kepada partai-partai kecil.

Sebagian besar orang kalau membayangkan arena politik Australia, pikirannya pasti akan tertuju pada partai politik. Bayangan tersebut memang tidak salah. Partai politik memainkan peran menonjol di negeri tersebut, karena kabinet dibentuk oleh partai politik yang memperoleh mayoritas suara diparlemen. Media massa selalu mengulas posisi partai politik dalam berbagai issue yang muncul. Hal semacam ini sebenarnya memang bukan hanya monopoli Australia saja. Studi mengenai sistem politik modern memang selalu menekankan pada partai politik. Dalam sistem demokrasi Barat partai politik memang telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.

Partai politik bisa didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bisa berorganisasi untuk berusaha mempengaruhi kebijaksanaan Negara (*Public Policy*). Partai politik dalam pengertian yang semacam ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Romawi, tetapi partai politik modern yang kita kenal sekarang ini ialah partai politik yang embrionya mulai dikenal di Inggris pada abad 18.

❖ MUNCULNYA PARTAI POLITIK DI AUSTRALIA

Seperti telah kita ketahui, kerajaan Inggris mulai memberikan hak pemerintahan otonomi pada wilayah-wilayah koloninya di Australia pada tahun 1950-an. Pemerintahan saat itu tetap berjalan meski belum ada partai politik. Arena politik Australia masih didominasi oleh fraksi-fraksi yang dimotori oleh individu-individu tertentu. Jadi sifatnya masih sangat personal belum organisasional.

Baru pada tahun 1880-an-1910 politik Australia mengalami perkembangan-perkembangan yang menyolok, termasuk diantaranya : pembentukan partai-partai politik dan pembentukan pemerintah federal. Pada tahun 1910 terjadi transformasi yang jelas. Hampir secara serentak muncul partai-partai politik di parlemen-parlemen Negara bagian. Sementara sistem lama yang

bersifat personal berangsur-angsur surut. Sementara pertentangan ideologi sangat mempengaruhinya.

Meskipun secara formal Australia menganut sistem multi partai, tetapi sejak tahun 1910 hampir bisa dikatakan bahwa Australia sebenarnya menganut sistem dua partai. Paling tidak secara ideologi terdapat dua kelompok : partai-partai kelompok buruh dan partai-partai kelompok Liberal. Partai-partai kecil yang juga sudah terbentuk saat itu selalu berada disekitar”induknya” yaitu partai Buruh dan Partai Liberal. Sejak tahun 1910 hampir semua anggota parlemen berasal dari Partai Buruh atau partai Liberal, dan semua kabinet juga dibentuk oleh partai buruh atau partai Liberal. Jumlah anggota kedua partai tersebut hanya sekitar 250.000 orang saja, tetapi dukungan yang diperolehnya selalu besar, mendekati 90 persen. Kekuatan kedua partai tersebut hampir berimbang. Paling tidak, baik partai buruh atau partai Liberal selalu memperoleh sekitar 40-50 persen suara pendukung.

Jika dilihat dari sejarah pembentukannya maka bisa dikatakan bahwa partai liberal terbentuk didalam parlemen, sementara partai Buruh dan partai Country dibentuk oleh kelompok-kelompok diluar parlemen. Partai Buruh dibentuk oleh serikat-serikat buruh, sementara partai Country dibentuk oleh kelompok-kelompok industri pedesaan. Dengan terbentuknya federasi Australia, partai Buruh mulai menempatkan diri sebagai partai nasional yang kuat dan kohesif, serta mulai melakukan koalisi dengan partai-partai lain yang sehaluan.

❖ **TERBENTUKNYA PARPOL DI AUSTRALIA**

Australia terbentuk koloni, ada parlemen, tapi belum ada parpol. Parpol Australia terbentuk sesudah adanya parlemen yang digunakan untuk mengorganisir kepentingan rakyat. Parpol ada yang dibentuk dari dalam parlemen. Contoh : Partai Liberal. Parpol juga ada yang dibentuk diluar parlemen. Contoh : Partai buruh dan partai Country. Anggota Parlemen adalah orang-orang yang top/tokoh-tokoh terkenal.

Australia dikenal adanya :

- *upper class* : para pemilik tambang emas, pemilik tanah.

- *Lower Class* : Buruh/pekerja kasar/petani.

Golongan *Lower class* tersebut membuat serikat buruh yang nantinya berkembang menjadi partai buruh(diluar parlemen terbentuknya). Partai Country tidak pernah besar, karena berasal dari penduduk didaerah terpencil. DPR membentuk partai liberal sebagai counter dari partai buruh yang mungkin mengancam eksistensi mereka di parlemen. Partai buruh merupakan partai tertua (1830-an) ketika terjadi perang class dan pemogokan-pemogokan dari para buruh pemangkas bulu domba. Konflik antar class tadi menimbulkan kesadaran oleh adanya orsospol.

❖ **PARTAI BURUH**

Partai buruh merupakan partai tertua di Australia. Pembentukannya dimulai pada tahun 1890 ketika terjadi perang klas dan pemogokan massal dari para buruh pemangkas bulu domba yang sampai mengakibatkan depresi ekonomi, meski pada akhirnya serikat buruh mengalami kekalahan. Serikat Buruh yang kalah mulai menyadari bahwa mereka memerlukan wakil-wakil diparlemen yang

bisa menyuarakan kepentingan mereka. Sejak awal kedatangan orang-orang kulit putih di Australia memang telah terjadi pengelompokan politik berdasar status social/klas. Basis dukungan Partai Buruh adalah buruh, narapidana (dulu), dan imigran kulit berwarna. Secara tradisional pendukung partai ini umumnya beragama katolik atau mereka yang tidak mempedulikan agama (atheis)

Jadi berbeda dengan partai-partai politik lainnya, partai Buruh sengaja dibentuk oleh organisasi diluar parlemen untuk dijadikan “sayap politik” nya. Serikat buruh merupakan basis anggota dan sumber financial bagi partai buruh. Karena itulah Serikat Buruh selalu mempunyai keterkaitan yang sangat tinggi dengan partai buruh. Anggota serikat Buruh selalu merasa bahwa pemerintahan yang dibentuk oleh partai Buruh adalah miliknya yang harus patuh terhadap kehendaknya.

Bob Hawke membina karirnya sebagai presiden Serikat Buruh, sebelum terpilih sebagai anggota parlemen dan pada akhirnya menjabat sebagai Perdana Menteri. Simon Crean, Presiden serikat Buruh yang sekarang, mempunyai peluang yang tinggi untuk menjabat sebagai ketua partai buruh. Keinginan Serikat Buruh untuk menguasai wakil-wakilnya di Parlemen ini tercermin dalam sumpah partai serta sistem caucus. Para anggota Partai Buruh bersumpah bahwa mereka akan mematuhi ketentuan dan rencana kerja partai. Bila mereka terpilih dalam parlemen, mereka akan memberikan suara sesuai dengan keputusan mayoritas caucus. Caucus adalah rapat pleno para wakil partai di parlemen untuk menentukan kebijakan partai di Parlemen. Pemerintahan Whitlam memperlihatkan pengaruh yang besar dari caucus terhadap partai, tetapi pengaruh ini telah berkurang dalam pemerintahan Bob Hawke.⁴⁶

Partai Buruh ialah sebuah partai sosialis demokrat yang bertujuan mengadakan pembaharuan social melalui proses parlementer. Mengadakan sosialisasi terhadap sector industri dan produksi, berusaha menghapus kemiskinan, diskriminasi dan monopoli. Tidak lupa, partai ini selalu menaruh perhatian besar terhadap masalah hak-hak asasi manusia. Mereka menganggap bahwa proses integrasi Timor Timur dengan Indonesia maupun perlakuan pemerintah Indonesia terhadap rakyat Timor Timur menyalahi prinsip pengakuan hak-hak asasi. Tentu saja penilaian ini dilakukan sesuai dengan kriteria masyarakat Australia.⁴⁷

PERPECAHAN-PERPECAHAN DALAM PARTAI BURUH

Sejarah Partai Buruh dipenuhi oleh perpecahan-perpecahan internal yang menyolok pada tahun 1916, awal 1930an dan pertengahan 1950an. Perpecahan-perpecahan tersebut sangat merugikan dan merusak basis dukungannya. Sebaliknya, hal ini sangat menguntungkan kelompok partai non buruh.

Tahun 1916 perpecahan terjadi karena W.M Hughes (Perdana Menteri yang berasal dari Partai Buruh) menginginkan untuk diadakan partai militer. Sebaliknya mayoritas caucus Partai Buruh ditingkat federal menolak usul tersebut. Akibatnya Hughes bersama-sama dengan sekelompok politisi senior Partai Buruh

⁴⁶ Carol Johnson, *The Labor Legacy: Curtin, Chifley, Whitlam, Hawke*, Allen&Unwin, 1989, hlm 16-25

⁴⁷ D.F. Woodward, *The Australian Labor Party*, dalam *Loc. Cit*, hal.155

berbalik mendukung Partai Liberal. Gabungan Partai ini kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional. Setelah itu Hughes tetap menjabat sebagai PM. Sebuah kasus yang langka di Australia, dimana seorang pemimpin yang telah melakukan desersi tetap dipercaya untuk menjadi PM.

Tahun 1920 Konggres Partai Buruh meresmikan tujuan partai untuk “mengadakan sosialisasi dibidang Industri, produksi , distribusi dan pertukaran barang”. Pernyataan ini segera disusul dengan *Blackburn Declaration* yang menyatakan bahwa partai tidak akan menyerobot hak pemilihan alat-alat produksi secara individual, sejauh hal tersebut digunakan untuk kepentingan social dan tidak digunakan sebagai sarana eksploitasi. Pernyataan susulan ini amat perlu agar pendukung partai tidak merasa ketakutan.⁴⁸

Perpecahan kedua terjadi pada tahun 1931. Partai Buruh memenangkan pemilu tahun 1929, tetapi pemerintahan Partai Buruh dihadapkan pada krisis ekonomi yang amat berat. Sculli, pemimpin partai Buruh yang menjabat sebagai Perdana menteri didukung oleh lima Gubernur Negara bagian mengusulkan memotong uang gaji, pensiun, serta belanja Negara sebagai saran untuk mengatasi krisis keuangan. Usul ini ditolak oleh J.T lang, gubernur New South Wales, yang segera keluar dari partai buruh. Partai Buruh kemudian pecah menjadi 3 kelompok. Pertama, sekelompok pimpinan Buruh pindah ke Partai Nasional yang kemudian berganti nama menjadi Partai Persatuan Australia (United Australian Partai/UAP). Kedua, kelompok J.T Lang membentuk Lang Labor Party. Ketiga, kelompok yang masih tetap setia pada Partai Buruh Lama, yang kekuatannya sudah sangat menyusut.

Perpecahan ketiga terjadi diantara tahun 1940-1955. konflik ini berakar pada konflik ideologi didalam tubuh Partai Buruh, yaitu ideologi Katolik vs Komunis. Sejak awal kelompok Katolik mempunyai pengaruh yang kuat dalam partai. Pada tahun 1940 kelompok ini merasa prihatin karena pengaruh ideologi komunis dalam partai buruh semakin kuat. Untuk menghadapinya kelompok Katolik membentuk gerakan-gerakan perlawanan.

Konflik ini memuncak tahun 1954 ketika ketua partai Buruh, Evatt, secara terang-terangan menyerang gerakan-gerakan kelompok Katolik yang dituduhnya sebagai gerakan subversi terhadap Partai . akhirnya tahun 1955 kelompok Katolik membentuk “Anti Communist Labor Party” yang terpisah dari Partai Buruh dan kemudian menjadi cikal bakal pendirian “Democratic Labor Party”.

Sejak saat itu hingga akhir 1960an Partai Buruh relative lemah. Baru awal tahun 1970an partai ini bangkit kembali dan memenangkan pemilu tahun 1972.

Kemenangan partai Buruh ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain:

- ☆ terpilihnya E.G Whitlam sebagai ketua Partai Buruh tahun 1967.
- ☆ Partai Buruh mengadakan perubahan-perubahan structural untuk memperbaiki imagenya dimasyarakat.
- ☆ Setelah kepemimpinan Menzies, Partai Liberal yang semula memerintah kemudian terpecah-pecah.

Hawke yang memenangkan pemilu tahun 1983, mengambil kebijakan pembentukan perusahaan negara. Ada landasan negara kesejahteraan dengan

⁴⁸ *Ibid*

membentuk *Commonwealth Employment service*, yang menyediakan anggaran bagi para penganggur dan jaminan kesehatan, memberikan subsidi federal bagi pembangunan rumah sakit dan pengembangan perguruan tinggi.

Sejak pertengahan 1800-an, gerakan buruh Australia telah menjadi perintis dari hak-hak buruh, dengan keuntungan sejarah awal di berbagai bidang seperti pengaturan kerja dan kondisi keamanan, kenaikan upah, delapan jam kerja dalam sehari, istirahat, pemuatan, lembur, dan dibayar cuti melalui berbagai kategori cuti. Mereka juga sukses dengan hak politik, dengan berlakunya UU Pemilu 1893 di New South Wales untuk "satu orang, satu suara". Perempuan mendapat suara di Australia Selatan dari tahun 1893, di Australia Barat dari 1899, dan di seluruh Australia untuk pemilu federal dari 1902.

Buruh selama tahun-tahun awalnya dibedakan oleh pertumbuhan yang cepat dan sukses di tingkat nasional, pertama membentuk pemerintah minoritas di bawah Chris Watson, Perdana Menteri pertama Buruh di dunia, selama empat bulan tahun 1904. Andrew Fisher lain kemudian membentuk pemerintah minoritas 1908-09. Pada pemilihan 1910, Fisher dipimpin Buruh untuk kemenangan. Pemerintah Fisher adalah mayoritas pemerintah federal pertama Australia, yang diselenggarakan mayoritas pertama Australia Senat, dan pertama pihak di dunia pemerintah mayoritas tenaga kerja. Ini adalah kali pertama sebuah partai buruh yang dikontrol setiap rumah legislatif, dan pertama kali dikontrol kedua majelis legislatif bikameral. Cabang-cabang negara juga berhasil, kecuali di Victoria, di mana kekuatan liberalisme Deakinite menghambat partai yang baru berkembang. Seluruh kantor cabang yang dibentuk pemerintah negara mayoritas pertama mereka di New South Wales dan Australia Selatan pada tahun 1910, di Australia Barat pada tahun 1911, di Queensland pada tahun 1915 dan di Tasmania pada tahun 1925. Keberhasilan tersebut menghindarkan pihak sama demokratis dan kerja sosial di negara lain selama bertahun-tahun.

Partai Buruh umumnya dideskripsikan sebagai sebuah partai demokratis sosial, dan konstitusinya menetapkan bahwa itu adalah partai sosialis demokratis. Partai ini diciptakan oleh, dan telah selalu dipengaruhi oleh, serikat perdagangan, dan dalam prakteknya kebijakan tersebut pada waktu tertentu biasanya yang menjadi kebijakan tentang gerakan buruh yang lebih luas. Jadi pada platform pemilihan pertama Buruh 1901 federal menyerukan Kebijakan putih Australia, warga negara dan arbitrase yang wajib perselisihan industrial. Tenaga Kerja telah di berbagai waktu ditunjang tarif tinggi dan tarif rendah, wajib militer dan pasifisme, White Australia dan multikulturalisme, nasionalisasi dan privatisasi, isolasionisme dan internasionalisme.

ALP (Australian Labour Party) mengadopsi nama "Partai Buruh Australia" formal pada tahun 1908, tapi berubah ejaannya menjadi Labor "Buruh" pada tahun 1912. Sementara itu adalah praktik standar dalam Bahasa Inggris Australia baik hari ini dan pada saat mengeja kata kerja dengan "u", partai ini dipengaruhi oleh gerakan buruh Amerika Serikat dan tokoh menonjol dalam sejarah awal partai, Amerika kelahiran Raja O'Malley, berhasil memiliki ejaan "modern". Perubahan ini juga membuat lebih mudah untuk membedakan referensi dengan partai dari gerakan buruh secara umum Selanjutnya., ejaan "kerja" telah diterima dalam bahasa Inggris Inggris dan Australia pada periode sebelumnya.

Kepemimpinan Partai Buruh:

- Chris Watson 1901-08 (Perdana Menteri 1904)
- Andrew Fisher 1908-15 (Perdana Menteri 1908-09, 1910-13, 1914-15)
- Billy Hughes 1915-16 (Perdana Menteri 1915-23, dikeluarkan dari A pada tahun 1916 dan membentuk Partai Buruh Nasional)
- Frank Tudor 1916-22
- Mathew Charlton 1922-28
- James Scullin 1928-35 (Perdana Menteri 1929-32)
- John Curtin 1935-45 (Perdana Menteri 1941-45)
- Ben Chifley 1945-51 (Perdana Menteri 1945-49)
- Dr H.V. Evatt 1951-60
- Arthur Calwell 1960-67
- Gough Whitlam 1967-77 (Perdana Menteri 1972-75)
- Bill Hayden 1977-83
- Bob Hawke 1983-91 (Perdana Menteri 1983-91)
- Paul Keating 1991-96 (Perdana Menteri 1991-96)
- Kim Beazley 1996-2001
- Simon Crean 2001-03
- Mark Latham 2003-05
- Kim Beazley 2005-06
- Kevin Rudd 2006-10
- Julia Gillard 2010-2013

PARTAI LIBERAL (LP = Liberal Party)

Partai Liberal dibentuk sebagai reaksi atas kelahiran Partai Buruh. Partai ini berasal dari pengelompokan sekelompok Borjuis dalam parlemen akhir abad 19, yang merasa perlu membentuk partai politik untuk menghimpun dana serta dukungan. Basis dukungannya berasal dari kelas menengah keatas (kaum pengusaha, pemilik tambang, pemilik tanah-tanah, peternakan), beragama Kristen Protestan dengan latar belakang pendidikan swasta. Partai ini memperjuangkan aspirasi kaum kapitalis kelas menengah Australia yang merasa kesulitan dengan semakin berkembangnya aktivitas gerakan buruh.

Partai Liberal menekankan kebebasan individual dalam berusaha. Mereka menginginkan penerapan model ekonomi Keynes, dikurangnya campur tangan pemerintah di bidang pengelolaan ekonomi.

Meskipun partai ini mempunyai hubungan yang erat dengan kaum pengusaha, tetapi ia tidak mempunyai hubungan yang institusional dengan mereka seperti halnya hubungan Partai Buruh dengan Serikat Buruh. Sampai saat ini Partai ini masih gigih dalam mempertahankan sikap anti imigrasi yang terutama ditujukan pada para imigran kulit berwarna (Asia).

Partai Liberal yang kita kenal sekarang ini (Partai Liberal modern), didirikan oleh R.G Menzies tahun 1944. Sejak itu partai ini menjadi Partai non Buruh yang berskala nasional (kecuali di Queensland). Cikal bakal partai ini telah ada sejak tahun 1890an, sebagai reaksi terhadap pembentukan partai buruh. Partai ini telah mengalami perubahan nama beberapa kali. Tahun 1917-1931 menjadi

partai nasional. Tahun 1931-1944 menjadi United Australia Party (UAP). UAP sangat terpecah-pecah, dan tahun 1944 Menzies menyatukan faksi-faksi yang ada sehingga terbentuk Partai Liberal Modern seperti yang kita kenal sekarang ini, yang resminya baru berdiri tanggal 28 Agustus 1945.

Dengan kemampuannya yang luar biasa menzies mengendalikan partai selama lebih dari 20 tahun. Struktur partai, organisasi, style dan kebijakan-kebijakan partai, semuanya dirancang oleh Menzies sebagai basis dukungan politiknya. Ia melakukan perubahan-perubahan mendasar, antara lain:

- ☆ Partai dirancang agar memiliki struktur federal yang berskala nasional
- ☆ Partai Liberal dijadikannya partai massa yang keanggotaannya luas. Partai Liberal merupakan partai terbesar (dilihat dari jumlah anggotanya) di Australia. Keanggotaan yang banyak ini dimaksudkan sebagai sumber dukungan, sumber keuangan partai yang akan menjadi mesin yang mapuh dalam pemilu.
- ☆ Terdapat pemisahan yang jelas antara organisasi massa (anggota biasa) dengan sayap diparlemen.

Dibawah kepemimpinan Menzies Partai Liberal selalu memperoleh dukungan yang stabil. Ia memanfaatkan perpecahan dalam partai buruh dan dengan pandainya memanfaatkan issue “ancaman komunis” untuk merebut simpati masyarakat.

Ketika Menzies mengundurkan diri pada tahun 1966, konflik-konflik laten dalam tubuh partai muncul kembali, sehingga partai kembali terpecah-pecah. Selama 22 tahun kepemimpinannya Menzies kurang memperhatikan masalah suksesi kepemimpinan partai. Sepeninggal Menzies tidak ada lagi pemimpin Liberal yang kuat. Pengganti-penggantinya hanya berkuasa dalam tempo singkat.

1966-1967: Holt

1968-1971: Gorton

1971-1972: Mc Mahon

1972-1975: Sneden

1975-1983: frazer

Kemenangan Frazer dalam pemilu 1975 mampu mempersatukan kembali partai ini. Tetapi di tahun 1980an mulai muncul lagi konflik antara faksi progressive vs faksi conservative, terutama dalam masalah ideologi dan kebijakan. Mendekatnya kebijakan Partai Buruh dengan Partai Liberal (*Convergence Theory*).⁴⁹

Akhir-akhir ini telah terjadi saling pendekatan (*Convergence Theory*) Partai Buruh dengan Partai Liberal karena keduanya menerapkan kebijakan yang sangat mirip dalam usahanya untuk menarik dukungan *swinging voters* (para pemilih mengambang). Keduanya berusaha untuk mengambil kebijakan yang pragmatis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan politik.

Dalam prakteknya Partai Liberal juga sependapat dengan Partai Buruh bahwa Negara mau tidak mau harus memainkan peran yang penting dalam masalah perekonomian. Partai Liberal berusaha menggunakan Negara sebagai

⁴⁹ <http://primeministers.naa.gov.au/>, National Archive of Australia, Diakses tanggal 20 Maret 2015, pukul 04.00 wib

kekuasaan bersama untuk melayani hak-hak individual. Dalam kenyataannya PM. Hawke yang berasal dari partai Buruh justru mengadakan Liberalisasi dan deregulasi perekonomian yang jauh lebih besar dibanding dengan pemerintah Fraser yang berasal dari partai Liberal.

Pendekatan ini mulai terasa sejak tahun 1970an, dikala pengaruh kelas dalam tingkah laku politik semakin menurun. Kelas menengah mulai banyak mendukung Partai Buruh, sementara kaum buruh profesional justru beralih ke Partai Liberal. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat Australia. Buruh-buruh kasar di pedesaan semakin menurun, beralih sebagai buruh industri White Collar.

Ideologi dan Kebijakan

- Ideologi partai merupakan suatu persoalan yang membingungkan bagi anggota partai liberal, terutama anggota parlemennya.
- Kebijakannya antara lain :⁵⁰
 1. kaum liberal percaya bahwa pemerintah bertanggungjawab terhadap rakyat melalui sistem parlementer, dimana wakil-wakil yang terpilih oleh rakyat adalah bebas bertindak atas dasar keyakinan mereka sendiri.
 2. Masyarakat liberal merupakan asosiasi bebas diantara individu yang percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk membangun kepribadiannya sendiri dan memilih cara hidupnya sendiri.
 3. kaum liberal bertujuan menciptakan lingkungan dimana prakarsa individu dan perusahaan swasta tumbuh dengan subur. Mereka mengakui bahwa perekonomian pasar bebas adalah faktor utama untuk mencapai kemajuan ekonomi.

Kepemimpinan Partai Liberal

Jabatan Perdana Menteri adalah jabatan yang paling berkuasa di Australia. Sang Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan bertugas di bawah arahan Gubernur-Jendral. Biasanya perdana menteri adalah pemimpin dari partai politik terkuat di Australia.⁵¹

⁵⁰ <http://www.liberal.org.au/>, diakses 20 Maret 2015, pukul 04.00 Wib

⁵¹ *Ibid*

Nama	Gambar	Mulai Menjabat	Akhir Jabatan
Alfred Deakin (periode ke-2)		5 Juli 1905	13 November 1908
Alfred Deakin (periode ke-3)		2 Juni 1909	29 April 1910
Joseph Cook		24 Juni 1913	17 September 1914
Sir Robert Menzies (periode ke-2)		19 Desember 1949	26 Januari 1966
Harold Holt		26 Januari 1966	19 Desember 1967
John Gorton		10 Januari 1968	10 Maret 1971
William McMahon		10 Maret 1971	5 Desember 1972
Malcolm Fraser		11 November 1975	11 Maret 1983
John Howard		11 Maret 1996	3 Desember 2007
Tony Abbott		18 September 2013	Sekarang

PARTAI COUNTRY(PARTAI NASIONAL)

Sebelum tahun 1975 bernama partai Country. Sekalipun termasuk partai kecil, namun kehadirannya cukup stabil dalam politik Australia. Embrio partai yang mewakili kepentingan desa (petani dan peternak) ini telah ada sejak periode colonial dalam wujud kelompok-kelompok kepentingan/penekan. Ketika membentuk sistem kepartaian ditahun 1890an, mereka membentuk partai-partai kecil yang biasanya menggunakan label *Famers and Settlers* atau *Farmers and Producers*. menyadari bahwa dukungan mereka kurang kuat, maka partai-partai ini lebih sering berkoalisi dengan Partai Liberal.⁵²

Sewaktu PD I Australia mengalami krisis ekonomi yang hebat, sementara pajak yang dipungut pemerintah semakin tinggi. Hal ini semakin memojokkan kaum petani, sehingga mereka merasa perlu untuk semakin mengintensifkan partainya. Partai Liberal dianggap terlalu berorientasi kekota dan kurang memperhatikan kepentingan mereka.

Dalam pemilu 1919 kelompok partai-partai Country ini mampu mencalonkan 19 Caleg dan memenangkan 11 kursi parlemen. Mereka mewakili *Famers and Settlers*, *Victorian Farmers Union*, *Primary Producers Union* dan wakil-wakil petani lainnya. Keberhasilan ini terutama karena dukungan mereka bisa terkonsentrasi pada beberapa daerah pemilihan. Jika dibanding dengan Partai Buruh dan Partai Liberal, struktur Partai Country tampak lebih tersentralisir.

Tahun 1920 *Australian Country Party* resmi terbentuk, dan mampu memenangkan 14 kursi parlemen dalam pemilu 1922. tahun 1923 mereka berkoalisi kembali dengan partai Nasional (Liberal), dan memegang pemerintahan bersama Partai Nasional. Keunggulan Partai ini terletak pada kontinuitas dukungannya. Meski tidak sekuat Partai Buruh dan Partai Liberal, tetapi dukungan petani Terhadap Country relative constant. Seakan partai ini mampu mengikat perasaan para petani untuk selalu berpihak padanya. Selain itu partai ini juga pandai memainkan kartunya dalam berkoalisi. Ia tahu persis bahwa dukungannya sangat diperlukan karena Partai Liberal jarang memperoleh suara yang mencukupi untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Namun akhir-akhir ini Country menghadapi masalah serius, karena penduduk desa makin berkurang, bahkan beberapa kota kecil telah berubah menjadi *Ghost Town* karena penduduknya berpindah kekota-kota besar. Untuk mengatasi masalah tersebut partai ini berusaha untuk mengubah image partainya menjadi *catch-all party*, dan memperluas basis dukungannya. Issue yang diperjuangkannya bukan hanya masalah pedesaan saja.

Di beberapa daerah pemilihan upaya ini telah memperlihatkan hasil positif. Di Queensland, New South Wales dan Australia Barat Partai Country mampu berkembang menjadi partai nasional dan merebut suara di kota-kota. Di tahun 1984 di Negara bagian Queensland partai ini bahkan mampu memrintah sendiri, tanpa dukungan rekan koalisinya dari Partai Liberal. Namun demikian dukungannya tidak pernah mampu menyamai Partai Liberal dan Partai Buruh,

⁵² James Jupp, *Australian Party Politic*, Melbourne University Press, Melbourne, 1966, hal 87

karena inti dukungan partai ini tetap didesa. Selain itu ia juga sering konflik dengan rekan koalisinya.⁵³

Prospek partai inipun semakin kurang menentu. Dalam pemilu 1975, 1977 dan 1980 Partai Liberal ternyata mampu memenangkan suara mayoritas. Artinya, jika Liberal mau, ia bisa memerintah sendiri tanpa dukungan country. Koalisi NCP (National Country Party) akhir-akhir ini hanya didasarkan pada tradisi saja, bukan suatu keharusan.

Ideologi dan Kebijakan

- Ideologi Partai Nasional mencerminkan seruan moral kaum tani pedesaan. Mereka berpandangan bahwa pertanian dan peternakan adalah aktivitas untuk menaikkan martabat manusia, dan masyarakat yang baik hanya bisa dicapai dengan sebaik-baiknya memiliki komunitas petani-petani pemilik tanah. Dan mendesentralisasikan kota-kota kecil yang tersebar disepanjang daerah pedesaan.
- Partai Nasional selalu berpendapat bahwa apa yang baik bagi petani dan peternak adalah baik bagi juga untuk Australia.
- Sama dengan Partai Liberal, sangat menganjurkan berkembangnya perusahaan swasta dan menentang ideologi sosialisasi bidang-bidang industri, produksi, distribusi dan pertukaran yang dianjurkan partai buruh.

❖ PARTAI-PARTAI MINOR/PARTAI-PARTAI KECIL

Secara formal Australia menganut sistem multi partai, meskipun partai yang besar hanya Buruh, Liberal dan Country. Dalam setiap kali pemilu biasanya diikuti lebih dari 30 partai. Sebagian besar diantara mereka adalah partai-partai kecil yang kadang-kadang hanya mampu bertahan satu/dua kali pemilu saja. Banyak pula diantara mereka yang tidak mempunyai wakil di parlemen. Beberapa diantara mereka akan kita bicarakan dibawah ini.

Democratic Labor Party

DLP mungkin merupakan partai minor yang paling penting dalam sejarah Australia. Kelahiran partai ini berawal dari konflik yang terjadi dalam tubuh partai Buruh. Tahun 1953 terbentuk *the Movement and Industrial Groups* yang dipelopori oleh tokoh-tokoh Partai Buruh cabang Victoria dan New South Wales. Gerakan ini ditentang keras oleh para pemimpin pusat partai Buruh yang menganggap sebagai gerakan pengkhianatan. Pertentangan semakin tajam. Di Victoria, 10 anggota parlemen Partai Buruh menyeberang ke pihak gerakan dan berhasil menjatuhkan pemerintahan Partai Buruh. Perpecahan dalam tubuh partai Buruh ini dimanfaatkan oleh R.G. Menzies yang cerdik. Ia segera memajukan jadwal pemilu (maju 2 tahun), dan hasilnya Partai Buruh kalah total dalam pemilu 1955.

Pada bulan Agustus 1957 pihak gerakan sepakat untuk membentuk Democratic Labor Party yang berpusat di Victoria dan Queensland. Tetapi di

⁵³ Ian McAllister, *Politic Behavior: Citizens, Parties and elites in Australia*, : Longman Cheshire Pty, Ltd., Melbourne 1992, hal 232

Australia Selatan dan Barat dukungan terhadap DLP sangat lemah, terutama karena pihak gereja katolik di daerah tersebut tidak mau mendukung DLP. Sumber kekuatan DLP terletak di tiga tempat:

- ☆ Di Victoria
- ☆ Di Senat
- ☆ Di National Civil Council

Sementara di parlemen, DLP hampir tidak mempunyai kekuatan karena perolehan suara tidak mencukupi. Sampai saat ini DLP tidak pernah mampu mempunyai dukungan suara yang mencukupi untuk mendudukkan wakilnya di DPR (kecuali di NSW tahun 1974, itupun terjadi karena partai Liberal lupa tidak mencalonkan wakilnya). Namun pada tahun 1961-1975 DLP pernah mempunyai pengaruh tertentu di Senat (Lihat gambar 3., hal 94). Tahun 1975 terjadi pembubaran bersama senat dan DPR yang mengakibatkan orang-orang DLP semuanya tertendang keluar.

Australia Party (AU)

Kelahiran AU diawali dari tulisan Gordon Barton, seorang pengusaha, di Sidney Morning Herald (1966) yang isinya menentang pemerintah (Partai Liberal) yang mengirimkan prajuritnya dalam perang Vietnam. Tulisan tersebut ternyata memperoleh tanggapan yang sangat besar (lebih dari 1000 tulisan serupa masuk ke redaksi SMH), sehingga menggerakkan Barton untuk membentuk *Liberal Reform Movement*, yang bertujuan untuk merombak kebijakan partai Liberal terutama yang berhubungan dengan masalah perang Vietnam.

Tahun 1966-1970 partai ini pernah merebut simpati rakyat, tetapi setelah itu terjadi konflik pimpinan partai yang membuat partai terpecah-pecah. Dengan berakhirnya perang Vietnam issue partai menjadi kurang menarik lagi dan pada tahun 1977 sebagian besar anggotanya beralih ke Australian Democrats Party (ADP).⁵⁴

Liberal Movement (LM)

Kelahiran LM diawali ketika Steele Hall yang semula menjabat sebagai ketua *Liberal and Country League* di Australia Selatan diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 15 maret 1972. ia kemudian membentuk Liberal Movement yang menjadi partai didalam partai Liberal Country. Tahun 1974 Hall berhasil menjadi anggota senat tetapi setahun kemudian jabatannya sudah tercopot karena ada pembubaran bersama senat dan DPR (*double dissolution*). Tahun 1976 Hall dan sebagian besar anggota LM bergabung kembali dengan partai Liberal, sementara sisanya membentuk a New Liberal Movement . gerakan baru ini akhirnya tidak bisa bertahan sementara anggotanya banyak yang kemudian beralih ke Australian Democrats (1977).⁵⁵

Australian Democrats (AD)

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ <http://primeministers.naa.gov.au/>, diakses tanggal 21 Maret 2015, pukul 03.00 Wib

Partai yang lahir pada tahun 1977 ini berinduk pada Australian Party dan Liberal Movement. Kedua partai ini sama-sama terpukul oleh pembubaran senat dan DPR bersama-sama (double dissolution) tahun 1974 dan 1975. Keduanya kemudian berusaha membangun kembali puing-puing partainya yang telah runtuh dan bergabung dengan nama baru, yaitu Australian Democrats.

AD berusaha meneruskan tradisi Australia Party yang menerapkan demokrasi langsung (*paricipatory democracy*) dalam proses pengambilan keputusan dipartainya. Sebagai partai minor AD cukup sukses. Beberapa anggotanya ada yang menjadi anggota senat; mempunyai satu kursi di DPR Tasmania, dan satu kursi di DPR New South Wales.

Australian Democrats berusaha untuk menjadi partai “lain” dengan Partai Buruh atau Liberal, terutama dalam hal ideologi. Ia berusaha untuk menjadi *aThird alternative* dari kedua pohon partai yang telah ada. Dengan demikian partai ini juga berusaha untuk berbeda dengan partai-partai kecil lainnya yang biasanya secara ideologis bisa digolongkan dalam kelompok kiri atau kanan sebagaimana dengan Partai Buruh dan Liberal. Issue sentral partai ini ialah menentang korupsi dan penambangan uranium yang dianggapnya akan membahayakan Negara. Dalam prakteknya AD sering tidak mampu memberikan apa yang telah ia janjikan sebagai *a third alternative*.⁵⁶

Progress Party/Libertarian Party

Partai ini didirikan di Sidney pada tahun 1975 dan pada mulanya partai ini disebut Partai Buruh. Ia didirikan untuk memberikan alternative yang jelas menghadapi sistem kepartaian Australia yang sangat didominasi oleh partai-partai besar. Dalam bidang perekonomian ia cenderung mendukung prinsip *laissez-faire* serta menciptakan kebebasan individual yang seluas-luasnya bagi setiap warga Negara. Ia menentang prinsip sosialisme maupun demokrasi social serta tidak menyukai keterlibatan pemerintah dibidang ekonomi maupun social. Menurutnnya tidak ada orang atau kelompok orang yang berhak menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menentang orang atau kelompok lainnya.⁵⁷

Country Liberal Party

CLP adalah partai non buruh yang utama di Northern Territory. Sampai dengan tahun 1966, partai Buruh merupakan satu-satunya partai yang ada di Northern Territory.

Kemudian pada tahun tersebut partai Country membuka cabangnya di Northern Territory. Diikuti oleh pembukaan cabang partai Liberal pada tahun 1968. pada tahun 1974 kedua partai non buruh ini kemudian bergabung dan menamakan dirinya sebagai CLP.

Menjelang pemilu partai harus bisa memperoleh uang sebanyak mungkin. Mereka harus membayar sejumlah *fee* untuk menominasikan kandidat-kandidatnya, membuat pamflet, propaganda, merekrut karyawan-karyawan khusus (temporer), dan membayar media massa agar mau mempublikasikan secara

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Ian McAllister, *Loc. Cit.*

terbuka, berapa banyak uang yang telah mereka keluarkan dan dari mana saja asalnya.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai publikasi keuangan partai ini. Partai Buruh dan Partai Australian Democrats menginginkan agar partai-partai politik mengumumkan sumber-sumber keuangannya secara terbuka kepada masyarakat meski mungkin yang diumumkan tidak perlu secara rinci. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menilai pertanggungjawaban partai dan masyarakat bisa mempunyai cara untuk mengidentifikasi akan adanya potensi atau konflik-konflik kepentingan yang nyata di sebuah partai. Peraturan seperti ini telah diberlakukan di Amerika Serikat. Sebaliknya Partai Liberal dan Partai Nasional menentang hal ini. Menurut mereka, pengungkapan secara terbuka seperti ini tidak diperlukan dan banyak donatur yang tidak bersedia namanya dipublikasikan secara umum.⁵⁸

Hampir semua partai politik di Australia selalu menghadapi masalah krisis keuangan. Pemilu berlangsung paling lama 3 tahun sekali sehingga mereka selalu harus siap kampanye. Model-model kampanye murah seperti pidato, rapat-rapat kecil maupun raksasa mulai ditinggalkan. Digantikan dengan penggunaan media massa seperti televisi dan penggunaan biro-biro iklan yang professional untuk *market research* dan cara-cara publikasinya.

Tanpa informasi resmi dari partai memang sangat sulit untuk mengetahui seberapa besar uang yang telah mereka keluarkan dan darimana asalnya. Hanya saja secara nalar bisa disimpulkan bahwa tidak mungkin sebuah partai bisa bertahan hidup hanya dari iuran anggotanya saja. Mau tidak mau pasti ada dana dari sektor-sektor masyarakat tertentu. Cabang-cabang partai selalu aktif mengadakan berbagai pesta, makan-makan malam dan undian-undian untuk pengumpulan dana.

Hubungan Antara Partai Dengan Kelompok-Kelompok Kepentingan

Partai-partai Australia mempunyai hubungan formal maupun tidak formal dengan kelompok-kelompok kepentingan, terutama kelompok-kelompok ekonomi (pengusaha). Kelompok-kelompok ekonomi ini berusaha menjalin hubungan dengan partai agar bisa memperoleh prioritas-prioritas tertentu melalui kebijaksanaan politik. Di Amerika Serikat (partai Republik dan Demokrat) dan Kanada (Partai Liberal dan progresif) hubungan antara partai dengan kelompok-kelompok ekonomi bersifat tidak formal. Sebaliknya di Inggris dan New Zealand yang pembentukan partainya sangat dipengaruhi oleh pembagian status ekonomi masyarakatnya, hubungan antara partai dengan kelompok-kelompok ekonomi ini bersifat formal dan jelas.⁵⁹

Di Australia terlihat adanya dua pola hubungan ini sekaligus, baik pola hubungan yang formal maupun yang tidak formal. Hal ini disebabkan oleh sejarah pembentukan dan basis dukungan partainya. Partai Buruh dibentuk oleh gerakan serikat buruh untuk mempertahankan kepentingan kaum buruh.

⁵⁸ John Warhurst, *Minor Parties and Pressure Groups*, dalam Howard R Penniman(Ed), *Australia at the Polls: The National Elections of 1980 and 1983*, Allen &Unwin, London, 1987, hal 220

⁵⁹ John Wilkes(Eds), *Forces in Australian Politics*, Angus & Robertson Ltd., Sydney, 1966, hal 122

Partai Liberal dibentuk oleh para pengusaha perindustrian, keuangan dan perdagangan, untuk menghadapi aktifitas partai Buruh. Partai Country dibentuk oleh petani di desa-desa dan pengusaha daerah. Sedangkan Partai Australian Democrats tidak mempunyai basis dukungan yang khusus.

Pengaruh serikat buruh terhadap Partai Buruh bisa dilihat dari blok-blok voting didalam partai. Tetapi sebagai sebuah partai besar, partai buruh merasa perlu untuk meluaskan basis dukungannya sehingga bukan hanya sekedar menjadi partainya kaum buruh saja. Fakta tetap memperlihatkan bahwa tidak semua kaum Buruh bersedia memilih Partai Buruh. Seandainya semua kaum buruh bersedia mendukungpun, partai Buruh belum bisa memperoleh suara mayoritas. Karena itu mau tidak mau Partai Buruh harus berusaha untuk memperluas basis dukungannya.

Partai Liberal memandang dirinya sebagai wakil dari semua kelompok ekonomi dan social yang ada di Australia. Karena itu sifatnya tidak *sectional* Partai Buruh. Tetapi basis utamanya tetap kelas menengah keatas, protestan dan biasanya mereka berasal dari sekolah-sekolah swasta. Partai ini terkait dengan kepentingan kelompok bisnis, industri dan professional. Dengan jumlah anggota melebihi 100.000 orang, partai ini mampu mengumpulkan dana yang besar.

Partai Politik dan Keanggotaan Parlemen

Ketika Menzies melakukan reorganisasi dalam partai Liberal pada tahun 1944, ia membentuk sebuah struktur federal yang hierarki dengan pembagian wewenang yang jelas antara parlemen dengan sayap-sayap partai. Keberadaan struktur federal tersebut dimaksudkan agar partai dan parlemen bisa dijadikannya sebagai basis dukungannya, bukan sebagai kelompok yang akan menekannya.

Dibawah Menzies partai dan parlemen benar-benar bisa dipakai sebagai alat pendukungnya. Dilihat dari hukum maupun praktek yang berlaku, cabang-cabang pemerintah selalu berada dibawah pengaruh Menzies. Parlemen juga berada dibawah pengaruh kabinet dan kabinet berada dibawah pengaruh Perdana Menteri (Menzies). Sikapnya yang kharismatik dan kepapakan membuat partai tidak berketuk untuk melawannya. Tetapi dibawah pemimpin-pemimpin lainnya, parlemen dan sayap-sayap partai baik yang berasal dari partai oposisi maupun partainya sendiri, lebih sering menjadi unsure penekan bagi Perdana Menteri.

Ideologi Partai

Jika dilihat dari kadar ideologi yang ada didalamnya partai politik bisa digolongkan dalam 3 tipe, yaitu:⁶⁰

1. partai-partai ideologi revolusioner, yang menginginkan perubahan sistem radikal dan ingin mempraktekan ideologi secara kaku dan rinci, mulai dari tujuan sampai ke tindakan-tindakannya.
2. Partai-partai adjustive yang mempunyai filosofi dasar ideologi tetapi cenderung konservatif.

⁶⁰ Richard H Chauvel, "Politics Down Under: Kehidupan Politik Dalam negeri Australia, dalam Richard H Chauvel (Ed), *Budaya dan Politik Australia*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 1992, hal 25-27

3. Partai-partai pragmatic, yang menerima kerangka kerja sistem politik tetapi selalu menyesuaikan tindakannya sebagaimana yang dikehendaki oleh pendukungnya.

Partai-partai politik di Australia selalu digambarkan terbentuk karena pembagian/perbedaan ideologi yang ada dalam masyarakat. Meski demikian pengaruh ideologi terhadap masing-masing partai berbeda. Terdapat partai yang ingin mempraktekkan ideologinya secara rinci hingga kehal-hal kecil dalam kehidupan masyarakat, tetapi terdapat pula partai yang hanya menyampirkan ideologi sebagai baju luarnya saja sehingga ia tidak kaku dengan dasar-dasar ideologinya.

Dalam prakteknya terdapat beberapa kesulitan jika sebuah partai ingin bersikeras untuk mempertahankan ideologinya. Pertama, fakta memperlihatkan bahwa didalam sebuah partaipun selalu terdapat perbedaan-perbedaan pendapat mengenai penerapan ideologi. Komitmen setiap anggota partai terhadap ideologi partai sangat berbeda-beda. Karena itu sulit untuk mencantelkan label ideologi dalam sebuah partai. Kedua, fakta juga memperlihatkan bahwa sifat perpolitikan Australia sangat pragmatic. Politik selalu disesuaikan dengan tuntutan pasar (*market place politics*), sehingga jika diperlukan ideologi bisa dikompromikan.

Sejak awal pembentukannya Partai Buruh selalu mengatakan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap sosialisme, bahkan menyatakan sebagai partai sosialis. Filosofi partai Buruh telah tercantum dalam hasil konferensi partai tahun 1921 dan kemudian direvisi kembali tahun 1982, sebagaimana berikut:

*The democratic socialization of industry, production distribution and exchange-to the extent necessary to eliminate exploitation and other anti social features in fields. But it completely rewrote its interpretation of what this Philosophy means details.*⁶¹

Tetapi didalam Partai Buruh itu sendiri tidak pernah ada kesepakatan tentang bagaimana mengartikan sosialisme itu sendiri. Juga terdapat berbagai pendapat tentang bagaimana strategi yang harus ditempuh untuk mewujudkan sosialisme tersebut. Hal ini terjadi karena didalam sebuah partai selalu terdapat faksi-faksi (sayap-sayap partai yang berbeda).

Sebagaimana namanya, Partai Liberal juga mempunyai komitmen terhadap Liberalisme. Tetapi partai ini sengaja menghindarkan perumusan yang rinci tentang arti dan strategi pencapaian ideologi tersebut. Dalam peraturan partai hanya disebutkan dengan menggunakan kata-kata yang sangat umum seperti "percaya pada....", "mematuhi prinsip-prinsip", mematuhi pemikiran-pemikiran dasar mengenai Liberalisme secara rinci.

Berbeda dengan Partai Buruh, baru pada akhir-akhir ini saja partai liberal berusaha mengklarifikasikan arti "Liberalisme". Dalam kenyataannya memang para pemimpin partai tidak memperoleh tekanan yang kuat dari para anggotanya untuk melakukannya. Pernyataan mengenai ideologi partai secara resmi tercantum dalam pamflet *What Liberal Stand For*.

⁶¹ *Ibid*

*Liberal believe that the Government is responsible to the people through a parliamentary system in which elected representatives of the people are free to act upon their own convictions.*⁶²

The Liberal society is a free association of individual who believe that everyone has the right to develop their own personalities and choose their own ways of life.

*Liberal aim to create an environment in which individual initiative and priate enterprise can flourish. They recognize that the competitive market economy is the key faktor in achieving general economic progress.*⁶³

Sebagaimana terlihat bahwa pernyataan diatas hanya merupakan sebuah filosofi (*philosophy*) dan tidak mencantumkan kebijaksanaan (*policy*) secara rinci. Jika dilihat dari tipe kepartaiannya maka semua partai-partai politik Australia cenderung merupakan partai adjustive dan pragmatik.

⁶² D.A Kemp, “ Social Change and Political Cleavages in Australia, dalam Dennis Woodward, Andrew Parkin, dan John Summers(Eds), *Government Politics and Power in Australia*, Longman Cheshire, Melbourne, 1987, hal 200

⁶³ *Ibid*

BAB V

SISTEM PEMILIHAN UMUM

❖ SISTEM PEMILIHAN UMUM

Rakyat Australia sangat sadar akan asas demokrasi, yang itu diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilih di Australia menghadapi beberapa seri pemilu, yang menuntut penggunaan, sekurang-kurangnya lima sistem pemilihan yang berbeda dan sekurang-kurangnya tiga sistem pemungutan suara yang berbeda pula. Pemilih yang sama harus memilih anggota Majelis rendah dan senator pada tingkat federal, disamping harus memilih anggota-anggota parlemen pada majelis rendah dan atau majelis tinggi di negara bagiannya masing-masing, yang memiliki masa bakti yang berbeda. Kompleksitas rakyat masih bertambah, bila mereka harus mengikuti pemilu kecil (by election) untuk memilih wakil-wakil mereka yang mengundurkan diri atau meninggal dunia. Disamping itu, mereka masih diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan referendum, bila pemerintah yang berkuasa menghendaki adanya perubahan konstitusi.

Pada tingkat federal, sistem majelis dan keanggotaannya diatur berdasarkan konstitusi. Majelis bersifat dua kamar yaitu majelis rendah (House of Representatives) dan senat (majelis tinggi federal). House of Representative dan Senat dipilih melalui sistem pemilihan yang berbeda. Pemilihan umum untuk memilih House of Representative dilakukan paling tidak sekali dalam tiga tahun yang waktunya ditentukan oleh Perdana Menteri. Tetapi dapat dilakukan sebelum habis masa bakti 3 tahunan, bila mayoritas anggota parlemen menghendaki. Badan tersebut terdiri dari 148 anggota yang dipilih berdasarkan sistem distrik. Untuk itu setiap negara bagian dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan berdasarkan jumlah penduduk. New South Wales memperoleh wakil 50, victoria 38, Queensland 25, Western Australia 14, South Australia 12, dan Tasmania 8. sedangkan Teritori, NC dan ACT, masing-masing memilih 2 wakil bagi majelis rendah federal.⁶⁴

Senat anggotanya ditetapkan oleh konstitusi, yaitu setengah dari jumlah anggota majelis rendah. Sebagai majelis bagi negara bagian, maka tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk, setiap negara bagian memiliki jumlah senator yang sama, yaitu masing-masing 12 senator, kecuali teritori NT dan ACT yang masing-masing hanya 2 senator.⁶⁵

Senat dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara-negara bagian, bagian diwakili oleh 12 anggota, dan Australian Capital Territory

⁶⁴ K.R. Evas, *The Australian Political system: An Introduction*, Jacaranda Press, Aukland, 1988, hal 189

⁶⁵ <http://www.aec.gov.au/>, diakses 23 Maret 2015, pukul 05.00 Wib

(Wilayah ibukota Australia) dan Northern Territory (wilayah utara) masing-masing mempunyai dua orang wakil, sehingga jumlah seluruh anggota senat adalah 76 orang. Para senator dipilih untuk masa jabatan enam tahun, separuh dari mereka dipilih setiap tiga tahun.

❖ METODE PEMUNGUTAN SUARA

Ada tiga metode pemungutan suara :⁶⁶

1. Metode Plurality atau dikenal dengan nama the first past the post , pernah diterapkan pada pemilihan anggota majelis rendah federal hanya sampai 1918. Metode ini merupakan metode yang sangat sederhana, dimana seorang calon memperoleh suara mayoritas secara otomatis terpilih menjadi anggota Parlemen (mayoritas sederhana).
2. Cara pemilihan adalah preferential, yaitu :
 - para pemilih diharuskan mencantumkan nomor urut disamping nama setiap calon sesuai dengan urutan pilihan masing-masing. Jumlah suara dengan pilihan pertama kemudian dihitung. Bila tidak ada calon dengan pilihan pertama yang memperoleh suara mayoritas, calon , dengan jumlah suara yang paling kecil dihapuskan dari daftar calon dan suara-suara dengan urutan kedua bagi calon yang dihapuskan itu dibagi-bagikan kepada calon yang masih ada. Proses seperti ini berjalan terus sampai seorang calon memperoleh mayoritas suara.
 - Diterapkan di berbagai daerah pemilihan yang menggunakan *single member constituency*. Anggota parlemen yang dipilih melalui sistem ini adalah anggota majelis rendah federal, negara bagian New South wales, Victoria, Queensland, South Australia, Tasmania, Teritoria NT dan majelis tinggi negara bagian victoria.
 - Sistem ini diterapkan sejak 1919, cenderung dipakai untuk menggoyahkan kepentingan partai buruh. Metode ini diperkenalkan oleh para penentang partai buruh untuk memajukan kepentingan mitra-mitranya dalam koalisi menentang partai buruh.
3. Cara pemilihan adalah:
 - perwakilan berimbang (*proportional representation*): seorang wakil dari suatu partai ditentukan oleh presentase suara yang diperolehnya dalam pemilihan umum. Setelah proses distribusi, setiap calon terpilih harus mempunyai sejumlah tertentu suara (quota=jumlah suara dibagi dengan jumlah calon yang akan dipilih)
 - diterapkan di daerah-daerah pemilihan yang memakai sistem multi member constituency. Daerah-daerah tersebut adalah semua daerah pemilihan bagi calon senator federal, anggota majelis tinggi di negara-negara bagian New South wales, western Australia, dan south australia serta anggota majelis rendah negara bagian tasmania dan teritori ACT.
 - Metode ini dipakai pertama kali dalam pemilihan senat federal tahun 1949. Metode dipandang lebih demokratis karena sistem ini lebih

⁶⁶ www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf, diakses 21 Maret 2015, pukul 03.00 Wib

mencerminkan secara langsung keinginan rakyat dalam memilih wakil-wakil mereka. Metode ini juga memberi peluang pada partai-partai kecil dan kelompok independen untuk memperoleh kursi di parlemen.

Setiap negara bagian dan wilayah merupakan daerah pemilihan dengan banyak calon (*multi number constituency*).

❖ PROSEDUR PENGHITUNGAN SUARA

SISTEM PEMILU AUSTRALIA

Sistem pemilu di Australia dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat, baik ditingkat federal/ nasional maupun ditingkat Negara bagian dan teritori. Pada tingkat federal sistem majelis dan keanggotaannya sudah diatur berdasarkan konstitusi.⁶⁷

A. Federal

Pada majelis ditingkat federal atau nasional bersifat bicameral atau dua kamar, yaitu majelis rendah dan senat. Majelis rendah bernama House Of Representatives, beranggota 148 orang yang ditarik dari masing-masing Negara bagian secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Negara bagian new south wales memperoleh wakil 50 orang, Victoria 38, queensland 25, western Australia 14, south Australia 12, dan Tasmania 8 orang, dan masing-masing 2 orang wakil bagi tritori NT dan ACT. Berdasarkan ketentuan konstitusi, pemilihan bagi anggota majelis rendah dilaksanakan 3 tahun sekali; tetapi dapat dilakukan pemilu sebelum habis masa bakti 3 tahunan, bila mayoritas anggota parlemen menghendakinya.

Berdasarkan konstitusi, setengah dari 12 senator Negara bagian dan seluruh dari senator dari teritori dipilih untuk masa bakti 3 tahun. Sedangkan 6 senator sisanya dipilih 6 tahun sekali. Oleh karena itu, ada 2 kali masa pemilu bagi pengisian kursi senator. Yaitu Full Senate Election, dimana rakyat memilih 12 anggota senatnya 6 tahun sekali. Dan Half Senate Election, dimana rakyat memilih 6 anggota senat yang pension pada 3 tahun pertama keanggotaan dari 6 tahun.

Untuk *Full Senate Election*, untuk mendapatkan kursi senat seorang senator harus mendapatkan quota 7,7 %, sedangkan dalam *Half Senate Election*, seorang senator harus mendapatkan 14,3 % quota.

Sistem Pemilu Federal / Nasional Australia

Parlemen	majelis	Daerah Pemilihan	Sistem Pemilu	Masa Bakti	Pemilu Pertama
Australia	Senat	Setiap Negara bagian 12 senator dan 2 senator untuk masing-masing	Perwakilan berimbang	6 tahun; setengahnya pensiun setiap 3 tahun	1949

⁶⁷ www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html, Diakses pada tanggal 01 Agustus 2014, pukul 03.00 Wib

		teritori			
	<i>House Of Representatives</i>	148 member electorate	Single	Preferensial	3 tahun
					1909

Jumlah Perwakilan Negara Bagian dan Teritori untuk *House of Representatives* Australia

No	Negara Bagian	Jumlah Wakil
1	New South Wales	50
2	Victoria	38
3	Queensland	25
4	Western Australia	14
5	South Australia	12
6	Tasmania	8
7	Teritori NT	2
8	Teritori ACT	2

Keanggotaan Majelis Tinggi (senat) Federal Australia

No	Negara Bagian	Jumlah Wakil
1	New South Wales	12
2	Victoria	12
3	Queensland	12
4	Western Australia	12
5	South Australia	12
6	Tasmania	12
7	Teritori NT	2
8	Teritori ACT	2

B. Negara Bagian

Pada tingkat Negara bagian dan teritori, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota parlemen Negara bagian dan teritori. Seluruh parlemen Negara bagian menganut sistem dua-kamar, kecuali Queensland. Queensland telah menghapus majelis tingginya sesjak 1922. Queensland dan 2 Teritori menganut sistem satu-kamar.

1. New South Wales

New South Wales menganut sistem majelis dua kamar. Majelis tingginya bernama Legislative Council, majelis rendahnya Legislative Assembly. Anggota majelis rendahnya adalah 99 orang untuk masa bakti 4 tahun. Sedangkan majelis tinggi 45 orang dipilih untuk masa bakti tiga kali masa bakti majelis rendahnya, yaitu 4 tahun.

Negara Bagian	<i>Majelis Rendah</i> (Legislative Assembly)		<i>Legislative council</i> (Majelis Tinggi)	
	Anggota	Masa Bakti	Anggota	Masa Bakti
New South Wales	99 orang	4 tahun	45 orang	3 kali masa bakti majelis rendah

2. Victoria

Majelis rendah Victoria memilih 88 anggotanya untuk masa bakti 4 tahun, sedangkan majelis tingginya beranggotakan 44 orang dengan masa bakti 2 kali masa bakti majelis rendahnya.

Negara Bagian	<i>Majelis Rendah</i> (Legislative Assembly)		<i>Legislative council</i> (Majelis Tinggi)	
	Anggota	Masa Bakti	Anggota	Masa Bakti
Victoria	88 orang	4 tahun	44 orang	2 kali masa bakti majelis rendah

Pemilu bagi 44 orang anggota dilaksanakan di 22 daerah pemilihan yang masing-masing daerah pemilihan memilih 2 anggota. Batas maksimum masa bakti majelis tinggi tersebut adalah 2 kali masa bakti majelis rendahnya, namun masing-masing satu anggota dari setiap daerah pemilihan pension setiap satu kali masa bakti majelis rendah. Oleh karena itu setiap 4 tahun sekali diselenggarakan untuk mengisi setengah dari anggota majelis tinggi yang pension tersebut.

3. Queensland

Pemilu di Queensland hanya untuk memilih anggota majelis rendah yang berjumlah 89 anggota setiap 3 tahun sekali.

4. Western Australia

Majelis tingginya berjumlah 34 anggota untuk masa bakti 6 tahun. Sementara majelis rendahnya 57 anggota dipilih setiap 3 tahun sekali.

Negara Bagian	<i>Majelis Rendah</i> (Legislative Assembly)		<i>Legislative council</i> (Majelis Tinggi)	
	Anggota	Masa Bakti	Anggota	Masa Bakti

Western Australia	57 orang	3 tahun	34 orang	6 tahun
-------------------	----------	---------	----------	---------

Pemilu bagi 34 orang anggota dilaksanakan di 6 daerah pemilihan. Untuk masa bakti 6 tahun, namun masing-masing satu anggota terpilih dari setiap daerah pemilihan pensiun setiap 3 tahun sekali. Oleh karena itu setiap 3 tahun sekali diselenggarakan untuk mengisi 6 anggota majelis tinggi yang pensiun tersebut.

5. South Australia

Majelis tingginya berjumlah 22 anggota untuk masa bakti 6-8 tahun. Sementara majelis rendahnya 47 anggota dipilih setiap 3-4 tahun

Negara Bagian	<i>Majelis Rendah</i> (Legislative Assembly)		<i>Legislative council</i> (Majelis Tinggi)	
	Anggota	Masa Bakti	Anggota	Masa Bakti
South Australia	47 orang	3-4 tahun	22 orang	6-8 tahun

6. Tasmania

Majelis tingginya berjumlah 19 anggota untuk masa bakti 6 tahun. Sementara majelis rendahnya 35 anggota dipilih setiap 4 tahun sekali

Negara Bagian	<i>Majelis Rendah</i> (Legislative Assembly)		(Majelis Tinggi) <i>Legislative council</i>	
	Anggota	Masa Bakti	Anggota	Masa Bakti
South Australia	35 orang	4 tahun	19 orang	6 tahun

7. Northern Australia

Pemilu di Northern Australia hanya untuk memilih anggota majelis rendah yang berjumlah 25 anggota setiap 4 tahun sekali

8. Australia Capital Terithory

Pemilu di Australia Capital Terithory hanya untuk memilih anggota majelis rendah yang berjumlah 17 anggota untuk masa bakti maksimum 3 tahun. Ini baru diberlakukan pada 1989.

Lima majelis tinggi Negara bagian dinamakan Legislatif (Legislative Council) sementara majelis rendah Negara bagian dan teritori mempunyai nama yang sedikit berbeda. Kecuali majelis rendah disouth australias dan Tasmania yang bernama House of Assembly, seluruh majelis rendah Negara bagian dan teritori disebut dengan legislative Assembly.

Penerapan sistem majelis baik ditingkat federal maupun Negara bagian dan teritori mempunyai dampak yang luas bagi perwakilan politik anggota parlemen . sistem perwakilan politik bagi anggota parlemen tidak hanya menggunakan satu sistem perwakilan, tetapi semua sistem perwakilan yang ada dipergunakan.

Sistem proportional representation atau perwakilan berimbang, dan sistem distrik- di Australia umumnya dikenal dengan sebutan preferential, karena metode pemungutan suaranya berbeda dengan sistem perwakilan berimbang- digunakan bagi wakil-wakil rakyat diparlemen.

Sistem perwakilan	Dengan sistem	Untuk Pemilihan	Digunakan pada
Proportional Representation	Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memiliki lebih dari satu anggota parlemen)	Diberlakukan bagi parlemen senator (majelis tinggi) ditingkat federal	Pemilihan majelis tinggi di New South Wales, Victoria, South Australia, Western Australia pemilihan majelis rendah di Tazmania dan teritori ACT
Preferential Representation (Distrik)	Single member constituency (setiap anggota parlemen hanya mewakili satu daerah pemilihan)	Bagi pemilihan wakil rakyat (majelis rendah) diparlemen pada tingkat federal.	Pemilihan anggota parlemen Negara bagian New South Wales, Victoria, Queensland, dan Western Australia dan teritori NT serta anggota majelis tinggi Tazmania

❖ UNDANG-UNDANG PEMILU

Pemilu Federal dilaksanakan berdasarkan UU pemilu 1902. Ada perdebatan yang berlarut-larut menyangkut siapa yang dipilih dan memilih. Aturannya antara lain :

- pria kulit putih hanya mempunyai satu suara.
- Wanita kulit putih baru mendapat hak pilih dalam pemilu federal setelah 1902. Padahal negara bagian South Australia telah memberikan hak pilih bagi wanita sejak 1894, yang berarti telah menjadi salah satu negara(bagian) diantara sedikit negara dunia, yang memberikan hak pilih kepada wanita.
- Diskriminasi terjadi pada kaum Aborigin, yang tidak punya hak pilih. Pada waktu UU diberlakukan orang Aborigin belum dipertimbangkan sebagai warga Australia. Kaum ini baru memperoleh hak suara pada tahun 1967.

BAB VI

KELOMPOK KEPENTINGAN AUSTRALIA

Australia adalah negara yang pembuatan kebijakan di dalam pemerintahannya kerap kali dipengaruhi oleh pihak-pihak dari luar pemerintah, khususnya *interest group*/kelompok kepentingan dan *pressure group*/kelompok penekan. Kelompok kepentingan adalah organisasi formal dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dan mencoba mempengaruhi kebijakan publik untuk melindungi atau mendukung terpenuhinya kepentingan dan tujuan mereka. Sedangkan kelompok kepentingan yang melakukan tekanan/secara intensif melakukan usaha-usaha untuk mempengaruhi pemerintah agar mengakomodasi kepentingan mereka dapat dikategorikan sebagai kelompok penekan.⁶⁸

Jumlah dan pengaruh kelompok kepentingan dan kelompok penekan semakin berkembang dengan pesat di Australia. Menurut Jaensch, terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi perkembangan kelompok-kelompok tersebut, yaitu, pertama, keterlibatan pemerintah yang semakin intensif dalam kehidupan masyarakat—seperti dalam bidang ekonomi dan sosial—membuat pemerintah membutuhkan banyak informasi, kerjasama, dan koordinasi dari pihak lain, sehingga pemerintah mengandalkan bantuan kelompok-kelompok tersebut. Kedua, sistem pemerintahan federal yang dianut Australia membuat kelompok kepentingan dan penekan memiliki lebih banyak ‘pintu’ untuk diketuk. Kelompok-kelompok tersebut dapat mempengaruhi pemerintahan baik di level nasional, negara bagian, hingga lokal. Ketiga, kompleksitas masyarakat modern mendorong munculnya kepentingan-kepentingan baru yang bervariasi, sehingga memicu terbentuknya kelompok-kelompok tertentu untuk melindungi kepentingan tersebut agar tetap terakomodasi dalam kehidupan bernegara.⁶⁹

Dalam esai ini penulis akan membuktikan bahwa *pressuregroup*/kelompok penekan memiliki peran dan pengaruh signifikan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah Australia lewat langkah-langkahnya yang menyentuh lapisan masyarakat (*indirectactions*) dan pembuat kebijakan (*direct actions*). Untuk itu penulis akan mengangkat studi kasus tentang peran organisasi *Animals Australia* dalam mempengaruhi peran pemerintah untuk melarang ekspor hewan ternak hidup dari Australia ke luar negeri.

JENIS-JENIS KELOMPOK PENEKAN

⁶⁸ D. Jaensch, *An Introduction Australian Politics*, Longman Cheshire, Melbourne, 1984, hal 136

⁶⁹ *Ibid*, hal.138

Terdapat 3 jenis kelompok penekan di Australia, yaitu *promotional*, *sectional groups*, dan *hybrid groups*. Jenis *promotional* adalah kelompok penekan yang memperjuangkan kepentingan dan isu-isu normatif dan universal, sehingga mendapatkan simpati dan dukungan dari hampir semua orang. Contoh dari jenis ini adalah organisasi amal, lingkungan, dan budaya. Jenis *sectional groups* mewakili kepentingan kelompok/golongan tertentu, seperti kelompok pebisnis, buruh, dan petani. Sedangkan *hybrid groups* memiliki perpaduan ciri jenis *promotional* dan *sectional groups*, yaitu memperjuangkan kelompok tertentu namun juga mendukung ide-ide normatif. Contoh jenis ini adalah gereja yang mewakili kepentingan umat Nasrani namun juga menjunjung nilai-nilai universal seperti perdamaian.⁷⁰

- Hampir semua orang Australia melibatkan diri dalam kelompok kepentingan (organisasi sukarela). Parpol dapat dibedakan dari kelompok kepentingan dalam hal perbedaan tujuannya: tujuan parpol adalah membentuk sebuah pemerintahan dan menjalankan kebijakan-kebijakannya dan ruang lingkup lingkup kepentingannya berskala nasional.
- *Sectional* :
 - kelompok ini mewakili salah satu golongan atau kepentingan atau kepentingan tertentu dalam masyarakat. Seperti golongan buruh, pengusaha, petani, agama. Eksistensi kelompok ini bisa bertahan lama, sepanjang kebutuhan kelompok yang diwakilinya terpenuhi.
 - Ada kelompok yang memiliki kesamaan kepentingan dengan partai-partai politik.
 - Ikatannya longgar dan tidak langsung. Sekalipun demikian, kelompok-kelompok penekan di Australia selalu menghindari setiap identifikasi dengan partai-partai politik tertentu. Mereka tidak melihat diri mereka, berdasarkan kepentingan yang dibawakannya, berasosiasi dengan parpol tertentu, terutama ketika mereka sedang berusaha mempengaruhi kelompok-kelompok penekan lainnya.
 - Hanya satu kelompok penekan yang memiliki kaitan langsung dengan struktur politik yaitu serikat-serikat buruh. Sebagian besar dari gerakan buruh membentuk partai buruh untuk melaksanakan tujuan-tujuan politik mereka. Sekalipun demikian, partai buruh mempertahankan kehidupannya dengan kekuatan sendiri. Walaupun di negara-negara bagian New South Wales dan Victoria, serikat buruh menguasai 60 % suara-suara pejabat tertinggi partai, hal ini tidak berarti serikat buruh menguasai partai. Kenyataannya serikat buruh tidak memiliki kesatuan suara, dan seringkali bertentangan secara langsung antara satu dengan lainnya, melalui faksi-faksi yang ada dalam partai buruh.

⁷⁰ D. Aitkin, B. Jinks, J. Warhurst, *Australian Politic Institution*, Longman Cheshire, Melbourne, 1989, hal. 135

- Tidak seluruh serikat buruh memiliki garis ideologi dan motivasi politik yang sama. Satu-satunya kesamaan serikat buruh adalah tujuan pembentukannya, yaitu untuk melindungi dan memperbaiki standar upah serta kondisi pekerjaan.
- Partai Liberal tidak pernah memberikan kesempatan adanya afiliasi dari organisasi luar kedalam mesin partainya.
- Kelompok-kelompok sectional lainnya adalah kelompok-kelompok yang tersebar kepentingannya. Seperti : kelompok gereja, pemain olahraga, profesional (terutama dokter, pengacara, guru atau dosen) ataupun mantan serdadu Australia.
- Orientasi politik kelompok-kelompok tersebut sering mendukung partai-partai politik tertentu.
- Kelompok profesional yang mapan, spt organisasi dokter dan pengacara, cenderung mendukung partai-partai non buruh. Organisasi guru dan dosen, cenderung mendukung partai buruh. Dukungan kelompok ini tidak stabil dan tidak terpelihara.
- *Promosional* : kelompok ini tidak mewakili salah satu golongan tertentu dalam masyarakat, kelompok ini terbentuk hanya untuk memajukan dan memperjuangkan satu isu tertentu, seperti kelompok-kelompok yang memperjuangkan masalah lingkungan, masalah binatang, dll.
- *hybrid groups* memiliki perpaduan ciri jenis *promotional* dan *sectional groups*, yaitu memperjuangkan kelompok tertentu namun juga mendukung ide-ide normatif.

❖ PEMBENTUKAN KELOMPOK INDUK

Australia adalah negara yang pembuatan kebijakan di dalam pemerintahannya kerap kali dipengaruhi oleh pihak-pihak dari luar pemerintah, khususnya *interest group*/kelompok kepentingan dan *pressure group*/kelompok penekan.

Kelompok kepentingan adalah organisasi formal dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dan mencoba mempengaruhi kebijakan publik untuk melindungi atau mendukung terpenuhinya kepentingan dan tujuan mereka. Sedangkan kelompok kepentingan yang melakukan tekanan/secara intensif melakukan usaha-usaha untuk mempengaruhi pemerintah agar mengakomodasi kepentingan mereka dapat dikategorikan sebagai kelompok penekan.⁷¹

Jumlah dan pengaruh kelompok kepentingan dan kelompok penekan semakin berkembang dengan pesat di Australia. Menurut Jaensch, terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi perkembangan kelompok-kelompok tersebut, yaitu, pertama, keterlibatan pemerintah yang semakin intensif dalam kehidupan masyarakat—seperti dalam bidang ekonomi dan sosial—membuat pemerintah membutuhkan banyak informasi, kerjasama, dan koordinasi dari pihak lain, sehingga pemerintah mengandalkan bantuan kelompok-kelompok tersebut.

⁷¹ D. Jaensch, *An Introduction to Australian Politics*, Longman Cheshire Pty Ltd, Melbourne, 1984, hal 136.

Kedua, sistem pemerintahan federal yang dianut Australia membuat kelompok kepentingan dan penekan memiliki lebih banyak ‘pintu’ untuk diketuk. Kelompok-kelompok tersebut dapat mempengaruhi pemerintahan baik di level nasional, negara bagian, hingga lokal. Ketiga, kompleksitas masyarakat modern mendorong munculnya kepentingan-kepentingan baru yang bervariasi, sehingga memicu terbentuknya kelompok-kelompok tertentu untuk melindungi kepentingan tersebut agar tetap terakomodasi dalam kehidupan bernegara.⁷²

❖ EFEKTIVITAS KELOMPOK KEPENTINGAN

kelompok kepentingan dipahami sebagai kelompok-kelompok yang dibentuk atas dasar persamaan kepentingan. Dalam penjelasan Gabriel Almond, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik.⁷³

Sistem politik Australia memungkinkan banyaknya kelompok kepentingan, jumlah organisasinya lebih banyak dibanding partai politik, demikian pula dengan jumlah anggotanya. Satu orang di Australia dapat tergabung di lebih dari satu kelompok kepentingan. Mereka berada dalam berbagai tingkatan sosial ekonomi masyarakat, dalam berbagai spektrum warna kehidupan masyarakat Australia.

Kelompok kepentingan di Australia dapat dibedakan dalam dua kelompok besar.⁷⁴ yaitu: a) Bersifat *sectional*. Kelompok ini mewakili salah satu golongan dan atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam masyarakat; b) Bersifat *promosional*. Kelompok ini tidak mewakili salah satu golongan, namun terbentuk hanya untuk memajukan dan memperjuangkan satu isu tertentu dan tidak dibatasi oleh kepentingan tertentu dan anggota-anggotanya melandasi organisasinya dengan adanya kepercayaan mengenai tujuan khusus.

Contoh Kelompok Penekan Di Australia

1. *Right to Life Australia* (RLTA).

Masalah yang diperjuangkan kelompok kepentingan semakin beragam mengingat kompleksnya isu-isu yang berkembang di Australia. Terdapat beberapa contoh kepentingan di Australia, salah satu kelompok kepentingan yang aktif memperjuangkan isu hak hidup manusia adalah *Right to Life Australia* (RLTA).⁷⁵ RLTA memperjuangkan penolakan terhadap kebijakan aborsi, euthanasia, pembunuhan bayi, dan penelitian *embryonic stem cell*.

⁷² D. Jaensch, hal 138.

⁷³ Gabriel A. Almond. *Studi Perbandingan Sistem Politik* dalam Mohtar Mas’ oed dan Colin MacAndrews, ed., *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 53.

⁷⁴ Zulkifli Hamid. *Sistem politik Australia*. (Bandung: Laboratorium Ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Penerbit Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 299.

⁷⁵ Right to Life Australia. *Campaigns*, 2010, <http://www.righttolife.com.au/campaigns.html> diakses pada tanggal 19 Agustus 2014, pukul 04.00 Wib

Right to Life Australia merupakan organisasi nonprofit, independen, dan mencakup level nasional. Pada tahun 1973 *Right to Life Victoria* didirikan di Melbourne, kemudian bulan September 2001 *Right to Life Victoria* melakukan merger dengan *Right to Life Australia* menjadi *The Right to Life Australia Inc.* Saat ini RLTA giat melakukan kampanye menentang Undang-Undang Aborsi Victoria yang disahkan tahun 2008. Pada 9 Oktober 2010, RLTA mengadakan pawai besar di *Treasury Garden*, Melbourne.⁷⁶

Dalam memperjuangkan kepentingannya, RLTA menggunakan metode secara langsung dan tidak langsung sesuai dengan kemampuan masyarakat yang pro pada RLTA. Secara langsung, staf profesional RLTA melakukan lobi-lobi kepada pemerintah agar menjadikan *pro-life* sebagai isu penting dan menekan pemerintahan yang berkuasa untuk menciptakan undang-undang *pro-life*. RLTA juga berkampanye menentang anggota legislatif yang mendukung Undang-Undang Aborsi serta mempengaruhi masyarakat agar tidak memilih mereka lagi. Secara tidak langsung, RLTA memberikan informasi kepada masyarakat melalui leaflet dan literatur. RLTA juga secara rutin merilis kegiatan-kegiatan mereka ke media, sehingga masyarakat Australia dapat mengakses perkembangan organisasi tersebut secara transparan.

Sebagai sebuah kelompok kepentingan yang tergolong besar, RLTA memiliki berbagai kemampuan yang dapat dimanfaatkan dengan baik guna mencapai kepentingannya. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas RLTA antara lain adalah bentuk organisasi, keanggotaan dan staf profesional, serta sumber pendanaan. Organisasi RLTA dapat dikatakan terstruktur rapi dengan visi dan misi yang jelas. Sebagai sebuah organisasi tingkat nasional, otoritas RLTA tidak diragukan lagi. Keanggotaan RLTA juga sangat luas. Selain anggota tetap ditingkat nasional dan negara bagian, RLTA memberikan kesempatan kepada para voluntir untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. RLTA juga memiliki staf profesional, terutama untuk memberi pelayanan konseling dan melakukan lobi pemerintah. Dana yang digunakan untuk kegiatan RLTA berasal dari iuran wajib anggota tetap, donatur, serta kegiatan *fund raising*. Dengan sumber dana tersebut, RLTA mampu menyediakan *Pregnancy Counselling Australia* (PCA) yang bertugas memberikan konseling mengenai aborsi dan pascaaborsi.

Mengenai isu Undang-Undang Aborsi Victoria 2008, sebenarnya RLTA mampu melakukan upaya lebih besar guna mencabut undang-undang tersebut karena RLTA mempunyai beberapa faktor pendukung. Hanya saja RLTA mengalami hambatan pada bidang keterwakilan. Pada tahun 2008, lebih banyak anggota legislatif yang berasal dari *Australian Labor Party* (ALP) yang menyetujui undang-undang tersebut. Untuk benar-benar dapat mewujudkan tujuannya, RLTA harus mampu meningkatkan kualitas lobi pemerintah.

Di samping itu, ada juga kelompok kepentingan yang berfokus pada isu lintas negara, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpusat di Sydney, Asosiasi Australia Papua Barat (*Australian West Papua Association/AWPA*) melayangkan surat resmi kepada Perdana Menteri Australia, Julia Gillard terkait

⁷⁶ *Ibid.*, hal 123

permintaan kepada pemerintah Australia untuk menghentikan bantuan dana bagi Densus 88. Permintaan ini disampaikan karena ada indikasi bahwa Densus 88 telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap aktivis asal Maluku. Pemerintah Australia mengeluarkan anggaran USD 16 juta setiap tahun untuk mendukung Densus 88. Dugaan penyiksaan yang dilakukan Densus 88 kepada para aktivis Republik Maluku Selatan menimbulkan kecaman publik mengenai penyalahgunaan dana tersebut. Pendanaan Australia atas Densus 88 bertujuan untuk memerangi terorisme.⁷⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok kepentingan dan penekan di Australia melakukan perannya sebagai alat untuk memajukan kepentingan-kepentingan kelompok yang diwakilinya, oleh sebab itu pula mereka selalu melibatkan diri ke dalam politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diputuskan pemerintah. Sejak seluruh proses pembuatan kebijakan publik dipindahkan menjadi satu di Canberra pada akhir 1950-an, berbagai kelompok kepentingan dipandang sebagai organisasi yang mampu dijadikan sebagai penasihat dan pemberi masukan bagi perencanaan kebijakan pemerintah.

2. Animal Australia

Animals Australia adalah organisasi pecinta binatang di Australia yang memiliki perhatian khusus pada isu kesejahteraan hewan (*animal welfare*) yang didirikan pada tahun 1980 oleh Professor Peter Singer and Christine Townend. Organisasi ini memiliki basis konstitusi *Victorian Associations Incorporation Act 1981*. *Animals Australia* memiliki struktur organisasi berupa badan eksekutif, badan pengawas, dan peraturan organisasi. Sejak awal berdiri organisasi ini aktif melakukan *lobbying* terhadap pemerintah dan berkontribusi dalam *Senate Select Committee on Animal Welfare*. *Animals Australia* merupakan organisasi non-profit yang pendanaannya diperoleh melalui sumbangan berbagai pihak.

Animals Australia mewakili sekitar 40 kelompok masyarakat dan ribuan pendukung/sukarelawan. *Animals Australia* menyediakan dan menyebarkan informasi dari penyelidikan yang mengungkap kejahatan terhadap hewan. Visi *Animals Australia* adalah dunia dimana semua binatang diperlakukan dengan kasih sayang, hormat, dan bebas dari kejahatan. Saat ini *Animals Australia* menjalankan dua peran utama, yaitu sebagai ujung tombak yang mewakili masyarakat di level *grass root* pada bidang kesejahteraan hewan dan sebagai organisasi yang aktif berkampanye untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan.⁷⁸

Keterwakilan kelompok penyayang binatang yang memiliki kepentingan tentang keselamatan binatang, struktur organisasi yang mapan, dan intensitas aktivitas menekan/mempengaruhi pemerintah menjadikan *Animals Australia* termasuk dalam kategori kelompok penekan. Terlebih, berdasarkan keterangan di atas, *Animals Australia* dapat dikategorikan sebagai kelompok penekan jenis

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Animal Australia, About Us(Online), ([Http://www. Animalaustralia.org/about/](http://www.Animalaustralia.org/about/)), diakses 29 Maret 2015, pukul 05.00 Wib

promotional karena sifatnya yang menjunjung nilai-nilai normatif dan universal, yaitu perlakuan layak terhadap semua makhluk, khususnya binatang.

Kasus Pelarangan Ekspor Ternak Hidup



Lahan luas dan iklim yang ideal menjadikan Australia sebagai negara yang sangat cocok untuk industri peternakan. Peternakan Australia sangat maju, sehingga Australia menjadi salah satu negara pengekspor hewan ternak hidup terbaik di dunia. Pasar utama ekspor sapi hidup dari Australia adalah Timur Tengah dan Asia Tenggara. Australia dikenal memiliki standar terbaik dalam hal ekspor binatang hidup. Ekspor ternak hidup diatur dalam regulasi ketat untuk menjamin kualitas hewan ternak hidup dari Australia.⁷⁹Regulasi tersebut disebut *Exporter Supply Chain Assurance System*(ESCAS) yang dibuat tahun 2011. ESCAS menganut 4 prinsip, yaitu *animal welfare*, kontrol, keterlacakan, dan audit.⁸⁰Dalam detail yang dimuat ESCAS, terdapat beberapa ketentuan seperti standar kualitas, *standard operating procedures*, dan *check list* tentang aktivitas ekspor ternak hidup dari Australia.⁸¹

Sebagai organisasi pecinta hewan yang peduli terhadap keselamatan binatang, *Animals Australia* memiliki komitmen untuk terus mengawasi proses ekspor tersebut secara independen. Sejak tahun 2003, *Animals Australia* melakukan berbagai investigasi untuk mengetahui keadaan hewan ternak hidup yang diekspor dari Australia ke beberapa negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Hasil investigasi tersebut mengungkapkan bahwa terjadi penyiksaan dan perlakuan kejam lain terhadap hewan-hewan tersebut. Melalui situs yang banliveexport.com *Animals Australia* mempublikasikan berbagai video dan laporan hasil investigasi tersebut.

⁷⁹ Meat and Livestock Australia, Livestock Exports(online)(<http://www.mla.com.au/About-the-red-meat-industry/livestock-exports>), diakses tanggal 29 Maret 2015, pukul 05.00 Wib

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Australia Department of Agriculture, Guidance on Meeting OIE Code Animal Welfare Outcomes for Cattle and Buffalo

Negara-negara yang ditemukan *Animals Australia* sebagai pelaku penyiksaan hewan ternak diantaranya adalah Palestina (Jalur Gaza), Mauritius, Israel, Yordania, Kuwait, Malaysia, Lebanon, Mesir, Indonesia, dan Qatar. Umumnya penyiksaan meliputi tidak diberikannya makanan dalam waktu lama, tidak layaknnya kandang (kapasitas dan kebersihan), penyiksaan seperti pembantingan, penusukan mata, dan bentuk penganiayaan lain pada ternak sebelum disembelih.

Temuan ini kemudian menjadi dasar bagi *Animals Australia* untuk melancarkan protes kepada pemerintah Australia. *Animals Australia* menganggap bahwa pemerintah Australia tidak mempedulikan nasib hewan ternak yang diekspor dari Australia dan hanya mengutamakan keuntungan. Protes yang dilakukan oleh *Animals Australia* meliputi dua cara, yaitu *lobby* ke pemerintah agar melarang kebijakan ekspor hewan ternak hidup ke negara lain dan melakukan kampanye seperti lewat *website* dan demonstrasi di jalan untuk mendapat perhatian publik.

Lobby Animals Australia



Jaensch menjelaskan bahwa kelompok penekan memiliki dua cara untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu cara langsung/*direct* dan cara tidak langsung/*indirect*. Cara langsung ditempuh dapat dengan melakukan pemerintah dan mengandalkan kedekatan personal dengan pejabat pemerintahan, penyampaian aspirasi lewat komite di parlemen, memilih kandidat di pemilu, dan mempengaruhi partai. Konsep cara langsung ini sesuai dengan yang diterapkan oleh *Animals Australia*. *Animals Australia* sangat gencar dalam melakukan *lobbying* kepada pemerintah agar aspirasinya tersampaikan dan kepentingannya dapat diakomodasi.⁸²

Aktivitas *lobbying* telah menjadi salah satu tujuan utama sejak awal berdirinya organisasi *Animals Australia*. *Animals Australia* kerap berkontribusi melalui *Senate Select Committee on Animal Welfare* dalam hal menyarankan pembentukan kebijakan dan aktivitas lainnya. Secara konsisten *Animals Australia* melakukan tekanan, advokasi, dan kerjasama dengan pemerintah Australia agar segala kepentingannya terkait keselamatan dan perlindungan hewan dapat terakomodasi, baik di level nasional, negara bagian, ataupun lokal. Bahkan aktivitas organisasi semacam *Animals Australia* yang mempengaruhi pemerintah

⁸² I. Marsh, *Interest Groups*, dalam J. Summers D Woodward A. Pakin, *Government Politics, Power and Policy in Australia*, Pearson Education Australia, French Forest, 2002, hal. 353-357

ini telah diakui secara resmi oleh pemerintah Australia lewat *websiteresminya* yang menyatakan bahwa komunitas yang bergerak dalam hal kesejahteraan hewan dapat berpartisipasi dalam pengembangan undang-undang, kebijakan, dan program yang bertujuan untuk menjaga standar yang baik dan keberlangsungan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) di Australia.⁸³ Tidak hanya menjalankan proses *lobbying* sendiri, *Animals Australia* juga memiliki panduan yang mengajak dan mengajarkan masyarakat awam cara untuk melakukan *lobby* terhadap pejabat pemerintah secara personal untuk mendukung pelarangan ekspor hewan ternak hidup. Panduan yang diunggah ke *website* tersebut meliputi informasi tentang cara-cara mengatur pertemuan, teknik saat pertemuan berlangsung, dan *follow-up* setelah pertemuan dengan *Member of Parliament*(MP)/anggota parlemen.

Lobby dari *Animals Australia* terbukti efektif meningkatkan dukungan dari pejabat pemerintah. Salah satu contoh adalah pada kasus terungkapnya penyiksaan yang dilakukan oleh beberapa Rumah Potong Hewan (RPH) di Indonesia lewat video hasil investigasi *Animals Australia*. Setelah *Animals Australia* meluncurkan *lobby* kepada beberapa pejabat pemerintah, tercatat terdapat sebagian pejabat pemerintah yang memberikan dukungan, beberapa diantaranya adalah anggota parlemen Andrew Wilkie, anggota senat Nick Xenophon, dan penyampaian petisi kepada menteri Joe Ludwig. Akibatnya, pemerintah memberlakukan kebijakan larangan ekspor ke Indonesia pada tahun 2011.

Pada pemerintahan Tony Abbott, *Animals Australia* tetap berusaha menekan pemerintah untuk melarang ekspor hewan ternak hidup ke negara-negara yang terbukti melakukan penyiksaan terhadap hewan ternak dari Australia. Salah satu contoh kasus terbaru adalah kebijakan pemerintah Australia yang memberhentikan ekspor ternak ke Mesir pada bulan Mei 2013 setelah laporan dan video mengenai penyiksaan hewan ternak di negeri tersebut digunakan sebagai bukti oleh *Animals Australia* untuk menekan pemerintah.

Kampanye *Animals Australia*



⁸³ *Ibid*

Sedangkan menurut Jaensch, cara tidak langsung ditempuh dengan mempengaruhi masyarakat untuk membentuk opini publik yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah. Cara yang umum digunakan adalah promosi di media massa. *Animals Australia* melakukan cara tidak langsung tersebut melalui kampanye yang dilakukan lewat media *websitedan* melakukan unjuk rasa/demonstrasi.

Melalui laman *website*-nya, animalsaustralia.org dan banliveexport.com, *Animals Australia* secara kontinyu memaparkan bukti-bukti penyiksaan terhadap hewan ternak di negara-negara tujuan ekspor. *Animals Australia* menyediakan berbagai format laporan seperti artikel dan video yang memuat tindak kekejaman tersebut. Video-video tersebut kemudian ditayangkan oleh stasiun televisi di Australia dan mendapat perhatian publik. Setelah penayangan, banyak publik yang menuntut pemerintah untuk menutup keran ekspor ternak hidup ke Australia.

Pada kasus penyiksaan hewan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) di Indonesia yang ditayangkan di kantor berita ABC pada tahun 2011, selain protes secara langsung kepada pemerintah, masyarakat Australia juga melakukan protes dengan mengurangi konsumsi daging sapi. Hal ini terlihat dari angka penjualan daging sapi yang menurun 15% setelah penayangan tersebut. Untuk merespon tuntutan tersebut, pemerintah Australia mengumumkan pemberhentian ekspor ternak hidup—khususnya sapi—ke Indonesia dengan harapan standar penyembelihan akan diterapkan sesuai dengan syarat kesejahteraan hewan/*animal welfare*. Menteri Pertanian Australia saat itu, Joe Ludwig, mengatakan bahwa larangan akan tetap berlaku hingga pemerintah Australia mendapatkan jaminan bahwa sapi-sapi Australia akan diperlakukan dengan layak. Pemerintah Indonesiapun mengkonfirmasi hasil temuan *Animals Australia* tersebut. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kasus penyiksaan hewan memang benar terjadi di beberapa RPH di Indonesia, bahkan pemerintah mengakui bahwa dari 120 RPH yang diinvestigasi, terdapat 50 RPH yang tidak layak dan pemerintah Indonesia telah melakukan pelarangan terhadap RPH yang dinyatakan tidak layak tersebut.

Tidak hanya menunjukkan kekejaman yang terjadi, *Animals Australia* juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan perlakuan kejam terhadap hewan dengan memberikan kesempatan donas. Uang yang terkumpul akan dipergunakan oleh organisasi ini untuk mendukung keberlangsungan kampanye tentang perlindungan hewan. Selain itu, *Animals Australia* juga mengajak para pengunjung situsnya untuk menyebarkan informasi mengenai penyiksaan hewan ternak dari Australia kepada orang lain atau pemerintah lokalnya.

Cara lain dalam berkampanye adalah dengan unjuk rasa/demonstrasi. Cara ini terlihat sangat efektif untuk mendapatkan perhatian publik karena disorot oleh media, sehingga pemerintah dan masyarakat umum dapat mengetahuinya. Unjuk rasa telah dilaksanakan beberapa kali. Salah satu contoh kasus adalah unjuk rasa besar pada bulan Oktober 2012 yang menyusul publikasi video tentang penyiksaan hewan ternak dari Australia di Pakistan. Masyarakat yang marah lalu bergabung dengan aksi yang dikoordinasi oleh *Animals Australia* dan melakukan aksi unjuk rasa di berbagai kota seperti Adelaide, Brisbane, Canberra, Melbourne,

Hobart, dan Fremantle. Massa yang terlibat dapat mencapai ratusan hingga ribuan orang di setiap kota. Aksi ini mendapat banyak dukungan, termasuk dari kalangan politisi/pejabat pemerintahan. Beberapa diantaranya adalah anggota senat dari *Green Party*, Lee Rhiannon dan anggota parlemen dari Partai Buruh, Melissa Parke yang mendukung pelarangan ekspor ternak hidup. Merespon tuntutan tersebut, pemerintahan Australia kemudian menghentikan ekspor ternak ke Pakistan untuk sementara waktu. Meskipun demikian, aksi protes terhadap ekspor hewan ternak hidup di Australia tetap mendapat penentangan dari beberapa pihak, khususnya dari peternak dan eksportir yang sangat menggantungkan hidupnya pada ekspor ternak ke luar negeri. Bahkan kedua kelompok pro dan kontra ekspor hewan ternak hidup saling berhadapan ketika berdemonstrasi di Fremantle pada Desember 2013.⁸⁴

Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan

Menurut *Pluralist Theory*/teori pluralis, kekuasaan (*power*) dalam suatu negara secara relatif terbagi-bagi dan institusi pembuat keputusan (pemerintah) sangat terbuka terhadap pengaruh dari banyak kelompok kepentingan. Akibatnya, keputusan politik hanya dapat dicapai dengan posisi tawar dan kompromi dari banyak orang, institusi, dan kelompok yang memiliki kekuasaan tersebut.⁸⁵

Konsep tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi di Australia dalam konteks peran kelompok penekan *Animals Australia* yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kekuasaan (*power*) utama pada suatu negara umumnya berada pada pemerintahnya yang berdaulat. Hal ini secara normatif juga berlaku di Australia dimana pemerintah menjadi aktor utama yang memegang kendali atas jalannya negara. Namun proses pembuatan kebijakan di Australia tidak terbatas pada pertimbangan pemerintah. Peran kelompok penekan seperti *Animals Australia* sangat besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan tersebut.

Penulis melihat bahwa terjadi hubungan timbal balik antara pemerintah dan kelompok kepentingan di Australia yang tercermin dari kasus ini. Bagi pemerintah, mengakomodasi kepentingan kelompok kepentingan—terutama kelompok kepentingan jenis *promotional*—menjadi penting karena kelompok ini membawa/mengusung nilai-nilai/kepentingan yang normatif-populis. Apabila pemerintah yang berkuasa dapat memenuhi kepentingan tersebut maka masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah dapat mengakomodasi kepentingan publik. Tentunya hal ini akan berdampak pada membaiknya citra partai yang sedang memegang pemerintahan. Namun apabila pemerintah menolak memenuhi tuntutan tersebut, citra pemerintah di mata rakyat dapat turun karena pemerintah akan dianggap tidak memihak pada kepentingan publik. Dalam kasus tuntutan pelarangan ekspor hewan ternak hidup, apabila pemerintah tidak mengabulkan tuntutan tersebut, maka masyarakat akan menganggap pemerintah tidak memiliki perasaan/nurani dan hanya mementingkan keuntungan yang diperoleh dari

⁸⁴ ABC, *Thousand Rally Against live Export Trade*(online), 07 Oktober 2012, (<http://www.Abc.net.au/news/2012-10-06/hundred-rally-against-live-exports-trade/4299198>), diakses 29 Maret 2015, pukul 06.00 Wib

⁸⁵ I. Marsh, *Op.Cit*, hal.359

perdagangan hewan ternak semata. Citra yang baik dapat mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan kepada partai yang sedang berkuasa di pemilu-pemilu berikutnya. Selain itu, kelompok kepentingan juga penting bagi pemerintah karena dapat menyediakan data/informasi yang tidak dimiliki pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah Australia sangat bergantung pada hasil investigasi yang dilakukan *Animals Australia* yang dapat memberikan informasi tentang penganiayaan hewan ternak di negara-negara lain.

Sedangkan bagi kelompok kepentingan, peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan utama dalam suatu negara sangat penting untuk dapat mewujudkan/melindungi kepentingan-kepentingan yang dijunjungnya. Dalam kasus ini *Animals Australia* sangat membutuhkan peran dan otoritas pemerintah untuk melarang ekspor hewan ternak hidup ke negara-negara yang melakukan penyiksaan terhadap hewan ternak agar hewan ternak yang dikirim dari Australia dapat diperlakukan secara layak, meskipun mereka adalah binatang. Memang pada kenyataannya kebijakan mengenai pelarangan ekspor hewan ternak hidup mendapat tentangan keras dari kelompok peternak, namun pada akhirnya pemerintah berusaha tidak begitu saja mengabaikan kepentingan kelompok tersebut dengan melarang ekspor hewan ternak hidup untuk sementara waktu sampai dengan ada jaminan dari pemerintah negara tujuan bahwa hewan ternak yang dikirim dari Australia akan memperoleh perlakuan yang layak.

Hal tersebut menjadi potret bahwa proses pengambilan kebijakan di Australia dapat dicapai dengan memperhitungkan posisi tawar dan kompromi dari pihak pemerintah dan pihak kelompok-kelompok penekan. Dalam kasus ini kepentingan kelompok penekan seperti *Animals Australia* menjadi prioritas lebih besar bagi pemerintah karena mendapat perhatian dan dukungan yang luas dari publik, sehingga pemerintah cenderung lebih responsif dengan melakukan pelarangan setelah tuntutan yang disertai bukti muncul dan menjadi isu hangat di tengah masyarakat.

BAB VII MEDIA MASSA AUSTRALIA

❖ PERKEMBANGAN MEDIA MASSA

Secara teritorial Australia adalah sebuah negara yang sangat besar, hal yang kemudian menciptakan logika linear akan kebutuhannya atas sarana *sharing* informasi, dalam konteks ini media massa. Akan tetapi hal ini tentunya berimbang sehingga pertanyaan tentang siapa mengontrol siapa dalam media dapat dipahami bahwa hal ini adalah bentuk saling interaksi dalam upaya pembangunan bukan dalam bentuk hegemoni global yang selalu berujung pada penindasan global. Media massa memiliki kekuatan yang besar ketika hal itu berada pada jalurnya bukan pada intervensi dan tekanan, sepatutnya media mampu menempatkan dirinya sebagai *news instrument* pembangun yang baik tanpa dominasi. Media massa dewasa ini menjadi sebuah barang hebat dalam dunia Globalisasi, persaingan informasi dan teknologi membawa media massa menduduki poin penting dalam hal ini, media massa seakan menjadi bisnis ataupun sebuah hal baru dengan sejuta potensi yang ada di dalamnya sehingga tak mengherankan ketika muncul nama-nama orang yang berada dibelakang wacana media.⁸⁶

Media Australia menganut prinsip-prinsip kebebasan liberal yang seringkali sarat makna. Sebab, Pemerintah Australia tidak memiliki kekuatan konstitusional untuk mengatur kegiatan media massa, yang dimiliki oleh swasta. Pemerintah Australia juga tidak mengenal pemberian izin penerbitan media massa sehingga pemerintah tidak berhak untuk menutup surat kabar. Murdoch menjadi pemilik 16 televisi lokal dan 31 koran termasuk Koran terbesar di Australia dan telah mengakuisisi berbagai media massa seperti Koran dan televisi lokal, di Indonesia Murdoch berhak atas ANTV yang telah dibawah kendalinya dan juga telah membeli *Lativi* yang sekarang telah menjadi *TvOne* bersama Abu Rizal Bakrie, selain itu Murdoch juga telah mengakuisisi MySpace.com pada tahun 2005 sehingga tak heran jika ia menjadi "*the most powerfull person in the world today*" dengan kerajaan media yang dimilikinya di seluruh dunia termasuk Australia sehingga dikatakan bahwa ketakutan akan keberpihakan media massa di Australia menjadi hal yang patut dipertanyakan.

Peran dan fungsi media massa di Australia sebagai mana yang telah kita bahas dari awal bahwa media massa memiliki poin penting sebagai alat kontrol social dalam masyarakat luas termasuk dalam masalah politik. Dewasa ini

⁸⁶ Margareth McColl, "The Mass Media and Political Behavior," dalam Dennis Woodward, Andrew Parkin, John Summers(eds), *Government Politics, and Power in Australia*, Longman Cheshire, Melbourne, 1987, hal 237

masalah politik menjadi sebuah hal yang sangat sensitif dan mampu menjadi liar ketika politik tak lagi memandang etika dan kemanusiaan sehingga menghalalkan segala cara termasuk melalui media massa yang menjadi wadah penghubung dengan jutaan orang di seluruh dunia. Berbicara tentang regulasi media massa dan terkait masalah politik, tentu tidak lepas akan peran pers di dalamnya.

Sydney Gazette

Sydney Gazette, pertama kali diterbitkan oleh mantan narapidana George Howe pada tahun 1803. Awal koran Australia merupakan catatan penting lokal, negara bagian dan peristiwa nasional. Halaman-halaman mereka merupakan sumber yang kaya informasi tentang sejarah masyarakat. Banyak koran utama yang beredar saat ini bisa melacak asal-usul mereka untuk publikasi dari masa kolonial. Namun, penampilan, isi, dan pengendalian surat kabar pada akhir abad ke-19 mencerminkan hal yang berbeda.

Pada bulan November 1800, Royal Laksamana berlabuh di koloni membawa narapidana yang diangkut. George Howe datang dengan pengalaman pencetakan dari Hindia Barat dan London. Keahlian yang berharga ini digunakan di pers pemerintah dan koloni pertama buku diterbitkan secara lokal, sebuah kompilasi dari perintah pemerintah yang diproduksi pada tahun 1802.

George Howe juga diperbolehkan untuk mencetak surat kabar pertama di Australia dari sebuah gudang sederhana yang terletak di bagian belakang Gedung Pemerintah. Mulai 5 Maret 1803 di Sydney Gazette dan New South Wales. Iklan dipublikasikan sebagai edisi mingguan dengan empat halaman portofolio dan sejumlah pemberitahuan swasta. Dalam edisi awal kertas, sebuah penjajah bisa menemukan pengiriman berita, hasil lelang, kejahatan laporan, dan pemberitahuan pertanian serta puisi, sastra, dan nasihat agama. Untuk mengumpulkan berita lokal, editor menggantung 'slip kotak' di depan toko di mana surat kabar dipublikasikan.

a . Sistem pers di Australia

Pers Komunis-Soviet di Australia

Pers sayap kiri (komunis) mengalami kejayaan sejak berakhirnya Perang Dunia I. Pada masa itu, para tentara yang kembali dari perang merasa muak dengan sistem kelas sosial yang lama. Dalam sistem tersebut, pemilik lahan pertanian dan peternakan berada di atas kaum pekerja, yang menderita selama Depresi Besar pada tahun 1930-an.

Selama Depresi Besar, banyak orang Australia kehilangan kepercayaan pada kemampuan wakil-wakil pemerintah mereka. Sejumlah organisasi ekstremis atau radikal memperoleh kekuatan dan popularitas sebagai akibat dari skala besar ketidakpuasan publik. Dari segi politik, kaum komunis, sosialis, organisasi pekerja dan pengangguran secara aktif menentang pengusiran paksa rumah-rumah, sedangkan kelompok-kelompok nasionalis dan fasis menikmati peningkatan keanggotaan menikmati hak politik.

Sistem pers komunis-Soviet di Australia berkembang pesat seiring meroketnya popularitas Partai Komunis Australia. Di ruang lingkup internasional, komunisme sendiri saat itu tengah berjaya di Uni Soviet dan China. Sistem pers komunis berkembang di Uni Soviet, negara di mana Partai Komunis Australia berkiblat. Dukungan atas sistem pers komunis di Australia memudar pada pertengahan tahun 1950-an. Peristiwa-peristiwa terkait komunisme di berbagai belahan dunia, seperti Revolusi Hungaria (1956) dan *The Great Leap Forward* (1958), mempengaruhi pudarnya dukungan pada sistem pers komunis.⁸⁷

b .Perkembangan Pers Otoriter dan Liberal di Australia

Dukungan atas pers komunis-Soviet pun beralih pada surat kabar yang kemudian menjadi suara penguasa, seperti *The Sydney Morning Herald* dan *The Age* di Melbourne. Keduanya dimiliki oleh keluarga Sir Warwick Fairfax, salah satu klan penguasa bisnis media di Australia. Pada periode ini, sistem pers di Australia beralih haluan menjadi otoritarian. Kemudian, terjadi persaingan antarkoran sore dalam memperebutkan pasar kelas pekerja dan komuter, misalnya *Daily Mirror* (Sydney), *Melbourne Herald*, *Telegraph Brisbane*, dan *Adelaide News*. Surat kabar-surat kabar tersebut kini sudah tidak lagi terbit. Pada periode ini, di bawah bendera surat kabar yang disebut terakhir, Rupert Murdoch mulai membangun kerajaan bisnis medianya. Sistem pers otoriter mawujud di Australia dalam berbagai aspek. Dibandingkan negara-negara liberal-demokratik lainnya, seperti Amerika Serikat dan Inggris, pers di Australia cenderung lebih terkekang. Ketidadaan perlindungan hukum terkait kebebasan berpendapat mereka, berdampak adanya rintangan bagi masyarakat terkait hukum dan komersial.

Namun demikian, saat ini sistem pers di Australia tak bisa dikatakan murni otoriter, melainkan cenderung ke arah yang lebih liberal dan berpihak pada pasar. Surat kabar yang sebelumnya konservatif dan menganut format *broadsheet*, seperti *Brisbane Courier-Mail* dan *Adelaide Advertiser*, berganti gaya menjadi format tabloid yang lebih kecil dengan konten yang berubah. Misalnya, meningkatnya pemberitaan bersifat hiburan seperti gosip selebriti.

Kebebasan Pers di Australia

Sekretaris Eksekutif Dewan Pers Australia Jack R Herman menggambarkan masyarakat Australia sebagai “bebas dan terbuka, toleran terhadap pendapat yang berlawanan, dengan tradisi berupa pers bebas dan kebebasan berbicara”. Ia berpendapat bahwa gagasan tentang kebebasan berbicara itu begitu jelas, hingga para pendiri negara melihat tidak perlu mengawetkan perlindungan tersebut dalam Konstitusi. Namun, saat ini ada pertanyaan penting akan apakah media benar-benar bebas untuk melaporkan masalah dan

⁸⁷ <http://beritasore.com/2007/04/10/presiden-afic-minta-media-dan-politisi-australia-hormati-hak-komunitas-muslim/>, diakses tanggal 01 April 2015, pukul 03.00 Wib

keprihatinan yang terkait kepentingan umum, dan apakah informasi yang mereka butuhkan tersedia untuk itu.

Chris Nash dari Australian Centre for Independent Journalism menyatakan, Australia adalah salah satu dari beberapa negara-negara yang tidak memiliki instrumen hukum (baik Undang-Undang Dasar atau *Bill of Rights*) yang menegaskan jangkauan dan cakupan dari kebebasan warganya, termasuk kebebasan berbicara. Sistem hukum umum di negara lainnya, termasuk Inggris, Kanada dan Selandia Baru, memiliki Undang-Undang yang termasuk dalam kerangka hukum mereka dalam bentuk tertentu. Sejumlah ketentuan ini terbatas pada kebebasan berbicara, berekspresi atau berkomunikasi; seperti Amandemen Pertama Amerika Serikat yang khusus untuk kebebasan pers. Kerangka konstitusional Australia bagi kebebasan pers lebih lemah daripada di negara liberal-demokratik lainnya. Tekanan komersial yang kuat dan legislatif dan dampak keuangan dari pemerintah nasional baru-baru ini di alternatif media publik telah berdampak merugikan. Medan di mana kontes untuk kebebasan berekspresi dan kebebasan pers terjadi lebih berbahaya bagi publik.

Dampaknya, menurut Heather Marano, adalah memburuknya perkembangan kebebasan pers di Australia. Praktik-praktik seperti merekam pembicaraan telepon, intimidasi, dan pemaksaan terhadap wartawan untuk menahan informasi dari masyarakat dan sumber-sumber menyerah kepada pihak berwenang, nyatanya terjadi di negara “yang berkembang dan seharusnya demokratis”.⁸⁸

Pada tahun 2007, Reporters Without Borders (organisasi internasional non-pemerintah yang mempromosikan kebebasan pers) menempatkan Australia pada peringkat 28 dari 169 negara untuk kebebasan pers. Ini adalah penurunan yang signifikan dari di peringkat 12 pada tahun 2002, dan menempatkan Australia di belakang negara-negara berkembang seperti Namibia, Latvia dan Republik Ceko. Amerika Serikat juga memperoleh peringkat buruk yang memalukan. Meskipun didasarkan pada cita-cita demokrasi dan kebebasan berekspresi, negeri Paman Sam itu telah berputar-putar di sekitar peringkat ke-limapuluh selama beberapa tahun terakhir.

Media yang bebas dan independen sangat penting bagi kebebasan berekspresi dan pendapat, seperti tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 19). Ini adalah inti dari proses demokrasi. Namun, banyak negara yang biasanya digambarkan sebagai demokratis, seperti Australia dan Amerika Serikat, gagal untuk secara efektif mempromosikan kebebasan pers. Mengapa? Alasan dapat dirangkum dalam satu kata: Terorisme. Setelah serangan 11 September, beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Britania dan Australia spesifik memperkenalkan Undang-Undang Anti-Terrorisme yang meningkatkan pengawasan warga dan pemantauan arus informasi. Inilah langkah-langkah

⁸⁸ <http://www.kbri-canberra.org.au/speeches/2004/041206civitas.htm>, diakses tanggal 02 April 2015, pukul 03.00 Wib

antiteror yang telah dikaitkan dengan penurunan dalam kebebasan pers di seluruh dunia Barat.

Pemerintahan Kevin Rudd telah mengindikasikan bahwa kebebasan pers merupakan prioritas kunci, namun mereka tidak berbuat banyak untuk memperbaiki kerusakan yang telah disebabkan hukum Australia. Sebaliknya, mereka berencana untuk lebih memperluas Undang-Undang Anti-Terrorisme untuk memungkinkan perusahaan untuk mengakses email karyawan. Partai Demokrat telah mendesak Rudd untuk melakukan mengevaluasi hukum yang berlaku sebelum mengembangkannya.

Dewan Pers di Australia

Australian Press Council Incorporated adalah badan pengawas media cetak yang melakukan pengaturan secara mandiri (*self-regulatory*). Dalam laman situs resminya, Dewan mengklaim bahwa pengaturan secara mandiri yang mereka terapkan memiliki sejumlah keuntungan. Keuntungan-keuntungan tersebut adalah dapat diakses oleh semua kalangan (*accessible to all*), menjadi sebuah industri yang berkomitmen pada standar dan untuk dewan pers yang independen (*an industry committed to standards and to an independent press council*), melindungi yang lemah (*protecting the vulnerable*), dan pada akhirnya menjaga keberlangsungan pers yang bebas dan bertanggung jawab (*maintaining a free and responsible press*).

Dewan Pers Australia didirikan pada Juli 1976, setelah diskusi antara penerbit dan Persatuan Wartawan Australia (AJA). Dewan didirikan dengan dua tujuan utama: untuk membantu melestarikan kebebasan tradisional pers di Australia dan memastikan bahwa pers yang bebas bertindak dengan tanggung jawab dan etika. Dewan pers menyediakan fasilitas gratis, mandiri, dan efisien mengenai masalah pers. Dasarnya adalah sembilan prinsip yang terkandung dalam *Statement of Principles*. Isinya mengenai akurasi; ketentuan tanggapan terhadap ketidaktelitian yang membahayakan; keadilan dengan menghormati privasi dan kepekaan individu; menghindari berita yang diperoleh dengan cara tidak adil dan tidak benar; membedakan fakta dan opini serta tidak menyimpang dari materi; pemberitaan yang tidak baik; menghindari pemberitaan yang berkaitan dengan masalah ras, suku, dan agama; merespon terhadap kritik; dan menjamin akan adanya publikasi terhadap semua keputusan hakim.

Tugas dari dewan pers ini adalah untuk menjaga karakter pers Australia tetap pada jalurnya. Dewan pers memiliki mandat dalam mempertimbangkan, menyelidiki, dan menangani keluhan mengenai pelaksanaan pers serta perilaku orang-orang dan organisasi terhadap pers. Dewan pers ini berpegang pada pernyataan kebebasan pers untuk menerbitkan adalah kebebasan orang akan informasi, dan bahwa kebebasan pers juga termasuk hak untuk menerbitkan apa yang layak menjadi berita tanpa rasa takut atau menguntungkan, dan hak untuk mengomentari atas berita tersebut. dewan pers percaya bahwa kebebasan pers harus dipenuhi agar fungsi pers sebagai *watchdog* bisa dijalani dengan baik dan benar. Dewan pers ini didanai oleh konstitusi, majalah, MEAA, dan AAP dari sekian persen budget mereka.

Sesuai dengan Konstitusi yang baru-baru ini direvisi, tujuan dari Dewan Pers Australia adalah untuk mempromosikan kebebasan berbicara melalui media cetak yang bertanggung jawab dan mandiri, dan kepatuhan yang tinggi terhadap standar jurnalistik dan editorial, dengan:

- a. Mempertimbangkan dan menangani keluhan dan keprihatinan tentang isi di surat kabar, majalah dan jurnal, diterbitkan baik dalam bentuk cetak atau di Internet;
- b. Mendorong dan mendukung inisiatif oleh media cetak untuk mengatasi penyebab pembaca 'keluhan dan kekhawatiran';
- c. Meninjau, dan jika perlu, menantang perkembangan politik, legislatif, komersial atau lain-lain yang dapat merugikan penyebaran informasi bagi kepentingan publik, dan mungkin akibatnya mengancam hak masyarakat untuk mengetahui;
- d. Membuat pernyataan untuk pemerintah, pertanyaan publik dan forum-forum lain mengenai masalah-masalah yang tepat tentang kebebasan berbicara dan akses terhadap informasi;
- e. Melakukan penelitian dan konsultasi mengenai perkembangan kebijakan publik yang mempengaruhi kebebasan berbicara, dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu tersebut;
- f. Mempromosikan pemahaman Tujuan, Prinsip-prinsip dan cara kerja Dewan terutama di kalangan editor, jurnalis dan sekolah jurnalisme, melalui forum dan konsultasi; dan mendorong umpan balik untuk pertimbangan Dewan.

Untuk melaksanakan peran tanggung jawab pers, Dewan berfungsi sebagai forum untuk siapa pun yang memiliki keluhan mengenai pers. Dalam upaya untuk mempertahankan kebebasan pers, Dewan memantau singkat tentang perkembangan yang mungkin memengaruhi kebebasan tersebut. Dewan ini didanai oleh koran dan industri majalah, dan kekuasaannya bertumpu pada kemauan penerbit dan editor untuk menghormati pandangan Dewan, secara sukarela untuk mematuhi standar etika dan untuk mengakui kesalahan secara terbuka.

Sejarah Dewan tidak selalu mulus. John Fairfax Ltd, yang semula tidak berada dalam pihak yang sama dengan Dewan, akhirnya bergabung pada tahun 1982. *News Ltd* keluar dari Dewan pada bulan Juni 1980, dan bergabung kembali pada tahun 1987. (Publikasinya terus bekerja sama dengan Dewan di masa itu.) Demikian juga, *Australian Suburban Newspapers Association Pty Ltd* sempat bergabung dan meninggalkan Dewan pada beberapa kesempatan, yang terakhir pada tahun 1996 dan bergabung kembali pada tahun 1998. AJA (sekarang bagian dari *Media, Entertainment and Arts Alliance*) menarik diri dari Dewan pada tahun 1987. Pada tahun yang sama, Dewan sudah direstrukturisasi menjadi format yang sekarang. MEAA kembali berafiliasi dengan Dewan pada tanggal 1 Juli 2005. Pada tahun 1992, Dewan Pers Australia menjadi anggota yayasan Asosiasi Dewan Pers Dunia dan bertindak sebagai Convenor / Dewan Penyimpanan. Pada bulan Mei 2000, Dewan Keluar dari Asosiasi

Sejak November 2009, Dewan terdiri dari 15 anggota, yang mewakili penerbit, para wartawan, serikat buruh, wartawan independen, dan anggota masyarakat, dan dipimpin oleh Ketua independen. Dewan mengadakan pertemuan setiap bulan, biasanya di Sydney, di kantor kecil yang dipimpin oleh Sekretaris

Eksekutif. Pada Agustus 2007, Dewan ini memperoleh badan hukum berdasarkan New South Wales Associations Incorporation Act.

Dewan akan dapat mengubah Konstitusi, dalam kerjasama dengan badan-badan konstituen. Dewan memiliki kekuasaan untuk menentukan luas dan memvariasikan struktur dan prosedur internal.

❖ KEPEMILIKAN DAN KONTROL PEMBERITAAN

If you're not carefull, the newspaper will have you hating the people who are being oppressed and loving the people who are doing the oppressing (Malcolm X)

Sepenggal kutipan di atas secara tersirat menunjukkan bahwa media massa, pada dasarnya memiliki kekuatan yang begitu besar. Sedemikian besar *power* yang dimiliki hingga media massa dapat mempengaruhi suatu aktor untuk berperilaku atau berpikir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh media massa, sekalipun pada mulanya perilaku atau pikiran tersebut tidak sesuai dengan kehendak si Aktor. Dengan kata lain, media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi *mindset* seseorang. Ya, media massa dapat mempengaruhi perspektif kita dalam memandang dunia.

Karena hal tersebut, banyak orang yang kemudian memanfaatkan media massa sebagai sarana untuk mencapai kepentingan yang ingin diraih. Seorang produsen makanan cenderung mengiklankan produknya di televisi, koran ataupun radio untuk mempengaruhi masyarakat agar mengkonsumsi produknya. Seorang penyanyi gencar mempromosikan album barunya di media massa untuk mempengaruhi masyarakat agar menyanyikan lagu-lagunya. Begitu juga untuk para politikus. Media massa, dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Efektivitas media massa untuk suatu perubahan politik memerlukan situasi politik yang kondusif. Iklim demokrasi, sangat mempengaruhi mati atau hidupnya media massa di suatu negara. Media massa yang bebas adalah salah satu indikator adanya demokrasi di suatu negara. Bahkan dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, media massa bahkan dapat menjadi salah satu pilar penting di sana. Australia, adalah negara yang dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Karenanya negara pesemakmuran Inggris ini mengakui adanya supremasi hukum, menghormati toleransi beragama, dan tentunya kebebasan berbicara serta berserikat. Ditopang dengan sistem pemerintahan yang demokrasi seperti itu, media massa kemudian menjadi salah satu pilar yang sangat esensial dalam sistem politik Australia.

Semakin berkembang zaman, semakin besar peran yang dipegang oleh media massa dalam kehidupan politik. Telah terjadi perluasan makna dalam konteks peranan yang dimainkan oleh media massa ini. Media massa bukan hanya sebagai sumber informasi politik, namun juga menjadi faktor pendorong atau trigger yang dapat berimplikasi pada perubahan politik. Selain itu, masih banyak aspek dari media massa yang mengukuhkan dirinya menjadi pilar penting di

politik dan pemerintahan Australia. Menurut Harsono Suwardi, seorang profesor komunikasi Universitas Indonesia, terdapat empat faktor yang membuat media massa memiliki pengaruh yang begitu kuat dalam kehidupan politik, yakni⁸⁹:

Pertama, media massa memiliki daya jangkau yang luas dalam menyebarkan informasi politik, bahkan mampu melewati batas wilayah, kelompok umur, jenis kelamin dan status sosial-ekonomi. Dengan begitu, status politik yang dimediasikan menjadi perhatian bersama di berbagai tempat dan kalangan. *Kedua*, media massa memiliki kemampuan untuk melipatgandakan pesan yang begitu mengagumkan. Dilipatgandakan atau tidaknya pesan memiliki korelasi yang begitu erat dengan respons masyarakat terhadap isu tersebut. Apabila responnya positif⁹⁰, kecenderungannya media massa akan melipatgandakan isu tersebut. Dampak pelipatgandaan ini tentu sangat besar di tengah masyarakat. *Ketiga*, setiap media dapat mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai dengan pandangannya masing-masing. Media massa memiliki kebijakan redaksional terkait dengan isi peristiwa politik yang ingin disampaikan. Kebijakan ini membuat media banyak diincar oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya dan sebaliknya, juga dijauhi oleh pihak-pihak yang tidak sependapat dengannya. *Keempat*, media massa memiliki fungsi agenda setting. Dengan begitu media massa memiliki hak untuk menyiarkan suatu peristiwa politik atau tidak menyiarkannya. Jadi media massa menggiring opini publik dalam suatu kuorum atau diskusi. Output dari diskusi inilah yang akan menentukan agenda-agenda dalam politik pemerintahan. *Kelima*, pemberitaan peristiwa oleh suatu media kecenderungannya akan berkaitan dengan media lainnya sehingga terbentuklah suatu rantai informasi (*media as links in other chains*) yang menambah kekuatan media massa dalam menyebarkan informasi politik dan otomatis juga memperbesar dampak yang dapat mereka berikan terhadap publik.

Dari kelima faktor tersebut, dapat dikerucutkan bahwa fungsi media dalam politik yang paling esensial adalah dengan kemampuannya menggiring opini publik dapat mempengaruhi perspektif masyarakat dalam memandang politik itu sendiri, apakah pro ataukah kontra. Hubungan antara media massa dengan politisi sendiri bagaikan hubungan “ayam” dengan telur”. Mereka saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa berita, media massa tidak akan bisa berjalan dan politisilah yang menyediakan berita ini. Sedangkan politisi membutuhkan media massa agar pandangan-pandangan politiknya disebarkan ke masyarakat luas, terutama bagi daerah pemilihnya. Maka dari itu, bukanlah hal yang mengherankan apabila politisi di Australia sangat menghargai media massa karena pengaruhnya yang begitu besar terhadap masyarakat hingga secara tidak langsung mempengaruhi pemerintahan dan politik Australia. Sedemikian besar peran media, hingga Napoleon pernah berkata bahwa: ⁹¹

“I fear three newspapers more than a hundred thousand bayonets.”

⁸⁹ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa* (Jakarta: Granit, 2004), h. xv.

⁹⁰ Respon positif ini dapat dilihat dari eksemplar surat kabar, tabloid atau majalah yang terjual serta dari rating pemirsa televisi.

⁹¹ Zulkifli Hamid, *Op.Cit*

Dalam konteks media massa di Australia, korelasi antara media massa terhadap politik dan pemerintahan lebih erat lagi karena praktek oligopoli yang berlangsung di sana. Beberapa kritikus berargumen bahwa kekuatan media berkorelasi erat dengan siapa pemilik media tersebut. Media massa di Australia hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha kaya saja sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks kepemilikan media massa berlaku sistem yang sangat oligopoli.

Oligopoli media di Australia berkembang selain karena faktor ekonomi, juga karena faktor politik. Telah diketahui bahwa untuk membentuk suatu media massa membutuhkan dana yang tidak sedikit. Setelah suatu media terbentuk, masih dibutuhkan dana yang tidak kalah besar untuk biaya-biaya produksi ketika menjalankannya. Banyak sekali surat kabar di Australia yang bangkrut karena masalah finansial, seperti *Daily Sun and Sunday Sun*, *Perth's Western Mail*, *Brisbane's Telegraph*, *Business Daily* dan *Sydney Mid-week News*. Oligopoli ini semakin berkembang karena faktor-faktor politik yang ada seperti pemberian izin membuat televisi ke beberapa perusahaan tertentu saja. Lagipula, sebagai pemain lama raja-raja media di Australia sudah mendapatkan keamanan yang sangat sulit diganggu, baik dalam konteks ekonomi maupun dalam konteks politik.

Dua penguasa media yang paling besar dan terkenal adalah Rupert Murdoch dan Kerry Packer. Tidak hanya raja media di Australia, mereka berdua termasuk penguasa-penguasa media di dunia ini. Murdoch, yang selama puluhan tahun mengembangkan sayap News Corporation miliknya ke berbagai pelosok dunia, adalah pemilik saham di Fox Network, Star TV, Studio 20th Century Fox, surat kabar *The Times* dan *The Sun* di London, televisi kabel Fox News, Fox Sport dan lainnya. Di Australia sendiri, Murdoch memiliki 16 televisi lokal. Sementara Kerry Packer memiliki Australian Consolidated Press (ACP) dan Publishing and Broadcasting Limited (PBL). Dalam bidang media, PBL memiliki sembilan jaringan televisi di Australia dan Australian Consolidation Press. PBL memiliki jumlah investasi yang besar dalam berbagai televisi berbayar dan jaringan televisi digital, seperti Foxtel dan Sky News Australia. Australian Consolidation Press sendiri yang didirikan pada tahun 1933 memproduksi lebih dari 60 majalah di Australia seperti *Australian Women's Weekly*, *Cleo*, *Harper's Bazaar*, *Australian House and Garden* dan sebagainya.⁹²

Praktek oligopoli dalam kepemilikan media massa di Australia tersebut tentu memberikan dampak bagi masyarakat Australia. Yang paling terasa adalah, dengan pilihan yang begitu, mereka tidak bisa memilih sumber informasi lainnya apabila ingin mengetahui isu-isu politik. Selanjutnya, pemilik media dan manajer-manajernya memiliki kesempatan untuk mengintervensi berita yang diturunkan oleh media tersebut.

Dan kecenderungan yang ada memang seperti itu. Seringkali mereka bertindak secara langsung untuk memastikan bahwa berita, editorial atau bahkan seluruh liputan berita tersebut merefleksikan sudut pandang tertentu atau melindungi kepentingan tertentu. Sedikit sekali pilihan yang tersedia bagi seorang

⁹² Tjipta Lesmana, "Kasus The Sydney Morning Herald, Kebebasan ala Pers LiberalLiberal, dalam Philips Kitley, Richard Chauvel, David Reeve(Eds), *Australia Dimata Indonesia: Kumpulan Artikel Pers Indonesia 1973-1988*, Kedubes Australia dan Gramedia, Jakarta, 1989, hal 295

staff di media yang tidak suka dengan perintah-perintah intervensi dari atasan. Karena praktek oligopoli, mereka tidak dapat bebas keluar-masuk perusahaan karena pada dasarnya kepemilikan media massa di Australia hanya berada di tangan beberapa orang saja. Dampak yang terakhir adalah, bahwa pemilik dapat mengurangi biaya produksi tanpa takut akan kompetisi. Salah satu cara untuk mengurangi biaya produksi yang paling mudah ditempuh adalah dengan cara mengurangi biaya untuk pegawai. Artikel yang ditulis di salah satu surat kabar sering dimuat juga di surat kabar lain yang masih berdiri dalam satu perusahaan yang sama.

Implikasinya adalah, sudut pandang yang dapat digunakan masyarakat semakin terbatas apalagi dengan kemungkinan adanya monopoli pemberitaan karena konglomerasi media massa tersebut. Perlu diingat bahwa selain radio dan televisi ABC, semua media massa di Australia adalah media komersial yang dikuasai oleh perusahaan swasta. Karenanya, tidak ada ikatan-ikatan yang mengharuskan mereka memberitakan sesuatu secara adil. Orientasi politik pemilik, secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi arah pemberitaan.⁹³

Peran media massa di Australia semakin terasa ketika masa-masa pemilihan umum. Sudah penulis sampaikan, bahwa mayoritas media massa di Australia berkonsentrasi pada masalah politik. Tingkat konsentrasi mereka ini semakin tinggi hingga hampir di seluruh halaman surat kabar, di televisi juga di radio mengenai berita kampanye, foto-foto para calon pemimpin yang baru, dan iklan dari partai-partai, organisasi, maupun individu. Dalam masa-masa ini dapat dikatakan mereka memainkan peran yang begitu krusial, walaupun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi suara masyarakat dalam pemilu.

Akibatnya peserta kampanye betul-betul berusaha memanfaatkan media massa semaksimal mungkin. Dalam membangun citra mereka di depan masyarakat, para politisi juga memanfaatkan media sebagai sarana untuk penampilan foto profil mereka atau gambar-gambar mereka. Pesan lisan, yang dilengkapi dengan penayangan gambar dalam televisi atau surat kabar sangat penting bagi mereka. Dengan begitu, simpati publik akan semakin besar, terutama yang ada di daerah pemilihannya. Menyadari urgensi media itulah mereka kemudian membanjiri media dengan iklan-iklan kampanye mereka semasa kampanye.

Karena iklan-iklan dari peserta kampanye tersebut, dapat dikatakan masa kampanye adalah masa-masa panen bagi mereka. Dinamikanya, harga iklan-iklan tersebut pastilah mahal sedangkan di masa kampanye partai-partai politik tidak segan untuk mengeluarkan uang hingga jutaan dolar dalam rangka mengkampanyekan program-program mereka di berbagai media. Terlepas daripada itu, kecenderungannya masyarakat juga akan mengikuti perkembangan kampanye sehingga rating ataupun jumlah penjualan eksemplar mereka meningkat.

⁹³ Rodney Smith, *Politics in Australia* (Australia: Allen&Unwin Pty Ltd, 1993), h.303-306.

Ada satu contoh kasus menarik yang merefleksikan urgensi media dalam perpolitikan Australia, khususnya pada masa kampanye. Kasus ini terjadi pada dekade 1970-an di Australia, dan masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu tindakan media dalam memberitakan politik yang sudah sangat jauh melewati batasan yang seharusnya. Pada tahun 1975, semua surat kabar milik Murdoch mengecam Perdana Menteri Gough Whitlam, pemimpin Partai Buruh ketika itu. Serangan Murdoch terhadap Whitlam sungguh merupakan hal yang berkontradiksi dengan posisi Murdoch ketika pemilihan tahun 1972. Ketika itu Murdoch menggunakan salah satu surat kabar miliknya yaitu The Australian untuk menyokong Whitlam. Murdoch mendonasikan uangnya lebih dari \$74.000 (jumlah yang besar saat itu) untuk kampanye ALP. Hasilnya, slogan 'It's Time' yang didengung-dengungkan oleh Whitlam memenuhi hampir semua surat kabar Murdoch dan Whitlam berhasil memenangkan kampanye.

Ketika Murdoch 'menyerang' Whitlam, laporan berita dan tulisan-tulisan para reporter surat kabar miliknya telah diedit hingga akhirnya yang kemudian muncul dalam surat kabar adalah berita-berita yang mengecam Whitlam. Salah seorang staff Murdoch di The Australian pernah berkata bahwa, *"You literally could not get a favourable word about Whitlam in the paper. Copy would be cut, lines would be left out."*⁹⁴

Sedemikian besar *back bench subeditor* yang dilakukan Murdoch, hingga para reporter politik surat kabar The Australian pernah mengirimkan surat protes kepada Murdoch. Karena tidak ada response dari Murdoch terkait dengan surat mereka, akhirnya wartawan The Australian melakukan aksi mogok bersama-sama dengan wartawan dua surat kabar Murdoch lainnya, The Sunday Mirror dan The Sunday Telegraph. Setelah perundingan panjang, Murdoch kemudian berjanji untuk berita-berita selanjutnya, *back bench* yang akan dia lakukan akan tunduk kepada kode etik. Sayangnya janji tersebut diberikan saat masa kampanye hampir selesai. Akhirnya, Whitlam kalah dan Malcolm Fraser dari Partai Liberal-lah yang memenangkan pemilu.

Setiap reaksi, tentu ada aksi yang melatarbelakanginya. Orientasi politik Murdoch yang berbeda (pada tahun 1972 mendukung Whitlam dan tahun 1975 justru menjatuhkannya), dilatarbelakangi oleh faktor-faktor tertentu. Salah satunya adalah fakta bahwa pemerintahan Whitlam telah kehilangan dukungan publik. Logikanya, media massa akan memberikan apa yang diinginkan oleh publik agar tingkat penjualan mereka meningkat. Dan itulah yang dilakukan oleh Murdoch. Akan tetapi, tentu ada unsur-unsur politis di dalam permainan tersebut. Hal itu semakin terlihat ketika Malcolm Fraser kemudian menawarkan jabatan duta besar di Jepang kepada mantan staff Murdoch, John Menedue.⁹⁵

Sosok Murdoch merupakan sosok yang strategi-strateginya yang luar biasa cerdas hingga berhasil menghimpun kekuatan besar yang mampu mengontrol

⁹⁴ Oxford University Press, *The Murdoch Papers and the 1975 'dismissal' Election*.

Diakses dari situs

http://www.oup.com.au/orc/extra_pages/higher_education/hirst_and_patching/murdoch_papers, diakses pada tanggal 29 Maret 2015, pukul 06.00 Wib

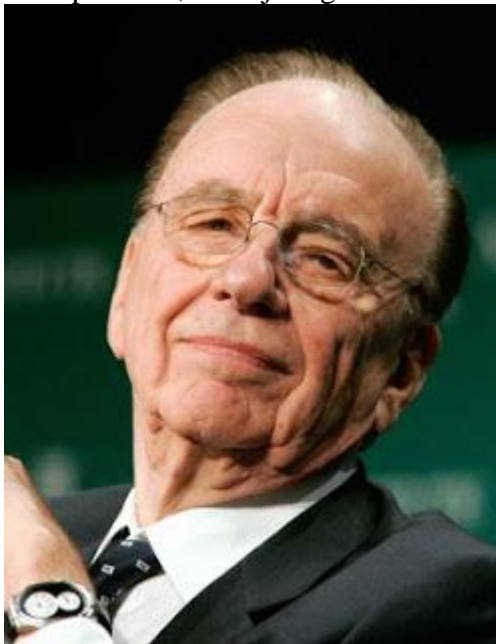
⁹⁵ *Ibid*

suatu negara (dalam perkembangannya, Murdoch bahkan mulai mengintervensi politik di Amerika Serikat dan Inggris). Menurut saya, dalam prakteknya bahkan Murdoch lebih licik daripada politikus-politikus sendiri. Karena dengan politik yang dia lakukan, Murdoch hampir selalu dapat mencapai kepentingannya. Seorang presiden normalnya hanya dapat berkuasa selama empat tahun akan tetapi seorang Rupert Murdoch ini telah berkuasa selama puluhan tahun. Namun, rasa ngeri dan khawatir itu memang ada. Apa yang akan terjadi terhadap dunia ini apabila media massa sedemikian besar pengaruhnya? Yang lebih parah lagi, media massa itu hanya dikuasai oleh segelintir orang saja?

I try to keep in touch with the details...I also look at the product daily. That doesn't mean you interfere, but it's important occasionally to show the ability to be involved. It shows you understand what's happening. (Rupert Murdoch)

Rupert Murdoch, Raja Media Massa Dunia

Bagaimana rasanya menjadi seorang pemilik korporasi media terbesar nomor 4 di dunia? Seperti seluruh dunia jatuh ke dalam genggam tangan. Mungkin itulah yang dirasakan oleh Rupert Murdoch, seorang pria kelahiran Melbourne, Australia. Dia adalah pemilik korporasi media besar News Corporation, serta jaringan televisi FOX.



Rupert berasal dari keluarga yang dekat sekali dengan media. Ayahnya, Keith Murdoch, dikenal sebagai seorang koresponden wilayah perang dan memiliki beberapa media cetak di Australia, serta sebuah stasiun radio di sebuah kota pertambangan di daerah pinggir kota. Sejak kecil, dia sering diajak mengunjungi tempat penerbitan, rumah seorang loper koran, dan dia mengaku senang sekali ketika itu. Rupert memiliki tiga saudara, ketiganya perempuan. Ketika usianya 12 tahun, Rupert sudah tahu bahwa dia menyukai bidang media massa.

Pengalaman pertamanya bersentuhan langsung dengan media terjadi ketika ia bersekolah di Geelong Grammar School. Pada saat itu Rupert bertugas mengedit media publikasi yang akan diterbitkan di sana. Selain itu ia juga

bergabung menjadi co-editor di media resmi sekolahnya yakni The Corian. Sejak dulu, Rupert memang seorang yang aktif. Ia bergabung dalam tim kriket, serta bekerja sambilan di salah satu koran milik ayahnya yaitu The Merlbourne Herald.

Tahun 1952, ayahnya meninggal. Usianya ketika itu 22 tahun. Sepeninggal ayahnya, ia mewarisi dua media cetak di Adelaide yakni News dan Sunday Mail. Di awal kepemimpinannya, dia menulis headline, mendesain layout, dan juga ikut andil di bagian percetakan dan pengetikan beritanya. Dia membuat perubahan besar di berbagai sisi. Fokus pemberitaan News diubah menjadi berita-berita kriminal, seks, serta skandal. Berkat perubahan ini, News mendulang sukses luar biasa. Tahun 1956, ia membeli sebuah media yang berbasis di Perth yaitu Sunday Times. Tidak lama setelah itu, tahun 1960, ia membeli The Mirror yang berbasis di Sydney.

Dia menjadi orang pertama yang membuat surat kabar berskala nasional di Australia dengan nama Australian. Usianya baru menginjak 37 tahun, tetapi nilai perusahaannya saat itu sudah mencapai \$50 miliar. Setelah itu dia pindah ke Eropa dan memperluas kerajaan medianya kesana. Dia membeli The News of the World dan The Sun, dan mengubah keduanya menjadi dua majalah dengan oplah yang besar. Setelah itu Murdoch mulai merambah pasar Amerika Serikat dengan membeli San Antonio News. Kemudian dia membuat tabloid Star, membeli New York Post, dan di tahun 1979 dia menyatukan semua media yang dimilikinya tersebut dalam satu naungan perusahaan yakni News Incorporation. Setelah itu dia masih melanjutkan sepak terjangnya dengan membeli Chicago Sun-Times, Village Voice, dan New York magazine. Tahun 1985 dia memperluas pengaruhnya dengan membeli 20th Century FOX Film dan menyatukannya menjadi FOX Incorporation. Dia membangun STAR TV di Hongkong, membeli beberapa perusahaan penerbitan di Inggris dan Amerika, membeli Myspace.com, dan Wall Street Journal.

Tahun 2011, salah satu media miliknya yakni The News of the World tersandung kasus penyadapan telepon. Meski begitu, hal itu tidak melemahkan pengaruh Rupert Murdoch di dunia media massa. Sampai saat ini, dia masih menjadi salah satu orang dengan pengaruh terbesar di media. Bicara tentang korporasi, di Indonesia pun korporasi media sudah menjamur. Banyak Rupert-Rupert Murdoch di Indonesia dengan kuasa yang luar biasa terhadap media yang dimilikinya. Hal ini disebabkan dengan semakin bebasnya perekonomian di Indonesia, sehingga siapa saja bisa memiliki perusahaan selama dia memiliki modal. Sudah bukan rahasia jika media saat ini dikuasai oleh perseorangan dengan pengaruh yang hampir tidak terkontrol. Apalagi sebagian besar dari pemilik modal tersebut juga berperan aktif dalam politik. Agaknya media massa memang menjadi lahan yang sangat menggiurkan.

Kita tahu bagaimana Trans TV dan TV7 yang kemudian berganti nama menjadi Trans 7 bergabung dalam naungan Trans Corp milik Chairul Tanjung. Kemudian bagaimana Indosiar merapat pada SCTV di bawah PT Surya Citra Media milik Sutanto Hartono, serta AnTV dan TV One milik Abu Riexal Bakrie. Selain itu masih ada Grup Jawa Pos milik Dahlan Iskan, RCTI, Global TV dan MNC TV yang menjadi satu di Media Nusantara Citra milik Harry

Tanoesoedibjo, BeritaSatu Media Holdings milik Grup Lippo, Kompas Gramedia milik Jakoeb Oetama, Grup Indika milik Agus Lasmono dan Wishnutama, Indonesia Network dengan jaringan TV-TV lokalnya, Sindo Media, Mahaka Media dengan Republiknya dimiliki oleh Erick Thohir, Media Group milik Surya Paloh, Visi Media dengan Vivanews.com nya, serta MRA Media Group yang sukses mengeluarkan majalah-majalah seperti Cosmopolitan, FHM, Spice, dan lain-lain.

Jaringan sebuah korporasi ini tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja, tetapi juga merambah sampai ke daerah-daerah. Contohnya seperti Grup Jawa Pos yang memiliki koran lokal hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Lalu bagaimana dengan koneksi dan kerjasama antara lokal dengan pusat ini? Bagaimana kerja korporasi News Incorporation yang tersebar di seluruh dunia? Terima kasih kepada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang telah memudahkan jaringan komunikasi dan kerjasama ini.

Dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi dan informasi saat ini, perusahaan-perusahaan tersebut dapat saling berinteraksi tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan adanya teknologi teleconference, bisa jadi rapat tidak harus berangsur dalam satu ruangan, tetapi cukup menggunakan fasilitas teleconference. Pengiriman surat-surat atau instruksi pun bisa diberikan melalui email yang artinya mengefisienkan waktu, biaya, dan kerja. Induk perusahaan dapat mengontrol anak-anak perusahaannya yang tersebar di berbagai daerah tanpa harus repot-repot mendatangkannya satu per satu. Untuk korporasi media sendiri, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga meningkatkan tuntutan pasar terhadap media-media yang segar. Masyarakat senantiasa butuh hiburan, informasi, serta edukasi. Sehingga tidak heran jika bisnis media semakin menggiurkan saja.

❖ MEDIA MASSA DAN POLITIK

Politik suatu negara menjadi salah satu point penting dalam perjalanan roda pemerintahan suatu negara baik itu negara besar maupun negara kecil yang terlaksana sebagai bentuk perwujudan eksistensi suatu negara baik itu bersifat local maupun internasional, suatu negara menjalankan segala bentuk kerja pemerintahan termasuk politiknya sebagai bentuk interaksi dan juga menjadi sebuah langkah pasti negara tersebut terhadap masalah yang dihadapinya sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pada dasarnya politik suatu bangsa adalah bentuk pencerminan karakteristik suatu negara terhadap apa yang sedang terjadi baik itu kebijakan politik dalam negeri maupun kebijakan politik luar negeri yang berhubungan dengan banyak negara lain di dunia.

Berangkat dari pemahaman politik suatu negara yang berusaha untuk menjadi cermin dan sebagai langkah kebijakan yang diambil oleh suatu negara terhadap permasalahan yang muncul dalam suatu masa pemerintahan dan dikatakan sebagai point penting pemerintahan, hal ini dikarenakan bahwa inilah bukti nyata kebijakan yang diambil oleh suatu negara terhadap negara lain ataupun terhadap masalah yang menimpa mereka sendiri atau berbagai hal yang terjadi dalam suatu negara dan itu patut diketahui oleh masyarakat luas sebagai faktor pendukung politik suatu negara atau dilain sisi kita melihat pentingnya

sosialisasi pengambilan kebijakan atau pemikiran politik terhadap masyarakat luas: rakyat maka perlulah sebuah pelaksana peran ini dalam hal ini peran media massa untuk membawa isu atau sesuatu ini ke masyarakat luas.

Media massa menjadi faktor terpenting dalam suatu pemerintahan terlebih lagi dalam era globalisasi dewasa ini yang menuntut kecepatan dan ketepatan informasi yang ada sehingga tidak tertinggal dengan negara lain yang telah memanfaatkan media massa yang berteknologi hebat sebagai pendorong pembangunan bangsa. Peran media massa sebagai pembawa pesan atau sosialisasi ini terkait mengenai masalah peran sertanya dalam perkembangan politik suatu bangsa dilandasi oleh beberapa hal:⁹⁶

Pertama, isi media massa pada dasarnya sudah dicacah-cacah untuk beragam muatan. Isi cacah-cacahannya tergantung pada peristiwa yang dianggap layak oleh media massa. Dalam hal ini, media massa yang menentukan kelayakan pesan yang disampaikannya dan bukan pihak lain yang merasa layak memesan isi media massa. Pengertian yang bisa diperoleh di sini, adalah kewenangan mutlak media massa untuk melaporkan atau tidak melaporkan peristiwa yang terkait. Ini pun masih dalam salah satu fungsi umum media massa sebagai pemberi informasi; belum merambah fungsi persuasi, edukasi atau sosialisasi.

Kedua, menjalankan peran sebagai sosialisator akan menjadi beban tersendiri bagi media massa. Ini pada dasarnya paralel dengan sejumlah pandangan yang meragukan kemampuan media massa untuk menjalankan fungsi persuasi dan edukasi atas dasar persyaratan keseragaman, rentang waktu, dan kontinuitas isi pesan. *Ketiga*, adanya relevansi politik dan media massa untuk menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi termasuk isu-isu yang berkembang baik itu bersifat positif maupun negative dan tentu saja dengan asas *cover both side*. *Keempat*. Adanya saling keterkaitan dan saling membangun untuk peran yang masing-masing diambil, pemerintah sebagai pekerja roda pemerintahan dan media massa sebagai wadah pewarta untuk memberitakan hal apa yang terjadi. Dari uraian tadi beberapa pengertian pokok bisa diambil, bahwa media massa lebih tepat menjalankan fungsi pemberian informasi politik dan penyebaran kepentingan melalui berbagai saluran-saluran yang ada.

Berbicara tentang hal ini dalam hal ini kita kan lebih banyak berbicara tentang bagaimana media massa di Australia bekerja dalam upaya untuk membangun citra dunia perpolitikan dalam pemerintahan Australia sebagai mana kita ketahui bahwa Australia adalah sebuah negara dengan berbagai kemungkinan yang ada serta dengan polemic yang terjadi di dalamnya semisal masalah Rasial yang tak pernah berujung bagi kaum Aborigin dan juga mengenai masalah bagaimana pemerintahan Australia memandang Media massa ini sebenarnya, apakah ia adalah sebuah pelengkap roda pemerintahan atau sebagai alat untuk kebijakan yang salah kemudian tidak untuk disampaikan untuk masyarakat luas.

⁹⁶ Rodney Smith, *Politics in Australia*, Allen&Unwin Pty Ltd, Australia 1993, h.303-306.

Dengan kata lain, berangkat dengan tujuan untuk memahami peran dan fungsi media massa di Australia sebagai alat control sosial yang terjadi dalam negara tersebut dan juga bagaimana hubungan media massa dengan pemerintah Australia; siapa mengontrol siapa? Kita mungkin tak bisa melepaskan pengaruh pemerintah terhadap apa yang terjadi dalam negaranya termasuk arah atau orientasi berita dari media massa tersebut, sebagai contoh bagaimana negara-negara besar dan berkembang berupaya untuk membangun image pemerintahannya dengannya dengan berita-berita di media massa, Amerika dengan control media massanya yang sangat ketat atau Indonesia pada zaman pemerintahan Soeharto yang mengekang kebebasan pers bahkan tak segan-segan untuk memenjarakan orang-orang yang dianggap terlalu vocal terhadap pemerintahan, majalah *Tempo* di Indonesia pernah merasakan bagaimana rasanya dilarang beredar pada masa orde baru atau selebaran-selebaran yang beredar di masyarakat, kampus, atau tempat-tempat umum tak lepas dari control pemerintah.

Hubungan Parlemen dan Media massa

Berbicara mengenai pemerintahan Australia dalam hal ini ketika parlemen bersidang, badan pekerja parlemen difokuskan untuk membantu pada rapat kerja kedua kamar, yaitu DPR dan Senat. Di sinilah mereka berdebat dan melakukan pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang dan berbagai macam hal terkait dengan kepentingan publik. Namun demikian, kesepakatan-kesepakatan penting dari kinerja anggota tidak jarang justru dilakukan di luar ruang persidangan. Jalannya pembahasan di ruang sidang Senate dan DPR disiarkan langsung melalui televisi, sehingga para anggota dapat selalu memonitor terhadap apa yang sedang terjadi dan berkembang dalam rapat tersebut. Kondisi ini dilakukan apabila mereka sedang melakukan pekerjaan lain di luar gedung parlemen, seperti misalnya, mempersiapkan pemaparan sidang, memeriksa rancangan undang-undang terbaru, dan ketika mereka sedang menghadiri berbagai acara sebagai atensi terhadap komunitas yang mereka wakili. Para anggota parlemen lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menginvestigasi hasil kerja tim yang dibentuk oleh parlemen dalam rangka memenuhi kebutuhan pertanyaan para anggota, tidak hanya dalam lingkup seputar Canberra tetapi juga meliputi seluruh bagian Australia.

Dalam kaitannya dengan pemaparan berbagai pertanyaan pada kamar DPR dan Senate, anggota parlemen juga berkontribusi dalam diskusi mengenai masalah-masalah publik melalui:

1. Partisipasi dalam kinerja parlemen dan kepanitiaan partai;
2. Turut serta dalam pembahasan di berbagai program radio dan televisi, menulis artikel di media massa dan majalah; serta
3. memberikan ceramah pada pertemuan publik dan konferensi.

Anggota Parlemen juga harus mengetahui apa yang sedang terjadi pada konstituen mereka guna menjaga pandangan buruk dari orang-orang yang mereka wakikan. Menjaga hubungan mereka dengan masyarakat, bagi sebageaian besar anggota Parlemen, cukup menyita waktu selama di Parlemen, hal ini dilakukan termasuk di antaranya dengan:

1. Bertemu dengan dan mendengarkan perseorangan maupun organisasi yang mencari informasi dan saran, memberikan suatu pandangan, atau meminta bantuan penyelesaian suatu masalah;
2. Merespon kebutuhan komunitas dengan menjawabnya melalui sepucuk surat dan dialamatkan kepada menteri, badan pemerintah, dan kelompok-kelompok lainnya yang berkepentingan;
3. Mengalisa berbagai pandangan dan bukti-bukti yang diberikan oleh anggota masyarakat kepada tim khusus di parlemen terkait dengan permasalahan yang menjadi perhatian penting bagi publik.

Sehingga bentuk hubungan parlement dan media mampu terjaga dengan baik dan berjalan sewajarnya sebagai hasil dari rapat kerja parlement selama ini dan pautu untuk di sosialisasikan kepada masyarakat luas. Rentetan peristiwa dan alur kerja dari roda pemerintahan tersebut tentu bukanlah hal mudah, ada banyak hal yang dilalui oleh pemerintah Australia untuk dapat sampai pada tahap tersebut, dimana system pemerintahan yang ada serta lajur politik yang terarah oleh konstitusi Australia menjadi sejarah penting dalam perkembangan politik Australia, kita mungkin saja tak bisa lupa pada berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di Australia, fenomena Rasial yang tak selesai untuk dibahas, pengambilan kebijakan yang sarat akan intervensi negara induk dan sekutunya; Inggris dan Amerika, serta yang akan kita bahas mengenai bagaimana media massa di Australia yang sering kali mengalami intervensi ataupun sebaliknya media yang menintervensi pemerintah, dalam wacana yang berkembang dewasa ini, kehadiran media massa besar sekelas⁹⁷: ABC, SBS, *Nine*, *Seven*, *Ten*, CNN, *Fox News Cable*, CNBC, BBC, Star Corp, MNSBC, serta berbagai media besar lainnya dikatakan memiliki keterkaitan erat dengan negara berkepentingan sebagai bentuk intervensi dan hegemony global yang dilaksanakan dengan berbagai tujuan.

Dari sinilah peran dan fungsi media massa Australia dipertaruhkan, bagaimana kinerja mereka setelah adanya hubungan kerjasama yang terjalin antara pemerintah Australia dalam hal ini parlemen dengan media massa untuk mensosialisasikan apa yang telah disepakati dalam pengambilan kebijakan di parlemen, akan tetapi adalah hal yang tak mudah untuk melaksanakan kerja tersebut hal ini disebabkan oleh factor dominansi media massa dalam masyarakat, keinginan untuk menjadikan media massa sebagai factor pendukung utama informasi dan sosialisasi politik perlu dipertegas ulang, hal ini dikarenakan bahwa dalam sejarah media pun sering kali terjadi ketimpangan yang tak diharapkan bahwa adanya kepentingan lain saling menutup dengan kepentingan lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa intervensi dan kekuasaan mampu melegalkan segala cara termasuk untuk media sendiri yang sering kali menjadi senjata utama pembunuhan karakter maupun pembunuhan kebenaran dengan intervensinya, di Australia sendiri, media massa beberapa kali mengalami intervensi terutama pada masa kepemimpinan John Howard yang dianggap terlalu menekan kebebasan pers dan sering kali media massa itu sendiri didapati melakukan kesalahan-kesalahan dengan mengikuti alur tersebut, sebagai contoh ketika masa terorisme mencuat kepermukaan dan mengemparkan dunia yang

secara disengaja atau tidak akan selalu bermuara pada ummat muslim diseluruh dunia sebagai biang atau kaum penghasil teroris yang entah dengan standar apa dikatakan demikian, media massa Australia memberitakan mengenai kebebasan beragama muslim yang muali tak dianggap lagi, dalam hal ini kebebasan beragama menjadi hal yang sangat menakutkan untuk diakui karena hanya akan melahirkan tekanan media dan intervensi luar dalam maslah beragama, hal ini memunculkan tanggapan dari pihak Presiden Federasi Dewan-Dewan Islam Australia (AFIC), Ikebal Patel, meminta media massa dan para politisi Australia untuk menghormati hak komunitas Muslim untuk mengatur masalah-masalah agamanya, ketegangan ini bermula dari seorang pejabat Australia Sheikh Taj al-Din al-Hilali.⁹⁸

Dalam edisi Selasa, Harian *The Age* dan *The Australian* misalnya memberitakan, kalangan politisi dan pejabat tinggi negara itu telah meminta mufti kelahiran Mesir itu agar mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan negara itu menyusul dukungannya atas Iran. Selain itu berbagai tekana-tekana media Australia pun muncul ketika Terkait dengan masalah nuklir Iran, sebagian besar negara anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, termasuk Indonesia, beberapa waktu lalu menyetujui pemberian sanksi yang lebih besar kepada Iran melalui Resolusi 1747, hal ini pula yang menjadi isu hangat yang seakan-akan coba untuk digembor-gemborkan sebagai bentuk dukungan terhadap tindakan Amerika di Timur Tengah.

Tidak hanya itu, secara teknis, media juga menyajikan informasi dengan sangat cepat dan dapat memenuhi kebutuhan pu blik atas informasi tersebut kapan saja. Kantor berita *Cable News Network* (CNN) menyiarkan tayangan berita 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Setiap menit memungkinkan untuk tersela *breaking news* yang memuat berita-berita darurat sehingga besar kemungkinan factor doktrinisasi terhadp suatu berita dapat masuk dengan cepatnya jika tidak dengan *filterlisasi* media yang baik dari pemirsa.

Kasus yang semapt mencuat lainnya sebelum perang, media ini tercatat paling gencar melancarkan “kampanye” untuk mendukung rencana Bush menginvasi Irak, baik melalui *Fox News*, surat kabarnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia, maupun majalah politiknya yang terkenal, *The Weekly Standard*. Misalnya, pembaca berita dan pembawa acara bincang-bincang(*talk show*) yang membicarakan masalah-masalah politik, dengan kemampuan moderator mengarahkan obrolan dengan narasumber selalu berhasil meyakinkan pemirsa bahwa Irak memang memiliki senjata pemusnah masal, dan secara implisit memaksa pemerintahan Bush untuk tidak rnengundurkan niat menyerang Irak. Bukan saja di daratan Amerika Serikat, hampir semua media milik jaringan *News Corps* di negara koalisi AS menyajikan berita yang kurang lbih seragam, yaitu bahwa Irak memiliki *prototype* dan bahan baku cikal bakal senjata pemusnah masal yang disebut sebagai mengancam “keamanan dan perdamaian dunia”.

⁹⁸ <http://yanpraz.multiply.com/journal/item/20>. MEDIA MASSA DAN SOSIALISASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA, diakses tanggal 21 Agustus 2014, pukul 03.00 Wib

Ketika Blix memberikan laporan kepada Sidang Dewan Keamanan PBB pada 27 Januari 2003, editorial sebuah surat kabar Australia milik jaringan *News Corporations* menulis tentang Blix yang telah menyediakan bukti bahwa diktator Irak Saddam Hussein tetap mengembangkan senjata pemusnah masal dan itu penting untuk diberitakan⁹⁹

Cerita lain ketika kita berbicara mengenai masalah media ini dalam wacana para pemimpin parlemen Australia, ada hal yang berbeda bahwa ketika ada beberapa media massa yang berada di luar garis koordinasi media luar dalam hal ini media yang dikuasai oleh asing (*News Corporations*) mencoba untuk memberikan gambaran yang berbeda sering kali mendapat tekanan. Sejarah mencatat ketika Doktrin “pre-emptive strikes” yang dispekulasikan media-massa sebagai alasan keengganan Pemerintah Australia untuk menandatangani TAC mengemuka ketika PM John Howard kembali menyinggung masalah tersebut dalam kampanye pemilu Australia yang lalu. Dalam salah-satu suatu wawancara radionya, menjelang keberangkatan menuju Laos untuk menghadiri ‘Commemorative Summit’ (30 November 2004), Perdana Menteri John Howard menegaskan kembali bahwa “pre-emptive strikes” akan dilakukan sebagai pilihan terakhir untuk mempertahankan diri dari serangan luar *“imminent attack if the country involved were not taking action to prevent the threat.... That is a simple statement of fact, but I don’t anticipate for a moment it is going to occur”*¹⁰⁰ ketika itu media dianggap sangat berpikiran jauh mengenai masalah ini sedangkan parlemen telah berupaya untuk memberikan pemahaman bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk pengaman negara meskipun mereka sebenarnya tahu bahwa ketika hal ini dilakukan, anggapan sebagai antek Amerika akan terus membayangi sehingga dalam beberapa catatan sejarah dan literatur yang ada berpenadapat bahwa media massa di Australia pun sering kali mengalami intervensi, bahkan tak jarang hal ini terjadi berdasarkan pergantian kepemimpinan di Australia dan juga kepentingan Inggris sebagai negara induk, sehingga dapat dilihat bahwa hal ini tidak memungkinkan adanya bentuk Journalism yang baik ketika hal ini masih dalam tekanan,

Dengan kata lain bahwa Media Australia adalah media Barat dan tampaknya akan tetap menganut prinsip-prinsip kebebasan liberal yang sering kali sarat makna. Sebab, Pemerintah Australia tidak memiliki kekuatan konstitusional untuk mengatur kegiatan media massa, yang dimiliki oleh swasta. Pemerintah Australia juga tidak mengenal pemberian izin penerbitan media massa sehingga pemerintah tidak berhak untuk menutup surat kabar akan tetapi dalam hal ini belum tercapai titik temu yang baik untuk saling menghargai dan menjadikan kerja parlemen sebagai bahan media untuk berkembang dimasyarakat tanpa adanya intervensi asing ataupun ketidak harmonisan antar pemerintah sehingga tidak di salah artikan sebagai intervensi pemerintah, tanpa adanya keperpihakan atas satu kaum akan tetapi dalam wacana yang sebenarnya.

⁹⁹ <http://beritasore.com/2007/04/10/presiden-afic-minta-media-dan-politisi-australia-hormati-hak-komunitas-muslim/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 03.00 Wib

¹⁰⁰ *Ibid*

MEDIA MASSA SEBAGAI NEW INSTRUMENT SARAT MAKNA

Media massa dewasa ini menjadi sebuah barang hebat dalam dunia Globalisasi, persaingan informasi dan teknologi membawa media massa menduduki point penting dalam hal ini, media massa seakan menjadi bisnis ataupun sebuah hal baru dengan sejuta potensi yang ada di dalamnya sehingga tak mengherankan ketika muncul nama-nama orang uang berada dibelakang wacana media.

*News Corporations*¹⁰¹ adalah salah satu konglomerasi media terbesar di dunia milik Rupert Murdoch. Jaringan dan distribusinya tersebar di seluruh penjuru dunia dan mampu menjadi alternatif utama di masing-masing kelas. Seperti *The Australia*, *The Weekly Australia*, dan *The Sunday Herald Sun* yang merupakan surat kabar terkemuka di Australia, *The Sun* sebagai koran utama Inggris, atau *The New York Post* yang bisa disejajarkan dengan *New York Times* di AS. Majalah *The Weekly Standard* adalah majalah politik terpendang di Washington. Begitu juga dengan program berita televisinya, *Fox News Channel*. Murdoch adalah pendukung rezim konservatif Bush dan Partai Republik. Ia juga dikenal sebagai tokoh neokonservatif yang aktif mensponsori setiap kebijakan presiden melalui jaringan medianya ini.

Di AS sendiri, media memang memiliki potensi besar memengaruhi opini publik yang akhirnya menjadi *input* bagi presiden' untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Ini tidak lepas dari masyarakat AS sendiri yang menjadikan media, terutama televisi dan surat kabar, sebagai gaya hidup dan kebutuhan. Murdoch menjadi pemilik 16 televisi lokal dan 31 koran termasuk Koran terbesar di Australia dan telah mengakuisisi berbagai media massa seperti Koran dan televisi lokal, di Indonesia Murdoch berhak atas ANTV yang telah dibawah kendalinya dan juga telah membeli Lativi yang sekarang telah menjadi TvOne bersama Abu Rizal Bakrie, selain itu Murdoch juga telah mengakuisisi *MySpace.com* pada tahun 2005 sehingga tak heran jika ia menjadi "*the most powerful person in the world today*" dengan kerajaan media yang dimilikinya diseluruh dunia termasuk Australia sehingga dikatakan bahwa ketakutan akan keberpihakan media massa di Australia menjadi hal yang patut dipertanyakan.

Peran dan fungsi media massa di Australia sebagai mana yang telah kita bahas dari awal bahwa media massa memiliki point penting sebagai alat control sosial dalam masyarakat luas termasuk dalam masalah politik, dewasa ini masalah politik menjadi sebuah hal yang sangat sensitive dan mampu menjadi liar ketika politik tak lagi memandang etika dan kemanusiaan sehingga menghalalkan segala cara termasuk melalui media massa yang menjadi wadah penghubung dengan jutaan orang di seluruh dunia.

¹⁰¹ <http://www.kompas.co.id/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.02.00363941&channel=2&mn=158&idx=158>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2014, pukul 10.00 Wib

Australia adalah sebuah negara besar, peran media massa sangat dibutuhkan akan tetapi hal ini mesti berimbang sehingga pertanyaan tentang siapa mengontrol siapa dalam media dapat dipahami bahwa hal ini adalah bentuk saling interaksi dalam upaya pembangunan bukan dalam bentuk hegemony global yang selalu berujung pada penindasan global pula. Media massa memiliki kekuatan yang besar ketika hal itu berada pada jalurnya bukan pada intervensi dan tekanan, sepatutnya media mampu menempatkan dirinya sebagai news instrument pembangun yang baik tanpa dominansi.

BAB VIII

EVOLUSI POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA

Sejarahnya diawali dengan kedatangan masyarakat kulit putih yang membuka pemukiman di Sydney Cove tahun 1788 yang kemudian menjadi koloni New South Wales, kemudian dalam waktu beberapa dekade komunitas masyarakat kulit putih tersebut terbentuk menjadi suatu negara Federasi (1 Januari 1901) dengan nama Commonwealth of Australia. Tidak ada yang aneh jika melihat masyarakat Australia di dalam *mainland*nya, sebab memang mayoritas mereka berkulit putih; tetapi jika dilihat kehidupan masyarakat yang berada di sekeliling mainland Australia, maka tampak adanya keganjilan yakni Australia yang putih dikelilingi oleh masyarakat kulit berwarna. Itu sebabnya dikatakan bahwa Australia sebagai *misplaced continent*, benua salah letak. Seharusnya dengan mayoritas masyarakat kulit putihnya, Australia berada di kawasan Eropa, tetapi justru mereka berada di wilayah Pasifik Selatan.

Pada awal berdirinya Commonwealth of Australia, merupakan tonggak sejarah baru bagi Australia. Saat itu adalah suatu era, dimana enam koloni yang berdiri sendiri secara terpisah-pisah, bergabung menjadi satu yang kemudian disebut sebagai Federasi Colonial. Saat itu satu bangsa siap untuk lahir yaitu Australia. Pada masa itu Australia memiliki wewenang untuk mengatur kedaan negaranya sendiri dan terbebas dari Inggris. Namun Australia belum mampu untuk menjalankan negara itu sendiri, Australia masih membutuhkan bantuan dari negara induknya yaitu Inggris.

Untuk urusan dalam negeri, Australia telah diberi kemerdekaan oleh Inggris. Namun urusan luar negeri Australia masih memerlukan pengawasan dari pemerintah Inggris. Semua hubungan bangsa lain masih harus diatur oleh pemerintah Inggris. Pada saat itu lahirlah pendapat dari kalangan pemerintah Federal Australia bahwa “tidak ada perbedaan kepentingan antara Australia dengan Inggris”. Namun akhirnya pendapat ini dipatahkan karena adanya kepentingan Australia akan suatu pulau yaitu Irian. Keadaan ini telah di sadari lebih dulu oleh Queensland. Akibat dari letak yang jauh dari Inggris, Australia tidak banyak mendapat dukungan dari Inggris untuk mempertahankan maupun menduduki Queensland. Akibat dari adanya keadaan yang demikian, pemerintah Australia mulai berfikir bagaimana caranya mereka mempertahankan diri tanpa selalu mengharapkan bantuan dari Inggris.

Pada tahun 1907, Australia diberi status dominion. Dengan demikian statusnya sebagai koloni Inggris mulai ditinggalkan. Status dominion ini memungkinkan Australia untuk mulai memikirkan sendiri urusan hubungan luar negerinya. Untuk selanjutnya Australia tidak lagi ditangani oleh Inggris dalam melakukan hubungan luar negerinya. Dan pada tahun 1909, Australia mengeluarkan undang-undang yang disebut The Defence Act. Australia mulai mengambil inisiatif sendiri pembinaan pertahanannya.

1. Australia pada Masa Perang Dunia I

Selama perang dunia pertama berlangsung. Australia selalu berada dibelakang Inggris. Inggris selalu membantu Australia terutama di bidang militer. Australia masih bersandar pada angkatan bersenjata milik Inggris yang dikenal baik dalam urusan berperang.

Alasan Inggris selalu membantu Australia karena:

- a) Australia merupakan negara bekas koloni Inggris, meskipun sudah berdiri sendiri namun ikatan tersebut masih terjaga.
- b) Rakyat dan pemerintah Australia tidak merasa keberatan atas campur tangan Inggris terhadap politik luar negerinya.
- c) Pada saat itu angkatan perang Australia relatif masih sangat lemah dan kecil.
- d) Australia membutuhkan perlindungan dan bantuan Inggris untuk keamanan serta pertahanan wilayahnya.

Dalam perang dunia pertama, Australia berperang menghadapi beberapa negara, yaitu:

- a) Tahun 1914, Australia menghadapi Jerman di New Guinea dan pada saat itu pula Guinea menyerah.
- b) Pasukan Australia diberangkatkan menuju Timur Tengah dan kawasan Eropa untuk membantu pasukan Inggris melawan pasukan Jerman, Australia dan Turki. Pada 9 November 1914, pasukan Australia berhasil menenggelamkan kapal Emden (kapal perang Jerman) yang berada di Samudra Hindia.
- c) ANZAC yaitu pasukan gabungan Australia dan New Zealand Army Corps, bersama-sama dengan pasukan Inggris dan Perancis bermaksud membantu Rusia yang pada saat itu mengalami tekanan dari pihak Jerman. Namun upaya ini mengalami kegagalan.

Setelah perang dunia pertama usai, timbul kesadaran dalam diri rakyat Australia bahwa Australia berhak disejajarkan dengan negara-negara lain yang sudah lama berdiri. Perdana menteri Australia, William Hughes mendesak agar Australia diakui dan memiliki hak yang sama dengan bangsa merdeka lainnya. Dan pada akhirnya tuntutan Hughes tersebut dikabulkan oleh Inggris. Untuk pertama kalinya Australia mendatangi perundingan perdamaian Versailles. Dan ketika Liga Bangsa-Bangsa di bentuk, Australia ikut menjadi anggota di dalamnya.

Pada tahun 1931, Ataturk Of Westminster secara resmi mengakhiri kekuasaan Inggris. Dengan demikian Inggris tidak lagi berkuasa untuk mengawasi hubungan luar negeri Australia. Namun Australia masih tetap mengandalkan Inggris dalam kepentingan luar negerinya.

2. Australia pada Masa Perang Dunia II

Perang Dunia II diawali dengan serangan Jerman terhadap Polandia pada tanggal 1 September 1939. Tidak lama kemudian Inggris menyatakan perang terhadap Jerman, dan Australia siap membantu Inggris. Dua tahun setelah meletusnya Perang Dunia II, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor (7 Desember 1941). Serangan Jepang ini melibatkan Amerika Serikat secara langsung dalam Perang Dunia II. Kemudian Jepang berhasil menguasai Malaya, Filipina, dan Indonesia. Serangan Jepang ini merupakan ancaman langsung bagi Australia. Australia meminta perlindungan angkatan laut dan angkatan udara kepada Amerika Serikat. Dan Australiapun dapat menghindari serbuan Jepang.

3. Hubungan Luar Negeri Australia Pasca Perang Dunia II

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak terjadi perubahan di seluruh bagian dunia. Perubahan yang menonjol adalah banyaknya daerah di Asia dan Afrika yang awalnya dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa telah terlepas dan merdeka. Berakhirnya Perang Dunia II membuat Inggris kehilangan koloninya di Asia dan Inggris Raya, mengalami kemunduran.

Perubahan-perubahan ini, berpengaruh pada politik luar negeri Australia. Australia yang pernah mendapat bantuan Amerika dalam menghindari serangan Jepang, telah membuat Australia perlahan-lahan lepas dari Inggris. Pada tahun 1951, Australia mulai mengadakan kerjasama dengan New Zealand dan Amerika Serikat. Kerjasama ini menghasilkan perjanjian yaitu perjanjian ANZUS TREATY. Perjanjian ini adalah perjanjian pertama yang ditandatangani Australia tanpa campur tangan Inggris.

Berakhirnya Perang Dunia II ini menyadarkan Australia bahwa negaranya berada di wilayah Asia, khususnya wilayah Asia Tenggara, dan terletak di Pasifik. Dengan munculnya kesadaran tersebut, Australia mulai memiliki keinginan untuk

menjalin hubungan baik dengan negara tetangganya. Pada tahun 1950, Australia berkeinginan untuk menderikan suatu organisasi yang menjadi wadah bagi negara-negara Asia (Asia Selatan dan Asia Tenggara) yang disebut dengan Colombo Plan.

Latar belakang berdirinya Colombo Plan adalah adanya kesadaran bahwa kepentingan penduduk Asia meliputi kepentingan seperempat penduduk dunia. Colombo memiliki dua program pokok yaitu Economic Development Programmed dan Technical Cooperation Scheme. Hasil yang telah ada dari program tersebut adalah adanya peningkatan dalam bidang produksi pertanian, pengairan, dan perluasan tanah yang di olah. Technical Cooperation Scheme bertindak sebagai penyedia para ahli untuk memberikan latihan bagi teknisi-teknisi dan member bantuan dalam berbagai proyek pembangunan. Selain itu para teknisi juga mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan khusus di Australia. Walaupun Australia masih terikat oleh Inggris dalam British Commonwealth Of Nations, namun ikatan Inggris semakin longgar. Inggris tidak lagi menjadi partner dagang utama Australia, karena Australia lebih memilih Jepang dan negara-negara asean sebagai partner dagangnya. Sebagai negara yang ikut menanda tangani piagam PBB, Australia mulai aktif dalam berbagai kegiatan badan internasional

Awal Kebijakan Luar Negeri Australia

Berkaitan dengan Kebijakan luar negeri, setiap negara tentu memiliki Kebijakan luar negeri yang berbeda-beda, yang ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing negara yang pastinya mengarah kepada kepentingan nasional. Tujuan-tujuan yang dimaksud berkaitan dengan bidang politik, keamanan, ekonomi. Pada tahun 2000 dapat dikatakan sebagai awal dari perubahan, fokus perhatian persoalan yang menyangkut tentang pertahanan dan keamanan yang lebih kearah pertahanan non-tradisional. Evolusi fokus kebijakan pertahanan kearah non-tradisional, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal pembentukan negara Australia.

Kebijakan luar negeri Australia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut di antaranya :

Pertama, *Historical Culture* atau budaya historis dan demografis. Dalam hal ini, terdapat dua negara yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri Australia yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Sampai awal abad ke-21 ini meski terdapat upaya untuk menjadikan kebijakan luar negeri Australia lebih mandiri dari pengaruh Amerika Serikat, khususnya jika Partai Buruh berkuasa adalah suatu kenyataan bahwa dalam banyak kasus yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan keamanan, kebijakan luar negeri Australia sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Beberapa contohnya adalah kebijakan Australia terhadap Indonesia berkaitan dengan masalah Irian Barat pada 1950-an sampai dengan pertengahan 1960-an serta kebijakan Australia atas Timor-Timur 1975-1999.

Kedua, Faktor Geografis. Sebagai negara benua yang terletak diselatan khatulistiwa yang dihuni oleh sebagian besar masyarakat keturunan Inggris (*Anglo Celtic*), masyarakat Australia merasa terisolir oleh lingkungan luarnya. Jika kita

menganalisis dari segi historis, kultur, bahasa, tradisi dan sistem politik demokrasi masyarakat Australia lebih dekat dengan Inggris dan Amerika Serikat, namun secara geografis Australia berdekatan dengan Asia. Pada pertengahan 1980-an, kedekatan geografis dengan Asia dipandang bukan sebagai hikmah melainkan sebagai bencana. Ketakutan Australia pada Asia ini sudah muncul pada tahun 1850-an ketika Australia menemukan tambang-tambang emas dan perak dinegerinya yang akan mengundang pendatang dari Asia khususnya Cina.

Ketiga, Perubahan konstelasi politik, ekonomi, dan keamanan regional dan internasional tidaklah bersifat statis melainkan sangat dinamis. Dinamika yang terjadi baik di lingkungan regional dan internasional sangat mempengaruhi implementasi politik luar negeri Australia salah satu contoh Perubahan kebijakan Pertahanan Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Tenggara pada masa Presiden Richard Nixon (*Doktrin Nixon 1969*) juga mempengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Australia dari ketergantungannya yang begitu besar pada aliansinya dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya menjadi suatu upaya untuk memperkuat *defence self-reliance*. Ini bukan berarti Australia tidak ingin lagi beraliansi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atau tak mau lagi membangun jaringan pertahanan dengan negara-negara tetangganya, melainkan adanya upaya agar semakin mandiri di bidang pertahanan.

Keempat, tujuan yang ingin diraih dari kebijakan luar negeri adalah kepentingan nasional. Tujuan politik dari kebijakan luar negeri Australia terdiri dari empat hal yaitu :

1. Australia yang lebih aman, baik dari segi fisik, ekonomi, budaya dan politik, termasuk ideologi dan nasional etosnya,
2. Suatu dunia yang lebih aman,
3. Suatu dunia yang lebih kaya,
4. Suatu dunia yang lebih baik.

Kebijakan luar negeri Australia *security objectives* yaitu bagaimana menjaga keamanan Australia baik secara individual (*Self - Reliance*) dalam kerangka aliansi militer dibawah payung Amerika Serikat seperti SEATO (*South East Asia Treaty Organization*) dan ANZUS (*Australia, New Zealand, and The United States*) serta dibawah payung Inggris FPDA (*Five Powers Defence Arrangement*) atau dalam kerangka kerjasama Regional yang membangun jaringan kerjasama keamanan dengan negara-negara ASEAN dan Pasifik Selatan. John Howard pada masa pemerintahannya mengumumkan suatu kebijakan baru tentang informasi wilayah maritim Australia yang dikenal dengan nama *Australia's Maritime Identification Zone*(AMIZ) pada tahun 2004 (melalui pernyataannya "*Strengthening Australia's Offshore Maritime Security*").

Awal pembentukan negara Federasi Australia mengalami perjalanan panjang. Perubahan bentuk pemerintahan dari koloni Inggris menjadi bentuk Federasi tidak mengurangi pengaruh *western* dalam pemerintahan Australia. Meskipun komposisi warganegaranya sudah menurun keinggrisannya dengan komposisi 25% non Inggris, tetapi pengaruh Inggris masih sangat kuat menguasai kelembagaan pemerintahan di Australia. Bereson & Rosenblat mengidentifikasi

pengaruh negara-negara *western* yang ada dalam kelembangaan pemerintahan di Australia setelah terbentuknya Federasi Australia sebagai berikut.

- Tradisi demokrasi parlemen menggambarkan pengaruh Inggris
- Adanya referendum menggambarkan pengaruh Swiss
- Pembagian kekuasaan pemerintah federal dengan state menggambarkan pengaruh Canada

Penggunaan nama Senate dan House of Representatives memperlihatkan pengaruh Amerika Serikat. Suatu benua yang dihuni oleh mayoritas masyarakat berkulit putih khususnya Inggris, dengan orientasi pemerintahan yang berkiblat ke Inggris, tetapi terletak di Pasifik Selatan, menyebabkan terlihatnya gambaran kelompok kulit putih yang terisolasi di antara kelompok masyarakat kulit berwarna. Kondisi ini menimbulkan dampak, harus bagaimanakah Australia menempatkan dirinya di antara negara-negara Asia dan Pasifik? Harus bagaimana Australia menata arah politik luar negerinya agar dapat hidup berdampingan dan bertetangga baik? Ini bukan persoalan mudah bagi Australia, sebab latar belakang budaya yang dimunculkan dalam bentuk pemerintahan berwarna *western* seringkali akan bertabrakan dengan warna pemerintahan kulit berwarna terutama negara-negara di Asia yang baru bermunculan sebagai akibat perkembangan nasionalisme pasca Perang Dunia II.

Latar Belakang Australia sebagai *misplaced continent*

Gaya hidup mayoritas masyarakat Australia yang diwakili oleh gaya hidup masyarakat kulit putih Eropa makin mempertajam gambaran terhadap kesalahletakan tersebut. Dimulai dengan kedatangan masyarakat kulit putih secara bergelombang sejak tahun 1788. Pada mulanya mayoritas dari mereka adalah narapidana yang dikirimkan berdasarkan kebijakan pemerintah Inggris yang menyusun rencana “*to remove the inconvenience which arose from the crowded state of the gaols in the different parts of the kingdom*”¹⁰² Pengiriman narapidana ini menyebabkan berkembangnya koloni-koloni lain selain New South Wales, sehingga berdasarkan Australian 94 Colonies Government Act tahun 1850 telah terbentuk enam koloni yang terdiri atas koloni New South Wales, Tasmania, Western Australia, South Australia, Queensland, dan Victoria. Perkembangan koloni-koloni ini oleh Crawford (1971) dikelompokkan pada gelombang kedua migrasi yakni perpindahan orang-orang dari Inggris yang berlangsung antara tahun 1788 sampai tahun 1945 yakni saat berakhirnya Perang dunia II. Mayoritas masyarakat yang termasuk dalam gelombang kedua ini berasal dari Inggris, dan mereka tetap mempertahankan gaya hidup Inggrisnya.

Gelombang ketiga migrasi penduduk Eropa ke Australia ditandai dengan adanya pergeseran yakni meningkatnya jumlah imigran non Inggris. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang mendorong pihak kementerian imigrasi untuk meningkatkan jumlah penduduk di Australia sebagai akibat dari depresi ekonomi, jumlah penduduk yang keluar Australia lebih besar ketimbang yang masuk, terhambatnya pertambahan penduduk secara alamiah. Program imigrasi ini mendatangkan sejumlah besar masyarakat Eropa yang non Inggris (terutama

¹⁰² Julius Siboro, *Sejarah Australia*, Tarsito Bandung, 1989, hal.24

dari Jerman, Italia, Belanda, Polandia, Yunani, Yugoslavia, Libanon, Austria, dan lain-lain. Pada masa ini komposisi penduduk Australia menjadi 75% berlatar belakang Inggris, dan 23% berlatar belakang Eropa non Inggris, sedangkan sisanya adalah penduduk Aborigin. Komposisi yang demikian memperlihatkan bahwa lebih dari 95% penduduk Australia adalah kulit putih yang berasal dari Eropa terutama Inggris.

Komposisi penduduk yang demikian memberi dampak pada kiblat kelembagaan pemerintahan yang mengarah ke negara-negara barat khususnya Inggris. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pemerintahan di Australia sejak berakhirnya pemerintahan Lachlan Macquarie sampai kepada pembentukan negara Federasi. Pengaruh western sangat kuat, diakibatkan komposisi penduduk sejak awal berdirinya koloni New South Wales yang masyarakatnya berasal dari Inggris.

Ketika awal berdirinya koloni New South Wales, bentuk otokrasi mewarnai pemerintahan para gubernurnya. Mayoritas penduduk yang merupakan narapidana menyebabkan munculnya bentuk pemerintahan yang demikian. Tidak ada lembaga pemerintahan apapun di luar kekuasaan gubernur. Artinya gubernur memegang tampuk pemerintahan seorang diri tanpa didampingi lembaga legislatif maupun yudikatif. Hal ini berlangsung sampai pada Pemerintahan Lachlan Macquarie (1810 – 1821) yang kemudian bentuk pemerintahan otokratis ini mulai digoncang oleh keinginan masyarakat bebas (*free settlers*), yang mulai seimbang jumlahnya jika dibandingkan dengan masyarakat narapidana, untuk membentuk pemerintahan yang bertanggungjawab (*responsible government*).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan komposisi penduduk ini diakibatkan oleh Lachlan Macquarie yang berhasil mengubah kondisi New South Wales mencapai kemajuan yang pesat, sehingga masyarakat bebas mulai melirik Australia. Di bawah pemerintahan Lachlan Macquarie inilah mulai gencar dilakukan eksplorasi baik ke pedalaman maupun eksplorasi pantai. Akibatnya, karena banyak ditemukan daerah-daerah yang memungkinkan untuk dibukanya pemukiman, maka berkembanglah koloni-koloni lain di Australia. Bentuk pemerintahan yang dikembangkan di koloni-koloni lain tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendatangnya, dan nuansa yang sangat kental adalah bentuk pemerintahan sebagaimana yang dianut di Inggris. Munculnya keinginan untuk mengimbangi kekuasaan gubernur ini karena tradisi yang dimiliki masyarakat Inggris bersifat demokratis, sehingga mereka menganggap sangat tidak layak jika *free settlers* diperlakukan sama dengan *convicts*.

Sejalan dengan pengembangan koloni-koloni lain, bentuk *responsible government* diawali dengan terbentuknya legislative council yang secara bertahap berkembang dengan berbagai undang-undang yang memperlihatkan makin banyaknya anggota legislative council dan makin luasnya kekuasaan legislative council dan makin sempitnya kekuasaan gubernur (lihat Judicature Act 1823, amandemen judicature act 1828, undang-undang tahun 1842 yang membentuk pemerintahan dengan sistem perwakilan). Puncaknya adalah dikeluarkannya Australian Colonies Government Act 1850 yang memberikan kebebasan pada masing-masing koloni untuk menyusun pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing koloni. Akibat dari undang-undang ini kemudian

selama 50 tahun masyarakat di koloni-koloni tersebut berjuang untuk mewujudkan federasi Australia. Pada tanggal 1 Januari 1901 terbentuk Federasi Australia dengan nama Commonwealth of Australia.

Perubahan bentuk pemerintahan dari koloni Inggris menjadi bentuk Federasi tidak mengurangi pengaruh *western* dalam pemerintahan Australia. Meskipun komposisi warganegaranya sudah menurun keinggrisannya dengan komposisi 25% non Inggris, tetapi pengaruh Inggris masih sangat kuat menguasai kelembagaan pemerintahan di Australia. Bereson & Rosenblat mengidentifikasi pengaruh negara-negara western yang ada dalam kelembagaan pemerintahan di Australia setelah terbentuknya Federasi Australia sebagai berikut:

- a) Tradisi demokrasi parlemen menggambarkan pengaruh Inggris.
- b) Adanya referendum menggambarkan pengaruh Swiss.
- c) Pembagian kekuasaan pemerintah federal dengan state menggambarkan pengaruh Canada.
- d) Penggunaan nama Senate dan House of Representatives memperlihatkan pengaruh Amerika Serikat.

Suatu benua yang dihuni oleh mayoritas masyarakat berkulit putih khususnya Inggris, dengan orientasi pemerintahan yang berkiblat ke Inggris, tetapi terletak di Pasifik Selatan, menyebabkan terlihatnya gambaran kelompok kulit putih yang terisolasi di antara kelompok masyarakat kulit berwarna. Kondisi ini menimbulkan dampak, harus bagaimanakah Australia menempatkan dirinya di antara negara-negara Asia dan Pasifik? Harus bagaimana Australia menata arah politik luar negerinya agar dapat hidup berdampingan dan bertetangga baik? Ini bukan persoalan mudah bagi Australia, sebab latar belakang budaya yang dimunculkan dalam bentuk pemerintahan berwarna *western* seringkali akan bertabrakan dengan warna pemerintahan kulit berwarna terutama negara-negara di Asia yang baru bermunculan sebagai akibat perkembangan nasionalisme pasca Perang Dunia II.

Latar belakang Australia sebagai *misplaced continent* atau *frightened country* dilihat dari gaya hidupnya dan kelembagaan politik yang berkiblat ke Eropa khususnya Inggris, tetapi secara geografis terletak di Pasifik Selatan yang notabene mayoritas penduduknya berkulit berwarna, adalah penggambaran terhadap benua yang di selatan ini pada awal dan perkembangannya sampai pada masa Perang Dunia II. Pencarian jati diri untuk memposisikan politik luar negerinya mulai tampak setelah masa Perang Dunia II di mana pada saat itu Australia menyadari bahwa menggantungkan eksistensinya pada negeri induknya Inggris tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di Pasifik Selatan. Perang Dunia II memberikan kesadaran pada Australia bahwa Amerika Serikat lebih dapat diandalkan untuk menjadi mitranya dalam menghadapi situasi dan kondisi di wilayah Pasifik

Analisis berikut memberikan gambaran bagaimana Australia mencoba mendekatkan diri pada Amerika Serikat karena merasa mempunyai kepentingan politik bersama. Perubahan wajah politik dunia setelah berakhirnya Perang Dunia II sangat berpengaruh terhadap politik luar negeri Australia. Penyerbuan Jepang ke Pasifik yang diikuti dengan pendudukan wilayah Darwin dan pada saat Australia mempertanyakan sumbangsih Inggris untuk membantu Australia tetapi

tidak memperoleh bantuan sebagaimana yang diinginkan, menyebabkan Australia mulai dekat dengan Amerika Serikat. Ilustrasinya bahwa semakin besar pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat di Pasifik, menyebabkan Australia menyandarkan diri pada kekuatan Amerika Serikat untuk keamanannya. Hal ini dapat dilihat dari penandatanganan pakta pertahanan bersama ANZUS TREATY (1951).

ANZUS treaty merupakan pakta pertahanan bersama Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat yang mengikat para anggotanya untuk menyadari bahwa serangan bersenjata di wilayah Pasifik oleh salah satu dari mereka dapat membahayakan perdamaian dan keselamatan yang lain. Australia memandang bahwa keamanan Australia bergantung pada hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat dan ANZUS memiliki dukungan kedua negara yang luas. Kemampuan Australia untuk membentuk lingkungan keamanan tergantung pada hubungan keamanan dengan Amerika Serikat yang memfasilitasi pengembangan kemampuan dan profesionalisme pasukan pertahanan Australia.

Kedekatan Australia dengan Amerika Serikat utamanya adalah dalam mengantisi-pasi masalah pertahanan, yang dapat diterjemahkan sebagai kepentingan pertahanan militer Australia bergantung pada Amerika Serikat. Akan tetapi, langkah Australia tidak hanya berhenti sampai di sana, sebab masalah pertahanan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan mesin pertempuran yang canggih. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kesalahletakan Australia mengharuskan negara tersebut menyadari lingkungan sekitarnya yang berbeda baik secara fisik maupun budaya. Australia harus menata kehidupan politik luar negerinya dengan mempertimbangkan *good neighbourhood* dengan negara-negara di sekitarnya. Sebagai contoh, untuk membendung penyebaran komunis di Asia Tenggara, setelah mundurnya Perancis dari Vietnam, maka pada tahun 1954 dibentuk SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) yang anggotanya adalah Australia, New Zealand, Perancis, Inggris, Pakistan, Philipina, Thailand, dan Amerika Serikat. Meskipun organisasi pertahanan bersama ini tidak berumur panjang (tahun 1977 dibubarkan sejalan dengan mundurnya Amerika Serikat dari Vietnam), tetapi terlihat adanya niat baik Australia untuk beradaptasi dengan negara-negara di sekitarnya.

Australia menjadi salah satu negara penggagas South Pacific Commission yang merupakan langkah awal terbentuknya South Pacific Forum (SPF), yakni forum tempat para pemimpin negara-negara di Pasifik bertemu dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di kawasan Pasifik. Hasil dari forum tersebut dapat dilihat dari hasil forum Brisbane tahun 1994 yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya pelestarian laut, hutan, dan sumber daya alam lain.; forum Madang menghasilkan kesepakatan reformasi ekonomi yang bertujuan untuk menstimulai perdagangan dan investasi, mengembangkan efisiensi dan akuntabilitas sektor publik, serta menciptakan kondisi yang dapat mengembangkan sektor privat. Dalam hal kerjasama militer, forum ini menghasilkan perjanjian South Pacific Free Zone Treaty – The Treaty of Ritonga tahun 2003. Dengan ditandatangani perjanjian ini maka kawasan Pasifik akan terbebas dari tes-tes senjata nuklir.

Asean Regional Forum (ARF) yang dibentuk tahun 1994 juga merupakan jawaban terhadap kepentingan Australia menata kehidupan politik yang mengarah

kepada bertetangga baik tersebut. Asean Regional Forum memiliki 25 negara anggota yang menaruh perhatian bagi keamanan Asia Pasifik. Dari 25 anggota ARF, terdapat 10 anggota ASEAN (Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam); 10 negara mitra Negara ASEAN (Australia, Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat), dan 5 negara pengamat ASEAN (Papua Nugini, Korea Utara, Mongolia, Pakistan dan Timor Leste). ARF menjadi suatu wadah tempat Negara anggota dapat berdiskusi mengenai isu keamanan regional yang terjadi dan mengembangkan aturan kerjasama untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut.

Politik Luar Negeri Australia

Tahun 1788-1901

Pada tahun 1788 Inggris mendirikan koloninya di Australia, 12 tahun setelah Amerika memberontak terhadap kekuasaan Inggris dan satu tahun sebelum meletusnya revolusi Perancis. Dengan ditemukannya benua baru diselatan (Australia) Negara-negara besar Eropa (Inggris, Jerman dan Perancis) saling bersaing untuk memperebutkan daerah selatan tersebut. Pada tahun 1803 Perancis mendirikan pemukiman di Porth Philip (Victoria) dan Hobart. Pada tahun 1810 Napoleon memerintahkan Gubernur Mauritius untuk menyerang Sidney. Sebelum terlaksana Napoleon jatuh.

Pada mulanya politik luar negeri Australia selalu diarahkan untuk mendukung Inggris. Pada tahun 1854 ketika Inggris berperang dengan Russia di Crimea, beribu-ribu penduduk Sidney dan Melbourne mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan perang. Pada tahun 1885 New South Wales mengirimkan 750 pasukan sukarelawannya ke Khartoum. Pada tahun 1899-1902 Australia juga mengirim 8 batalion untuk mendukung Inggris dalam perang Boer di Afrika Selatan. Tetapi seiring dengan meningkatnya system demokrasi dan nasionalisme Australia, berkembang pula sentiment anti Inggris.

Upaya pembelotan politik luar negeri dari Inggris mulai tampak pada tahun 1883 ketika Queensland berusaha untuk menganeksasi New Guinea yang dikuasai Jerman. Upaya ini segera ditentang oleh Inggris. Jerman mengukuhkan kekuasaannya di Pasifik Selatan dengan mengumumkan kekuasaannya di kepulauan Bismark. Pada tahun 1886 Inggris dan Jerman menyetujui garis demarkasi dan mengakui kekuasaan Jerman di Neew Guinea dan kepulauan sekitarnya. Kekecewaan terhadap Inggris juga diekspresikan oleh pemerintah Victoria (dekat NSW) ketika Inggris gagal memaksa Perancis untuk menarik pasukannya di New Hebrides.

Kekecewaan dan berkurang kepercayaan terhadap kemampuan Inggris untuk melindungi Australia inilah yang meningkatkan sentiment nasionalisme Australia terhadap Inggris pada akhir abad 19, sebagaimana tercermin dalam pidato sir Henry Parkes di Melbourne yang menghimbau pendirian federasi Australia. Pada saat itu jumlah penduduk Australia sudah hampir 4 juta jiwa, dengan income perkapita yang lebih tinggi dibanding penduduk Eropa maupun Amerika. Australia bukannya kekuatan Eropa yang harus menjadi penguasa di laut selatan (*mistress of the southern seas*). Menurut Henry Parkes, seandainya

koloni-koloni di Australia mempunyai suara yang sama, maka pada tahun 1885 New Guinea sudah menjadi kepunyaan Australia. Parker mengharap kekuasaan Gubernur Jenderal Australia yang mandiri, setara dengan monarkhi Inggris yang menurutnya sudah ketinggalan jaman. Namun demikian ide Henry Parkes menemui banyak tantangan, karena Imperium Inggris sedang berada pada puncak kejayaannya. Bagi Inggris, Australia harus menjadi bagian dari imperiumnya, yang akan mengembangkan *our language, our law, our sosial habits, our literature, our great sture of science* ke seluruh penjuru dunia.

Perang dunia I

Tahun 1901 terbentuk federasi Australia . Setahun kemudian Inggris memberikan kepercayaan kepada Australia untuk menguasai papua sehingga Australia mulai merasa perlu untuk mempunyai armada laut. Pada waktu itu kejayaan suatu Negara sangat ditentukan oleh kecanggihan armada lautnya. Misalnya pada tahun 1904-1905 angkatan laut Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Tahun 1908 armada Amerika Serikat yang tergabung dalam misi *great White Fleet* mengunjungi Australia. Hal-hal diatas semakin menyadarkan Australia akan pentingnya menguasainya lautan dan pada tahun 1910 diresmikan terbentuknya Angkatan Laut Australia.

Pada tahun 1914-1918 terjadi perang dunia I yang melibatkan Australia sebagai sekutu Inggris, sebagaimana kata-kata Andrew Fisher: *We will support of the British Empire to our last man and our last shilling*. Tentara Australia berperang melawan Jerman di medan Perang Belgia dan Perancis serta melawan Turki di medan perang Gallipoli. Keterlibatan dalam perang dunia tersebut menyadarkan dan meningkatkan kebanggaan Australia sebagai sebuah bangsa (nation) karena ternyata tentara Australia mampu menghadapi bangsa-bangsa besar di Eropa (Jerman, Turki).

Meski PM Australia William Morris Hughes ikut duduk dalam perundingan Versailles (tahun 1919) sehingga diberi mandate untuk menguasai Papua Neew Guinea yang semula diduduki Jerman, tetapi keterlibatan dalam perang tersebut telah menyadarkan akan ironi bahwa mereka tidak berhak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Nasib mereka tergantung pada perlindungan Inggris, politik luar negeri mereka tergantung pada Inggris dan perekonomian juga tergantung pada Inggris.

Ironi diatas menimbulkan perselisihan dikalangan masyarakat Australia. Terutama berkaitan dengan kelangsungan pengiriman pasukan Australia dalam pertempuran-pertempuran diluar negeri. Gereja Katolik Australia dan penduduk Australia keturunan Irlandia mengecam keras pengiriman pasukan untuk berperang dipihak Inggris, dalam perang Crimea, Perang Dunia II, dan perang Vietnam.

Menurut pasal 51 konstitusi 1901, politik luar negeri dilaksanakan oleh pemerintah federal yang baru. Tetapi dalam kenyataannya, pemerintah federal ini selalu diartikan sebagai Commonwealth, sehingga praktis keputusan yang berkaitan dengan politik luar negeri dilakuakn oleh pemerintahan Inggris. Malah pada tahun

1916 PM. Hughes membubarkan departemen Luar negeri. Baru pada tahun 1921 departemen luar negeri dibuka lagi. Itupun hanya sebagai bagian dari kantor PM sampai dengan tahun 1932 jabatan Menlu selalu dirangkap oleh PM baru pada tahun 1940 Australia membuka pos diplomatiknya di Washington, Tokyo dan Ottawa.

Jika dibandingkan dengan koloni Inggris lainnya seperti Kanada, Afrika selatan atau Irlandia politik luar negeri Australia termasuk yang paling lambat. Kanada sudah membuka hubungan diplomatiknya dengan Washington pada tahun 1927. hal ini disebabkan karena kuatnya komponen Perancis di Kanada dan kedekatannya dengan Amerika Serikat membuat hubungan Ottawa dengan London kurang Intens. Dalam kasus Afrika selatan juga sudah mempunyai kedutaan besar di Washington, Roma dan Den Hague pada tahun 1912. disini faktor persaingan antara penduduk Afsl keturunan Belanda dan keturunan Inggris dan adanya Issue Apartheid, menjadikan Afsl lebih cepat terbebas dari Inggris. Irlandia juga cenderung menentang Inggris karena sikap kebenciannya terhadap Inggris.

Sebaliknya Australia tidak mempunyai hal-hal yang memaksanya melepaskan diri dari Inggris. Bahkan Australia merasa tidak mempunyai alternative lain selain merasa sebagai bangsa Inggris. Antara tahun 1901-1939 sebagian besar orang Australia merasa dirinya sebagai orang Inggris. Pelindung Australia adalah Angkatan laut Inggris bukan Angkatan laut Australia, sebagian besar ekspor Australia ditujukan ke Inggris, investasi Australia juga berasal dari Inggris, anak-anak Australia belajar dengan menggunakan textbook Inggris, orang Australia berpergian dengan menggunakan paspor Inggris, sehingga sebagian besar orang Australia merasa bahwa dirinya adalah orang Inggris. Mereka juga merasa wajar kalau politik luar negerinya dikendalikan Inggris.

Faktor lain yang juga menghambat munculnya pengelolaan politik luar negeri yang professional di Australia adalah adanya kecenderungan perdana Menteri untuk mendominasi politik luar Negeri, karena ia mempunyai kepentingan pribadi didalamnya. Inggris cenderung hanya mau berkonsultasi dengan orang yang paling berkuasa yaitu PM. Inisiatif perdagangan dilaksanakan Australia dengan membuka kantor perwakilan perdagangan (konsulat) di China (1921), Singapore (1925) dan Kanada (1929) serta Jepang (1935).

Demikianlah dalam periode 1901-Perang dunia II, Australia sudah melaksanakan aktivitas perdagangan dan politik luar negeri, tetapi belum mandiri. Kebijakan dilaksanakan dalam rangka mendukung politik luar negeri, tetapi belum mandiri. Kebijakan dilakukan untuk mendukung Imperium Inggris. Sebagaimana dikatakan Menzies (1938): *I have always believe...that British Empire exercise its greatest influence in the World. It was suicidal for a dominion to formulate its own foreign policy (debates, 1938).*

Perang Dunia II

Menjelang perang dunia II Australia dikagetkan dengan jatuhnya daerah-daerah kekuasaan Inggris dan Belanda di Asia Tenggara ketangan Jepang. Jepang juga menjatuhkan bom di Darwin, Broome dan pelabuhan Sidney (Februari 1942). Untuk pertama kalinya tanah Australia menjaui ajang perang. Untungnya republic

Amerika segera menyelamatkan dan melindungi Australia. Hal ini membuka mata Australia bahwa ternyata penyelamat Australia adalah Republik Amerika, bukan imperium Inggris. Dengan demikian nasib Australia berpindah dari satu protector ke protector lain. Sebagaimana dikatakan oleh PM John Curtin (27 Desember 1941): *I make quite clear that Australia looks to Amerika, free of any pangs as to our tradisional links or kindship with the united kingdom (meanly, 1976)*. Bagi pemerintah Australia menjadikan Amerika Serikat sebagai pelindung adalah praktis, muarah dan mudah.

Perang dunia II menyadarkan Australia akan pentingnya system pertahanan. Selama decade 1950-1960an terjadi perdebatan antara:

- ☆ Kelompok yang menginginkan agar Australia mempunyai system pemerintahan yang mandiri, netral, non blok dan militer Australia yang hanya dipergunakan untuk melindungi Australia sendiri.
- ☆ Kelompok yang menginginkan agar Australia mempunyai pakta pertahanan regional, tetapi hanya melibatkan kekuatan luar.
- ☆ Kelompok yang menginginkan agar Australia mempunyai system pertahanan regional dengan melibatkan kekuatan luar terutama dengan Amerika Serikat. Kelompok ini mempunyai dukungan terkuat dan terbesar. PM Menzies sendiri selalu menyebut Amerika dan Inggris sebagai *our great and powerful friends*. Tidak mengherankan jika pada tahun 1951 Australia menggabungkan diri dalam pakta ANZUS, bersama dengan Amerika dan New Zealand. Pada tahun 1954 Australia menggabungkan diri dalam pakta Pertahanan *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO) bersama dengan Amerika, Inggris, Perancis, New Zealand, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Pada tahun 1950-1953 tentara Australia kembali bergabung dengan Amerika untuk mempertahankan Korea Selatan (perang korea)

Tahun 1956 Australia kembali mendukung Inggris dalam krisis Suez. Pada tahun itu presiden Gamal Abdul Nasser berusaha untuk menasionalisasikan terusan suez. Meski terusan ini terletak di wilayah Mesir tetapi sejak tahun 1888 Inggris memaksa Mesir untuk menandatangani penggunaan tersebut untuk kepentingan Internasional. Terusan Suez mempunyai artai yang sangat penting sebagai penghubung Negara-negara industri di Eropa dengan pasar internasionalnya. Pasokan minyak dari Negara-negara timur tengah ke Negara-negara Barat juga selalu melalui terusan ini.

PM Australia, Menzies mendukung Inggris habis-habisan. Bagi Menzies membela harga diri Inggris adalah bagian dari kepentingan nasional Australia. Terusan suez sangat penting artinya bagi perekonomian Inggris. Jika tersebut tertutup perekonomian Inggris bisa hancur dan terjadi pengangguran besar-besaran, padahal Inggris merupakan pasar dan investor terbesar bagi Australia. Sebagian masyarakat dan kalangan birokrat sebenarnya tidak menyetujui sikap Menzies ini, tetapi peran Menzies sangat dominant. Ketika kemudian ternyata sebagian besar anggota PBB dan Amerika menentang sikap Inggris, maka Australia ikut terpukul.

Fakta kemudian memperlihatkan bahwa meski terusan suez ditutup, kepentingan nasional Australia juga tidak terganggu, tidak seperti yang dikatakan Menzies. Perdagangan Australia dengan Inggris menurun, ekspor Australia

banyak yang disalurkan lewat teluk Persia, impor minyak Australia juga tidak terganggu karena Australia bisa mengimpor minyak dari Indonesia dan Negara-negara Arab lainnya yang bersimpati terhadap Mesir. Bahkan ekspor Australia ke Mesir bisa meningkat. Kegagalan Inggris dalam krisis suez semakin menyadarkan Australia akan kelemahan Inggris. Tetapi sepanjang pemerintahan Menzies Politik luar negeri dan system pemerintahan Australia sangat tergantung pada Inggris. Menzies menjelaskan konsep pertahanan *forward defence* sebagai berikut:

*The simple English of this matter is that with our vast territory and our small population we cannot survive a surging communist challenge from abroad except by the cooperation of powerful friends, including in particular the United Kingdom and the United States. Similarly, it is unbelievable that any responsible Australia should fail to see that if the battle against communism is to be an effective one it must be as forward of Australia as possible.....if Malaya vital to our defence, more vital properly understood, than some point on the Australian coast, then we must Malayan defence in a real sense our business.*¹⁰³

Sepanjang tahun 1965-1975 politik luar negeri Australia kembali disibukkan dengan keterlibatannya dalam perang Vietnam, sebaliknya kelompok oposisi (partai Buruh) cenderung menentang. Akhirnya kombinasi antara sengitnya perdebatan didalam negeri dan kegagalan Amerika Serikat di Vietnam, mendorong kemenangan partai Buruh dalam pemilu 1972, setelah 23 tahun berada dibawah kekuasaan partai liberal.

Tahun 1972

Terpilihnya Edward Gough Whitlam sebagai perdana menteri (1972-1975) membawa perubahan besar dalam politik luar negeri Australia. Whitlam secara tegas menyatakan bahwa Australia mempunyai kepentingan sendiri dan dapat membuat keputusan sendiri tentang apa yang harus dilakukan. meski menjadi sekutu Amerika Serikat, tidak berarti bahwa kepentingan Australia harus diabdikan bagi kepentingan Amerika. Dikatakan oleh Whitlam:

*The change of government provides a new opportunity for us to reassess the whole range of Australia foreign policies and attitudes...our thinking is toward a more independent Australian stance in international affairs; an Australia which will enjoy growing standing as a distinctive, tolerant, cooperative and well regarded nation, not only in the Asia and Pacific region, but in the world at large.*¹⁰⁴

Tidak lama kemudian Australia mencatat politik luar negeri yang spektakuler antara lain :

- ☆ Mengakui China, Vietnam Utara, Jerman Timur, dan Korea Utara.
- ☆ Menarik pasukannya dari medan perang Vietnam.
- ☆ Menarik bantuan ekonominya terhadap Kamboja.

¹⁰³ Evans, Gareth and Bruce Grant, *Australia's Foreign Relation: in The World of the 1990s*, Melbourne University Press, Carlton, Victoria, 1991,

¹⁰⁴ *Ibid*

- ☆ Menghentikan penjualan gandumnya di Zimbabwe Rhodesia, dalam rangka dukungannya terhadap gerakan anti apartheid di Negara jajahan Inggris tersebut
- ☆ Memberikan bantuan terhadap gerakan anti apartheid di Afrika Selatan.
- ☆ Memprotes dan menuntut Perancis di Mahkamah Internasional atas percobaan nuklirnya di Pasifik Selatan
- ☆ Menjalin kerjasama dibidang kebudayaan dengan Negara-negara Asia Pasifik
- ☆ Menghilangkan diskriminasi rasial dalam prosedur keimigrasian Australia
- ☆ Memberi kemerdekaan terhadap Papua New Guinea
- ☆ Mempererat kerjasama secara simpatik dengan Negara-negara Dunia ke III (pada tahun 1974 Australia hadir sebagai pengamat dalam konferensi non blok)
- ☆ Membuka pasar Australia bagi Negara-negara sekitarnya terutama untuk tekstil dan pakaian jadi.

Selain itu terdapat pula tindakan politik luar negeri yang kontroversial yang menimbulkan perdebatan sengit dalam masyarakat Australia, yaitu :

- ☆ Pengakuan Australia secara *de jure* atas penggabungan Estonia, Latvia dan Lithuania dengan Uni Sovyet
- ☆ Kunjungan Whitlam ke Indonesia (1975) sementara Indonesia baru saja menginvasi Timor-timur.

Kebijakan Whitlam memang sangat spektakuler. Sangat masa jabatannya sangat singkat. Pada tahun 1975 ia dipecat oleh Gubernur Jenderal Australia, Sir John Kerr. Pengganti Whitlam, Fraser yang berasal dari partai Liberal, sebenarnya tetap berusaha menjalin hubungan yang baik dengan kawasan Asia Pasifik, tetapi cara-caranya jauh lebih kalem. Menteri luar negeri dalam kabinet Fraser, Andrew Peacock, menjalin hubungan yang baik dengan Negara-negara Asean, Papua New Guinea dan Negara-negara Dunia III.

Dibanding dengan PM-PM Australia yang terdahulu yang berasal dari partai Liberal, Fraser terlihat lebih nasionalistik. Fraser memprotes keputusan Amerika Serikat untuk mendukung keputusan Dillingham Corporation untuk menuntut kompensasi sehubungan dengan penghentian izin penambangan pasir di kepulauan Fraser. Fraser juga berselisih dengan Amerika Serikat dalam perundingan masalah tarif multilateral. Fraser juga ragu-ragu untuk memberikan izin, ketika kapal pembom milik B52 milik Amerika Serikat meminta izin transit di Darwin.

Pada tahun 1976 Fraser mengunjungi Cina untuk berusaha menarik Cina untuk menggalang kekuatan 4: Cina, Jepang, Amerika Serikat dan Australia, untuk menghadapi kekuatan Uni Soviet. Tetapi usaha Fraser ini tidak ditanggapi oleh Cina. Pada tahun ini pula, untuk pertama kalinya manusia perahu Vietnam mendarat di Darwin. Masalah manusia perahu kemudian menjadi ancaman baru yang sangat serius bagi Australia. Disatu sisi para manusia perahu tersebut jelas mengancam lapangan kerja orang-orang kulit putih, tetapi disisi lain Australia adalah salah satu negara penandatangan konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa dalam masalah pengungsi. Dengan meningkatnya konflik di Indocina maka ancaman manusia perahu bagi Australia semakin merepotkan.

Tahun 1983: Bob Hawke

Pada tahun 1983 Bob Hawke yang berasal dari Partai Buruh (Australian Labor Party) yang memberikan perhatian serius dalam masalah politik luar negeri. Beberapa kebijakan Bob Hawke yang menonjol adalah:

- ☆ Menekankan aliansinya dengan Amerika Serikat yang disertai dengan pengajuan usul pelucutan senjata Nuklir dan pembentukan kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC)
- ☆ Mengupayakan penyelesaian konflik Indocina
- ☆ Menentang politik Apartheid di Afrika Selatan

Pada tahun 1987 Menteri pertahanan Kim Beazley menerbitkan kertas putih pertahanan Australia yang didasarkan pada laporan Paul Dibb (1986) tentang pentingnya Australia mempunyai system pertahanan yang mengandalkan pada kemampuan sendiri (*defence self reliance*). Usulan ini diajukan karena secara financial Australia juga sudah merasa mampu untuk memperbesar anggaran pertahanannya. Kim Beazley juga mengajukan strategi pertahanan *defence in depth* yang mengandalkan pada deteksi awal, peningkatan kekuatan udara, kekuatan darat dan kekuatan laut yang ditambah dengan kerjasama dibidang intelejen dan komunikasi militer dengan Amerika Serikat.

Bagi Australia konsep pertahanan *defence self reliance* dan *defence in depth* merupakan sebuah terobosan kemandirian. Dengan system pertahanan yang lebih mandiri maka politik luar negeri Australia juga lebih mandiri sehingga lebih aktif dalam mengajukan inisiatif-inisiatif di forum internasional. Di bawah PM Bob Hawke dilakukan penggabungan kementerian Luar negeri dan perdagangan (*Department of Foreign Affairs and Trade*).¹⁰⁵

Australia Gagasan Uni Asia-Pasifik

Perdana Menteri Australia Kevin Michael Rudd, J menegaskan usulan pembentukan suatu kelompok masyarakat Asia-Pasifik tidaklah meniru model Uni Eropa. "Kelompok ini tidak akan memiliki satu mata uang yang sama sebagaimana Uni Eropa," katanya. Pemimpin Federal Partai Buruh Australia itu lebih lanjut mengatakan pembentukan Uni Asia-Pasifik itu bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama di bidang ekonomi dan politik negara-negara di kawasan itu. Mantan diplomat yang fasih berbahasa Mandarin itu berharap Uni Asia-Pasifik bakal terbentuk pada 2020. Tak pelak tekad Rudd membentuk kelompok yang beranggotakan Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, India, Australia, dan negara-negara di Asia Pasifik itu menjadi topik utama media massa di Negeri Kanguru itu. Kritikan pun mengalir. Di antaranya dari dua mantan perdana menteri Australia, Paul Keating dan Bob Hawke.

Kedua pentolan Partai Buruh itu mengatakan gagasan itu tidak realistis dan tidak layak diterapkan di Asia. "Asia belum membutuhkannya," kata Bob Hawke, salah seorang pelopor berdirinya forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) itu. Adapun Keating menganggap kelompok itu justru akan mengancam

¹⁰⁵ Fedor A Mediansky, *Australian Foreign Policy : into the Next Millennium*, Macmillan, Australia, 1992, hal 123

kedaulatan Cina. Tapi Rudd yakin Uni Asia-Pasifik bisa terwujud pada 2010. Dia lalu merujuk ke masa ketika Bob Hawke memulai proses pembentukan APEC. "Dulu semua orang juga berpendapat itu mustahil," ujarnya. Rudd pun lantas menunjuk Richard Woolcott guna mempromosikan gagasan itu.

Woolcott adalah diplomat senior. Dia pernah bertugas sebagai Duta Besar Australia di Perserikatan Bangsa Bangsa. Cuma kelompok oposisi menuduh Rudd tergesa-gesa dalam membuat kebijakan. Usulan itu juga mendapat perhatian dari Jepang dan Indonesia, dua negara yang akan dikunjungi Rudd pekan depan. Jepang, sebagaimana diungkap *AFP*, mengaku cemas akan adanya kemungkinan perubahan aliansi. Tokyo was-was kebijakan politik luar negeri Australia bakal bergeser dari Amerika Serikat dan Jepang. Maklumlah kedua negara itu merupakan mitra utama Australia di percaturan politik dunia dan kawasan.

Kebimbangan Identitas Nasional dan Pengaruhnya dalam Kebijakan Luar Negeri Australia.

Kondisi geografis dan struktur komposisi penduduk Australia merupakan tantangan dalam pelaksanaan pengambilan arah dan strategi kebijakan politik luar negeri Australia baik pada masa dulu maupun sekarang. Struktur komposisi masyarakat Australia yang merupakan Negara kedua terbesar imigran di dunia menjadikan Australia mempunyai penduduk yang heterogen dan kebanyakan penduduknya berkulit putih (western) yang bisa dikatakan satu ras dengan masyarakat Eropa. Tetapi secara geografis Australia terletak di kawasan Pasifik Selatan atau bagian dari Asia sehingga terjadi ketegangan dalam Identitas Nasional dan hal itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri yang di ambil dan di arahkan oleh Australia.

Ditinjau dari era pemerintahan atau pemimpin dari Australia dapat kita analisis bagaimana sebenarnya arah kebijakan luar negeri Australia. Pertama, Era administrasi PM Paul Keating yang menyebutkan akan memperbaharui identitas nasional Australia dan Asia akan memainkan peran yang penting dalam hal ini. Faktor keterkaitan dengan negara-negara Asia akan menjadi faktor kunci dalam hal menentukan identitas nasional ini. Maka dari itu kebijakan-kebijakan luar negeri Paul Keating lebih bersifat multilateral dengan negara-negara Asia dan mencoba menjalin kerjasama yang baik. Namun terdapat kendala, yaitu bagaimana pandangan negara-negara Asia tersebut terhadap Australia, seperti Singapura dan Malaysia yang cenderung bersikap pesimistis terhadap upaya Australia ini.

Kedua, Pada tahun 1996, PM Paul Keating diganti oleh PM John Howard setelah kalah dalam kampanye. Berbeda dengan PM Paul Keating, John Howard lebih menitikberatkan hubungan bilateral antara Australia dengan AS dan Inggris. Ketiga, Pada tanggal 3 Desember 2007 Sosok Kevin Rudd ini cenderung non-konservatif jika dibandingkan dengan sosok PM Howard, ia juga PM yang pertama kali mengalami akibat dan pengaruh dari munculnya Cina sebagai kekuatan baru. Kompleksitas globalisasi juga membuatnya memiliki cara pandang tersendiri dalam membuat kebijakan luar negeri. PM Rudd menekankan apa yang disebut diplomasi Middle Power sebagai prioritasnya. Dengan diplomasi seperti

ini, maka Kebijakan Luar Negeri Australia lebih bersifat fleksibel dengan beberapa poin, yaitu :

- a. Sebagai membership of United Nations : maka Australia memainkan peran multilateralnya.
- b. Sebagai sekutu AS : maka Australia tetap menjaga hubungan baik dengan AS dan Inggris.
- c. Comprehensive Engagement with Asia : sebagai negara yang bertetangga dengan Asia, maka Australia menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara Asia.

Keempat, Di bawah kepemimpinan PM Rudd, maka ia memiliki visi Kebijakan Luar Negeri Australia, yaitu : membangun komunitas Asia Pasifik secara politik dan ekonomi serta membangun keamanan regional dan dialog kerjasama.

KECENDERUNGAN POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA

Kecenderungan politik luar negeri Australia untuk menjalin kerja sama dan membuka diri terhadap kawasan asia pasifik dengan tetap tidak meninggalkan hubungannya dengan AS dan inggris adalah langkah nyata arah kebijakan luar negeri Australia pada masa sekarang. Walaupun hubungannya dengan Negara Induk yakni Inggris sekarang agak melemah dikarenakan jarak antara Australia dan Negara induk tersebut menyebabkan Australia lebih memilih untuk mendekatkan diri ke Amerika Serikat yang mana notabenenya memiliki pengaruh yang lebih kuat dari pada inggris di kawasan asia pasifik. Jadi menurut Australia hubungannya sebagai orang western tetap dijaga dengan kerjasama keamanan bersama AS selain itu untuk masalah kerjasama ekonomi dan lainnya Australia mulai membuka diri di kawasan asia pasifik. Sedangkan dengan kawasan regional asia pasifik Australia memberikan dukungan terhadap berbagai organisasi yang ada di kawasan asia pasifik ini.

Dukungan tersebut terlihat pada organisasi berikut ¹⁰⁶:

- Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS) adalah Forum Kepulauan Pasifik (sebelumnya dikenal sebagai Forum Pasifik Selatan sebelum 2000), yang pelayanan Sekretariat, menyatukan independen dan mengatur diri-negara di Pasifik dalam tahunan pemimpin sebuah KTT.
- Secretariat of the Pacific Community (SPC)
- South Pacific Applied Geoscience Commission (SOPAC) yang membantu anggota untuk menilai, eksplorasi dan pengembangan mineral dan sumber daya yang tidak hidup lainnya.
- Pacific Regional Environment Program (SPREP) mempromosikan kerjasama regional dalam masalah lingkungan di asia pasifik.
- Forum Fisheries Agency (FFA) yang bertujuan membantu anggota untuk memaksimalkan manfaat yang berkelanjutan dari konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perikanan mereka.

¹⁰⁶ [www.dfat.gov.au / perdagangan / FTA / asean / AANZFTA](http://www.dfat.gov.au/perdagangan/FTA/asean/AANZFTA), diakses 20 April 2015, pukul 03.00 wib

- South Pacific Board of Educational Assessment (SPBEA) yaitu suatu daerah, organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1980 untuk membantu negara-negara anggota dan wilayah untuk mengembangkan prosedur penilaian terhadap dan / atau regional sertifikat nasional.
- University of South Pacific (USP) yang merupakan penyedia utama pendidikan tersier di wilayah Pasifik dan pusat internasional keunggulan untuk pengajaran, penelitian dan konsultasi pada semua aspek kehidupan Pasifik.
- Fiji School of Medicine (FSMed) yang merupakan lembaga kesehatan tersier yang melatih dan mendidik profesional kesehatan untuk melayani masyarakat di Pasifik.

Selain dukungan Australia juga merupakan anggota dari organisasi regional asia pasifik yaitu:

- APEC yaitu program kerjasama ekonomi di kawasan asia-pasifik.
 - ASEAN-Australian Development Cooperation Programme (AADCP) Program Kerjasama Pembangunan ASEAN-Australia adalah demonstrasi praktis dari komitmen Australia untuk bekerja sama dengan ASEAN untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di Asia Tenggara. Hal ini mencerminkan prioritas saat ini dan tantangan yang dihadapi kedua pasangan untuk memperluas hubungan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keamanan di kawasan negara-negara dengan tantangan pembangunan yang berbeda. Tujuan dari program ini adalah untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di dalam ASEAN, dengan membantu ASEAN untuk mengatasi tantangan pembangunan daerah prioritas melalui kerjasama regional.
- Tujuan khusus dari AADCP adalah:
1. untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan sosial regional (termasuk-ekonomi dan keuangan kerjasama makro, integrasi ekonomi, perumusan kebijakan sosial dan sistem, dan hubungan AFTA-CER);
 2. untuk memperkuat kapasitas kelembagaan daerah;
 3. untuk memperkuat ilmu pengetahuan, teknologi dan kerjasama lingkungan;
 4. untuk mempercepat baru Negara-negara Anggota ASEAN 'integrasi ke ASEAN dengan mendukung partisipasi mereka dalam program-program kerjasama ASEAN.

Kesimpulan	Politik	Luar	Negeri	Australia
-------------------	----------------	-------------	---------------	------------------

Arah kebijakan luar negeri Australia mengalami perubahan seiring periode pergantian kepemimpinan di Negara kangguru tersebut. Walaupun bukan hanya pengaruh pemimpin yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia tetapi juga berbagai factor seperti letak geografi dan lainnya. Pembukaan diri Australia yang semula semua cenderung ke Negara eropa karena ada anggapan orang Australia ini merupakan orang western yang tinggal bukan di Negara Eropa dimulai pada kepemimpinan Perdana Menteri Paul Keating yang pertama kali ingin mengubah identitas nasional tersebut dengan membuka diri dan ikut dalam organisasi regional di kawasan asia pasifik. Kemudian seiring terpilihnya PM Howard arah kebijakan luar negerinya kembali berkiblat kearah barat. Periode

setelahnya adalah PM Rudd yang sebelumnya merupakan seorang diplomat dan melihat Australia sebagai bagian dari kawasan asia pasifik dan sehingga Australia kembali menjalin hubungan baik dengan Negara-negara di asia pasifik terutama Negara-negara tetangga yaitu ASEAN.

BAB IX

KEPENTINGAN NASIONAL AUSTRALIA

❖ Tujuan Nasional Australia

Tujuan dasar politik luar negeri Australia adalah menjaga integritas dalam lingkungan internasional yang saling bersaing. Integritas suatu bangsa bukan hanya mencakup perlindungan terhadap aset-aset yang penting seperti wilayah teritori, sumber daya alam dan manusia dalam batas negara tetapi juga memelihara sistem ekonomi, politik, sosial, budaya masyarakat yang turun temurun secara singkat. Hal-hal tadi disebut sebagai etos fisik dan sosial dari sebuah negara. Ada dua sikap kelompok nilai yang membangun etos nasional Australia. Sikap kelompok nilai yang pertama adalah campuran antara nilai budaya, etika, agama dan etnis yang menentukan sikap dan moralitas masyarakat. Sedangkan kelompok nilai yang kedua adalah campuran antara nilai, sosial, politik dan ekonomi yang dipelihara oleh masyarakat dalam aturan-aturan administrative. *Tujuan utama dari politik luar negeri suatu Negara adalah kelangsungan hidup dan untuk itu keamanan Negara adalah suatu hal yang mutlak.* Keamanan Negara bukan hanya keamanan secara fisik dari serangan maupun invasi, tetapi berarti juga perlindungan dari agresi ekonomi Negara lain, yang juga berarti mengamankan dasar nilai dan budaya masyarakat dari penerapan ideologi luar negeri yang bertentangan.

❖ KEPENTINGAN NASIONAL

Menurut paradigma Realis, kepentingan nasional sangat mempengaruhi politik luar negeri sebuah bangsa. Kepentingan nasional bisa digolongkan dalam tiga kategori:

1. Kepentingan geo politik atau geo strategi
2. Kepentingan ekonomi dan perdagangan
3. Kepentingan untuk menjadi dan dilihat sebagai warga internasional yang baik.

Ruang lingkup kategori yang pertama dan kedua sudah jelas, tetapi ruang lingkup dari kategori ketiga agak tidak jelas.

Kepentingan geo politik atau geo strategi

Kepentingan geo politik atau geo strategi Australia ialah mempertahankan kedaulatan dan kemandirian (kemerdekaan) politik Australia. Kepentingan ini bisa dibedakan dalam dimensi regional dan internasional.

Dalam dimensi regional Australia berkepentingan untuk meyakinkan bahwa Negara-negara sekeliling Australia tetap berada dalam situasi yang damai, stabil dan berteman atau minimal tidak memusuhi Australia. Kawasan pertama yang berperan bagi keamanan Australia adalah sekelompok Negara-negara yang termasuk didalam :

- ☆ *Inner area of direct military interest* yaitu territory Australia dan sekitar (Indonesia, Papua New Guinea, New Zealand dan kepulauan Pasifik Selatan).
- ☆ *A larger Area of primary strategic area* yaitu daerah Laut Hindia bagian timur, Negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik Selatan lainnya.
- ☆ Kawasan yang lebih luar: Northeast Asia, Indocina dan Asia Selatan.

Dalam dimensi internasional Australia berkepentingan untuk menghindari terjadinya perang nuklir. Sebagaimana dikatakan oleh menlu Gareth Evans didepan sidang umum PBB tanggal 4 oktober 1988:

Nuclear disarmament and arms control are not matters exclusively for those great powers which currently possess nuclear weapons. For if there is a nuclear conflict, it is not just the peoples of the nuclear weapon states who will suffer. The peoples of the world will be devastated. As the potential victims of nuclear catastrophe, the people of all nations have the right to demand real progress and the eventual elimination of nuclear weapon. They have the right to demand that the nuclear arms race not take new form, including its spread into outer space.

Kepentingan Ekonomi dan Perdagangan

Sebagai Negara industri yang memproduksi barang-barang berteknologi ringan dan tinggi, serta sebagai Negara yang ekspor jasanya sedang berkembang, Australia berkepentingan untuk berusaha dan mengamankan rezim perdagangan internasional yang bebas dan liberal. Australia berkepentingan agar akses pasar ke berbagai Negara selalu terbuka. Sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan internasional sering dihambat oleh kebijakan-kebijakan yang bersifat proteksi seperti tarif, kebijakan non tarif, subsidi ekspor agar barangnya menjadi murah atau penggunaan sarana-sarana politik untuk memproteksi (nasionalisasi). Australia juga berkepentingan agar lalu lintas keuangan dan perbankan internasional berlangsung tanpa hambatan, kebebasan arus investasi, teknologi, transport dan komunikasi. Dengan demikian Australia bisa menanamkan investasinya ke berbagai Negara. Misal dengan adanya liberalisasi peraturan perguruan tinggi di Indonesia, maka beberapa perguruan tinggi di Australia akan segera membuka cabang di Indonesia.

Kepentingan untuk menjadi dan dilihat sebagai warga internasional yang baik.

Sebagai warga internasional yang sudah sewajarnya jika Australia ikut peduli terhadap masalah-masalah internasional, seperti:

- ☆ masalah lingkungan internasional: pencemaran, menipisnya lapisan ozon.
- ☆ Masalah kesehatan internasional : meningkatnya ancaman penyakit AIDS, perdagangan narkoba, meningkatnya populasi dunia yang tidak terkendali (*Birth control*).
- ☆ Masalah perekonomian dan kemanusiaan internasional : kelaparan, kemiskinan, hutang Negara-negara berkembang.
- ☆ Masalah kelangsungan umat manusia: anti nuklir, *arm control*.
- ☆ Ancaman keamanan yang bukan berasal dari militer: masalah pengungsi, *peace keeping*, dan instabilitas di Negara tetangga atau di kawasan.
- ☆ Masalah peningkatan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, dekolonisasi, penghapusan diskriminasi rasial (*apartheid*). Kebijakan ini dilandaskan pada nilai-nilai dan budaya demokrasi Australia sehingga tercapai standart internasional dalam hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan Tujuan dan Kepentingan Nasional Australia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Australia, Perdana Menteri Howard pada masa pemerintahannya menetapkan kebijakan politik luar negerinya sebagai berikut :

1. Melindungi teritorial Australia dari serangan fisik dan memelihara kapasitas Australia dalam membuat kebijakan independen.
2. Membangun dan melanjutkan kapasitas kompetensi perdagangan dan investasi pada skala internasional, tapi dengan penekanan pada pasar Asia-Pasifik.
3. Menghapuskan senjata pemusnah massal dan untuk menahan konflik regional (di dalam dan di luar Asia), peningkatan keamanan dalam menghadapi terorisme internasional, melalui migrasi tidak sah, tentang penyakit, arus pengungsi, penurunan kualitas lingkungan, narkoba dan kejahatan transnational, sehingga dapat meminimalisasikan risiko konflik global.
4. Memelihara dan mempromosikan Australia sebagai negara yang memiliki nilai demokrasi liberal yang direfleksikan dari intelektual Eropa dan peninggalan budaya, untuk menarik minat negara-negara Asia Pasifik yang memiliki sejarah dan budaya yang berbeda¹⁰⁷

Menyimak kebijakan politik luar negeri Australia tersebut, maka untuk poin 1 dapat dianalisis bahwa melindungi teritorial Australia dari serangan fisik berarti arah pengembangan militer Australia yang mandiri. Di lihat dari segi geografis, Australia sangat mudah diserang dari arah utara. Dengan demikian militer Australia harus selalu siap dalam menyelenggarakan pertahanan di belahan utara negerinya. Mengingat penduduk Australia sangat kecil (hanya berjumlah lebih kurang 20 juta jiwa yang mengisi satu benua), maka dasar pertahanannya bertumpu pada teknologi tinggi.

Makna lain dari pengembangan militer yang mengarah ke utara, maka perlindungan teritorial lebih difokuskan pada penahanan serangan dari utara.

¹⁰⁷ *The National Interest*, 1997, berdasarkan kutipan dari Buana Katulistiwa, 2005, pp. 1-16,

Artinya, tetangga Australia yang paling dekat di utara adalah Indonesia. Bagaimana Australia menata hubungannya dengan Indonesia, mengingat pertahanan yang dibangun oleh Australia mengarah di utara, yang dapat ditanggapi oleh pemerintah Indonesia sebagai membangun pertahanan terhadap ekspansi Indonesia. Hal ini terlihat dari perjalanan sejarah yang terlihat bahwa seringkali terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Australia dengan Indonesia. Dapat dilihat bagaimana keterlibatan Australia yang berkonspirasi dengan Belanda pada peristiwa Irian Barat. Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta yang memperlihatkan politik Australia terhadap pemberontakan dalam negeri Indonesia antara ucapan dan tindakan sangat berbeda ¹⁰⁸Masalah Timor Timur juga memperlihatkan kepentingan Australia dalam menyangga keamanannya dari serangan di utara. Kepentingan utama Australia terhadap Timor Timur adalah menghindari tidak melebarnya konflik di Timtim masa 1970an yang dapat menjadi ancaman bagi Australia (ingat teori domino, ancaman komunis dari utara). Politik luar negeri Paul Keating ini membuat hubungan antara Australia dengan Indonesia mesra, tetapi setelah naiknya Howard yang mengubah politik luar negerinya dengan pengakuan kemerdekaan Timor Leste, maka hubungan tersebut menjadi tegang. Kondisi yang demikian mengisyaratkan bahwa Australia seharusnya dapat menjalin hubungan baik terutama dengan Indonesia sebagai negara tetangga terdekat di utara. Tangkisan Letug ¹⁰⁹memberikan pandangan pemikiran yang perlu disikapi oleh pemerintah Indonesia terhadap hubungan kedua negara adalah sebagai berikut (1) perlu revolusi diplomasi dalam memandang Australia sebagai negara tetangga, (2) perlu dibangun wacana politik yang elegan tanpa membuat takut Australia seperti misalnya mengembangkan politik kebudayaan yang tidak terkait dengan ekspansi ekonomi, (3) perlu mengubah paradigma baru membangun wacana nasionalisme Indonesia dengan mengedepankan diplomasi yang agresif untuk kepentingan nasional. Dari sisi Australia, perlu dikembangkan arah kebijakan politik luar negeri yang seimbang antara kedekatannya dengan Amerika Serikat (*western*) dengan kesadarannya bahwa negara-negara di Asia telah bangun dan menjadi kekuatan yang tidak terbendung, seperti Cina, India, dan Korea. Bagi Australia, membangun hubungan Sino – Australian yang lebih kuat dapat dibangun melalui perbaikan hubungan Indonesia – Australia secara lebih keras.

Terhadap poin 2, yakni membangun kapasitas kompetensi perdagangan dan investasi skala internasional dengan penekanan pada pasar Asia – Pasifik, dapat dijelaskan bahwa pandangan politik luar negeri Australia masa kepemimpinan Howard cenderung mengedepankan pihak swasta sebagai kekuatan terdepan dalam diplomasi internasional-nya. Australia dalam penampilan wajah di dunia internasional memperlihatkan dirinya sebagai wakil kepentingan kolonialisme baru di belahan Asia Tenggara. Salah satu ciri demokrasi di Australia adalah memisahkan antara apa yang menjadi kawasan swasta dari kawasan pemerintah. Wajah politik luar negeri Australia dapat sama sekali

¹⁰⁸ Indra Piliang, berdasarkan resensinya terhadap buku Hadi Subadio Keterlibatan Australia dalam pemberontakan PRRI/Permesta, 2002, hal. 228-229

¹⁰⁹ *Ibid*

berbeda dengan wajah politik swastanya. Dengan dalih swasta, pemerintah Australia dapat melepaskan diri dari tuduhan merongrong negara lain (simak peristiwa lepasnya Timor Leste, yang didahului dengan merebaknya peran LSM yang mengangkat isu kemanusiaan). Peran swasta menjadi garda depan diplomasi yang sangat efektif untuk memperjuangkan agenda-agenda politik sebuah negara. Melalui peran pihak swasta inilah Australia berupaya mengembangkan dirinya sebagai investor dan pelaku perdagangan skala dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini Australia menjadi negara salah satu negara terkaya di dunia.

Poin 3 yakni penahanan laju konflik regional memperlihatkan peran serta Australia terhadap kepentingan perdamaian dunia. Penghapusan senjata pemusnah massal (lihat peran Australia dalam South Pacific Forum), penanganan arus pengungsi (simak perubahan komposisi masyarakat Australia pasca migrasi pengungsi dari Vietnam dan Kamboja), penurunan kualitas lingkungan, peredaran narkoba dalam jaringan internasional, dan kejahatan transnasional, semuanya menjadi agenda kepedulian Australia terhadap masalah-masalah yang timbul di dunia. Di sini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Australia tidak hanya pada masalah kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga masalah-masalah lain di luar keduanya. Tindak lanjut dari persoalan pada poin 3 ini adalah Australia harus mampu mempromosikan dirinya sebagai negara yang memiliki nilai demokrasi liberal (yang memang direfleksikan dari budaya Eropa), dan harus pula dapat mengupayakan dirinya agar dapat menarik minat negara-negara sekitar yang memiliki budaya berbeda. Artinya Di satu sisi Australia harus memperlihatkan jatidirinya sebagai negara dengan pola pikir dan budaya putih, tetapi di sisi lain Australia juga harus mampu menempatkan dirinya yang berbeda tersebut dalam lingkungan Asia Tenggara – Pasifik yang bukan berbudaya putih.

Jika disimak masa pemerintahan Howard tersebut, tampaknya masih relevan dengan tiga pilar politik luar negeri Australia. Warna partai Liberal yang konservatif memang terlihat sangat kuat, seperti ketegangan-ketegangan yang muncul akibat sering terjadi kekeliruan dalam persepsi antara pemerintah Australia dengan Indonesia, tetapi juga tradisi penekanan pada pentingnya wilayah regional dan kerjasama dengan negara-negara Asia menjadi salah satu agenda politik luar negeri Australia. Di samping itu, pilar kedua yang merupakan tradisi partai Buruh, juga sedikit terlihat yakni pemahaman terhadap identitas diri suatu bangsa. Pertanyaan yang masih perlu dikemukakan adalah, bagaimana arah politik luar negeri Australia masa mendatang? Apakah akan sama seperti kepemimpinan PM yang sebelumnya atau akan lebih spektakuler lagi?

❖ KESEMPATAN UNTUK MEMPENGARUHI

Dalam praktek politik luar negeri, kepentingan (*interest*) tidak sama dengan pengaruh (*influence*). Pengaruh lebih sulit diukur. Secara tradisional, kawasan Pasifik Selatan merupakan daerah pengaruh Australia. Misalnya di republik Fiji, setelah terjadi kudeta militer tahun 1987. Australia berusaha agar mencapai situasi politik yang stabil, kerukunan rasial, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan penghargaan terhadap sistem demokrasi konstitusional (*Western Liberal Democracy*).

Dalam berhubungan dengan Negara-negara pasifik Selatan, Australia menerapkan *strategi Constructive Commitment* yang dilandaskan pada:

- ☆ Semangat partnership bukan semangat dominasi
- ☆ Penghormatan terhadap kedaulatan nasional
- ☆ Pembentukan persepsi bersama tentang strategi dan keamanan kawasan.

Dalam masalah perdagangan internasional Australia berusaha membangun *Coalition of allies* yaitu kelompok pedagang/produsen hasil-hasil pertanian yang diharapkan bisa menjadi kekuatan III dalam perundingan-perundingan internasional, disamping Amerika Serikat dan masyarakat Eropa (EC). Seperti kita ketahui Australia sebagai produsen hasil pertanian dihadapkan pada masalah terus merosotnya harga-harga dipasaran internasional dan adanya proteksi dari Amerika dan masyarakat Eropa.

Pada tahun 1986 dibawah menteri perdagangan John Dawkins, Australia berusaha membentuk koalisi Negara-negara produsen pertanian yang beranggotakan Negara-negara Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Tenggara dan Negara-negara commonwealth. Koalisi ini diharapkan mampu meningkatkan posisi *bargaining* dalam perundingan putaran Uruguay.

❖ **PRIORITAS POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA**

Karena berbagai keterbatasan yang ada Australia harus menyusun prioritas, sehingga tercapai politik luar negeri yang efektif. Prioritas tersebut disusun sebagai berikut:

- ☆ Memelihara keamanan kawasan
- ☆ Berperan serta dalam memelihara keamanan dunia
- ☆ Mendorong kerjasama perdagangan, investasi dan perekonomian
- ☆ Berperan serta untuk ikut menyelesaikan masalah global, sebagai warga internasional yang baik.

Kebijakan Menahan diri (*containment policy*) sesudah tahun 1949

Setelah berakhirnya Perang Dunia II hampir di seluruh dunia terjadi perubahan besar dalam bidang politik. Beberapa negara di Eropa menjadi negara yang dikuasai komunis. Jika dikaji kembali ke masa sebelum berakhirnya Perang Dunia II, persetujuan-persetujuan tertentu yang disepakati dalam Konferensi Yalta menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam konferensi ini, Uni Soviet diijinkan menguasai bagian timur Polandia. Sebagai gantinya, Polandia diberikan teritori Jerman yang terletak di bagian utara dan barat Polandia. Stalin berjanji kepada Roosevelt dan Churchill, bahwa Polandia, Yugoslavia, Bulgaria, dan Rumania akan direorganisasikan mengikuti gagasan-gagasan demokratis dengan melakukan pemilihan yang bebas dan jujur. Akan tetapi, ternyata kemudian Stalin mengingkari janjinya. Dia menjadikan Polandia, 101 Bulgaria, Rumania, sebagai negara-negara satelit yang didominasi Uni Soviet; Yugoslavia pun untuk sementara sempat didominasi Uni Soviet.

Dua bulan setelah Perang Dunia II berakhir, Jenderal Eisenhower menulis, "*American-Soviet friendship is one of the cornerstones upon which the edifice of peace should be built.*" (Persahabatan Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan salah satu dasar untuk membangun perdamaian yang lebih baik). Ribuan orang

Amerika Serikat menyetujui pendapat Eisenhower ini, dan juga menghargai heroisme pasukan Rusia dalam mengalahkan musuh bersama, yaitu Jerman. Sama dengan Eisenhower, para pendukungnya juga bersimpati pada penderitaan orang Rusia dalam menghadapi Jerman selama berlangsungnya Perang Dunia II. Mereka kemudian bertanya, "Mengapa mereka tidak dapat bekerja sama dalam masa damai?" Rasa percaya terhadap kerja sama seperti itulah untuk sebagian menjadi alasan Amerika Serikat mulai dengan segera mendemobilisasikan kekuatan angkatan bersenjataanya segera sesudah masa damai tiba.

Akan tetapi, segera sesudah perang usai, banyak negara di dunia terpecah ke dalam dua kubu yang saling bermusuhan, yaitu Amerika Serikat bersama banyak bangsa-bangsa non-Komunis, dan Uni Soviet bersama sebagian besar bangsa-bangsa berhaluan Komunis. Ketegangan akibat persaingan di antara kedua kubu inilah yang melahirkan apa yang disebut sebagai Perang Dingin. Secara umum, senjata Perang Dingin ini bukan bedil atau meriam, tank, dan pesawat tempur, melainkan propaganda dan bantuan-bantuan yang bersifat militer, ekonomis, dan teknis untuk memperkuat sekutunya dan menarik simpati pihak-pihak netral. Dalam keadaan seperti itu, harus diakui, bahwa di beberapa tempat,

Perang Dingin itu telah menjadi perang panas, dan perkelahian yang sungguh-sungguh telah menjadi kenyataan.¹¹⁰ Platt dan Drummond mengemukakan beberapa faktor yang dari sudut pandang Amerika Serikat dianggap makin merenggangkan kedua belah pihak serta meningkatkan suhu Perang Dingin, antara lain:

1. *Mutual suspicion between Communist Russia and Capitalist Countries;*
2. *Communist propagandists capitalize on post-war hunger and growing nationalism in underdeveloped countries;*
3. *Soviet satelites are created;*
4. *Russian encouragement of communism in The Far East;*
5. *Russia drops an "iron curtain" to shut out the democracies.*

(1). *Kecurigaan timbal balik antara Rusia yang berfaham komunis dengan negara-negara kapitalis.* Lenin dan penggantinya, Stalin, meyakini bahwa jika komunisme tidak menghancurkan kapitalisme, kapitalisme akhirnya akan menghancurkan komunisme. Sejak awal terjadinya Revolusi Komunis (1917), dengan berbagai alasan, sudah terjadi kecurigaan timbal balik antara Rusia yang berfaham komunis dengan negara-negara yang berfaham kapitalis. Selama berlangsungnya perang, tampaknya Stalin curiga terhadap negara-negara (sesama) sekutunya. Sebagai contoh, secara tidak langsung Stalin menyatakan, bahwa penundaan mereka membuka front kedua didasarkan pada keinginan untuk melihat pengikut Nazi dan pengikut komunis saling menghancurkan. Pihak Sekutu takut kalau-kalau pengikut komunis (Uni Soviet) mengadakan perjanjian damai secara terpisah dengan Jerman, sebagaimana telah terjadi dalam masa Perang Dunia I.

(2). *Para propagandis komunis memanfaatkan kelaparan pasca-perang dan*

¹¹⁰ Nathaniel Platt and Nuriel Jean Drummond, *Our nation from its creation : a great experiment*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1964, hal. 825-826

bertumbuhan nasionalisme di daerah-daerah terbelakang (daerah-daerah sedang berkembang). Kerusakan yang diakibatkan oleh Perang Dunia II begitu hebat, sehingga ketika perang telah usai, hanya dua negara yang sungguh-sungguh memiliki kekuatan, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Uni Soviet melirik ke arah timur dan barat, dan melihat bahwa tidak ada bangsa di Asia dan di Eropa yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mencegah ekspansinya. Uni Soviet menyadari bahwa perang ternyata telah mengintensifkan kelaparan dan kekacauan, terutama di daerah-daerah terbelakang. Uni Soviet juga mendengar makin kerasnya jeritan yang anti-imperilistis seperti, 'Asia for Asians!' ('Asia untuk bangsa Asia!') dan 'Africa for Africans!' ('Afrika untuk bangsa-bangsa Afrika!'). Uni Soviet menyadari bahwa penduduk di wilayah ini, yang sedang terbakar oleh nasionalisme, merupakan kondisi yang matang bagi propaganda komunis menentang Inggris, Perancis, dan Belanda yang pada waktu itu dipandang sebagai penjajah. Memanfaatkan dan mengeksploitir sebagian terbesar kegelisahan itu, orang-orang komunis yang berasal dari bangsa itu atau agen-agen Moscow melukiskan suatu gambaran yang bersemangat tentang apa yang dilakukan oleh komunisme untuk suatu negeri. Mereka mengklaim (mengaku) bahwa komunisme mengakhiri lilitan kemiskinan dan kebodohan, menghapuskan diskriminasi rasial, agama, dan kelas-kelas dalam masyarakat. Mereka menuduh kapitalis sebagai sumber dari semua kejahatan ini. Mereka menyatakan dengan tegas bahwa hanya kaum komunis yang secara jujur mendukung rakyat-rakyat terjajah dalam perjuangannya untuk merdeka.

(3). *Terciptanya negara-negara satelit Uni Soviet.* Banyak wilayah yang lepas dari Rusia sebagai akibat Perang Dunia I, diduplikatnya kembali selama Perang Dunia II. Ke dalamnya termasuk Estonia, Latvia, Lithuania, dan bagian-bagian dari Finlandia, Polandia, dan Rumania. Semua oposisi terhadap komunis di negara-negara tersebut, dihancurkan dengan cara-cara rakyat di negeri itu membaca karya-karya terbitan luar negeri. Winston Churchill amat mencela sensor ketat yang dilakukan oleh Uni Soviet tersebut, dan menuduh Uni Soviet memasang "tirai besi" dari Laut Baltic sampai ke Laut Adriatic.

Setelah Perang Dunia II, tampak seolah-olah pengikut komunis Yunani, dengan bantuan dari negara-negara tetangga yang telah menjadi satelit Rusia, akan mengambil alih kekuasaan di negeri itu. Pihak yang pro-Barat, kerajaan Yunani yang antikomunis melakukan upaya kecil untuk meningkatkan kondisi ekonomi bangsa yang buruk. Sementara itu, Inggris menginformasikan kepada Amerika Serikat, bahwa Inggris tidak lagi akan memikul beban keuangan untuk membantu Yunani dan tetangganya, Turki. Pada waktu yang bersamaan, Uni Soviet terus menekan Turki agar mengakuinya melakukan pengawasan bersama terhadap Selat Dardanella dan Bosporus.

Jika Yunani dan Turki menjadi komunis, berarti Rusia akan mendominasi bagian Timur Mediterranean, dan bagi pihak Barat hal itu sekali gus merupakan ancaman terhadap hubungan mereka dengan Timur Tengah yang kaya minyak serta rute pelayaran ke Timur Jauh. Oleh karena itu, Presiden Truman memutuskan untuk mengambil pendirian tegas terhadap Uni Soviet dan para pendukungnya. Dalam tahun 1947, Truman meletakkan kebijakan yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri terhadap Uni Soviet selanjutnya. Platt and

Drummond¹¹¹ mengutip kata-kata Truman yang dalam perkembangan selanjutnya dikenal sebagai *Truman Doctrine*, yang berbunyi sebagai berikut.

... it must be the foreign policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world --we will surely endanger the welfare of our nation. (... harus menjadi politik luar negeri Amerika Serikat untuk membantu bangsa-bangsa merdeka yang sedang berjuang menentang penaklukan oleh kelompok minoritas bersenjata atau oleh tekanan-tekanan dari luar. Bangsa-bangsa merdeka di dunia mengharapkan bantuan kita untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Jika kita bimbang dalam kepemimpinan kita, berarti kita membahayakan perdamaian dunia dan kita dengan sungguh-sungguh akan membahayakan kesejahteraan bangsa kita.)

Oleh karena tekanannya pada perintangannya ekspansi komunisme lebih jauh, maka Truman Doctrine dianggap memprakarsai suatu *containment policy* (politik pengurungan atau penahanan). Dalam penerapannya, Amerika Serikat membangun kekuatan bersenjatanya sendiri dan memberikan bantuan militer dan ekonomi terhadap bangsa-bangsa yang terancam. Yunani dan Turki merupakan dua negara yang pertama kali mendapatkan manfaat dari containment policy tersebut. Congress Amerika Serikat menyediakan dana sebesar \$400 milyar untuk bantuan ekonomi dan militer kepada mereka dalam tahun 1947. Misi-misi militer segera digerakkan kepada kedua negara tersebut, dan akhirnya keduanya tidak menjadi satelit Uni Soviet.

Dalam kaitannya dengan Australia, *containment policy* yang diprakarsai oleh Amerika Serikat memposisikan negara yang terisolasi tersebut (Australia) untuk lebih memahami proses terjadinya kebangkitan negara-negara Asia dan Afrika. Kekurang-pahaman Australia terhadap budaya dan bahasa negara-negara di Asia memaksa mereka untuk menjalin kerjasama lebih baik dengan negara-negara baru yang terbentuk di Asia tersebut.

Kemenangan Mao Tse-Tung dengan komunisnya di Cina tahun 1949, diikuti dengan pecahnya perang Korea 1950 mengindikasikan bahwa Cina telah siap untuk memperluas teritorinya melalui kekuatan militer atau cara persuasif. Australia membaca arah pergerakan sepak terjang Cina, sepertinya mereka akan mengambil alih Laos dan Vietnam Selatan, berpindah ke Thailand serta Kamboja setelah menguasai India, Pakistan, Ceylon, Timur Tengah dan Afrika. Blackmore¹¹² menggambarkan hal tersebut sebagai *Domino Theory*. Ia menjelaskan, *this "domino theory" of Communist expansion explains the Australian government's contributions of military aid in South East Asia*". Australia merasakan kecenderungan tersebut sehingga merasa perlu untuk membendung kekuatan Cina tersebut.

Pada masa ini orientasi Politik luar negeri Australia ditetapkan melalui upaya membendung perluasan komunis melalui cara memberikan bantuan militer dan memperkuat pertahanannya melalui perjanjian pertahanan bersama dengan

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² *Ibid*

Amerika Serikat, melaksanakan bantuan ekonomi terutama kepada negara-negara yang berada di sekitarnya yang tergabung dalam Commonwealth of Nation. Australia membantu membendung ekspansi Korea Utara melalui kekuatan militernya. Australia juga memberikan bantuan militer kepada Malaysia (sebagai sesama anggota British Commonwealth of Nations) dalam rangka membandung kekuatan komunis di Asia Tenggara.

Dalam kasus perang Vietnam, keterlibatan militer Australia adalah dengan mengirimkan "*army advisers*" untuk melatih tentara Vietnam Selatan dalam strategi perang di hutan-hutan, bahkan tahun 1966 militer Australia ditingkatkan kontribusinya sebagai akibat diberlakukannya wajib militer. Hal ini dilakukan agar Australia mampu membendung agresifitas komunis. Di sini terlihat bahwa periode tahun 1950an sampai 1960an Australia menganut konsep pertahanan yang disebut dengan *Forward Defence*, yakni membangun pertahanan dengan menempatkan pasukan di luar wilayah negaranya (lihat keterlibatan tentara Australia pada perang Korea, perang Vietnam, dan Malaysia & Singapura).

Setelah itu, pada periode berikutnya orientasi pertahanan Australia menganut konsep *Defence of Australia*. Konsep pertahanan ini menggunakan *self reliance* sebagai dasar utamanya. Di sini, militer Australia harus mampu melaksanakan operasi secara mandiri dan harus mampu menangkal jangkauan senjata musuh dengan memanfaatkan geografi Australia. Kini Australia menerapkan Regional Defence dengan strategi varian kerjasama pengembangan pertahanan misil bersama Amerika Serikat.

Meskipun berbagai konsep pertahanan dikembangkan oleh Australia, tetapi pada dasarnya kedekatan dengan Amerika Serikat menjadi dasar dari segalanya. Setelah melepaskan diri dari keterikatan dengan Inggris, Australia menyandarkan dirinya pada Amerika Serikat. *National interest* Australia lebih ditujukan pada pembentukan lingkaran Pasifik Barat yang dimanifestasikan dalam bentuk *Australia's Maritime Identification System* (AMIS). AMIS merupakan manifestasi konsep keamanan maritim regional Amerika Serikat yang diterjemahkan oleh Australia sebagai penguatan strategi pertahanan maritimnya.

Menarik untuk disimak pendapat Petrov (2008)¹¹³ yang menggambarkan tiga pilar tradisi politik luar negeri Australia yakni (1) Tradisi Menzies (partai Liberal) yang digambarkan sebagai tradisi realistik, pragmatis, dan berpusat pada kekuatan. Di sini pandangan Menzies difokuskan pada kenyataan keterisolasian Australia dapat diatasi dengan menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat; (2) Tradisi Evatt (partai Buruh) yang memperlihatkan gambaran nasionalis dan internasionalis, sebab Evatt berpedoman organisasi internasional (dalam hal ini PBB) merupakan forum yang cukup efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Arah pilar kedua ini adalah kekuatan dan nilai kebebasan dan pemahaman terhadap identitas diri suatu bangsa; (3) Tradisi Spender & Casey (Partai Liberal) menekankan pada pentingnya wilayah regional dan kerjasama aktif dengan Asia. Sampai saat ini, ketiga pilar tersebut masih relevan dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan politik luar negeri Australia, meskipun

¹¹³ <http://moadoph.gov.au/exhibitions/online/petrov/>, diakses 23 April 2015, pukul 04.00 Wib

penekanannya sangat ditentukan oleh kondisi dari partai manakah perdana menteri Australia berasal.

Pemantapan diri Australia sebagai Bagian dari Asia Tenggara dan Pasifik Selatan

Berdasarkan pengalaman sejarahnya di atas, selayaknya sikap Australia adalah pemantapan diri sebagai bagian dari Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Keterikatan dengan Amerika Serikat sebagai sekutu yang setia tidak menghalangi niat Australia untuk bergerak menuju keterikatan dengan Asia. Dalam hal ini dapat dilihat Australia sebagai bagian dari komunitas internasional yang mampu menjadi donor kemanusiaan. Aussiebuddy¹¹⁴ mengemukakan bahwa kebijakan luar negeri Australia diarahkan oleh suatu komitmen untuk multilateralisme dan regionalisme. Di satu sisi masalah keamanan Australia didampingi oleh Amerika Serikat, sedang di sisi lain masalah-masalah yang berhubungan dengan kerjasama ekonomi Australia menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di Asia. Artinya, Australia tidak lagi bergantung kepada Inggris yang secara geografis letaknya jauh dari benua yang di selatan sehingga orientasi bergeser ke Amerika Serikat, dan menghadapi letaknya yang terpencil di Pasifik Selatan Australia harus mampu memantapkan dirinya sebagai bagian dari Asia Tenggara dan Pasifik Selatan.

Kebijakan luar negeri Australia berpatokan pada tujuan dan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Berikut adalah cuplikan mengenai Tujuan Nasional dan Kepentingan Nasional Australia sebagaimana dikutip oleh Aussiebuddy wordpress¹¹⁵.

Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Australia

❖ Peran Kabinet dalam Politik Luar Negeri

Issue tentang politik luar negeri Australia selalu menjadi perdebatan sengit dalam masyarakat Australia. Meski issue ini jarang bisa menjatuhkan pemerintah. Produk politik luar negeri biasanya dipengaruhi oleh Departemen Dalam Negeri dan perdagangan (*Minister of Foreign Affairs Trade*). Jika issue tersebut berhubungan dengan hal-hal yang spesifik maka akan dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan kementerian-kementerian yang bersangkutan, misal:

- ☆ Menteri Pertahanan akan diajak berkonsultasi mengenai masalah ekspor impor senjata
- ☆ Menteri Urusan Keimigrasian, pemerintah local dan Etnik akan diajak berkonsultasi tentang hal-hal yang terkait dengan masalah pengungsi.
- ☆ Menteri Olah Raga, kesenian, lingkungan, tourism dan territorial, serta menteri Perindustrian akan diajak berkonsultasi mengenai hal-hala yang berakitan dengan kebijakan pelajar/siswa asing.

¹¹⁴ www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/australia.html, diakses 23 April 2015, pukul 04.00 Wib

¹¹⁵ Aussiebuddy wordpress, 2008, diakses pda tanggal 23 April 2015, pukul 10.00 WIB

- ☆ Menteri Perhubungan akan diajak berkonsultasi mengenai masalah penerbangan internasional.

Konsultasi semacam ini selalu dilakukan secara formal melalui surat-menyurat, utusan antar departemen atau secara informal melalui telepon. Biasanya konsultasi tersebut didasarkan pada semangat kerjasama. Tetapi kadang-kadang terjadi juga persaingan antar cabinet (*bureaucratic Politics*), misalnya: persaingan antara menteri Luar Negeri dengan menteri Pertahanan.

❖ Struktur Pelayanan Diplomatik

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (*the Department of foreign Affairs and trade*) berkantor pusat di Canberra dan membawahi 10 bagian dan dua badan khusus. Dua badan khusus tersebut ialah:

- ☆ *The Australian International Development Assistance Bureau* (AIDAB) yang merupakan lembaga otonom didalam departemen dan bertanggungjawab langsung kepada menteri.
- ☆ *The Australian Trade Commission* (Austrade) yang didirikan sejak tahun 1991 khusus untuk mempromosikan perdagangan.

Public Diplomacy (Second Track Diplomacy)

Menteri Luar Negeri dan diplomat yang professional saja tidak akan mampu menghasilkan diplomasi yang baik. Selain itu masih diperlukan *Public Diplomacy* yaitu diplomasi yang tidak langsung diarahkan pada pemerintah yang dituju tetapi lebih diarahkan untuk mempengaruhi pendapat masyarakatnya. Inti dari semua kegiatan diplomasi ialah kegiatan untuk membujuk atau mempengaruhi. Dalam era modern ini penayangan film, pertukaran delegasi, penerbitan buku dan penyediaan perpustakaan yang baik, merupakan sarana untuk melaksanakan *public diplomacy*. Sarana-sarana tersebut bisa membentuk citra atau image tentang Australia, citra tersebut akan menentukan sikap mereka terhadap Australia sehingga bersedia untuk berkunjung atau berlibur ke Australia, menanamkan modal di Australia, membeli produk barang dan jasa Australia, dsb.

Public diplomacy bisa mengambil bentuk yang keras (propaganda) dan lunak (diplomasi kebudayaan). Bentuk-bentuk kegiatan public diplomacy antara lain:

- ☆ Kegiatan untuk meyakinkan para anggota kongres Amerika bahwa pemberian subsidi Export dalam *European Community* akan mengakibatkan kehancuran petani Australia.
- ☆ Kampanye diberbagai Negara agar mendukung Sidney sebagai tempat penyelenggara Olimpiade 2000.
- ☆ Meyakinkan masyarakat Jepang bahwa produk Australia itu bagus.
- ☆ Mengadakan briefing untuk para wartawan ASEAN tentang tujuan pembentukan APEC.
- ☆ Pertukaran delegasi parlemen
- ☆ Memberikan beasiswa untuk Negara-negara lain
- ☆ Mendorong penayangan film atau opera sabun buatan Australia di Negara-negara lain.

Public diplomacy terlebih melalui jalur diplomasi kebudayaan sangat efektif untuk membentuk citra Australia. Terutama dalam berhubungan dengan Negara tetangga Asia yang struktur sosial, budaya dan agamanya sangat berbeda. Serial TV *Return To Eden* mendapat sangat positif di Indonesia, meski pemutaran film ini sebenarnya bukan diprakarsai oleh pemerintah. Serial *Crocodile Dundee* dan Buku *The Thornbirds* juga memperoleh sambutan yang positif.

Radio Australia juga memainkan peran penting dalam memberi informasi pada dunia luar tentang Australia. Disini kredibilitas adalah kunci sukses. Pemerintah tidak berhak mengontrol maupun mengendaikan siaran radio Australia. Seandainya para pendengar dinegara lain mengetahui bahwa radio tersebut dikendalikan oleh pemerintah maka mereka tidak akan percaya lagi terhadap radio tersebut. Jadi kebebasan pers harus dijunjung tinggi.

Australia semula kurang menyadari peran *public diplomacy* ini. Tetapi sejak tahun 1980an Australia semakin menyadari keberadaanya dilingkungan Asia Pasific yang budayanya sangat berbeda. *Public diplomacy* ternyata cukup efektif dalam mendekatkan jarak budaya tersebut dan mendukung pencapaian kepentingan nasional Australia. Pemerintah Australia mengeluarkan dana sekitar 8 juta dollar /tahun untuk kegiatan ini, diluar beasiswa AIDAB dan promosi dagang. Sebagian besar dana diarahkan keAsia, terutama Indonesia, Cina, Jepang dan New Zealand.

BAB X

HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN NEGARA-NEGARA ASIA TIMUR

Sejak dekade 1970an hubungan Australia dengan Jepang, Cina, Korea, Taiwan dan Hongkong berkembang pesat. Ini terutama karena prestasi perekonomian Negara-negara ini sangat mengagumkan. Sejak tahun 1970an Jepang telah menjadi Negara tujuan no. 1 untuk pasar ekspor Australia. Korea menduduki urutan ke 3, Taiwan ke 7, Hongkong ke 9 dan Cina ke 10. Kelompok Negara-negara ini menyerap 1/3 total ekspor Australia. Sebagai perbandingan Eropa dan Amerika Utara hanya menyerap kurang dari 1/5 total ekspor Australia. Selama tiga puluh tahun hubungan Australia-asia timur didominasi oleh isu perdagangan, kecuali dengan Cina temanya berganti-ganti antara politik dan perdagangan.¹¹⁶

Arti Penting Asia Timur Bagi Australia

Arti Ekonomi

Asia timur kini telah menjadi salah satu dari tiga pusat produksi, perdagangan dan keuangan dunia. Pertumbuhan perekonomian telah mencapai diatas 8% pertahun. Sejak berakhirnya PD II Jepang telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar didunia, pemberi kredit terbesar didunia, produsen mobil terbesar, barang-barang elektronik, produsen robot dan semi konduktor terbesar didunia. Korea dan Taiwan yang semula adalah Negara yang sangat bergantung pada Amerika Serikat kini tumbuh menjadi Negara pedagang yang berproduksi menengah atas. Cina yang semula dilanda perang saudara kini tumbuh menjadi produsen barang-barang padat karya.

Keberhasilan perekonomian Asia Timur yang spektakuler ini telah mengundang eksplanasi berbagai ahli. Beberapa ahli mengatakan bahwa nilai-nilai

¹¹⁶ www.radioaustralia.net.au/.../2014.../australia...hubungan...asia.../132902..., diakses 24 April 2015, pukul 4.00 Wib

konfusius serta hubungan antara pemerintah dengan kelompok bisnis telah mendorong keberhasilan Asia Timur.

Argument lain mengatakan bahwa prestasi ini disebabkan karena adanya manajemen ekonomi yang efektif yang dipadukan dengan strategi industri yang diorientasikan untuk ekspor (*Export Oriented Industry*), yaitu industri produk manufaktur yang mempunyai keuntungan komparatif cukup tinggi (*Comparative advantage*). Mereka cepat menyerap dan mengadaptasi teknologi dari luar (negara maju) dan tidak segan-segan structural adjustment. Mereka sangat diuntungkan dengan adanya buruh yang murah tetapi rajin dan produktif. Faktor lain yang ikut mendorong keberhasilan ekonomi Asia Timur tersebut ialah adanya tatanan ekonomi internasional yang relative terbuka setelah PD II sehingga produk mereka mudah di ekspor dan mudah diserap oleh pasar internasional.

Keberhasilan ekonomi Asia Timur tersebut telah membuka peluang bagi Australia. Sejak tahun 1966 Jepang telah menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Australia, menggantikan posisi Inggris. Sejak tahun 1967 Asia Timur menjadi kawasan tujuan ekspor utama (2/5 dari total ekspor) bagi Australia menggantikan posisi Eropa Barat. Asia Timur juga menjadi sumber investasi dan turisme bagi Australia, jadi sasaran politik luar negeri Australia di Asia Timur ialah merebut peluang untuk menjadikan Asia timur sebagai pasar, mitra dagang utama, sumber investasi dan turisme. Australia harus berusaha menghilangkan stereotypes yang merusak citra Australia bahwa Australia adalah tempat yang cocok untuk relaks dibandingkan untuk berbisnis (*Australia is better place in which to relax than to do business*).

Hubungan Australia-Republik Rakyat Cina

Kemunculan RRC (1949) ditanggapi dengan sangat dingin oleh Australia. Baru pada tahun 1972 Australia membuka hubungan diplomatiknya dengan RRC setelah selama 23 tahun menolak mengakui eksistensi RRC. Hubungan kedua negara kembali terganggu dengan adanya peristiwa Tiananmen 4 Juni 1989. Australia membekukan bantuan ekonomi dan teknik serta meniadakan kunjungan politik tingkat tinggi selama 2 tahun.

Meski hubungan diplomatiknya sedingin es tetapi hubungan perdagangan kedua Negara tetap berjalan dan sejak tahun 1960an Cina menjadi salah satu pasar utama bagi produk gandum dan wol Australia. Kemudian disadari bahwa tanpa hubungan diplomatik, pasar Cina tidak akan terbuka bagi Australia, sementara Cina berkembang sebagai raksasa Asia. Motivasi bisnis, politik, strategi menjadi pendorong dibukanya hubungan diplomatik Australia-RRC semasa pemerintahan Gough Whitlam.

Pengakuan Australia terhadap legalitas pemerintahan RRC merupakan sebuah keputusan yang sangat berani. Bagi Whitlam ini adalah sebuah obsesi meski mendapat tentangan keras dari berbagai kalangan. Saat itu dunia masih dicekam oleh perang dingin dan pengakuan terhadap RRC bisa dianggap sebagai kecenderungan Australia yang bergerak ke"kiri". Ketika Malcom Fraser mengambil alih pemerintahan, ternyata RRC dijadikannya sebuah kartu As dalam menghadapi Uni Sovyet. Kunjungannya ke RRC tahun 1976 sangat sukses.

Dibawah Bob Hakwe, hubungan kedua Negara sangat hangat. Bob Hakwe melakukan kunjungan dua kali ke RRC, dibalas dengan kunjungan Pm Li Peng, disusul dengan kunjungan sekjen PKC Hu Yaobang. Australia berusaha menggali potensi ekonomi RRC semaksimal mungkin. Kunjungan tingkat menteri dipersering. Dibentuk berbagai wadah kerjasama, *The Joint Ministerial Economic Commission* (JMEC) untuk mengkoordinasikan hubungan perekonomian kedua Negara dan kalangan masyarakat bisnis Australia menanggapi dengan sangat antusias. Dibentuk lembaga kerjasama dibidang besi, baja, wool, pertanian, batubara, pendidikan, iptek, transportasi, komunikasi, mesin, elektronik, energi dan ruang angkasa. RRC menanamkan modalnya dalam proyek penambangan biji besi di Mount Channar (western Australia) dan peleburan aluminium Portland di Victoria. Keduanya merupakan investasi terbesar RRC diluar negeri.

Sayangnya hubungan yang hangat ini tidak berlangsung lama. Setelah terjadi peristiwa Tiananmen Juni 1989 hubungan kedua Negara menurun cepat, dikarenakan:

- ☆ Regormasi perekonomian RRC tahun 1984-1988 menjadikan perekonomian dinamis, tetapi juga menimbulkan problem (*over heating*) sehingga gairah masyarakat bisnis Australia dalam berdagang dengan RRC menurun.
- ☆ RRC menganggap Australia melakukan penghianatan karena menjalankan two way trade, berdagang dengan RRC sekaligus dengan Taiwan.
- ☆ Ekspor Australia ke Taiwan dan Korea Selatan lebih tinggi nilainya karena berupa barang-barang yang mempunyai nilai tambah tinggi, sementara ekspor ke RRC hanya barang-barang mentah.
- ☆ Neraca perdagangan RRC-australia semula seimbang tetapi lama-kelamaan cenderung devisit dipihak Australia.
- ☆ Setelah terjadi peristiwa Tiananmen terjadi penyingkiran terhadap tokoh-tokoh reformis yang selama itu menjadi mediator kedua Negara, sehingga menjadikan masyarakat kalangan bisnis Australia menjadi kehilangan gairah.
- ☆ Setelah terjadi peristiwa Tiananmen, muncul berbagai kritik terhadap pemerintah Australia sehubungan dengan sikapnya terhadap RRC. Kritik ini terutama dari kalangan oposisi. Bahkan mantan Dubes Australia untuk RRC, Dr Stephen Fitzgerald juga menganggap bahwa hubungan Australia dan RRC berlebihan, terlalu antusias, terlalu emosional sehingga keuntungan materialnya tidak sebesar yang diharapkan.

Meski hubungan Australia RRC kemudian mengundang pro dan kontra, serta penuh dengan dinamika tetapi kehangatan hubungan kedua Negara tetap tercatat sebagai prestasi hebat bagi Australia, terutama kalau berhubungan dengan pembentukan rasa percaya diri (*national confidence*) karena hubungan tersebut tidak mendapat restu dari Amerika. Hubungan tersebut mencerminkan pembentukan Australia sebagai sebuah *nation state* untuk bersikap terhadap kawasannya sendiri (Asia).

Hubungan tersebut juga menjadi sebuah ujian besar bagi Australia untuk bergaul dan menjalin hubungan yang substansial dengan Negara-negara Asia. Australia telah mencoba berhubungan dengan Indonesia, India yang mempunyai budaya dan sistem pemerintahan maupun sistem politik yang sangat berbeda, dan semuanya menimbulkan problem. Hubungan budaya Australia RRC bisa

dikatakan sangat berhasil. Kedua Negara sering menukar delegasi. Para pelatih acrobat RRC didatangkan untuk melatih sirkus anak-anak *The Flying Fruit Fly*. Australia membantu penribitan Koran berbahasa Inggris, *China Daily*. Dalam jangka panjang Australia tetap berkepentingan untuk mendekatkan kembali hubungan kedua Negara. Kepentingan ekonomi, strategi dan politik Australia terhadap RRC tetap besar. RRC memegang kunci bagi terciptanya stabilitas politik di kawasan Indocina, terutama Kamboja. RRC juga merupakan pemain utama dalam isu perlucutan senjata dan kelestarian lingkungan hidup.

Hubungan Australia Taiwan

Sampai dengan tahun 1972 Australia mengakui pemerintahan Taipei sebagai pemerintahan yang sah atas Cina. Namun demikian sejak tahun 1950an, Australia juga menjalin hubungan dagang dengan RRC, terutama mengekspor gandum dan wool. Meski pada waktu itu Amerika mengembargo RRC.

Dengan pengakuan PM. Whitlam terhadap RRC (Desember 1972) maka itu berarti menganggap Taiwan hanya sebagai salah satu propinsi RRC (one China Policy). Tetapi sebagaimana Negara-negara barat lain one China policy tetap dijalankan secara tidak konsisten karena hubungan dagang tetap berlangsung dengan kedua China. Hubungan Australia Taiwan sangat diwarnai dengan kepentingan ekonomi.

Ketika Koumintang mengambil alih Pulau nTaiwan tahun 1949, suasana pulau tersebut masih sepenuhnya agraris. Pemerintahan nasionalis koumintang kemudian melakukan land reform serta melakukan industrialisasi yang diorientasikan untuk ekspor. Antara tahun 1961-1970 nilai ekspor Taiwan naik sekitar 22%/ tahun, GNP meningkat dan saving masyarakatnya sangat tinggi. Pemerintah mengarahkan sepenuhnya kendali ekonomi dengan rencana pembangunan 4 tahun (dimulai tahun 1953) dan memerlukan undang-undang darurat.

Dalam era tahun 1980an Taiwan muncul sebagai salah satu dari 13 negara dengan volume perdagangan terbesar di dunia. Sebagai Negara pedagang, Taiwan mempunyai insting untuk bersikap perfeksionis (tertutup). Kini, Negara-negara lain berusaha untuk membuka tariff berbagai barang dan mengizinkan investasi asing di bidang perbankan. Sikap yang proteksionis ini menjadikan Taiwan lebih sering menikmati surplus perdagangan dengan Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Anehnya, meski Negara ini bermusuhan dengan RRC tetapi perdagangan tidak langsung antara keduanya, lewat Hongkong, mencapai US \$1 Billion (1980an).

Perdagangan Australia Taiwan mencapai US \$3,6 billion (1990) dan merupakan Negara tujuan ekspor no 7, berada diatas Hongkong maupun RRC. Ekspor Australia meliputi batubara, aluminium, wool, daging sapi, biji besi, kapas. Impor Australia meliputi automatic data processing equipment, mainan anak, peralatan olah raga, tekstil, pakaian jadi, tas, sepatu, sepeda motor dan furniture. Australia berharap bisa menembus pasar Taiwan untuk bisa mengekspor gandum, daging sapi dan buah segar. Australia juga berusaha keras untuk menarik investasi asing dari Taiwan. Sejauh ini neraca perdagangan cenderung seimbang. Australia berharap bisa menembus pasar Taiwan untuk bisa

mengeksport gandum, daging sapi dan buah segar. Tetapi harapan ini masih terhambat oleh sikap Taiwan yang masih memproteksi produk pertanian dan perjanjian khusus Amerika Taiwan dibidang produk pertanian.¹¹⁷

Ketiadaan hubungan diplomatik Australia Taiwan tentu saja menghambat. Saat ini hubungan diplomatik diurus oleh *The Australian Commerce and Industry Office* (ACIO) sebuah badan dibawah kamar dagang Australia. Selain mengurus hubungan ekonomi, ACIO juga mengurus sejumlah pekerjaan kedubes seperti masalah kepengurusan visa, pelayanan public dan kebudayaan. Sebaliknya Taiwan membuka *Taipei Economic And Culural Office* di Australia. Sebagai resiko ketiadaan hubungan diplomatik maka Australia Taiwan tidak mempunyai jalur penerbangan langsung. Pesawat Qantas (Australia) tidak dapat terbang ke Taiwan, sebaliknya pesawat Cina Airlines (Taiwan) tidak bisa terbang ke Australia.

Hubungan Australia dengan Hongkong

Hongkong, Kowloon dan New Territories berpenduduk lebih dari 6 juta orang merupakan daerah perdagangan yang sangat maju. Sesuai dengan perjanjian Inggris dengan RRC tahun 1984, daerah tersebut kini berstatus sebagai daerah administrasi khusus yang sampai 50 tahun kemudian, sistem sosial, ekonomi, maupun gaya hidup dijamin untuk tetap seperti kala.

Sebagai sesama koloni Inggris, Australia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Hongkong. Hongkong menduduki urutan ke 9 sebagai daerah tujuan ekspor (emas, batubara, seafood, alat-alat fotografi) Australia. Impor Australia meliputi garmen, alat kantor dan produk elektronik. Hongkong menempati urutan yang kelima sebagai daerah tujuan investasi Australia (tahun 1989 mencapai \$ 6,5 billion Hongkong). Menempati urutan ke 3 terbesar sebagai daerah asal imigran Australia (tahun 1990 sekitar 14.000 imigran Hongkong diaustralia). Sebaliknya pada tahun yang sama sekitar 12.500 orang Australia bekerja dan bertempat tinggal di Hongkong dan lebih dari 250 perusahaan Australia beroperasi di Hongkong. Setiap tahunnya sekitar 47.000 wisatawan hongkong berlibur di Australia dan 5120 mahasiswa Hongkong belajar di Australia.

Hubungan Australia dengan Korea

Sejak abad VII telah berdiri kerajaan Korea yang mampu mempersatukan wilayah semenanjung korea. Sejak tahun 1945 tentara Uni Sovyet menduduki Korea Utara dan tentara Amerika menduduki Korea Selatan serta membagi Korea menjadi dua Negara yang dibatasi oleh garis lintang 38⁰. Pemisahan tersebut dikukuhkan dengan perang Korea tahun 1950-1953. Australia membantu Korea Selatan dan sekitar 300 prajurit Australia gugur dalam perang tersebut.

Sejak tahun 1974 hubungan diplomatik Australia dengan Korea utara terputus dan diikuti dengan pengusiran diplomat kedua Negara. Sebenarnya korea Utara mempunyai potensi ekonomi yang lebih besar terutama dibidang sumber

¹¹⁷ www.tabloiddiplomasi.org/.../1270-east-asian-summit-kepentingan-strate... diakses 20 April 2015, pukul 04.00 Wib

alam seperti hidro electric power dan mineral. Tetapi karena praktis terisolasi dari pergaulan internasional, perkembangan Korut sangat lamban.

Sebaliknya hubungan Australia dengan korea selatan sangat insentif . Korsel menduduki urutan ke 6 sebagai partner dagang Australia (tahun 1990 mencapai \$ 6 billion). Korsel menduduki urutan ke 3 sebagai daerah tujuan ekspor Australia meliputi mineral, produk pertanian, energi dan besi baja. Jadi sebagian besar ekspor Australia ke Korea Selatan masih berupa sumber alam/ bahan mentah. Potensi ekspor Australia ke Korsel yang berbentuk jasa pendidikan, informasi, pariwisata, komponen otomotif, konstruksi dan produk pertanian lainnya belum bisa berkembang. Sebaliknya impor Australia dari Korea sebagian besar berupa barang-barang jadi.

Hal diatas menunjukkan bahwa meski total ekspor Australia ke Korea cukup besar tetapi bersifat hubungan kedua Negara masih sempit. Hubungan antar penduduk/masyarakat kedua Negara harus lebih dikembangkan. Tahun tahun 1990 australia membuka Australian Education Center di Seoul untuk memberikan informasi pendidikan di Australia bagi masyarakat Korea. Di Melbourne juga dibuka National Korean untuk memperkenalkan bahasa dan budaya Korea pada masyarakat Australia. Hasilnya sangat positif karena kini semakin banyak mahasiswa Korea yang belajar di Australia.

BAB XI

HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN INGGRIS

Australia mempunyai kaitan darah (nenek moyang), sejarah, budaya, politik, perdagangan, investasi, militer dan intelijen yang sangat erat dan unik dengan Inggris. Siaran televisi Australia disiarkan secara luas di Inggris, berita olahraga Australia dibicarakan setiap orang di Inggris, iklan produk Australia ada dimana-mana sehingga penduduk Inggris sangat familiar dengan Australia. Sebaliknya penghargaan penduduk Australia terhadap Inggris sangat tinggi. Berita sosial, ekonomi, politik anggota kerajaan Inggris dibicarakan sampai di pelosok Australia.

Inggris menduduki urutan pertama sebagai Negara sumber investasi bagi Australia (Amerika pada urutan kedua dan Jepang urutan ketiga). Nilai investasinya mencapai \$ 44,5 billion (1990) setara dengan 60 persen investasi Eropa barat di Australia. Inggris menduduki urutan kedua sebagai Negara tujuan investasi Australia (Amerika Serikat menduduki tingkat pertama). Pada tahun 1990 nilai perdagangan dengan Inggris mencapai \$ 5,3 billion. Inggris menduduki peringkat ketiga sebagai Negara asal impor Australia dan peringkat keenam sebagai Negara tujuan ekspor Australia. Sebagai perbandingan, Jerman menduduki peringkat keempat untuk impor dan 11 untuk ekspor, Perancis menduduki peringkat ke 11 untuk impor dan 17 untuk ekspor, Itali menduduki Peringkat 7 untuk impor dan 14 untuk ekspor.

Hubungan militer dan intelijen kedua Negara dijalin melalui keanggotaan Australia dalam FPDA (*Five Power Defence Arrangements*). Sejak tahun 1950an pengaruh Inggris di Australia memang sudah menyusut, digantikan oleh Amerika. Tetapi pengambilalihan posisi ini memang sejalan Inggris. Baik Australia maupun Inggris memang mengakui kepemimpinan Amerika. Baik Australia maupun Inggris mendukung Amerika dalam perang teluk.

Hal yang mengganjal hubungan kedua Negara ialah adanya konotasi bahwa nasionalisme Australia selalu didentikan sebagai anti Inggris, pro Irlandia. Gangguan akan selalu ada kalau pemimpin kedua Negara mengungkapkan bahwa hubungan sebagaimana dimasa silam. Ini adalah sebuah ilusi karena keadaan

sudah banyak berubah. Tuntutan masyarakat Australia untuk membentuk sebuah republic yang terlepas dari kekuasaan Inggris semakin gencar. Tetapi sebagaimana pengalaman Amerika yang melakukan revolusi kemerdekaan atas bantuan Perancis, tetapi sampai saat ini juga tetap menjalin hubungan istimewa dengan Inggris. Australia juga berharap demikian. Bahkan rasa kedekatan Australia dengan Inggris mungkin akan melebihi kedekatan Amerika Inggris. Australia mempunyai system parlementer, pendidikan dan hukum yang sama dengan Inggris.

Dalam sistem politik global, Australia adalah negara Barat yang berlokasi di kawasan Asia pasifik dan memiliki hubungan yang erat dengan Amerika Utara dan Eropa sejak lama. Sejak merdeka dari Inggris, Australia aktif dalam menjalin hubungan internasional baik di dalam maupun di luar kawasan Asia Pasifik. Pada Perang Dunia II lebih dari satu juta orang Amerika menggunakan Australia sebagai pangkalan sehingga jelas ada pengaruh Amerika Serikat yang sangat besar terhadap masyarakat Australia¹¹⁸. Hal ini terlihat pada dukungan Australia pada Amerika Serikat (AS) untuk memerangi komunisme di Asia. Ketika Perang Dingin berakhir pada tahun 1980-an, Australia mengubah pendiriannya mengenai perlindungan militer dari Amerika Serikat. Di sisi lain, pengaruh AS di Australia juga cukup besar dengan adanya investasi ekonomi Amerika dalam sektor manufaktur di Australia dan pengaruh budaya populer AS. Banyak akademisi Australia merupakan lulusan Amerika dan kurikulum pendidikan Australia pun semakin dipengaruhi oleh kecenderungan pendidikan Amerika. Menurut penulis, hal ini juga tak lepas dari kepentingan Australia untuk menjadi aktor yang diperhitungkan di mata dunia khususnya di kawasan Asia Pasifik sendiri bila bersekutu dengan AS yang merupakan hegemon tunggal hingga saat ini.

Perbandingan Era John Howard dan Kevin Rudd

Pada era kepemimpinan Kevin Rudd yang berasal dari Partai Buruh, formula politik luar negeri Australia memiliki perbedaan dengan AS meski tetap dalam strategi yang sama dengan mantan Perdana Menteri John Howard untuk mengamankan pengaruh politiknya di kawasan Asia Pasifik yaitu menghindari aksi-aksi militer dan penyebaran pasukan tentara dalam upaya penyebaran pengaruh seperti yang dilakukan AS ketika menguasai Irak dan Afganistan¹¹⁹. Selain itu juga mulai merevisi beberapa kebijakan politik luar negerinya yang cenderung “mengekor” apa yang dilakukan oleh mantan Presiden AS, George W.Bush, yang agresif dan militeristik serta gagasan untuk membentuk Asian-Pacific Union (APU) yang lebih berorientasi ekonomi dan perdagangan. Masa depan APU diperkirakan akan menggeser APEC dan ASEAN atau justru menggabungkan keduanya, ada juga yang menganggapnya sebagai skenario untuk memperlemah soliditas atau kekompakan negara-negara ASEAN dalam perang diplomasi melawan Amerika dan negara-negara maju lainnya. Dari kecurigaan semacam ini menjadi logis bahwa Australia memperakarsai APU dengan maksud

¹¹⁸ <http://www.kompas.com>, diakses 23 April 2015, pukul 04.30 Wib

¹¹⁹ <http://www.webmaster.com>, diakses 23 April 2015, pukul 04.30 Wib

untuk memberi ruang yang seluas-luasnya bagi sekutunya, Amerika, dalam menanamkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara dengan pendekatan non-militer.

Bagi Australia, hubungan ekonomi dengan negara-negara di dunia khususnya dalam lingkup regional selama ini dilakukan dalam Asia Pacific Economic Forum (APEC) yang berjalan cukup efektif meskipun masih banyak kekurangan di sana-sini. Melalui keanggotaan dalam APEC, Australia sebenarnya mendapatkan berbagai keuntungan seperti munculnya integrasi regional dengan Asia terutama Asia Tenggara. Hubungan ekonomi Australia dengan Amerika juga terjadi secara bilateral seperti pernyataan Lang dan Hines bahwa hubungan ekonomi kedua negara memiliki banyak sekali hal-hal fundamental yang berpengaruh pada investasi, kepemilikan modal dan perusahaan serta adanya pasar potensial bagi barang produksi Australia.¹²⁰

Untuk menghilangkan hambatan ekonomi yang ada, Australia pada pemerintahan sebelumnya yaitu Pemerintahan John Howard melakukan perjanjian Free Trade Area (FTA) untuk mendapat jaringan ekonomi yang lebih luas serta mendapat hubungan persaingan ekonomi yang "sehat" melalui adanya saling ketergantungan. Meskipun demikian, tidak jarang terdapat beberapa kritik mengenai hubungan tersebut, seperti memburuknya hubungan Australia dengan Asia dan tersingkirnya Australia dalam perjanjian regional.

Terlepas dari pro-kontra yang ada, tak bisa disangkal Australia sangat bergantung pada AS terutama dalam hal militer. Awal mula kerjasama ini adalah Australia mempererat hubungannya dengan AS untuk memastikan keamanan wilayahnya dari invasi Jepang. Ini terkait erat dengan konsep forward defense dimana Australia mencoba untuk menghentikan ancaman sebelum masuk kedalam wilayahnya. Sejak berakhirnya Perang Dunia kedua, militer Australia secara resmi "membonceng" AS dan sebagai konsekuensinya tentara Australia harus mendukung Amerika Serikat dalam setiap peperangan, seperti yang terjadi Korea, Vietnam, Perang teluk, dan juga Afghanistan. Keadaan ini juga menguntungkan Australia seperti pada saat Australia mengirim tentara di Timor Timur pada tahun 1999. Banyak yang menentang, namun karena dukungan dari militer terutama Amerika Serikat dan sekutunya, tindakan Australia tersebut seolah mendapat legitimasi dan bisa dimaklumi.

Salah satu bentuk aliansi antara Australia dengan Amerika dalam hal militer adalah melalui aliansi Australia, New Zealand, United States (ANZUS) yang ditujukan untuk mengontrol daerah Asia dan Pasifik Barat yang sebelumnya merupakan strategi pembendungan komunis AS terhadap Soviet dari Eropa Barat sekaligus Asia pasifik. Keuntungan yang didapat Australia adalah dapat mencegah ancaman sebelum masuk ke mainland Australia, selain itu Australia mendapatkan keuntungan berupa transfer teknologi militer dan akses data dari intelijen AS. Hal

¹²⁰ M. Beeson, 'Australia Relationship with United States : The Case for Greater Independence', <<http://espace.library.uq.edu.au/eserv.php?pid=UQ:11015&dsID=mbajps03.pdf>> diakses 23 April 2015, pukul 04.00 Wib

ini semakin menunjukkan bahwa Australia tidak lebih merupakan perpanjangan tangan AS terutama di wilayah Asia Pasifik.

Terkait dengan isu terorisme, Howard berada di pihak AS dan ikut menyerukan perang melawan terorisme dengan Al Qaidah sebagai musuh utamanya, padahal keberadaan terorisme sudah ada sejak abad 18.¹²¹ Hal ini menurut penulis terkait dengan konstruksi AS untuk memulihkan hegemoninya yang mulai menurun paska krisis dan ketiadaan musuh bersama paska perang dingin sehingga eksistensinya sebagai polisi dunia kurang terdengar gaungnya. Untuk itulah pengeboman WTC adalah momen yang tepat untuk menyebarkan pada dunia tentang bahaya teroris yang awalnya merupakan masalah nasional AS menjadi suatu isu global. Kritik mengalir karena ditengarai bahwasanya kebijakan perang terhadap terorisme itu hanya merupakan keputusan pejabat elit Australia saja, karena masyarakat Australia sendiri mengkhawatirkan tindakan balasan dari teroris bila diperangi dan bergabungnya Australia dengan aliansi militer Amerika Serikat hanya memberi keuntungan pada finansial militer Amerika Serikat saja yang memonopoli pengadaan persenjataan. Selain itu, pengkritik lain menyatakan bahwa eratnya hubungan Australia dengan Amerika terutama dalam hal militer telah membahayakan hubungan yang lebih penting bagi Australia yaitu hubungan dengan Asia yang sempat dianggap ancaman serta integrasi regional Australia dengan negara-negara sekitarnya. Hal penting yang harus diperhatikan di sini adalah dulunya bangsa Australia sentimen terhadap imigran dari Asia dan sengaja memarjinalkannya. Hal ini terkait dengan kebijakan White Australian Policy pada era 1908, yang menginginkan Australia didominasi dan dijalankan oleh bangsa kulit putih Eropa. Hal ini disebabkan oleh sentimen rasial dari pemerintah, selain itu pemerintah Australia ingin melindungi penduduknya agar tidak tersaingi oleh bangsa Asia. Apalagi Jepang, Cina, dan India mulai muncul sebagai negara industri baru yang sukses. Kekhawatiran yang berlebihan pada pendatang asing ini menyebabkan Australia dijuluki sebagai bangsa yang xenophobia, padahal hal ini sama sekali tak beralasan. Namun, semenjak diterapkannya multikulturalisme tingkat sentimen rasial di Australia sudah menurun. Untuk memperbaiki hubungannya dengan Asia, Australia menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara seperti China, Jepang, Singapura dan mengirim delegasi kepada Korea Utara. Selain itu, komitmen Australia kepada Asia juga dapat diketahui melalui keikutsertaan Australian Federal Police (AFP) dalam upaya penyelidikan kasus bom bali.

¹²¹ *Ibid*

BAB XII

HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat semula merupakan koloni Inggris. Tahun 1776 koloni ini mengobarkan revolusi menuntut kemerdekaan dari Inggris. Tahun 1982 negara baru ini mngeluarkan sebuah doktrin (Monroe Doctrin) yang intinya tidak akan membiarkan Negara-negara Eropa (Inggris) mencampuri urusan politik di benua Amerika. Doktrin ini menunjukkan penegasan Amerika tidak mau berada dibawah kekuasaan Inggris, sementara kekuasaan Inggris dilautan pada saat itu sangat besar. Canada yang berada disebelah utara Amerika Serikat merupakan koloni Inggris hingga tahun 1867.

Banyak kesamaan diantara Australia Amerika. Keduanya bekas koloni Inggris, sebagian besar penduduknya imigran Inggris /Eropa, sama-sama berbahsa Inggris, berbudaya Anglo saxon, mempunyai system pemerintahan demokrasi, pers bebas, peranan swasta sangat besar, dan sama-sama menganggap dirinya sebagi *the new world*. Perbedaannya jika Amerika muncul sebagai nation state melalui sebuah revolusi, sebaliknya Australia melalui sebuah evolusi: koloni, *self government, dominion, independence*.

Hubungan khusus Australia Amerika dijalin melalui aliansi Pertahanan melalui Pakta ANZUS (Australia New Zealand, Amerika Serikat). Australia dan Australia berada pada aliansi yang sama ketika terjadi konfrontasi Indonesia Malaysia. Bisa dikatakan bahwa kedua Negara mempunyai hubungan khusus (*special relationship*), meski harus ditekankan bahwa special relationship bukan berarti free rides, free lunches, excuse untuk tidak mempunyai politik luar negeri yang mandiri sehingga tidak mempunyai integritas politik luar negeri. *Special relationship* harus diartikan untuk tetap menjunjung tinggi kepentingan bersama dan saling menghormati kedaulatannya. Hubungan Australia Amerika Serikat terkait dalam dimensi keamanan, ekonomi, dimensi keamanan.

Sejak perang Dunia II Amerika berperan sebagai pelindung pertahanan Australia. Selain itu Amerika juga mempunyai kepentingan untuk mempertahankan eksistensinya dikawasan Asia Pasifik yang mempunyai arti penting bagi perekonomian dan Hankam Amerika. Dikawasan ini Amerika mempunyai pakta pertahanan dengan Jepang. (pakta pertahanan Amerika Jepang), dengan Korea Selatan (pakta pertahanan Amerika Korea Selatan) dan semula

juga mempunyai pangkalan di Filipina (Subic dan Clark, yang kemudian dihapus tahun 1990an). Kehadiran Amerika tersebut memberikan jaminan pertahanan keamanan bagi Australia. Sebaliknya Australia mempunyai arti strategis bagi Amerika. Kini Australia merupakan satu-satunya sekutu formal Amerika di Pasifik Selatan.

Akhir-akhir ini Australia menekankan system pertahanan *self reliance*: mempertahankan diri dengan didasarkan pada sumber-sumber kekuatan sendiri, tetapi tetap dalam kerangka aliansi. Dalam konteks global Australia memberikan kontribusi berupa fasilitas bersama di Pine Gap dan Nurrungar. Fasilitas bersama di Nurrungar berupa stasiun bumi untuk mengontrol satelit-satelit pertahanan Amerika, sehingga bisa mendeteksi jika ada serangan rudal balistik (nuklir) yang ditujukan ke Amerika atau Negara-negara sekutunya.

Fasilitas bersama di Pine Gap mengumpulkan data intelijen terutama untuk meverifikasi data persenjataan (arms control) dan perlucutan senjata (disbarment) yang telah disepakati Negara-negara pemilik senjata nuklir, sesuai dengan kesepakatan perundingan INF dan START. Tanpa fasilitas di Pine Gap ini, sulit bagi Amerika untuk mengontrol gerak-gerik penambahan maupun pengurangan kepemilikan senjata nuklir Negara-negara musuh.

Dimensi Ekonomi

Hubungan ekonomi Australia Amerika telah terjalin sejak lama. Sampai dengan abad 19 hampir segala kebutuhan California disuplay dari Sidney. Sebelum dibuatnya terusan Panama dan sebelum adanya jaringan kereta api antara kota-kota di Pantai Timur dengan Pantai Barat Amerika, maka lebih mudah mengirimkan barang lewat kapal dari Sidney ke California daripada dari New York ke California.

Amerika kini merupakan mitra dagang kedua terbesar bagi Australia (setelah Jepang) dengan total nilai sekitar \$ 17,6 billion. 23,8% impor Australia berasal dari Amerika dan 11,3 % ekspor Australia ditujukan ke Amerika. Amerika merupakan Negara penanam modal terbesar kedua (setelah Inggris) di Australia, sehingga jika terjadi kegoncangan perekonomian Amerika pasti akan berakibat langsung bagi kesehatan perekonomian Australia. Australia merupakan salah satu konsumen peralatan militer ternasar bagi Amerika (sekitar \$3,3 billion dalam 3 tahun).

Australia selalu mendukung Amerika dalam berbagai isu mengenai resolusi hak-hak asasi manusia, masalah Palestina, resolusi terhadap Iran dan sebagainya. Tetapi Australia juga berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap Afrika Selatan, retivikasi protocol genewa mengenai aturan perang, aspek kawasan bebas nuklir Pasifik Selatan (The south Pasific Nuclear Free Zone), larangan uji coba nuklir di Pasifik Selatan, repratiasi pengungsi Indocina dan larangan penambangan dan pengeboran minyak di antartika.

Dibidang ekonomi Australia sangat menentang keputusan Amerika untuk memberikan subsidi ekspor terhadap gandum, larangan impor terhadap produk pertanian, terutama gula dan daging sapi, besi dan uranium (Voluntary Restrain Arrangement). Sebagai Negara penghasil produk pertanian dan pertambangan yang sangat efisien, Australia sangat terpuakul dengan kebijakan ini, terlebih

masyarakat Eropa juga memproteksi produk pertaniannya dengan memberikan subsidi ekspor untuk produk pertanian. Bahkan sebagian masyarakat Australia memaksa agar pemerintah bersikap lebih tegas terhadap Amerika, misalnya dengan mengancam akan membubarkan fasilitas bersama di bidang pertahanan atau bahkan membubarkan aliansi pertahanan, agar Amerika Serikat membuka pasar gandumnya. Kekecewaan sikap Australia terhadap Amerika tersebut tercermin dalam pidato Bob Hawke di depan kongres AS tanggal 23 Juni 1988: Australians must not be given reason to believe that while we are first class allies, we are, in trade, second class friends. Trade issue must not be allowed to fester, or to erode our wider friendship or alliance.

Dinamika relasi Australia- Amerika Serikat : tantangan aliansi pasca War on Terrorism

Australia adalah negara yang boleh dikatakan sebagai sekutu paling setia AS di dunia setelah Inggris Raya. Australia secara tegas mendukung kebijakan AS sejak Perang Dunia II, hingga Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Teluk 1991, dan baru-baru ini perang di Afghanistan dan Irak. AS Serikat telah menjadi faktor penting dalam kebijakan pertahanan Australia selama lebih dari 60 tahun dengan pemberian jaminan keamanan yang kuat untuk Australia, termasuk penangkal nuklir yang diperluas. Postur pertahanan Australia diperkuat dengan akses ke intelijen AS, selain itu, bidang pendidikan, senjata dan militer juga mendapatkan perhatian dari AS. Namun, untuk pertama kalinya sejak Perang Vietnam, muncul perdebatan di Australia mengenai apa yang sebenarnya AS harapkan dari aliansi kedua Negara dan tentang arti kekuasaan AS di era kontemporer bagi Australia.

Sebuah aliansi bukan hanya merupakan produk dari perhitungan rasional kepentingan nasional. Namun juga melibatkan nilai-nilai bersama, sistem kepercayaan, dan sejarah kerja sama. Australia dan AS telah lama berbagi nilai-nilai demokrasi dan keyakinan. Australia dan AS berbagi penggunaan bahasa Inggris dan keduanya merupakan negara berukuran besar bekas koloni Kerajaan Inggris. Namun terdapat perbedaan penting dilihat dari aspek sejarah dan geografi. Pengalaman sejarah AS tercermin dari warisan religius dan pengalaman dari ideologi liberal klasik yang dapat dilihat dalam Deklarasi Kemerdekaan AS Serikat dan Konstitusi. Agama dan liberalisme klasik, secara bersamaan membentuk aspek-aspek budaya politik AS. Sementara itu, nation building di Australia dibentuk oleh budaya keras warisan narapidana, kekeringan, dan perasaan inferior menciptakan pola pikir yang skeptis, sinis dan penuh kecurigaan. Agama tidak memainkan peran penting dalam politik Australia dan di Australia rasa nasionalisme tidak begitu kuat seperti yang dilakukan oleh AS. Maka, kedepannya, bukan hal yang patut dipertanyakan lagi alasan kedekatan Australia dengan negara-negara besar seperti Kerajaan Inggris di masa pasca perang dunia dan Amerika Serikat pasca perang dunia II.¹²²

Ikatan yang menghubungkan kedua negara mencakup seluruh spektrum hubungan internasional - dari sektor perdagangan, ekonomi, budaya, lingkungan

¹²² Australia Government: Departement of Foreign Affairs and Trade, 'Australia-United States Free Trade Agreement', < http://www.dfat.gov.au/geo/us/australia_us_alliance.html > diakses 26 April 2015, pukul 04.00 Wib

politik dan kontak kerjasama pertahanan. Perdagangan dua arah mencapai hampir \$ 26 miliar pada tahun 2006 dan terhitung lebih dari 459.700 orang Amerika mengunjungi Australia pada tahun 2007. Pada bulan September 2007, Amerika Serikat dan Australia menandatangani perjanjian pertukaran pelajar dan program ekskursi untuk pertama kalinya. Persahabatan yang kuat tersebut diperkuat oleh berbagai kepentingan umum dan pandangan yang sama pada kebanyakan isu-isu internasional. Pemerintah Australia dan pihak oposisinya bahkan sepakat bahwa keamanan Australia tergantung pada hubungan dengan Amerika Serikat. Kedekatan aliansi kedua negara terlihat pula dari kunjungan presiden AS ke Australia (pada tahun 1991, 1996, 2003, dan 2007), seorang Wakil Presiden berkunjung pada Februari 2007, dan Perdana Menteri Australia melakukan kunjungan ke Amerika Serikat setiap tahun sejak 1995 hingga tahun ini. Terdapat beberapa perjanjian bilateral maupun multilateral yang disepakati oleh kedua negara. Seperti Australia-U.S. Free Trade Area (AUSFTA) dan ANZUS yang disepakati bersama New Zealand. Secara substansial, kesepakatan ini cukup komprehensif mencakup hubungan perdagangan, pertahanan dan investasi. AUSFTA juga menciptakan berbagai kelompok kerja berkelanjutan dan komite yang dirancang untuk mengeksplorasi lebih lanjut reformasi perdagangan dalam konteks bilateral. Dalam perjanjian multilateral, keduanya bekerja sama dengan sangat erat di World Trade Organization (WTO), dan keduanya juga merupakan anggota aktif di forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Sejumlah lembaga AS juga secara aktif melakukan kegiatan ilmiah di Australia. Pada tahun 2005, perjanjian bilateral tentang iptek diperbarui. US National Aeronautics and Space Administration (NASA) menyatakan bahwa Australia merupakan wilayah yang penting karena sejumlah fasilitas pelacakan vital program luar angkasa AS terletak di negara ini. Pada tahun 2001, AS dan Australia menandatangani perjanjian pajak baru dan perjanjian jaminan sosial.¹²³

Setidaknya terdapat dua poin penting yang menunjukkan kelemahan hubungan aliansi AS dan Australia. Pertama, dalam mendukung kebijakan WoT AS, Australia telah mengeluarkan banyak dana untuk menyediakan pasukan tempur di Afghanistan dan Irak dan untuk mengembangkan kemampuan kontraterorisme. Hambatannya muncul ketika AS membuat tuntutan politis mengenai perang terorisme terutama di negara-negara Asia Tenggara yang dianggap pusat terorisme di Asia yang secara geografis berbatasan dengan Australia. Kedua, Angkatan Pertahanan Australia yang relatif kecil hanya sekitar 52.000 pasukan secara total dan 20.000 cadangan dihadapkan dengan berbagai kebijakan perang AS menyebabkan sektor pertahanan Australia memiliki beban yang lebih berat. Hal ini terlihat saat Perang Irak terjadi, Australia mengirim 2.200 pasukan, termasuk pasukan khusus dan komando, pesawat tempur dan pengawasan elektronik pesawat terbang, kapal perang permukaan, dan izin penyelam. Namun, ditengah-tengah upaya pertempuran tersebut, mereka ditarik kembali untuk dikirim ke Kepulauan Solomon di Pasifik Selatan. Hal yang perlu

¹²³ Congressional Research Service, 'Australia: Background and U.S Relations', <<http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33010.pdf>> , diakses 26 April 2015, pukul 04.00 Wib

ditilik lebih jauh adalah apakah masyarakat Australia sendiri setuju dengan kebijakan yang sangat “Amerika” tersebut.

Sebuah survey yang dilakukan oleh The Lowy Institute Poll 2005 menunjukkan bahwa sebenarnya 68 persen rakyat Australia menganggap bahwa negara mereka terlalu memperhatikan pandangan dari AS dalam kebijakan luar negerinya, dengan 32 persen mengatakan bahwa mereka sangat khawatir tentang kebijakan luar negeri AS dan 25 persen menjadi cukup khawatir.¹²⁴ Meskipun demikian, 58 persen warga Australia memiliki perasaan positif tentang AS Serikat, dengan 39 persen menjadi negatif. Menurut penulis, hubungan yang terjalin pada dua negara ini setidaknya benar-benar merupakan bentuk aliansi yang cukup solid. Hal ini telah disepakati oleh sebagian besar pengamat hubungan internasional khususnya yang mendalami dinamika aliansi Australia-AS. Hubungan yang terjalin ini diprediksi akan tetap lancar hingga dalam esainya mengenai prospek hubungan AS-Australia, David Mosler menyebutkan bahwa ada kemungkinan Australia akan menjadi negara bagian AS yang ke 51. Prediksi ini sebenarnya menunjukkan secara tidak langsung adanya perasaan inferior Australia pada AS sehingga kemungkinan yang ada menunjukkan bahwa Australia menjadi “bawahan” AS. Terlebih lagi mengingat kesetiaan yang cukup tinggi yang ditunjukkan Australia lewat keikutsertaannya dalam setiap perang AS, maka Australia merupakan basis aliansi AS yang sangat penting di wilayah Asia Pasifik. Masyarakatnya yang berpendidikan dan berideologi barat ikut mempermudah pemeliharaan aliansi tersebut.

¹²⁴ *Ibid*

BAB XIII

HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN PASIFIK SELATAN

Pasifik Selatan terdiri dari New Zealand, Papua New Guinea, Vanuatu, Kiribati, Kepulauan Solomon dan kepulauan-kepulauan kecil lainnya yang membentang seluas 10.000 km antara Guam hingga Pitcairn, merupakan kawasan terdekat bagi Australia. Secara tradisional Pasifik Selatan merupakan *sphere of influence Australia*. Sejak abad 19 telah muncul gagasan kalangan pemimpin Australia untuk menjadi *Mistress of the south seas*. Sebagaimana Amerika Serikat yang menjadi tuan di Benua Amerika.¹²⁵

Kawasan tersebut merupakan bekas koloni Australia, letak geografisnya sangat dekat dan kini Australia merupakan negara donor utama bagi kawasan Pasifik Selatan. Situasi ini sering mempersulit Australia. Jika Australia aktif sering dikatakan sebagai neo kolinialis, tetapi jika Australia pasif dikatakan mengabaikan kawasan ini.

Australia mempunyai kepentingan strategis dan ekonomi yang besar di kawasan ini. Karena letaknya yang sangat dekat maka Australia harus mengupayakan agar kawasan ini stabil, damai tanpa gangguan kekuatan asing. Dibidang ekonomii, New Zealand merupakan merupakan Negara tujuan ekspor ketiga terbesar dan Papua New Guinea merupakan Negara keempat terbesar. Australia juga merupakan negara pemasok produk manufaktur terbesar bagi Negara-negar kecil di kawasan ini, dengan nilai penjualan sekitar \$ 1,2 billion/tahun. Investasi Australia di kawasan ini juga besar (20%) dari total investasi diluar negeri.

Hubungan Australia New Zealand

Sebagai sesama bekas koloni Inggris, Australia dan New Zealand mempunyai kaitan kesejarahan yang sangat erat. Bersama dengan koloni-koloni

¹²⁵ "Constitution of Independent State of Papua New Guinea (consol. to amendment #22)". *Pacific Islands Legal Information Institute*, diakses pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 15.00 Wib

Inggris lainnya di Australia, New Zealand aktif menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan Alfred Deakin untuk membahas pembentukan federasi dari koloni-koloni tersebut (tahun 1891). Meski New Zealand kemudian memutuskan untuk berdiri sendiri, tetapi hubungan cultural antara dua Negara sangat erat. Sekitar 200.000 penduduk New Zealand menetap di Australia dan lebih dari 1,5 juta orang New Zealand dan Australia saling berkunjung di kedua Negara tiap tahunnya.

Sejak tahun 1990 kedua Negara membentuk pasaran bersama (ANCERTA atau disingkat CER, the Australia n and New Zealand Closer Economic relationship Trade Agreement) yang memuat kemudahan di bidang perdagangan yang meliputi penyamaan hukum-hukum bisnis, penyamaan prosedur karantina dan bea masuk, investasi, penerbangan dan telekomunikasi.

Keberadaan CER terbukti menguntungkan perekonomian kedua Negara. Perdagangan kedua Negara meningkat rata-rata 15% pertahun. Australia merupakan mitra dagang terpenting bagi New Zealand, dan New Zealand merupakan mitra dagang terbesar keempat bagi Australia. Keduanya sama-sama merupakan Negara pengekspor jasa dan produk manufaktur, tetapi produk mereka bisa disandingkan bersama dan sama-sama laku di kedua Negara.

Sebagai sesama Negara anggota Commonwealth para pejabat tinggi kedua Negara mempunyai sekitar 23 forum untuk membicarakan dan mempererat hubungan sesama Commonwealth. Sekitar 6 bulan sekali menteri Luar negeri kedua Negara juga saling berkunjung. Dilihat dari struktur sosialnya, New Zealand berbeda dengan Australia. Sebagian besar penduduknya terdiri dari imigran asal Inggris dan ras Polinesia. Lebih dari 10% penduduknya berasal dari etnik maori. Hubungan New Zealand dan Inggris juga dekat. Sebaliknya penduduk Australia lebih heterogen berasal dari imigran Eropa dan Asia.

HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN PAPUA NEW GUINEA

Papua New Guinea merdeka tahun 1975. Australia sering menggambarkan hubungan kedua Negara sebagai hubungan ibu dan anak. Meski sekarang si anak telah beranjak dewasa dan merdeka. Letaknya sangat dekat dengan Australia menjadikan Papua New Guinea mempunyai arti strategis yang sangat penting bagi Australia. Hubungan ekonomi kedua Negara juga sangat penting. Papua merupakan mitra dagang yang penting, dengan total nilai sekitar \$ 1,2 billion/tahun. Investasi Australia di Papua juga cukup besar, senilai \$ 2 billion (1990). Lebih dari 12.000 warga Australia tinggal di Papua New Guinea.

Papua Nugini adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua (Indonesia) di sebelah barat. Benua Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya, dan salah satu kota terbesarnya, adalah Port Moresby. Papua Nugini adalah salah satu negara yang paling bhinneka di Bumi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki, dengan populasi yang tidak lebih dari 6 juta jiwa. Papua Nugini juga salah satu negara yang paling luas wilayah perkampungannya, dengan hanya 18% penduduknya menetap di pusat-pusat perkotaan. Negara ini adalah salah satu negara yang paling sedikit

dijelajahi, secara budaya maupun geografis, dan banyak jenis tumbuhan dan binatang yang belum ditemukan diduga ada di pedalaman Papua Nugini.

Sebagian besar penduduk menetap di dalam masyarakat tradisional dan menjalankan sistem pertanian sederhana yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Masyarakat dan marga ini memiliki beberapa pengakuan tersirat di dalam kerangka undang-undang dasar negara Papua Nugini. Undang-Undang Dasar Papua Nugini (Pembukaan 5(4)) menyatakan harapan bagi *kampung dan komunitas tradisional untuk tetap menjadi satuan kemasyarakatan yang lestari di Papua Nugini*, dan untuk langkah-langkah aktif yang diambil untuk melestarikannya. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nugini telah memberlakukan beberapa undang-undang di mana sejenis "Tanah ulayat" diakui, artinya bahwa tanah-tanah tradisional pribumi memiliki beberapa landasan hukum untuk memproteksi diri dari campur tangan kaum pendatang yang bertindak berlebihan. Tanah ulayat ini disebutkan melingkupi sebagian besar tanah yang dapat digunakan di negara ini (sekitar 97% seluruh daratan), tanah yang dapat diolah oleh kaum pendatang bisa saja berupa milik perseorangan di bawah syarat pinjaman dari negara atau tanah milik pemerintah.

Geografi negara Papua Nugini beragam dan di beberapa tempat sangat kasar. Sebuah barisan pegunungan memanjang di Pulau Papua, membentuk daerah dataran tinggi yang padat penduduk. Hutan hujan yang padat dapat ditemukan di dataran rendah dan daerahpantai. Rupa bumi yang sedemikian telah membuatnya menjadi sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur transportasi. Di beberapa daerah, pesawat terbangadalah satu-satunya modus transportasi. Setelah diperintah oleh tiga kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada tahun 1975. Kini Papua Nugini masih menjadi bagian dari dunia persemakmuran. Banyak penduduk hidup dalam kemiskinan yang cukup buruk, sekitar sepertiga dari penduduk hidup dengan kurang dariUS\$ 1,25 per hari.

Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertanahan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadanganmineral, meliputi minyak bumi, tembaga, dan emas, menyumbangkan 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang cukup bernilai.

Mantan Perdana Menteri Sir Mekere Morauta berupaya untuk meletakkan kembali kesatuan perlembagaan negara, memantapkan mata uang kina, meletakkan kembali kemantapan anggaran nasional, memprivatisasi perusahaan-perusahaan umum yang dirasa cocok, dan memastikan kelestarian perdamaian Bougainville setelah tercapainya perjanjian 1997 yang mengakhiri ketegangan kaum separatis Bougainville. Pemerintah Morauta mencapai kejayaan ketika menarik dukungan internasional, khususnya mendapat dukungan dari IMFdan Bank Dunia demi mengamankan pinjaman bantuan pembangunan. Tantangan yang cukup hebat dihadapi oleh Perdana Menteri Sir Michael Somare, termasuk

upaya memperkuat kepercayaan penanam modal, melanjutkan upaya privatisasi aset-aset pemerintah, dan memelihara dukungan dari anggota Parlemen.

Pada Maret 2006, Komisi PBB untuk Kebijakan Pembangunan menyeru agar status Papua Nugini sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara terbelakang karena kemandekan sosial dan ekonomi yang mulur.^[16] Tetapi, sebuah penilaian yang dilakukan IMF pada penghujung 2008 menemukan bahwa "paduan antara kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, dan tingginya harga ekspor barang tambang dunia, telah mendukung mengambanginya pertumbuhan ekonomi dan memantapnya ekonomi makro terbaru Papua Nugini. Pertumbuhan PDB sejati, pada lebih dari 6% pada tahun 2007, berlandasan luas dan diharapkan terus menguat pada 2008."

Papua New Guinea kaya akan kandungan alamnya seperti emas, bijih tembaga, minyak mentah dan gas alam, kayu, ikan, minyak sawit, teh, karet dan batang kayu. Apabila dirincikan, untuk produk kehutanan menyumbang 4% GDP, kelautan 1% GDP, pertanian sebesar 13% GDP dengan produk utama kopi, bijih coklat, kelapa, minyak, kayu, teh dan vanilla, industri menyumbang 25% GDP: dengan sektor utama pada penghancuran kopra, proses pembuatan minyak, produksi tripleks, produksi kayu, pertambangan emas, perak dan tembaga; konstruksi, turis, produksi minyak mentah, produksi penyulingan minyak tanah, sedangkan mineral dan minyak yang paling banyak untuk GDP sebesar 82%.

Dalam perdagangan khususnya ekspor impor, PNG memiliki jumlah ekspor yang lebih besar daripada impornya. Komoditas yang diekspor berupa emas, bijih tembaga, minyak kayu, minyak kelapa sawit, dan kopi. Pasarnya berada di Australia, Jepang, Filipina, Jerman, Korea Selatan, Cina, USA, UK, Singapura, dan Malaysia. Sedangkan Impor berupa mesin dan perlengkapan transportasi, kendaraan, barang-barang manufaktur, makanan, bahan bakar minyak, dan kimia. Supply terbesar dari Australia, USA, Singapore, Jepang, Cina, New Zealand, Malaysia, Hong Kong, Indonesia dan UK.

Dalam hal pengelolaan mineral, kayu dan sektor perikanan dikuasai oleh investor asing. Pendapatan pemerintah bergantung pada ekspor mineral dan minyak. Pemilik lahan asli dari sumber kedua komoditas ini juga mendapat pendapatan dari setiap operasi yang dilakukan. Saat ini komoditas itu dikuasai oleh Exxon mobil dan InterOil dari Amerika Serikat.

Sedangkan sekitar 75% populasi menggantungkan dirinya pada sector pertanian. Deforestasi mewarnai sector ini dikarenakan tidak adanya regulasi yang jelas dalam peraturan pembukaan lahan. Dalam sector perikanan, PNG memiliki industry tuna yang aktif, akan tetapi penangkapannya dilakukan oleh kapal bangsa lain dibawah lisensi PNG. Australia, Singapura dan Jepang adalah eskporter utama pada Papua New Guinea. Mesin, minyak, pertambangan dan penerbangan adalah ekspor kuat Amerika kepada Papua New Guinea. Saat ini Exxon Mobil menguasai mayoritas dari cadangan gas alam dan pembangunan fasilitasnya. Menyusul InterOil Amerika yang mengoperasikan kilang minyak di Port Moresby dan telah menandatangani perjanjian dengan Korporasi Energi Dunia untuk membangun proyek LNG (*Liquefied Natural Gas*) kedua pada PNG. Dan saat ini Cina tengah gencar dalam proyek pengembangan tambang nikel di PNG. Dalam hal hubungan kerjasama multilateral dalam bidang ekonomi, PNG telah

bergabung dalam APEC (*Asean Pasific Economic Forum*) sejak tahun 1993, kemudian masuk dalam WTO tahun 1996, juga sebagai observer di ASEAN dan anggota ARF, juga tergabung dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

Sumber bantuan mayor lainnya kepada PNG adalah Japan, Uni Eropa, China, Taiwan, PBB, ADB, IMF, dan WB. Beberapa volunteer dari sejumlah negara dan misi pekerja gereja menyediakan pendidikan, kesehatan, dan pemberian bantuan pembangunan negara. Bantuan asing kepada PNG sekitar \$46 per capita. Dana U.S \$1.5 juta per tahun digunakan untuk proyek HIV/AIDS di PNG. Perekonomian PNG ini jika dilihat secara seksama, terdiri dari sector formal, sector berbasis hukum dan sector informal. Sektor formal mengarah pada industry yang menyediakan basis pekerjaan yang sempit, terdiri dari pekerja kontrak dalam produksi mineral, sector manufaktur yang relative kecil, lapangan kerja yang kecil dalam sector keuangan, sector public dan industry jasa, konstruksi serta transportasi.

Jika dibandingkan dengan Negara Pasifik lainnya, PNG masih memiliki posisi ekonomi yang kuat, dengan jumlah simpanan yang banyak dan bertambah selama ledakan komoditas terjadi sebagai penyangga keuangan selama Krisis Ekonomi Global (*Global Economic Crisis*), dan sector keuangan relative terlindungi dari kegentingan kredit global. Pertumbuhan ekonomi di PNG diperkirakan kuat pada tahun 2010, dengan kontribusi dari sector domestic dan eksternal. Berdasarkan perkiraan Departemen keuangan, tahun 2010 pertumbuhan ekonomi akan naik mencapai 7.5% diatas estimasi tahun 2009 sebesar 5.5%. Inflasi turun pada tahun 2010 mendekati 5 %. Dengan itu, Departemen Keuangan dan Bank di PNG lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang akan meungkinkan inflasi kembali meningkat. Resiko terhadap perekonomian kemungkinan berasal dari LNG dan pertumbuhan sector mineral. Pendapatan Pemerintah PNG mudah terkena imbas karena sangat tergantung pada perubahan peningkatan dari harga global untuk emas, tembaga dan minyak.

Exxon Mobil, membawa proyek LNG pada kesempatan peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi PNG dan diperkirakan dapat berkontribusi dalam meningkatkan 15-20% GDP. Australia dan PNG memiliki kesepakatan untuk membangun keefektifan, transparansi dari proyek pendapatan Negara didalam pemerintahan, dan pemerintah Australia telah memberikan pinjaman sebesar USD 500 juta untuk mendukung partisipasi Australia dalam pengembangan proyek tersebut. Hubungan Australia dan Papua New Guinea sangat dekat, ditandai dengan bantuan Australia untuk mewujudkan Kesejahteraan Keuangan Berdaulat untuk mengatur pendapatan secara efektif.

Papua Nugini dan Australia

Pada tahun 1902, wilayah Papua Nugini berada di bawah administrasi Australia, diikuti dengan adanya aneksasi oleh Kerajaan Inggris. Papua Nugini diperintah oleh Australia hingga akhirnya PNG memerdekakan diri pada tahun 1975. Namun, hubungan di antara kedua negara tersebut relatif dekat, dengan Australia terus memberikan bantuan pembangunan bagi PNG. Model institusi politik PNG menganut model sistem Westminster, sama halnya dengan sistem politik yang dianut oleh Australia. Hubungan antara PM Michael Somare (PNG)

dan PM John Howard (Australia) seringkali mengalami ketegangan. Ketegangan ini dipicu saat Somare dilarang memasuki Australia.

Pada tahun 2001, dibangun pusat penahanan di Pulau Manus, PNG. Pusat penahanan ini sebagai salah satu “*Australia’s Pacific Solution*”. Para pengungsi yang mencari suaka di Australia dikirim ke Pulau Manus atau Nauru dan Australia membayar biaya penahanannya, serta menyediakan bantuan ekonomi untuk PNG. Dalam bidang ekonomi, Australia merupakan sumber import terbesar bagi Papua Nugini, dan Australia juga merupakan pasar ekspor terbesar bagi Papua Nugini.

Hubungan Politik

- 1) Pada tahun 2006, ketegangan antara Papua Nugini dan Australia semakin memanas karena “Julian Moti Affair”. Moti merupakan rekan dekat Manasseh Sogavare, PM ke 10 di Pulau Solomon yang ditangkap di Port Moresby pada tanggal 29 September 2006 di bawah permintaan ekstradisi Australia karena masalah seks anak-anak yang berhubungan dengan peristiwa di Vanuatu pada tahun 1997.
- 2) Setelah melanggar persyaratan jaminan dan meminta perlindungan di Komisi Tinggi Kepulauan Solomon, Moti diterbangkan ke Kepulauan Solomon dengan penerbangan rahasia Pertahanan Angkatan PNG pada 10 Oktober, hal ini menyebabkan kemarahan di pihak Australia.
- 3) Sehingga Australia membatalkan Ministerial Meeting pada bulan Desember dan melarang PM senior PNG memasuki Australia.
- 4) Pada tahun 2007, PM Australia yang baru, Kevin Rudd, melakukan normalisasi hubungan dengan Papua Nugini. Rudd, menemui rekan dari PNG di Bali pada Desember 2007 dan Ia pun mengunjungi PNG pada Maret 2008.
- 5) The umbrella agreement is the Joint Declaration of Principles of 1987, revised in 1992.

Perjanjian penting antara Papua Nugini dan Australia:

- 1) *the Papua New Guinea-Australia Trade and Commercial Relations Agreement (PATCRA II);*
- 2) *the Agreement for the Promotion and Protection of Investment (APPI) ;*
- 3) *the Double Taxation Agreement;*
- 4) *the Treaty on Development Cooperation;*
- 5) *the Torres Strait Treaty; (shared border region)*
- 6) *the Joint Agreement on Enhanced Cooperation agreed in July 2004; and*
- 7) *the Partnership for Development, which was signed by the Australian and Papua New Guinea Governments on 21 August 2008.*

Kerjasama Papua Nugini – Australia

- 1) Stephen Smith (mantan Menlu Australia) beserta mantan Menlu PNG, Sam Ambal, menandatangani perjanjian Perdagangan dan Imigrasi;
- 2) *The Second Joint Understanding on the Owen Stanley Ranges, Brown River Catchment and Kokoda Track Region*, untuk memastikan Wilayah Kokoda merupakan kawasan yang tergolong dalam properti khusus;
- 3) Mereka juga menandatangani *Memorandum of Understanding on Papua New Guinea's participation in the Pacific Seasonal Worker Pilot Scheme*, untuk memfasilitasi cross border movement oleh para pejabat dan petugas kesehatan di wilayah perbatasan di Selat Torres;
- 4) Papua Nugini – Australia Forum 2009:
 - a) *The Australia-Papua New Guinea Ministerial Forum*
 - b) Penandatanganan *Memorandum of Understanding for Cooperation on Sustainable Forest Management* dan rencana kerja untuk meningkatkan kerjasama di bawah *Forest Carbon Partnership*
 - c) Pemberian dana sebesar 1 juta US \$ untuk mendanai *Kokoda Development Program* (pelayanan dasar untuk komunitas lokal) dan 250.000 US \$ untuk *Kokoda Track Authority* (untuk meningkatkan infrastruktur trekking di Kokoda)
 - d) Pembahasan isu dampak krisis ekonomi global, proyek LNG, pertahanan, kebijakan dan kerjasama Selat Torres.

Kerjasama pertahanan

- a) Pendampingan, pelatihan dan pemberian saran teknis oleh militer Australia kepada militer Papua Nugini serta melakukan latihan bersama antara pasukan militer Australia dan Papua Nugini;
- b) Dukungan pertahanan dilakukan dengan 22 ADF personnel;
- c) Pertahanan sipil yang sejalan dengan *PNG Defence Force*.

Papua Nugini dan Selandia Baru

Papua Nugini adalah pasar terbesar bagi Selandia Baru. *New Guinea and Papua New Guinea Business Council* merupakan wadah kerjasama ekonomi dan promosi perdagangan di antara keduanya. Kerjasama-kerjasama yang dijalin antara Papua Nugini dan Selandia Baru, antara lain:

- 1) *The New Zealand Aid Programme (2008-2018)*;
- 2) *Health Sector Improvement Programme (HSIP)*;
- 3) *Hubungan Papua Nugini – New Zealand*;
- 4) *Bougainville Community Policing Project*;

Bougainville merupakan daerah otonom di Papua Nugini yang mengalami konflik panjang sejak 1990-an. Selandia baru mendukung program rekonstruksi, penguatan sistem hukum, keadilan dan

pemerintahan Bougainville. Selandia Baru juga memberikan pelatihan kepada Polisi Bougainville.

5) *Pasific Island Forum*;

Membicarakan isu teknik yang memiliki implikasi keamanan. Forum ini juga digunakan sebagai wahana perekat di antara negara-negara Pasifik Selatan.

6) *Regional Peace Keeping*;

Untuk menghadapi tantangan dinamika keamanan di kawasan Pasifik Selatan.

Ancaman dan Tantangan Bagi Papua Nugini di Pasifik Selatan

Papua Nugini kini berada diambang kehancuran ekonomi, kejatuhan pemerintahan, dan kekacauan sosial. Inilah ancaman terbaru Papua Nugini. Beberapa tantangan akan dihadapi oleh pemerintah, mencakup penyediaan keamanan fisik bagi investor asing, mengembalikan kepercayaan investor, memperbaiki integritas pada institusi Negara, mempromosikan efisiensi ekonomi dengan memprivatisasi institusi Negara yang sudah bangkrut, dan menyeimbangkan hubungan dengan Australia. Tantangan social-budaya lainnya yang dapat menurunkan ekonomi mencakup HIV/AIDS, dengan tingkatan infeksi tertinggi di Asia Timur dan Pasifik, dan hukum dan tatanan kronis dan isu kepemilikan tanah.

Negara ini, kini dibelenggu oleh korupsi, Kriminal dan infrastruktur yang tidak terintegrasi. Masyarakat Papua Nugini hanya mendapatkan keuntungan sedikit dari kekayaan mineral dan bantuan asing sejak merdeka tahun 1975 dari Inggris. Kekayaan mineral Papua Nugini telah menguntungkan segelintir elit politik saja. Kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk investasi dalam pembangunan jalan-jalan, pendidikan dan kesehatan. Tindak kriminal dipicu oleh pengangguran angkatan kerja berusia muda yang menyebarkan aksinya hingga ke pelosok pedesaan.

Yang paling penting adalah bahwa Papua Nugini saat ini harus mampu mengikat berbagai komunitas yang berbeda-beda dalam suatu organisasi politis dan ideologis yang efektif. Titik utama krisis Papua Nugini adalah 'suku versus negara'.¹²⁶

Australia Ancam Beri Sanksi Papua Nugini

Sydney (AFP/ANTARA) - Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, mengancam akan memberi sanksi jika Papua Nugini (PNG) menunda pemilihan tengah tahunnya, memicu kecaman dari utusan utama negara Pasifik tersebut. Carr, mengutarakan di kantor diplomat pekan ini, pada hari Kamis bahwa Australia "tidak segan-segan untuk mempertimbangkan pemberian sanksi" jika PNG tidak melakukan pemilu pada pertengahan tahun 2012 seperti yang sudah direncanakan

¹²⁶ Papua Nugini. <http://kumpulcoretcoret.wordpress.com/2011/05/25/papua-new-guinea/>, diakses pada tanggal 26 April 2015, pukul 16.00 Wib

sebelumnya.

"Kami tidak memiliki pilihan lain kecuali meminta dunia lain untuk mengecam dan mengisolasi Papua Nugini," ujar Carr pada Sky News. Negara miskin namun kaya sumber daya tersebut mengalami keterpurukan politik, karena pemberontakan militer pada bulan Januari yang mengakibatkan ketidakpastian selama beberapa bulan yang dipicu oleh putusan Mahkamah Agung terkait kepemimpinan. Pengadilan menyatakan bahwa pemimpin senior Sir Michael Somare telah dipecat secara semena-mena dari jabatannya ketika ia sakit di Singapura oleh Peter O'Neill, yang akhirnya menjabat sebagai perdana menteri.

Carr menyatakan O'Neill "harus berkomitmen tegas terhadap pemilihan ini," seraya menambahkan "tanpa hal itu, pemerintahan akan dijalankan dengan salah di Papua Nugini." Pendapatnya tersebut dikecam oleh Charles Lepani, komisaris tinggi Papua Nugini untuk Australia, yang menyatakan bahwa pendapat tersebut "spekulatif" dan tidak berdasar. "Kami dan pemerintah Papua Nugini terkejut karena negara sahabat baik kami mengeluarkan pernyataan yang tidak bersahabat dan tidak benar tersebut," ujar Lepani pada media Fairfax. Lepani mengatakan bahwa Carr tidak berbicara sebelumnya dengannya sebelum mengutarakan pendapatnya tersebut dan telah mengirimkan surat padanya untuk menyatakan kekecewaannya. Hamparan Papua Nugini kaya sumber daya persediaan gas bumi, namun negara dengan jumlah penduduk 6,6 juta orang tersebut masih berada dalam kemiskinan. Pemilihan dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Juni.¹²⁷

¹²⁷<http://perkembanganmiliter.blogspot.com/2012/03/australia-ancam-beri-sanksi-papua.html>., diakses pada tanggal 24 April 2015, pukul 13.00 Wib

BAB XIV

HUBUNGAN INDONESIA DENGAN AUSTRALIA

Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat. Hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang. Dalam perjalanannya, hubungan antara Indonesia dan Australia tidak terlepas dari konflik. Ketika terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Australia turut campur dengan berpihak kepada Malaysia. Militer Australia yang ketika itu mendukung Malaysia, terlibat pertempuran dengan militer Indonesia di Borneo (Kalimantan). Masa Pemerintahan Orde Baru di Indonesia merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara Indonesia dengan Australia. Namun, ketika terjadi pemisahan Timor Timur (sekarang Timor Leste) dari Indonesia pada 1999, hubungan kembali memanas. Indonesia menganggap bahwa lepasnya Timor Timur dikala itu akibat dari turut campur Australia. Saat ini, hubungan kedua negara juga sedikit terganggu akibat dari sikap sebagian kongres Australia yang membiarkan masuknya pelarian dari gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) ke wilayah Australia. Selain itu, isu mengenai pencari suaka dan penyesuaian yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap biro-biro hukum di Indonesia, dan sikap abstain Australia terhadap isu tersebut, membuat Indonesia mulai mempertanyakan hubungan teman atau lawan dengan Australia.

Hubungan antara Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang cukup panjang sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu dari sejumlah negara di dunia yang pertama mengakui hak Indonesia untuk merdeka. Dalam perkembangannya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia mengalami pasang surut. Hal tersebut terjadi karena berbagai perbedaan yang ada di antara kedua negara, antara lain, perbedaan yang terkait dengan sistem politik, kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun, fakta geografis yang menunjukkan bahwa kedua negara merupakan negara bertetangga menjadi faktor yang mendorong perlunya kedua negara untuk berinteraksi secara kondusif guna menjaga stabilitas kawasan.

Mengingat bahwa kedua negara menghadapi permasalahan dan tantangan bersama yang mempengaruhi keamanan kedua negara, Indonesia dan Australia perlu melakukan kerja sama dalam bidang keamanan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia telah menandatangani Perjanjian tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (*Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*) pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perjanjian ini mempunyai arti penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia karena memuat sejumlah prinsip dasar pelaksanaan hubungan bilateral kedua negara. Hal ini juga akan menandai era baru dalam hubungan kedua negara sehingga berbagai permasalahan sensitif dan pelik di antara kedua negara dapat dihadapi dengan suatu landasan yang lebih kuat dan mempunyai tolok ukur yang jelas.

Prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan bilateral kedua negara adalah:

- a) Kesetaraan dan saling menguntungkan;
- b) Saling menghargai dan mendukung kedaulatan, integritas wilayah, kesatuan nasional, dan kemerdekaan politik;
- c) Tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing;
- d) Tidak mendukung atau berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan, baik yang dilakukan oleh orang dan/atau lembaga, yang mengancam stabilitas, kedaulatan dan/atau integritas wilayah Pihak lain, termasuk menggunakan wilayahnya untuk melakukan kegiatan separatisme;
- e) Menyelesaikan sengketa secara damai; dan
- f) Tidak menggunakan ancaman atau menggunakan tindakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik Pihak lain. Perjanjian ini akan memperkuat kerja sama dalam bidang keamanan yang selama ini telah berlangsung dan menjadi dasar bagi peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan yang menjadi kepentingan bersama.

Yang dicakup dalam Perjanjian ini meliputi kerja sama dalam bidang:

- a) Pertahanan;
- b) Penegakan hukum;
- c) Pemberantasan terorisme;
- d) Intelijen;
- e) Keamanan maritim;
- f) Keselamatan dan keamanan penerbangan;
- g) Proliferasi senjata pemusnah masal;
- h) Tanggap darurat;
- i) Pada organisasi multilateral mengenai keamanan; dan
- j) Peningkatan saling pengertian antarperseorangan dan antarmasyarakat.

Meskipun mencakup kerja sama dalam bidang pertahanan, Perjanjian ini bukan merupakan suatu pakta militer atau mengarah pada pembentukan pakta militer. Dalam rangka memastikan pelaksanaan perjanjian ini secara efektif, Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan pertemuan berkala dalam

kerangka Forum bilateral yang ada, yaitu *Indonesia-Australia Ministerial Forum* (IAMF).¹²⁸

A. Kondisi Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Australia

Kondisi hubungan bilateral Indonesia dan Australia mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Menurut Collin Brown, seorang pakar Indonesia di Australia menyebutkan bahwa hubungan Indonesia dan Australia seperti *roller coaster*. Australia pernah menjadi wakil Indonesia pada Komisi Tiga Negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas pengakuan resmi PBB terhadap Republik Indonesia pada tahun 1949. Hubungan kedua negara kemudian mengalami pasang surut, mulai dari kasus Timor Timur, Papua, *illegal fishing*, terorisme, penyelundupan orang, serta isu-isu perdagangan obat-obatan terlarang dengan seluruh proses hukumnya. Di antara semua itu, kasus Timor Timur dianggap telah menorehkan luka yang begitu mendalam bagi hubungan kedua negara, khususnya Indonesia.¹²⁹

Fluktuasi dalam hubungan bilateral Indonesia dan Australia disebabkan oleh berbagai perbedaan di antara kedua negara, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, serta orientasi politik yang mengakibatkan perbedaan prioritas kepentingan. Rizal Sukma mengatakan setidaknya adanya tiga isu yang membentuk persepsi publik Australia tentang Indonesia, yakni isu-isu pertahanan dan militer, hak asasi manusia, dan citra Indonesia yang penuh kekerasan. Bagi Indonesia, Australia dianggap penting selain karena peran Australia dalam sejarah kemerdekaan Indonesia juga adanya konektivitas politik, sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kebudayaan. Indonesia saat ini menjadi penerima program bantuan Australia terbesar tahun anggaran 2009/2010 dengan estimasi mencapai 452.5 juta dolar. Nilai perdagangan barang dan jasa kedua negara mencapai 10.3 miliar dolar dengan nilai investasi dua arah menembus 4.5 miliar dolar. Sementara itu, ada sekitar 400 perusahaan Australia beroperasi di Indonesia yang meliputi sektor pertambangan dan energi, konstruksi, finansial, dan industri makanan.

Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat. Hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang. Dalam perjalanannya, hubungan antara Indonesia dan Australia tidak terlepas dari konflik. Ketika terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Australia turut campur dengan berpihak kepada Malaysia. Militer Australia yang ketika itu mendukung Malaysia, terlibat pertempuran dengan militer Indonesia di Borneo (Kalimantan). Masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara Indonesia dengan Australia. Namun, ketika terjadi pemisahan Timor Timur (sekarang Timor Leste) dari Indonesia pada 1999, hubungan kembali memanas. Indonesia menganggap bahwa lepasnya Timor Timur dikala

¹²⁸ www.radioaustralia.net.au/indonesian/...hubungan-australia...indonesia.../...diakses tanggal 24 April 2015, pukul 05.00 Wib

¹²⁹ Sunardi Purwaatmoko, *Hubungan bilateral Indonesia-Australia: mencari sebuah perspektif alternatif: laporan penelitian*, Depdiknas dan Universitas Jember, Jember, 2002, hal 35

itu akibat dari turut campur Australia. Saat ini, hubungan kedua negara juga sedikit terganggu akibat dari sikap sebagian kongres Australia yang membiarkan masuknya pelarian dari gerakan organisasi Papua Merdeka (OPM) ke wilayah Australia.

B. Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Australia

1. Bidang Perdagangan

Nilai perdagangan Indonesia atas produk pertanian dan peternakan dengan Australia mencapai 12 miliar Dollar AS. Produk tersebut masih dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan dalam negeri.

Karena itu, kementerian perdagangan mendesain program jangka panjang yang berorientasi pada kemandirian pangan, sehingga tidak lagi bergantung kepada impor luar negeri.

2. Bidang Pendidikan

Banyak pelajar dari Indonesia yang belajar di universitas yang ada di Australia. Selain itu, pemerintah Australia juga membantu pemerintah Indonesia di dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

3. Bidang Kesehatan

Australia berkomitmen untuk membantu pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan. Australia membantu memperkuat kapasitas Indonesia dalam menangani kasus HIV/AIDS melalui program kemitraan senilai 100 juta dolar Australia atau sekitar Rp800 miliar. Selain itu, saat ini juga telah terjalin kemitraan antara Australia dan Indonesia di dalam penanggulangan penyakit mata di Indonesia, khususnya Bali. Hal ini ditunjukkan dengan itikad baik kedua negara membangun pusat mata Australia-Bali, di Denpasar, Bali. Pusat mata itu sendiri telah diresmikan pada 27 Juli 2007 oleh pemimpin kedua negara.

4. Bidang Ekonomi

Perdagangan dan perniagaan antara Australia dan Indonesia semakin tumbuh. Perdagangan dua-arah telah meningkat menjadi 25,2% selama tahun 2000-2002. Lebih dari 400 perusahaan Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan pemerintah Indonesia.

5. Bidang Pariwisata

Sejak awal 1970-an Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata bagi orang Australia. Australia telah menjadi sumber wisatawan yang penting bagi Indonesia. Bali merupakan provinsi yang paling dikenal.

6. Bidang Keamanan

Kerja sama bidang kemiliteran atau bidang keamanan antara Indonesia dengan Australia dihentikan, sejak kemunculan masalah penyadapan Australia terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia. Rencana latihan bersama Angkatan Laut kedua negara pun dibatalkan. Kerja sama patroli laut oleh kedua negara juga dibatalkan. Indonesia dan Australia kini mengawasi perairan lautnya sendiri-sendiri.

Selain di bidang kemiliteran, kerja sama yang dihentikan juga meliputi pertukaran data intelijen. Kita stop tukar menukar data dan info intelijen. Kita stop juga latihan bersama Kopassus yang ada di Lembang. Dari Darwin, kita tarik pesawat F16 dan Hercules, katanya. Purnomo menegaskan, penghentian kerja sama itu sama sekali tidak merugikan Indonesia. Sebab, selama ini TNI tak pernah bergantung pada Australia.¹³⁰

7. Bidang Pembangunan

a. Program Bantuan Pemerintah Australia

Program bantuan luar negeri pemerintah Australia telah membantu meningkatkan taraf kehidupan jutaan jiwa di negara-negara berkembang. Program bantuan ini mendukung kepentingan nasional Australia dengan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan di negara-negara berkembang.

Australia memfokuskan bantuannya di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan dan bantuan bisa digunakan secara efektif dan efisien. Pemerintah Australia bekerja dalam kemitraan bersama negara-negara berkembang untuk merencanakan dan menjalankan program-program bantuan, termasuk aksi tanggap kemanusiaan.

b. Program Bantuan Australia di Indonesia

Australia dan Indonesia telah bermitra dalam pembangunan lebih dari 60 tahun. Kemitraan ini mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan infrastruktur dasar, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, dan memperkuat demokrasi, keadilan serta tata kelola pemerintahan.

Menjaga kemitraan ini sangatlah penting bagi Australia. Luasnya wilayah Indonesia serta kedekatan jaraknya dengan Australia menjadikan peningkatan kesejahteraan, stabilitas dan pertumbuhan di Indonesia amat penting bagi kedua negara sekaligus kawasan.

C. Manfaat Hubungan Bilateral Indonesia dengan Australia

Hubungan bilateral Australia-Indonesia membantu kehidupan jutaan jiwa dengan

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur dan tata kelola perekonomian yang lebih baik
- Meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan
- Melindungi masyarakat miskin dan rentan dari guncangan; dan
- Mendukung demokrasi, keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik

Hubungan Indonesia-Australia (Kumpulan Artikel Penulis yang dimuat di Surat Kabar Nasional)

1. Artikel dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Jumat, 10 Juni 2005

¹³⁰<http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html>, diakses tanggal 24 April 2015, pukul 05.00 Wib

HUBUNGAN INDONESIA –AUSTRALIA : KECENDERUNGAN KONFLIK

Oleh : Anna Yulia Hartati

Hubungan Indonesia- Australia selalu diwarnai konflik dari waktu ke waktu terjadi pasang surut. Berbagai konflik dari yang besar maupun konflik yang kecil, menyebabkan hubungan keduanya agak kurang stabil. Sidang kasus Corby Warga negara Australia, tersangka kasus Narkoba yang dihukum 20 tahun terjadi pada saat hubungan Indonesia Australia membaik. Australia bahkan memberikan bantuan 1 miliar dolar kepada RI untuk membantu korban Tsunami di Aceh dan Sumut. Bahkan media massa mengungkapkan, jika Corby di jatuhi hukuman mati, maka akan merenggangkan hubungan kedua negara. Belum selesai masalah tersebut, muncul teror di Kedutaan Besar RI di Canberra berupa bubuk bakteri sejenis Anthrax. Memang belum terbukti kalau kasus teror tersebut berhubungan dengan kasus Corby. Semuanya masih dalam penyelidikan. Belum lagi kasus ledakan bom di depan kantor kedutaan besar Australia pada bulan September tahun 2004, yang juga masih menyisakan duka bagi keluarga korban. Kalau kita lihat dari contoh kasus yang terjadi akhir-akhir ini, mengindikasikan bahwa hubungan Indonesia –Australia dari waktu ke waktu terjadi pasang surut. Hal ini terkait dengan politik luar negeri kedua negara yang orientasinya selalu berubah-ubah. Ini ada hubungannya dengan sejarah Indonesia yang sangat panjang.

Sejarah Konflik

Seperti kita ketahui selama masa kolonial Hindia Belanda, Australia merupakan sekutu negara-negara Barat, berpihak pada Belanda. Ketika Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1945 Australia tidak segera mengakui kemerdekaan Indonesia karena ia masih meragukan kemampuan golongan nasionalis dalam mengatasi ancaman komunis. Dukungan terhadap kaum nasionalis Indonesia juga akan menyinggung perasaan Inggris yang masih menjajah Malaysia dan Singapura serta Perancis di Indocina yang merupakan sekutu Australia. Tetapi ternyata hasil konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949 telah memaksa Belanda untuk segera angkat kaki, sehingga Australia berupaya terpaksa mempertahankan hubungan yang baik dengan pemerintah baru Indonesia. Masa pemerintahan Soekarno juga terlibat beberapa konflik, diantaranya masalah Irian Barat, ketika Soekarno menuntut pengembalian Irian Barat yang masih diduduki Belanda. Australia bersikap untuk memihak Belanda. Bagi Australia, Irian mempunyai arti yang penting untuk pertahanannya.

Sejak pertengahan dekade 1970-an, agenda utama konflik Australia-Indonesia beralih pada masalah Timor-Timur. Baik Australia maupun Indonesia pada prinsipnya mempunyai persamaan kepentingan di Timor-Timur, yaitu kepentingan akan keamanan wilayah serta kepentingan ekonomi (eksplorasi dan penambangan minyak di Laut Timor).

Kecenderungan Konflik

Model konflik antara Indonesia – Australia cenderung berlarut-larut. Bahkan bisa disebut sebagai gerakan *roller Coaster*, kalau naik perlahan-lahan,

tetapi kalau turun akan sangat cepat. Masalah hubungan kedua negara, pada dasarnya adalah sebuah gejala politik luar negeri. Pembuatan keputusan yang menyangkut kebijakan luar negeri melibatkan beberapa faktor. Kecenderungan konflik antara Indonesia-Australia, dipengaruhi oleh tiga hal yaitu : **pertama**, Situasi politik dalam negeri kedua negara, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Australia sendiri menganut sistem Demokrasi Parlemen yang sangat kompetitif. Debat politik yang terjadi di dalam negerinya selalu terpantul pada politik luar negerinya, yang berarti juga sangat tergantung pada kebijakan partai politik yang memerintah. Misalnya saja pada saat pemerintahan PM Keating hubungan Indonesia *mesra*, karena Keating memperoleh dukungan kuat dari fraksi kanan dalam partai buruh yang mayoritas terdiri dari para pengusaha besar. Mereka amat berkepentingan untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan Indonesia yang akhirnya terjadi kesepakatan kedua negara pada tahun 1990 dalam hal penambangan minyak di celah Timor. Kondisi dalam negeri Indonesiapun tidak jauh berbeda dengan Australia, dimana presiden Soeharto yang *nuani* dan *ngemong* mampu mempertahankan hubungan yang baik antara kedua negara. Sebaliknya ketika terjadi peristiwa Dili 12 Nopember 1991, masyarakat Australia memberikan reaksi yang sangat keras terhadap Indonesia, karena tuntutan dari fraksi kiri Partai Buruh yang dipimpin oleh Bob Hawke yang bersikap militan, sehingga otomatis hubungan kedua negara agak terganggu. Sampai pada kepemimpinan John Howard, hubungan kedua negara lebih banyak bermasalah, dari teror bom sampai Indonesia dituduh sebagai sarang teroris, akhirnya menjadi kendala tersendiri untuk membangun hubungan yang lebih baik. **Kedua**, Situasi ekonomi dan militer , termasuk faktor geografi yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan keamanan. Persepsi sebagian militer dan masyarakat Australia yang menganggap Indonesia sebagai ancaman, juga akan mempengaruhi kebijakan Australia. Posisi Australia yang bersebelahan dengan Kutub Selatan (yang tidak berpenghuni) menjadikan Australia selalu mempersepsikan bahwa ancaman selalu akan dari sebelah utara. Yang dimaksud dengan ancaman disini adalah segala sesuatu yang mengancam kepentingan nasional Australia, yang meliputi berbagai bentuk, mulai penyerbuan terhadap daratan Australia, ancaman terhadap kelancaran perdagangan luar negeri Australia, gangguan terhadap Zone Economic Exclusivenya, atau konflik-konflik kecil lainnya yang dianggap mengancam kepentingan nasionalnya. Salah satu negara Utara yang dikhawatirkannya adalah Indonesia. Hal ini wajar karena secara teoritis memang dua buah negara yang berbatasan langsung mempunyai potensi konflik yang jauh lebih besar jika dibanding dengan negara yang tidak berbatasan langsung. Apalagi Australia memang mempunyai konflik/ daerah sengketa dengan Indonesia pada masalah landas kontinen Timor, sebelum Timor lepas dari NKRI. Meskipun pemerintah Indonesia mengatakan berkali-kali bahwa tidak akan mengancam Australia, tetapi penjelasan itu tidak mudah diterima oleh Australia. Karena pada dasarnya sebuah negara menghadapi *Security dilemma*, yaitu keraguan sebuah negara untuk memastikan apakah angkatan bersenjata maupun peralatan militer yang dimiliki negara tetangganya akan digunakan untuk maksud defensif (bertahan) atau ofensif (menyerang). **Ketiga**, Konteks Internasional. Situasi di neagra yang menjadi tujuan politik luar

negeri, serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan melihat konteks diatas, tragedi bom Bali dan Bom kedubes Australia, menjadi isu yang cukup menghebohkan, karena terorisme memang sedang “trend” dikalangan beberapa negara yang merasa dimusuhi oleh para teroris. Australia masuk kedalam global anti teroris yang dimotori oleh AS. Australia menjadi target kedua oleh para teroris, bahkan menurut situs milik Jemaah Islamiyah (JI), mengatakan bahwa Australia masuk dalam daftar musuh Tuhan, seperti halnya AS. Target ini juga diperkuat oleh pemerintah oleh Pemerintah Australia yang sedang menyelidiki berita adanya kelompok militan JI, yang mengirimkan skuad pembunuh dengan target pejabat Australia di Indonesia. Para pembunuh dari kelompok JI yang terkait Al Qaeda telah menyusup ke Indonesia dari Mindanao, Filipina. Menurut *Wall Street Journal*, badan –badan keamanan Barat khawatir JI mengubah taktiknya. Terkait dengan isu seputar terorisme, Indonesia berusaha untuk meluruskan berbagai kejadian kepada dunia Internasional, sehingga image bahwa Indonesia tidak aman dan rawan bisa ditepiskan. Kasus yang baru saja merebak adanya teror serbuk bakteri, di KBRI Canberra yang cukup mengagetkan, karena ini hal yang pertama terjadi selama sejarah terorisme di Indonesia. Dari ketiga hal diatas, mengindikasikan bahwa hubungan Indonesia Australia ibarat *roller coaster*. Selama kedua negara masih dalam posisi persepsi yang berbeda kecenderungan konflik akan tetap ada. Pada kenyataannya hubungan Indonesia – Australia memang *unpredictable*, sulit diramalkan karena hal itu akan sangat tergantung dari sikap kedua pemerintahan dalam memelihara kelangsungan hubungan bertetangga yang baik.

2. Artikel dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu, 03 Oktober 2009

***BALIBO FIVE* DAN GANJALAN HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA**

Oleh : Anna Yulia Hartati, S.IP, M.A

Insiden *Balibo Five* terjadi di wilayah Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste pada tahun 1975. Dalam insiden itu ada lima wartawan asing yang tewas. Mereka adalah reporter Greg Shackleton (Australia), perekam suara Tony Stewart (Australia), juru kamera Gary Cunningham (Selandia Baru), juru kamera Brian Peters (Inggris) dan reporter Malcolm Rennie (Inggris). Pemerintah Australia berusaha untuk membuka kembali kasus yang sudah terpendam selama 34 tahun dengan melakukan penyidikan investigatif.

Kasus ini tersulut lagi sejak penayangan film *Balibo Five* yang disutradarai oleh warga Australia dan ditayangkan di Timor Leste baru-baru ini. Insiden ini terjadi tanggal 7 Desember 1975, dimana Indonesia menyerbu Timor Leste (dahulu Timor Timur) dengan sandi Operasi Seroja. Penyerbuan ini dilakukan karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunisme tidak berkuasa di Timor Timur. Selain itu, serbuan Indonesia ke Timor Leste juga karena adanya kehendak dari sebagian rakyat Timor Leste yang ingin bersatu dengan Indonesia atas alasan etnik dan sejarah.

Penyidikan oleh polisi Federal Australia yang dimulai lagi sejak 20 Agustus 2009 dipastikan telah mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Polisi Federal Australia (AFP) sendiri mengakui bahwa kasus ini bukan kasus mudah untuk diungkapkan karena melibatkan banyak pihak dan kejadiannya sendiri telah berlangsung bertahun-tahun yang lalu. Menurut Juru Bicara Deplu, Teuku Faizasyah menyatakan bahwa sebenarnya film tersebut diangkat dari novel fiksi. Tetapi kontroversi yang muncul tetap membuat hubungan diplomatik diantara kedua negara meradang

Ganjalan Diplomatik

Hubungan kedua negara dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu: *pertama*, sejarah hubungan bilateral kedua negara yang tambal sulam, *kedua* kurangnya pemahaman budaya politik masing-masing negara, *ketiga*, belum banyak *scholars* Indonesia yang memiliki keahlian dalam bidang studi Australia, sementara sudah cukup banyak ilmuwan Australia yang mendalami masalah Indonesia, *keempat*, media yang berperan cukup besar terhadap perkembangan perspektif kedua negara dalam sejarah hubungan bilateral. Sentimen kalangan media Australia juga besar terhadap kasus terbunuhnya 5 (lima) wartawan Australia (*Balibo Five*). Hubungan politik kedua negara seringkali dipicu oleh bagaimana media mempersepsikan negara tetangganya masing-masing, *kelima*, faktor perubahan politik di kedua negara juga menjadi penentu dalam hubungan bilateral keduanya. Dibandingkan dengan politik di Australia yang merupakan warisan model Westminster dari kerajaan Inggris, Indonesia merupakan negara demokrasi baru. Australia menjadi negara federal sejak tahun 1901, dengan sistem pemerintahan parlementer dan pengalaman berdemokrasi yang cukup panjang.

Isu Timor Leste memang menjadi isu yang sangat sensitif bagi Indonesia dan Australia. Apalagi sejak krisis moneter 1997, perubahan image tentang Indonesia juga berubah. Hal ini berakibat pada melemahnya posisi Indonesia di dunia internasional, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada melemahnya hubungan bilateral Indonesia-Australia.

Terkait kasus *Balibo Five*, pihak Indonesia menyatakan bahwa lima wartawan tersebut tewas di tengah baku tembak antara sukarelawan Indonesia dan anggota Fretilin. Sedangkan kesimpulan Pengadilan Glebe Coroners Negara Bagian New South Wales (NSW) menyatakan, personel TNI membunuh lima wartawan Australia itu. Pihak Deplu menegaskan, tidak ada sekecil pun niat pemerintah membuka kembali kasus yang menewaskan lima wartawan di Balibo itu.

Bagi Indonesia, kasus ini dianggap selesai dengan kesimpulan bahwa kematian lima wartawan asing, murni kecelakaan. Masyarakat yang sudah menonton diharapkan tidak terjebak antara fakta sejarah sesungguhnya dengan kisah rekaan dalam film tersebut. Pihak Kepolisian Federal Australia (AFP) akan memulai penyelidikan atas kemungkinan telah terjadi kejahatan perang dalam kasus tewasnya 'Balibo Five'. Dengan dibukanya kembali penyelidikan kasus ini, kedua negara justru akan kembali melihat masa lalu yang suram. Dan akan membuka kembali luka lama, yang seharusnya tidak perlu diungkap kembali.

Kedua belah pihak harus terus-menerus membangun upaya diplomatik. Insiden-insiden harus sampai tuntas penyelesaiannya, walaupun banyak pengamat mengatakan bahwa hubungan Indonesia-Australia seperti “*Roller Coaster*”, dan selamanya akan mengalami pasang surut sebuah hubungan. Yang terpenting dari semuanya itu adalah pelajaran yang harus diambil dari setiap kasus yang terjadi agar kedua negara semakin dewasa dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Sebagai negara bertetangga, keduanya harus bisa saling menahan diri untuk tidak terjebak ke dalam dinamika hubungan diplomatik yang semu, karena sekecil apapun masalah diantara keduanya akan tetap menjadi sebuah ganjalan sekaligus tantangan bagi hubungan bilateral Indonesia-Australia baik masa sekarang maupun di masa depan.

3. Artikel dimuat di harian Suara Merdeka, Selasa, 15 Maret 2011

WIKILEAKS DAN SIKAP INDONESIA

Oleh : Anna Yulia Hartati

Berita di dua surat kabar Australia, The Age dan harian Sydney Morning Herald edisi Jumat, 11 Maret 2011, membuat gerah pemerintah Indonesia. Berita yang berasal dari bocoran kawat diplomatik AS melalui WikiLeaks ini, menampilkan judul yang besar pada halaman depan, “*Yudhoyono 'Abused Power': Cables accuse Indonesian President of corruption.*” Tidak hanya itu, sejumlah pejabat dan mantan pejabat Indonesia pun turut disinggung, diantaranya mantan Wapres Jusuf Kalla, Ketua MPR Taufiq Kiemas, hingga Ibu Negara Ani Yudhoyono. Kedubes AS pun menyebut penasihat presiden, TB Silalahi, sebagai salah satu informan berharga. Pemerintah Indonesia melalui Menlu Marty Natalegawa menyampaikan protes kepada AS.

Wikileaks sebagai situs pembocor rahasia negara yang dipimpin Julian Assenge, mungkin akan semakin heboh setelah WikiLeaks melansir bahwa mereka memiliki setidaknya 3059 dokumen rahasia Amerika terkait masalah Indonesia. Sang Redaktur WikiLeaks, Julian Assange sendiri dianggap sebagai pahlawan oleh banyak orang karena berani membocorkan kebobrokan berbagai politikus dunia serta kelicikan Politik Negara Paman Sam Tersebut. Tapi oleh sebagian diplomat WikiLeaks dan Julian Assange dianggap sebagai penghianat dan menurut kabar tengah diburu oleh berbagai Agen Rahasia negara-negara yang merasa gerah oleh ulahnya.

Momen ini tidak begitu saja dilewatkan oleh dua media terkemuka di Australia. Media massa Australia yang sangat liberal begitu gamblang membeberkan setidaknya tiga isu yang bersumber dari rilis WikiLeaks yaitu penyalahgunaan wewenang oleh SBY selama menjadi presiden salah satunya dalam kasus Taufik Kiemas, Presiden dan Ibu negara Ani Yudhoyono yang

memanfaatkan posisi politiknya untuk mendapatkan uang dan Yusuf Kalla yang membayar jutaan dollar AS untuk memenangkan dirinya menjadi ketua umum Golkar. Mengapa Media Australia menempatkan berita negatif tentang pemerintah Indonesia di halaman pertama? Apakah ada maksud tersembunyi? Apalagi berita tersebut diterbitkan bersamaan dengan kunjungan Wapres Boediono ke Australia.

Persepsi Australia

Memang tidak hanya kali ini saja media Australia memuat berita negatif tentang Indonesia. Pemerintah Indonesia juga pernah sangat tersinggung sekitar tahun 1986, ketika harian The Sydney Morning Herald memuat berita yang isinya menghina pemerintah Indonesia. Waktu itu pemerintah kita juga protes dan beberapa agenda ke Australia juga dibatalkan. Bahkan Persatuan Wartawan Indonesia mengecam pers Australia bahwa Indonesia tidak mengizinkan wartawan Australia untuk meliput Kunjungan Presiden Reagan Di Bali (Philips Kitley, dkk, 1989).

Sikap Media massa Australia yang seakan tiada hentinya “memusuhi” Indonesia memang perlu dikaji lebih luas lagi. John Naisbitt, penulis buku *Megatrends* membuktikan bahwa surat kabar adalah cermin sikap rakyat dari lingkungan yang diwakilinya.

Politik luar negeri Australia yang menempatkan konsep Geostrateginya tentang persepsi ancaman yang datang dari utara, menduduki prioritas pertama. Geostrategi Australia memang tidak memungkinkan adanya serangan musuh dari Selatan, karena tidak ada penduduk di kutub selatan, dari barat terhalang samudra Hindia yang ganas, ataupun dari timur yang terhalang samudera pasifik dan negara-negara kecil dikawasan tersebut sudah diikat dalam kerjasama South Pacific Forum serta ANZUS. Maka satu-satunya musuh datangnya dari arah utara. Salah satunya adalah Indonesia. Presepsi inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya psikologi ketakutan tentang musuh yang datang dari utara.

Ada beberapa hal yang menyebabkan Australia senantiasa menaruh rasa curiga pada Indonesia, sebagai tetangga yang cukup besar potensinya. *Pertama*, Merasa ngeri dengan militansi penduduknya yang mampu mengusir penjajah dari ribuan pulau hanya dengan bersenjata bambu runcing.

Kedua, Merasa mendapat saingan dalam hal komoditi ekspor Australia terutama hasil tambang dan pertanian, terutama ke pasaran Jepang dan AS yang menjadi tulang punggung pendapatan nasional Australia.

Ketiga, sikap sosial rakyat Australia. Hal ini berkaitan dengan kepribadian dasar yang membentuk satu sikap sosial yang dipengaruhi oleh faktor keturunan biologis, lingkungan fisik, kebudayaan dan pengalaman. Sebagai bangsa ras kulit putih, bangsa Australia mempunyai sikap sosial tertentu terhadap bangsa-bangsa Asia Tenggara yang termasuk ras kulit berwarna. Sikap yang kita rasakan adalah arogan (sombong), sok tahu dan sok memimpin. Sebagai bangsa maju yang hidup dilingkungan yang kurang maju, bangsa Australia merasa superior dalam segala hal. Oleh karena itu dalam berhubungan dengan tetangganya, ia merasa mempunyai hak untuk memaksakan sistem atau kebudayaannya untuk diterima begitu saja, tanpa memperdulikan sistem atau kebudayaan negara tetangganya.

Seperti kasus dimuatnya berita yang menyinggung pemimpin negara Indonesia tersebut, sebagai kebebasan pers yang dilindungi oleh konstitusi Australia.

Berita yang dimuat di dua harian terkemuka Australia setidaknya menjadi ajang refleksi bagi pemerintah Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, dalam membuat kebijakan baik dalam negeri maupun kebijakan luar negerinya. Di era yang serba digital ini, rahasia negara bisa dilihat oleh seluruh masyarakat dari berbagai belahan dunia.

4. Artikel dimuat di harian Suara Merdeka, Kamis, 23 Nopember 2013

HUBUNGAN “TAMBAL SULAM”

Oleh: Anna Yulia Hartati

“Tidak ada harga yang lebih mahal dari sebuah kedaulatan”, pernyataan ini disampaikan Menlu RI Marty Natalegawa dalam wawancara di Metro TV (senin, 18/11/13). Pernyataan ini menandakan bahwa kedaulatan adalah segala-galanya bagi sebuah negara dan tidak bisa ditawar atau diganti dengan apapun. Apalagi untuk kesekian kalinya Australia melakukan hal yang menyinggung kedaulatan negara dan juga terkait isu-isu sensitif antar kedua negara. Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan *whistleblower* asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan *Australian Broadcasting Corporation (ABC)* dan harian Inggris *The Guardian*, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia. Marty mengatakan tanggapan yang diberikan oleh pemerintah Australia melalui media seolah-olah penyadapan ini adalah insiden yang “*dismissive*” atau lumrah dilakukan (antaranews.com, 18/11/13).

Lagi-lagi hubungan kita dengan Australia kembali meradang setelah pasang surut hubungan yang terkait dengan banyak isu. Reaksi Indonesiapun sedikit mengalami kemajuan dengan memanggil Dubes Indonesia untuk Australia Nadjib Riphath, guna melakukan konsultasi dan memperoleh informasi tentang apa yang terjadi di Australia. Indonesia menunggu proses klarifikasi dari PM Tony Abbot terkait isu penyadapan tersebut. Dari informasi yang ada, dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, *Defence Signals Directorate*, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.

Dalam praktek hubungan antar negara persoalan penyadapan sudah ada sejak peradaban manusia. Bahkan pada perang dunia I dan II praktek ini sudah lazim dilakukan. Dalam hubungan diplomatik, disamping diplomat yang resmi, negara-negara juga membentuk suatu badan yang diistilahkan dengan dinas rahasia. Mereka khusus bertugas untuk mendampingi dan menjaga para diplomat dan kepala negara dalam menjalankan tugas di luar negeri. Sebaliknya para diplomat yang sedang menjalankan tugas di luar negeri sekaligus berfungsi sebagai agen mata-mata (intelijen) bagi negaranya. (Ranny Emilia, 2013). Namun pasal 27 Konvensi Wina, mengatur tentang perlindungan/kemerdekaan berkomunikasi. Apa yang dilakukan oleh Australia memang melanggar konvensi tersebut. Setelah

Perang Dunia II secara resmi AS, Australia, Selandia Baru, Kanada dan Inggris, mengikat perjanjian dimana mereka saling bertukar data intelijen. Sedangkan dengan Indonesia belum ada perjanjian secara resmi, sehingga berhak untuk melakukan protes atau tindakan lain yang diatur dalam aturan hubungan diplomatik. Misalnya dalam pasal 9 Konvensi Wina, negara berhak untuk mengusir diplomat negara lain (persona non grata). (Konvensi Wina, 1961).

Krisis Hubungan

Pengungkapan isu penyadapan tersebut muncul saat hubungan bilateral dua negara tengah meruncing terkait tudingan mata-mata sebelumnya dan isu mengenai penanganan manusia perahu yang melewati Indonesia menuju Australia. Terlepas dari isu yang melibatkan hubungan dua negara, ada faktor lainnya yang juga berpengaruh antara lain: *pertama*, sejarah hubungan bilateral kedua negara yang tambal sulam. Pada tahun pertama hubungan politik Australia dengan Indonesia mengalami dilemma. Di satu pihak, terdapat rasa simpatik terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan keinginan yang murni untuk memelihara hubungan baik dengan Indonesia. Namun dipihak lain apabila Belanda keluar dari kepulauan Indonesia, maka Australia merasa tidak aman. Sehingga timbul pertanyaan dari para pemimpin Australia: pertama apakah rakyat Indonesia bila merdeka dari kolonial Belanda akan menguntungkan Australia? Dan yang kedua apakah Indonesia mampu membendung ancaman komunis? Dalam hal ini rakyat Indonesia kurang matang dalam berpolitik dan belum berpengalaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mereka berpikir bahwa bangsa Indonesia tidak akan mampu membendung agresi komunis. Australia khawatir apabila mendukung Republik Indonesia dalam mengusir Belanda maka tindakan itu akan mempercepat berakhirnya kekuasaan colonial Eropa di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian pada tanggal 27 Desember 1959 pemerintah secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyatakan keinginan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Republik Indonesia. *Kedua* kurangnya pemahaman budaya politik masing-masing negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri Australia, yang menjadikan wilayah sebelah utara sebagai ancaman. *Ketiga*, belum banyak *scholars* Indonesia yang memiliki keahlian dalam bidang studi Australia, sementara sudah cukup banyak ilmuwan Australia yang mendalami masalah Indonesia.

Keempat, media yang berperan cukup besar terhadap perkembangan perspektif kedua negara dalam sejarah hubungan bilateral. Terkait isu penyadapan, yang muncul beberapa hari belakangan, setelah media Australia Sydney Morning Herald menurunkan berita soal penyadapan Australia dan Amerika Serikat terhadap Indonesia berdasarkan keterangan dari mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA) Edward Snowden. Sydney Morning Herald menyebut ada pos penyadapan di dalam gedung Kedutaan AS dan Australia di Jakarta. Sementara itu, harian Inggris The Guardian menulis bahwa Badan Intelijen Australia sudah menyadap Indonesia sejak tahun 2007 ketika RI menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB di Nusa Dua, Bali.

Dalam hubungan diplomatik harus didasari pada kepercayaan, sedangkan skandal penyadapan kebalikan dari kepercayaan dan ini mengindikasikan bahwa tidak ada teman yang abadi,. Jadi kewaspadaan perlu kita bangun untuk menjaga apa yang kita miliki.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Aitkin, Don , Brian JinkJohn Warhurst, *Australian Political Instution*, edisi ke 4, Longman Chesire, Melbourne, 1989
- Chauvel , Richard H (Ed), *Budaya dan Politik Australia*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 1992
- D, Scondat, C. , & Montequieu, B. d. , *The Spirit of Laws*, Kitchener, Batoche, Ontario, 2000
- E.M. Andrew, *A History of Australian Foreign Policy*, Longman Cheshire, Melbourne, 1988
- Evans, Gareth and bruce Grant, *Australia's Foreign Relation: in The World of the 1990s*, Melbourne University Press, Carlton, Victoria, 1991
- Evas, K.R. *The Australian Political System: An Introduction*(Edisi ke-3), The Jacaranda Press, Auckland, 1988
- Gare, D., & Ritter, D., *Making Australian History Perspectives on The Past 1788*, Cengage Learning, Melbourne, 2008
- Hamad, Ibnu , *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit, Jakarta, 2004
- Hamid, Zulkifli . *Sistem politik Australia*, Laboratorium Ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999
- Harrison, Sir, Moore W *The Constitution of the Commonwealth of Australia*, University of Sydney Library, Sidney, 2000

- Irving, Helen. *Five Things to Know About the Australian Constitution*. Cambridge University Press, Cambridge 2004.
- Jaensch, D., *An Introduction Australian Politics*, Longman Cheshire, Melbourne, 1984
- Johnson, Carol, *The Labor Legacy: Curtin, Chifley, Whitlam, Hawke*, Allen&Unwin, London, 1989
- Jupp, James, *Australian Party Politic*, Melbourne University Press, Melbourne, 1966
- Kitley, Philips, Richard Chauvel, David Reeve(Eds), *Australia Dimata Indonesia: Kumpulan Artikel Pers Indonesia 1973-1988*, Kedubes Australia dan Gramedia, Jakarta, 1989
- McAllister, Ian, *Politic Behavior: Citizens, Parties and elites in Australia*, : Longman Cheshire Pty, Ltd., Melbourne, 1992
- Mas'oed, Mohtar dan Colin MacAndrews, ed., *Perbandingan Sistem Politik* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001
- Mediansky, Fedor A *Australian Foreign Policy : into the Next Millennium*, Macmillan, Australia, 1992
- Parliament of Australia, *Parliamentary Handbook of the 42nd Parliament*, Parliamentary Library, 2007.
- Platt, Nathaniel and Nuriel Jean Drummond, *Our nation from its creation : a great experiment*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1964
- Purwaatmoko, Sunardi, *Hubungan bilateral Indonesia-Australia: mencari sebuah perspektif alternatif : laporan penelitian*, Depdiknas dan Universitas Jember, Jember, 2002
- Sawer, Geoffrey, *Australian Government today* (edisi ke-13), Pitman, Melbourne, 1987
- Siboro, Julius, *Sejarah Australia*, Tarsito Bandung, 1989
- Smith, Rodney, *Politics in Australia*, Ilen&Unwin Pty Ltd, Australia, 1993
- Summers, J. and D Woodward A. Pakin, *Government Politics, Power and Policy in Australia*, Pearson Education Australia, French Forest, 2002
- Warhurst, John, *Minor Parties and Pressure Groups*, dalam Howard R Penniman(Ed), *Australia at the Polls: The National Elections of 1980 and 1983*, Allen &Unwin, London, 1987
- Wilkes, John (Eds), *Forces in Australian Politics*, Angus & Robertson Ltd., Sydney, 1966
- Williams, John M. dan Clement Macintyre. *Commonwealth of Australia*. Sidney: University of Sydney Library, 2000
- Woodward, Dennis, Andrew Parkin dan John Summer(Eds), *Government, Politics and Power in Australia*, Longman Cheshire, Melbourne, 1987

SUMBER INTERNET

<https://www.google.com/search?q=peta+australia&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=sb>,
<http://indocropcircles.wordpress.com/2013/12/18/ditemukan-meriam-asal-indonesia-mengubah-catatan-sejarah-australia/>.

<http://www.australia.com/id/about/culture-history/history.aspx>,
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Australia,
www.cityofsydney.nsw.gov.au/.../australias-syste...
sejarah.kompasiana.com/.../sistem-pemerintahan-australia-sebuah-refleksi
www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf,
 1999 referendum report and statistic background. Terdapat di
http://www.aec.gov.au/elections/referendums/1999_Referendum_Reports_Statistics/Referendum_Background.htm#results.
 Comission, A. E. (2012, October 24). Referendum Dates and Results. Retrieved October 22, 2013, from Australia Election Comission:
http://www.aec.gov.au/Elections/referendums/Referendum_Dates_and_Results.htm,
<http://primeministers.naa.gov.au/>, National Archive of Australia
<http://www.liberal.org.au/>,
<http://primeministers.naa.gov.au/>,
<http://www.aec.gov.au/>,
www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf,
www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html,
 Right to Life Australia. *Campaigns*, 2010,
<http://www.righttolife.com.au/campaigns.html>
 Animal Australia, About Us(Online), ([Http://www. Animalaustralia.org/about/](http://www.Animalaustralia.org/about/))
 Meat and Livestock Australia, Livestock
 Exports(online)(<http://www.mla.com.au/About-the-red-meat-industry/livestock-exports>)
 ABC , *Thousand Rally Against live Export Trade(online)*
 ([http://www. Abc.net.au/news/2012-10-06/hundred-rally-against-live-exports-trade/4299198](http://www.Abc.net.au/news/2012-10-06/hundred-rally-against-live-exports-trade/4299198))
<http://beritasore.com/2007/04/10/presiden-afic-minta-media-dan-politisi-australia-hormati-hak-komunitas-muslim/>,
<http://www.kbri-canberra.org.au/speeches/2004/041206civitas.htm>,
 Oxford University Press, *The Murdoch Papers and the 1975 'dismissal' Election*.
http://www.oup.com.au/orc/extra_pages/higher_education/hirst_and_pat_ching/murdoch_papers,
<http://yanpraz.multiply.com/journal/item/20>. MEDIA MASSA DAN
 SOSIALISASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
<http://beritasore.com/2007/04/10/presiden-afic-minta-media-dan-politisi-australia-hormati-hak-komunitas-muslim/>
<http://www.kompas.co.id/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.02.00363941&channel=2&mn=158&idx=158>,
[www.dfat.gov.au / perdagangan / FTA / asean / AANZFTA](http://www.dfat.gov.au/perdagangan/FTA/asean/AANZFTA)
<http://moadoph.gov.au/exhibitions/online/petrov/>,
www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/australia.html,
www.radioaustralia.net.au/.../2014.../australia...hubungan...asia.../132902...
www.tabloiddiplomasi.org/.../1270-east-asian-summit-kepentingan-strate...,
<http://www.kompas.com>
<http://www.webmaster.com>,

M. Beeson, 'Australia Relationship with United States : The Case for Greater Independence', <

<http://espace.library.uq.edu.au/eserv.php?pid=UQ:11015&dsID=mbajps03.pdf>>

Australia Government: Departement of Foreign Affairs and Trade, 'Australia-United States Free Trade Agreement', <

http://www.dfat.gov.au/geo/us/australia_us_alliance.html>

Congressional Research Service, 'Australia: Background and U.S Relations' , <<http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33010.pdf>>

"Constitution of Independent State of Papua New Guinea (consol. to amendment #22)". Pacific Islands Legal Information Institute

<Http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html>.